

Dokumen ini tersaji dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Mohon gunakan Bookmark untuk menuju versi Bahasa Inggris.
This document is available in Indonesian and English. Please use Bookmark to view English Version.
Penerjemahan hanya untuk referensi.
Translation for reference only.

Revisi

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Tahun 2014



J TRUST BANK

Jakarta, 04 Agustus 2015

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada: Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang "Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum", dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006", serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal "Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum"

Compliance Division (CPD) - 4 Agustus 2015

Daftar Isi

Revisi

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

	Halaman
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris dan Direksi	12
Bab III Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite PT Bank Mutiara Tbk.	46
Bab IV Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern, dan Audit Ekstern...	73
Bab V Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern.....	95
Bab VI Penyediaan Dana, Rencana Strategis Bank, Transparansi dan Pengungkapan Aspek Lainnya.....	110
Bab VII Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	135
Laporan Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG Bank.....	139
Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (<i>Action Plan</i>) GCG.....	146
Rencana Implementasi GCG 2015.....	150

Z. A.

BAB I PENDAHULUAN

Komitmen PT Bank Mutiara Tbk

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) "mengharuskan" perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Bank Mutiara Tbk memiliki komitmen untuk melanjutkan dan menyempurnakan pelaksanaan GCG yang mengutamakan prinsip moral dan etika serta praktik-praktik bisnis perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya praktik-praktik bisnis perbankan yang sehat, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Penerapan regulasi serta prinsip dasar *Good Corporate Governance* pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*) dan juga kami senantiasa memperhatikan kepentingan dan melindungi semua pihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Etika dan perilaku sangat penting dalam membangun suatu budaya perusahaan, dimana hal ini ditetapkan dalam Buku Etika Korporasi PT Bank Mutiara Tbk yang berlaku untuk seluruh karyawan dan manajemen.

Pelaksanaan GCG PT Bank Mutiara Tbk mengacu pada standar industri perbankan secara umum, dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan meliputi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governace* bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan *The ASEAN Corporate Governance Scorecard* yang merupakan standar dan praktik *Corporate Governance* pada negara-negara ASEAN, maupun praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang berlaku.

Pelaksanaan GCG PT Bank Mutiara Tbk yang berlandaskan pada prinsip-prinsip/asas GCG sangat penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder* (*maximizing shareholder value*) dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat secara umum. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang harus tercermin pada kinerja dan pengelolaan Bank yang profesional serta kemampuan Bank mengelola risiko, serta transparansi pada masyarakat.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

PT Bank Mutiara Tbk pada penghujung tahun ini telah melewati pada tahap akhir penanganan pemilik lama yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memasuki masa kepemilikan investor baru. Beberapa tahapan peralihan LPS ke investor baru telah dilalui seperti *due diligence* dan terakhir adalah pemilihan pemenang. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa LPS dalam rangka peralihan kepemilikan juga telah dilakukan yaitu pada tanggal 20 Nopember 2014 dengan pemilik baru J Trust yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai pemenang oleh LPS.

J Trust adalah sebuah perusahaan keuangan dari Jepang yang telah resmi dan lulus dalam melewati tahapan proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*). Sebagai investor baru, J Trust telah berkomitmen penuh untuk mengembangkan PT Bank Mutiara Tbk untuk lebih maju lagi di masa yang akan datang seperti telah dilaksanakannya RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Desember 2014 dengan agenda penyeteroran modal baru sebesar Rp.300 miliar dan pengangkatan susunan manajemen untuk memperkuat pertumbuhan bisnis ke depan. Untuk sementara waktu visi dan misi yang telah dijalankan dengan baik tetap diteruskan dan berkelanjutan sebagai langkah strategis dan fundamental perusahaan. PT Bank Mutiara Tbk terus melakukan penajaman visi dan misinya sebagai berikut:

Visi dan Misi

Bank telah menetapkan Visi dan Misi, yang saat ini telah disosialisasikan dan diimplementasikan secara menyeluruh melalui kegiatan operasional dan budaya perusahaan.

Visi

"MENJADI BANK FOKUS TERBAIK PILIHAN MASYARAKAT"

Dengan fokus bisnis utama bank adalah :*Small dan Medium Enterprises, Consumer dan Mikro* serta *Treasury dan International Banking*.

PT Bank Mutiara Tbk akan senantiasa berupaya menjadi bank penyedia jasa keuangan yang berkualitas dan profesional, yang membangun pelayanan kepada nasabahnya melalui kedekatan hubungan yang baik sebagai mitra usaha.

Misi

"MEMBERIKAN YANG TERBAIK DENGAN MENGUTAMAKAN PELAYANAN, KENYAMANAN DAN KEPUASAN NASABAH UNTUK HASIL YANG OPTIMAL"

Berkaitan dengan Misi, PT Bank Mutiara Tbk memberikan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan, kenyamanan, dan kepuasan nasabah secara optimal, serta akan menjadi bank fokus terdepan dengan *core value "SPIRIT"* sebagai perwujudan dari *S = Service excellence, P = Professionalism, I = Integrity, R = Relationship, I = Innovative, dan T = Trust*, yang penjabarannya sebagai berikut :

Service Excellence

Kepedulian
Kecepatan
Penampilan
Simpatik
Ketulusan

Professionalism

Kehati-hatian
Disiplin
Handal/Kompeten
Dedikasi
Gigih

Integrity

Bertanggung jawab
Etika
Bebas dari Konflik
Kepentingan
Keberanian moral
Interdependensi

Relationship

Kerjasama
Komunikatif
Kepercayaan
Keakraban
Apresiasi

Innovative

Kreatif
Pembaharuan
Gagasan
Imajinatif
Mitigasi Risiko

Trust

Jujur
Komitmen
Dapat diandalkan
Benar
Saling Menghargai

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

Penjabaran *corporate value* "SPIRIT" tersebut mengandung nilai-nilai luhur, yaitu komitmen untuk "melakukan perubahan menjadi yang lebih baik", dimana visi, misi dan *corporate value* harus membudaya dan meresap dalam diri setiap individu karyawan PT Bank Mutiara Tbk untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Prinsip-Prinsip/Asas GCG

Pelaksanaan penerapan GCG di PT Bank Mutiara Tbk mencakup implementasi dari lima prinsip dasar GCG yang dikenal dengan istilah "TARIF" yakni: *Transparansi (Transparency)*, *Akuntabilitas (Accountability)*, *Pertanggungjawaban (Responsibility)*, *Independensi (Independency)*, dan *Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)*, sebagaimana ilustrasi gambar sebagai berikut :

PRINSIP DASAR GCG				
<i>Transparency</i>	<i>Accountability</i>	<i>Responsibility</i>	<i>Independency</i>	<i>Fairness</i>
<p>Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.</p>	<p>Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan dengan efektif.</p>	<p>Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.</p>	<p>Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tokanan dari pihak manapun.</p>	<p>Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

Sebagai lembaga intermediasi, PT Bank Mutiara Tbk harus memastikan bahwa seluruh jajaran Bank di setiap aspek bisnis sudah melaksanakan prinsip-prinsip dasar GCG yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Adapun penjelasan lebih rinci terkait prinsip-prinsip GCG tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Keterbukaan/Transparansi (*Transparency*)

Memiliki unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Secara internal, Bank juga berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi kepada para karyawannya, antara lain melalui transparansi proses pengambilan keputusan. Penerapan transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Memiliki unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Untuk memastikan akuntabilitas, maka fungsi, tugas, dan wewenang berbagai fungsi di dalam organisasi, serta pertanggungjawabannya, telah diatur dengan jelas sesuai dengan Pedoman Tata Kerja masing-masing fungsi sehingga kinerja semua bagian organisasi dapat dipertanggungjawabkan secara sehat/transparan dan terukur. Untuk itu Bank harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

[Signature]

3. Pertanggungjawaban/Responsibilitas (*Responsibility*)

Memiliki unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta bertanggung jawab. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Bank berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan serta Bank bertanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Memiliki unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, atau dapat diartikan bahwa organ-organ Bank menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Bank berkomitmen menjalankan usahanya secara independen agar organ-organ Bank beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Memiliki unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Bank senantiasa memastikan agar hak dan kepentingan pemegang saham dapat terpenuhi serta pula memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingannya (*stakeholders*).

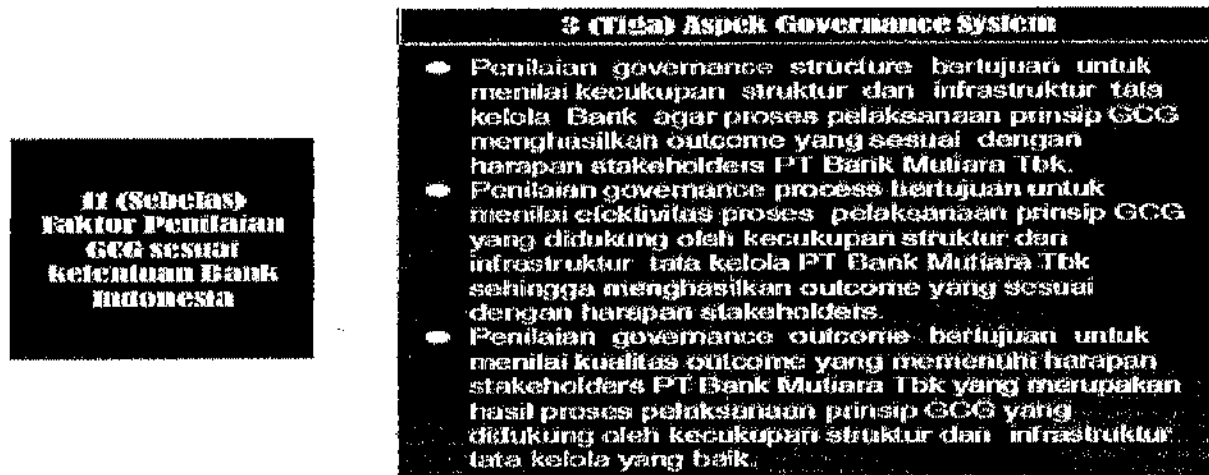
Lima prinsip dasar GCG akan mendukung pelaksanaan 4 (empat) bidang yang menjadi faktor utama penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank rating*), yang secara berkelanjutan menjadi fokus perbaikan dan peningkatan antara lain: Penguatan Keuangan (*Capital & Earnings*), Perbaikan *Risk Profile*, dan perbaikan penerapan GCG dengan lebih meningkatkan 5 (lima) prinsip dasar GCG dalam mendukung pengembangan Infrastruktur Bisnis Utama, dan Penguatan *Corporate Image*.

11 (Sebelas) Faktor Utama dalam Pelaksanaan GCG

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG (TARIF) paling kurang harus diterapkan ke dalam 11 (sebelas) faktor utama dalam pelaksanaan GCG PT Bank Mutiara Tbk sebagaimana yang diilustrasikan melalui gambar di bawah ini. Kesebelas faktor dimaksud, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan & non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG & pelaporan internal;
11. Rencana strategis Bank.

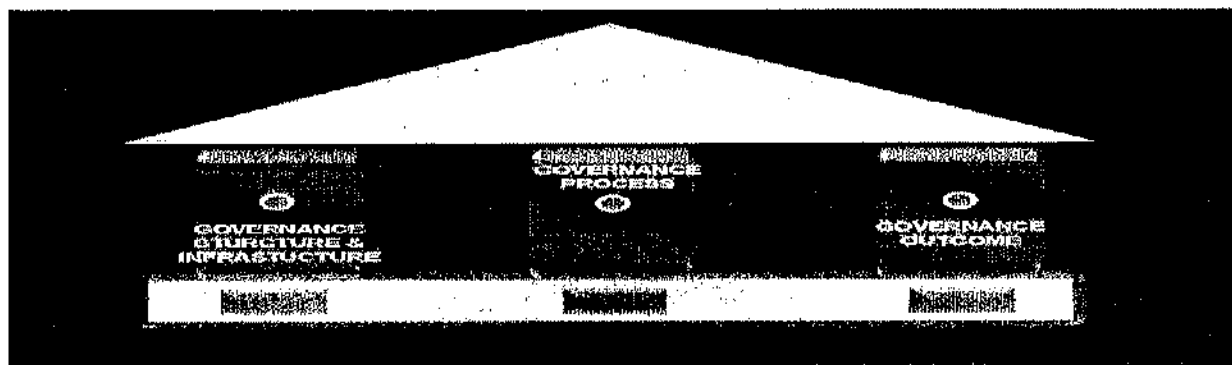
Dibawah ini merupakan ilustrasi dari 11 (sebelas) faktor penilaian GCG yang meliputi 3 (tiga) aspek *governance system* yang harus dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, sebagai berikut :



Selanjutnya atas pelaksanaan prinsip GCG ke dalam 11 (sebelas) faktor utama dimaksud dilakukan melalui penilaian sendiri (*self assessment*). Pelaksanaan penilaian sendiri tersebut harus dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG (TARIF), serta dikelompokkan ke dalam *governance system* yang meliputi 3 (tiga) aspek *governance system*, yaitu: *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*, sebagaimana penjelasan di atas.

Governance System

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip TARIF tersebut maka dibangunlah *governance system* yang meliputi 3 (tiga) pilar, sebagaimana ilustrasi gambar sebagai berikut:



Adapun penjelasan secara singkat terkait 3 (tiga) pilar *governance system*, dapat disampaikan sebagai berikut:

Governance Structure

Governance structure merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana PT Bank Mutiara Tbk diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kinerja bisnis secara *accountable* dan mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang (*sustainable*), dengan tidak mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Sebagai sistem, konsekuensi logisnya adalah GCG membutuhkan suatu perangkat pendukung yang lebih dikenal sebagai *governance structure* yang dibentuk dengan tujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

tata kelola PT Bank Mutiara Tbk agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*. Dapat kami sampaikan bahwa yang termasuk dalam struktur tata kelola PT Bank Mutiara Tbk adalah RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola PT Bank Mutiara Tbk, antara lain adalah kebijakan dan prosedur PT Bank Mutiara Tbk yang senantiasa mengacu dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.

Governance Process

Selain membutuhkan pilar *governance structure*, implementasi GCG PT Bank Mutiara Tbk juga membutuhkan pelaksanaan dengan aturan main yang jelas dalam suatu bentuk mekanisme atau lazim disebut *governance process* yang dapat dipertanggungjawabkan dan sekaligus diperlukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola PT Bank Mutiara Tbk sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders*. Dapat dikatakan, *governance process* merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut. Hal ini demi menjamin dan/atau mengawasi berjalannya sebuah *governance system* dalam PT Bank Mutiara Tbk. Dengan demikian, diharapkan aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat dan efektif sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dan/atau dapat meminimalisir terjadinya benturan kepentingan, serta meminimalisir timbulnya risiko dari suatu kebijakan yang telah diputuskan.

Governance Outcome

Terdapat dua *outcomes* yang diharapkan dari implementasi GCG, yaitu: mampu meningkatkan kinerja perusahaan (*improved performance*) dan mampu mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan (*reduced conflict of interest*). Selain itu, mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia, penting juga disampaikan bahwa pilar ke-3 tersebut, yaitu: *governance outcome*, bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* dalam memenuhi harapan *stakeholders* PT Bank Mutiara Tbk yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG dengan didukung kuantitas dan kualitas kecukupan struktur dan infrastruktur, sehingga terciptanya tata kelola perusahaan yang baik .

Peningkatan Nilai Perusahaan dan Modal

- Dalam melaksanakan seluruh kebijakan dan strategi perusahaan, bank berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan untuk pemegang saham (*shareholder value*) melalui kinerja keuangan maupun non keuangan. Sebagai gambaran, pada sisi non keuangan, Bank berupaya untuk memperkuat jaringan kantor dengan relokasi maupun penambahan jaringan kantor baru, serta pengembangan pembiayaan mikro, memperkuat budaya perusahaan sesuai visi misi, melanjutkan dan menyempurnakan penerapan GCG dan belanja modal dalam sistem teknologi guna menunjang bisnis.
- J Trust sebagai pemegang saham baru telah berkomitmen penuh untuk mengembangkan PT Bank Mutiara Tbk kedepan terutama menuju pasar retail, dengan salah satunya adalah rencana penambahan modal mulai pada akhir tahun 2014 dan secara bertahap untuk beberapa tahun berikutnya sesuai kebutuhan untuk mendukung ekspansi bisnis. Penyetoran modal oleh J Trust ini bertujuan untuk memelihara rasio permodalan CAR agar tetap dapat bersaing di pasar perbankan terutama sesuai dengan *peer group* di Indonesia.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- Dengan adanya penyetoran modal ini telah memperkuat modal bank sebagai dasar selain untuk pertumbuhan kredit di masa yang akan datang, tentunya juga akan mempercepat penyelesaian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Disamping itu juga terus melakukan upaya maksimal untuk memperbaiki *Net Non Performing Loan* (NPL), dan meningkatkan upaya *monitoring* yang ketat agar kualitas atas kolektibilitas kredit tetap terjaga dan lancar.

Penerapan GCG dan Tingkat Kesehatan Bank

Penerapan GCG PT Bank Mutiara Tbk senantiasa dijalankan secara konsekuen dan berkelanjutan dengan didukung komitmen yang kuat dari organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Prinsip dasar dalam melaksanakan komitmen selama ini antara lain:

1. Memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis, dengan misi : "menjadi Bank fokus terbaik pilihan masyarakat" dan visi : "memberikan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan, kenyamanan, dan kepuasan nasabah untuk hasil yang optimal".
2. Memiliki nilai-nilai perusahaan yang menggambarkan sikap moral bank yang baik dalam melaksanakan usaha.
3. Memiliki pedoman tata kerja Dewan Komisaris dan tata kerja Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya.
4. Memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku perusahaan yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan organ perusahaan dan jajaran dibawahnya. Etika bisnis dan pedoman perilaku dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten sehingga membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan.
5. Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Memiliki peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mendukung suasana kerja yang kondusif.
7. Memiliki *whistle-blowing system* untuk memungkinkan diperolehnya laporan dan pengaduan serta saran dan kritik dari pegawai dan pemangku kepentingan lainnya.
8. Memiliki Kebijakan dan Prosedur sebagai acuan dalam menjalankan usaha, serta senantiasa dievaluasi sesuai kebutuhan dan perkembangan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan prinsip-prinsip/asas GCG diantaranya dengan menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank Mutiara Tbk setiap tahunnya kepada para pihak (*stakeholders*) sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, PT Bank Mutiara Tbk secara berkala melakukan *self assessment* yang komprehensif terhadap pelaksanaan GCG untuk memantau serta mengevaluasi implementasinya dan melakukan kajian rencana tindak lanjut, termasuk tindakan korektif apabila diperlukan guna mendapatkan hasil yang lebih baik.

Secara formal, penerapan prinsip dasar GCG merupakan salah satu faktor penilaian tingkat kesehatan bank selain Profil Risiko (*Risk Profile*), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*) baik bank secara individual maupun konsolidasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan penilaian terhadap 4 (empat) faktor yang mencakup :

➤ Profil Risiko

Self Assessment terhadap Profil Risiko adalah proses penilaian keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko yang dihadapi bank, yang diilustrasikan sebagai berikut :

- ***Inherent Risk*** - Risiko Inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak dapat dikuantifikasikan, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. *Inherent Risk* dapat berupa parameter yang bersifat *ex-post* (telah terjadi) maupun parameter yang bersifat *ex-ante* (belum terjadi).
- ***Risk Control System (RCS)*** - Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan penjabaran dari penerapan Basel II Pilar 2 Supervisory review yang telah dijabarkan di perbankan Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko. Penilaian *Inherent Risk* dan RCS selanjutnya menghasilkan *net risk* per jenis risiko dan kesimpulan risiko komposit bank secara keseluruhan.

➤ Good Corporate Governance (GCG)

Pelaksanaan GCG mencakup implementasi dari 5 (lima) prinsip/asas GCG yaitu antara lain : transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip/asas GCG yang diwujudkan dalam :

- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
- Penanganan Benturan Kepentingan
- Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
- Penerapan Fungsi Audit Intern
- Penerapan Fungsi Audit *Ekstern*
- Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)
- Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal
- Rencana Strategis Bank

➤ Permodalan / Capital

Permodalan bank harus mampu menyerap semua risiko yang ada di bank. Penilaian permodalan ini mencakup :

- Kecukupan permodalan :
 - Kecukupan modal yang dapat menyerap risiko,
 - Kecukupan modal untuk mendukung rencana bisnis dan
 - Kualitas modal (komposisi tier 1)
- Pengelolaan Permodalan :
 - Efektifitas perencanaan dan penggunaan modal untuk menghasilkan pendapatan,
 - Pemupukan modal organik,
 - Kemampuan akses bank kepada sumber permodalan.

➤ Pendapatan/Earnings

Faktor pendapatan bank dinilai berdasarkan aspek Kinerja *Earnings*, sumber-sumber *earning*, diversifikasi pendapatan, dan *earning sustainability*.

Strategi lainnya dalam upaya meningkatkan pencapaian kinerja bank yang mendukung hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang baik adalah penguatan *funding* beserta perbaikan komposisinya, pengembangan bisnis kredit consumer, small, dan micro business, memperkuat jaringan kantor dengan menambah kantor baru dan relokasi, penguatan *corporate image* dan *brand awareness* serta pengembangan fungsi *investor relation* untuk mendukung rencana divestasi, penerapan manajemen likuiditas yang efektif dan efisien untuk perbaikan laba operasi yang *sustainable*, meningkatkan kapabilitas perusahaan dengan melakukan restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan, yang tentu pelaksanaan dari semuanya didukung prinsip kehati-hatian dan penerapan dari tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian / *prudential banking*, maka pencapaian ratio-ratio keuangan yang penting tetap menjadi perhatian dan dijaga untuk memenuhi ketentuan regulator, antara lain pemenuhan ratio-ratio keuangan terkait dengan PPA/CKPN, CAR, NPL, PDN, BMPK, Rugi/Laba.

Langkah-Langkah Strategis yang Akan Ditempuh

PT Bank Mutiara Tbk akan diarahkan menjadi salah satu 'Bank Fokus' terbaik di Indonesia, disesuaikan dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan skala usahanya. Berbagai strategi dan program telah disiapkan oleh manajemen untuk dapat menjadikan PT Bank Mutiara Tbk sebagai "Bank Fokus" terbaik pilihan masyarakat dan menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia yang aman, terpercaya memiliki layanan istimewa, menghasilkan produk-produk berkualitas, dengan performa terpercaya, bersih dan kuat sesuai dengan filosofi mutiara.

Untuk perencanaan 3 (tiga) tahun kedepan ini PT Bank Mutiara Tbk akan memfokuskan kepada pengembangan bisnis retail melalui kredit mikro, kecil dan menengah sehingga diharapkan memperoleh hasil yang tinggi (*high yield loan*) yang pada akhirnya akan meningkatkan Net Interest Margin (NIM). Perkuatan jaringan usaha bank dengan merencanakan pembukaan 22 (dua puluh dua) kantor, masing-masing 11 (sebelas) kantor per tahun pada tahun 2016 dan 2017 akan mendukung pula percepatan perluasan *customer base* dana pihak ketiga sehingga penguasaan dana pihak ketiga akan lebih merata, tidak berkonsentrasi pada deposito besar tertentu saja.

J Trust sebagai pemegang saham baru telah berkomitmen penuh untuk mengembangkan PT Bank Mutiara Tbk kedepan terutama menuju pasar retail, dengan salah satunya adalah rencana penambahan modal pada akhir tahun 2014 sesuai kebutuhan hingga tahun 2017 untuk mendukung ekspansi bisnis. Penyetoran modal oleh J Trust ini bertujuan untuk memelihara rasio permodalan CAR agar tetap dapat bersaing di pasar perbankan terutama sesuai dengan *peer group* di Indonesia.

Dengan adanya penyetoran modal ini telah memperkuat modal bank sebagai dasar selain untuk pertumbuhan kredit di masa yang akan datang juga digunakan untuk memperbaiki Net Non Performing Loan (NPL) dan tentunya akan mempercepat penyelesaian Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Adapun dalam melaksanakan seluruh kebijakan dan strategi perusahaan, bank berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan untuk pemegang saham (*shareholder value*) melalui kinerja

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

keuangan maupun non keuangan. Sebagai contoh, pada sisi non keuangan Bank berupaya untuk memperkuat jaringan kantor dengan relokasi maupun penambahan jaringan kantor baru, serta pengembangan pembiayaan mikro, memperkuat budaya perusahaan sesuai visi misi, melanjutkan dan menyempurnakan penerapan *good corporate governance* dan belanja modal dalam sistem teknologi guna menunjang bisnis.

Strategi Pengembangan Bisnis

Adanya kebijakan yang baru dimana saat ini bank sedang berupaya menguatkan permodalan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Fase selanjutnya bank berupaya melakukan penguatan implementasi *dual control* dan peningkatan kualitas bisnis kembali di tahun kedepan melalui; rencana pengembangan bisnis yang lebih terfokus pada bidang atau segmen mikro, kecil dan menengah, berupa *retail* dan *commercial*, serta berupaya memperbaiki komposisi pendanaan pada CASA yang lebih baik.

Bank juga akan mulai melakukan perbaikan pada *upgrading core system* guna mendukung dan mengembangkan "*E-Banking*" dan "*M-Banking*" untuk lebih memberikan kemudahan bagi nasabah primanya, disamping untuk dapat bersaing dengan produk liabilitas bank lainnya. Selain itu juga dalam pelaksanaan peningkatan kualitas bisnis didukung penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang meliputi :

1. Penguatan implementasi *dual control* dan peningkatan kualitas melalui:
 - Penerapan RCSA (*Risk Control Self Assessment*)
 - Penerapan COSO Based Komponen :
 - a) Penerapan *Risk Based Audit* (*pilot project*)
 - b) Menyusun *Audit Rating System*
2. Pengembangan dan perbaikan 8 jenis profil risiko manajemen yang terpisah dengan pengelola bisnis.
3. Peningkatan kualitas implementasi komite kredit (NAK dibantu oleh konsultan, training kredit & LK oleh tenaga internal Bank).
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan ALCO untuk mendapatkan penetapan suku bunga produk bank yang kompetitif.
5. Peningkatan kualitas advis / rekomendasi manajemen terkait pengetolaan risiko, Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Penguatan kualitas bidang kepatuhan (GCG) dan budaya perusahaan :

1. Penguatan kualitas kebijakan manajemen maupun keputusan mengenai produk, jasa dan layanan, serta pengelolaan perusahaan yang tertuang dalam surat keputusan, surat edaran, SOP baik internal bank maupun eksternal dengan cara memberikan masukan kepada divisi-divisi, mensosialisasikan, melakukan *assessment*, dan lain-lain.
2. Penerapan prinsip mengenai nasabah, terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) dengan sosialisasi dan melakukan pengkinian data.
3. Penguatan implementasi program budaya perusahaan sesuai standar yang ditetapkan.

Tahapan Implementasi GCG

Dalam mempersiapkan masa peralihan kepada kepemilikan yang baru, bank telah menetapkan beberapa target jangka pendek maupun menengah yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Tahun 2014

Konsolidasi, Transformasi, Reorganisasi, *Positioning*

1. Evaluasi bisnis & infrastruktur
2. Penyelesaian NPL (*restruktur, Collection & WO*), *Special Mention Collection*
3. Memperbaiki kinerja keuangan
4. Konsolidasi bisnis (*Organisasi, NPL, Bisnis*) dan Persiapan ekspansi bisnis (*Bisnis Micro SME dan Retail*)
5. *Set up* strategi bisnis yang terarah
6. Rekrut *Sales Force*
7. Pelatihan fokus pada *Micro SME, & Consumer*
8. Memperbaiki dan mengoptimalkan kantor cabang serta jaringan distribusinya
9. Kontinjensi Liabilitas

Tahun 2015

Expand, Optimisasi, Pertumbuhan

1. Pengembangan bisnis *Micro SME, Trade Finance, dan Treasury*
2. Mengembangkan produk program Konsumer
3. Optimalisasi infrastruktur
4. Fokus pada pertumbuhan *Micro, kecil dan menengah*
5. Rekrut *Sales Force*
6. Pengembangan program untuk bisnis *Micro SME, Commercial, Trade Finance*
7. Optimalisasi *CASA*
8. Kontinjensi Liabilitas

Tahun 2016

Meningkatkan (*Infrastruktur, Kapasitas, Kapabilitas*) dan Pertumbuhan

1. Mempersiapkan infrastruktur *implant & agency banking*
2. Menambah jaringan kantor
3. Membangun *Core Banking system* ter Integrasi
4. *Restructure Remunerasi System*
5. Fokus pada pertumbuhan *Micro, kecil dan menengah*
6. Persiapan *commercial banking business*
7. Pengembangan *CASA* untuk kredit *Micro, kecil dan menengah, Commercial, Trade Finance & Consumer*
8. Pertumbuhan *CASA*
9. Pengembangan *internet & mobile banking*
10. Kontinjensi Liabilitas

Tahun 2017

Pangsa Pasar

1. Memperbesar pangsa pasar
2. Fokus pada pertumbuhan *Micro, kecil dan menengah*
3. Pertumbuhan *Retail Banking*
4. Pertumbuhan *CASA*
5. Kontinjensi Liabilitas

BAB II

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS), PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan hirarki tertinggi dalam organisasi perusahaan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan/atau Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18. RUPS berwenang untuk :

- Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan Laporan Tahunan Perseroan atau menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing.
- Mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi, misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Perseroan.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain serta *tantiem* Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar) di Indonesia yang terafiliasi dengan salah satu dari KAP internasional dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasar modal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan menetapkan jumlah honorariumnya.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang wajib diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat.

Selama tahun 2014, PT Bank Mutiara Tbk telah menyelenggarakan 5 (lima) kali RUPS yaitu :

- a. 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 4 Juni 2014
- b. 4 (empat) kali RUPS Luar Biasa, yaitu pada tanggal 26 Februari 2014, tanggal 20 Oktober 2014, tanggal 20 Nopember 2014, dan tanggal 30 Desember 2014

(1) RUPS Tahunan

Pada tanggal 4 Juni 2014 telah diadakan RUPS Tahunan, yang telah menghasilkan beberapa keputusan penting, diantaranya adalah:

Agenda Pertama:

1. Memberi persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang termuat dalam Buku Laporan Tahunan 2013, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan dalam ringkasan penting (*highlights*) yang telah disampaikan dalam Rapat ini.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan serta penjelasan atas dokumen tersebut, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan opini: 'Wajar Tanpa Pengecualian' sebagaimana dinyatakan dalam Lapornya Nomor: 0210/T&T-GA/R-1/2014, tanggal 8 April 2014 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2013.
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sejauh tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Agenda Kedua:

Menyetujui seluruh laba/rugi pada tahun buku 2013 diakumulasikan pada saldo laba/rugi dan tidak ada pembagian dividen.

Agenda Ketiga:

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014 dengan persyaratan memiliki reputasi yang baik serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Menetapkan besarnya honorarium kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi serta kemampuan keuangan Perseroan.

Agenda Keempat:

1. Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat disertai ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan selama menjabat, yaitu kepada:

Tuan Pontas R. Siahaan sebagai Komisaris Utama
Tuan Sigid Moerkardjono sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
Tuan Eko Budi Supriyanto sebagai Komisaris Independen
Tuan Sukoriyanto Saputro sebagai Direktur Utama
Tuan Ahmad Fajar sebagai Direktur
Tuan Erwin Prasetio sebagai Direktur

2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

- Komisaris Utama/Komisaris Independen ; Sigid Moerkardjono

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- Komisaris : Didik Madiyono
- Komisaris Independen : Eko Budi Supriyanto
- Komisaris : Sukoriyanto Saputro

Direksi Perseroan:

- Direktur Utama : Gandhi Ganda Putra Ismail
- Direktur : Ahmad Fajar
- Direktur : Laksmi Mustikaningrat

Pengangkatan ini berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 terhitung sejak pengangkatan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

3. Dengan demikian, susunan pengurus terbaru untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

- Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sigid Moerkardjono
- Komisaris : Didik Madiyono
- Komisaris Independen : Eko Budi Supriyanto
- Komisaris : Sukoriyanto Saputro

Direksi Perseroan:

- Direktur Utama : Gandhi Ganda Putra Ismail *)
- Direktur : Ahmad Fajar
- Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono
- Direktur : Laksmi Mustikaningrat **)

Catatan: *) Berlaku efektif setelah hasil *Fit and Proper Test* oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi Pelaksana Tugas (Plt)Direktur Utama kepada Sdr. Ahmad Fajar selaku Direktur, yang berlaku sejak tanggal 04 Juni 2014 dan akan berakhir setelah Direktur Utama definitif mendapat persetujuan atau lulus hasil uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

***) Berlaku efektif pada tanggal 29 September 2014 setelah mendapat persetujuan dari OJK atas lulus hasil uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagai Direktur PT Bank Mutiara Tbk.

Agenda Kelima:

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan Direksi Perseroan yang diangkat berdasarkan Rapat dan untuk menyesuaikan besaran gaji dan tunjangan Tuan Felix Istyono Hartadi Tiono dengan besaran gaji dan tunjangan Direksi yang diangkat berdasarkan Rapat.

2. Menetapkan besaran honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Rapat sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Komisaris LPS Nomor 052/RDK-LPS/2014 tanggal 4 Juni 2014.

(2) RUPS Luar Biasa

- A. Pada tanggal 26 Februari 2014 telah diadakan RUPS Luar Biasa, yang telah menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut:

Agenda Pertama:

1. Menerima pengunduran diri:

- a. Tuan Benny Purnomo selaku Direktur; dan
- b. Tuan Budhiyono Budoyo selaku Direktur

yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 26 Februari 2014 dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan selama menjabat dengan ketentuan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan oleh yang bersangkutan selama tahun buku 2013 dan tahun buku 2014 akan diputuskan dalam RUPS Tahunan tahun buku 2013 dan RUPS Tahunan tahun buku 2014.

2. Menyetujui usulan Dewan Komisaris untuk mengangkat pejabat setingkat Executive Vice President (EVP) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama, dalam rangka menjalankan fungsi yang selama ini dilaksanakan oleh anggota Direksi yang mengundurkan diri dan fungsi lain (*asset recovery* dan penanganan kredit bermasalah) yang dibutuhkan Perseroan, dimana mekanisme dan proses pengangkatannya diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Agenda Kedua:

1. Menyetujui pengangkatan Tuan Felix Istyono Hartadi Tiono sebagai Direktur Perseroan yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Tuan Felix Istyono Hartadi Tiono tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Selama pengangkatan Tuan Felix Istyono Hartadi Tiono belum berlaku efektif, maka Tuan Erwin Prasetyo tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan yang membawahkan fungsi kepatuhan. Setelah pengangkatan Tuan Felix Istyono Hartadi Tiono berlaku efektif, maka Tuan Erwin Prasetyo tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2013.

2. Menyetujui remunerasi dan fasilitas terhadap anggota Direksi yang baru diangkat yang jumlahnya sama dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan keputusan RUPS sebelumnya (berlaku setelah lulus uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan) dan sebelum berlaku efektif lulus maka anggota Direksi yang baru diangkat menerima remunerasi sebesar 80% dari jumlah yang diterima setelah pengangkatannya berlaku efektif.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - Direktur Utama | : Sukoriyanto Saputro |
| - Direktur | : Ahmad Fajar |
| - Direktur | : Erwin Prasetyo |
| - Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan | : Felix Istyono Hartadi Tiono *) |

Catatan:*) Berlaku efektif pada tanggal 22 April 2014 setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas lulus hasil uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Kemudian seiring dengan telah ditetapkannya J Trust Co., Ltd (lembaga investasi yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang) sebagai pemilik baru PT Bank Mutiara Tbk, yang memenuhi syarat divestasi saham atau penjualan strategis PT Bank Mutiara Tbk setelah sebelumnya J Trust Co., Ltd mengikuti *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka PT Bank Mutiara Tbk telah memasuki proses babak baru perubahan kepemilikan dan susunan pengurus yang tercermin dalam keputusan hasil RUPS Luar Biasa PT Bank Mutiara Tbk berikut ini.

- B. Pada tanggal 20 Oktober 2014 telah diadakan RUPS Luar Biasa, yang telah menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut:

Berdasarkan pendapat dari anggota Dewan Komisiner, pemimpin rapat menyatakan bahwa Rapat memutuskan :

- a. Menyetujui Rancangan Pengambilalihan Perseroan sebagaimana yang diusulkan oleh Direksi Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Menyetujui Konsep Akta Pengambilalihan Perseroan sebagaimana terlampir dalam Rancangan Pengambilalihan Perseroan.
- C. Pada tanggal 20 Nopember 2014 telah diadakan RUPS Luar Biasa, yang telah menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut:

Agenda Pertama:

1. Menyetujui pengkonversian saham Seri A Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan (*Convertible Preferred Stock*) menjadi saham Seri A Saham Biasa (*Common Stock*) dengan rasio konversi satu berbanding satu.
2. Memberikan persetujuan atas pengambilalihan saham PT BANK MUTIARA, Tbk oleh J TRUST Co. Ltd. dari LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN (LPS) sebagai berikut:
 - a. Pengalihan sebesar 99.996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam persen) saham perseroan atau sebanyak 801.184.100.000.000 (delapan ratus satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus juta) saham Seri A milik LPS kepada J Trust Co. Ltd. yang dilakukan dengan tahapan:

- i. Sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) saham perseroan atau sebanyak 793.200.325.675.265 (tujuh ratus sembilan puluh tiga triliun dua ratus miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima) lembar saham Seri A akan dialihkan kepada J Trust segera setelah ditutupnya RUPS;
 - ii. Sebesar 0,996% (nol koma sembilan sembilan enam persen) saham perseroan atau sebanyak 7.983.774.324.735 (tujuh triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) lembar saham Seri A Saham Biasa akan dialihkan oleh LPS kepada J-Trust atau pihak yang ditunjuk oleh J-Trust, yang akan dilakukan setelah dipenuhinya kondisi tertentu sesuai dengan amandemen CSPA, sehingga setelah pengalihan tersebut kepemilikan saham J-Trust sesuai dengan Surat OJK Nomor SR-187/D.03/2014 tanggal 10 (sepuluh) Nopember 2014 (dua ribu empat belas) perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir PT BANK MUTIARA Tbk.
- b. Pengalihan sebesar 0,004% (nol koma nol nol empat persen) saham perseroan atau sebanyak 28.350.177.035 saham (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh lima) Seri B milik Pemegang Saham Lama (Masyarakat) kepada J Trust yang akan dilakukan setelah dipenuhinya kondisi tertentu.
3. Sebagai konsekuensi dari butir (a). di atas, mengacu pada UU PT, LPS menjadi pemegang saham minoritas dengan kepemilikan sejumlah 7.983.774.324.735 (tujuh triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) lembar saham yang setara dengan 0,996% (nol koma sembilan sembilan enam persen) sehingga LPS menjadi pemegang saham biasa yang tidak lagi memiliki preferensi sebagaimana hak-hak yang melekat pada saham preferen.

Agenda Kedua:

1. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan termasuk mengubah pasal mengenai perubahan saham Seri A Saham Preferen Yang Dapat Dikonversikan (*Convertible Preferred Stock*) menjadi saham Seri A Saham Biasa (*Common Stock*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 7, serta menghapus pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham melalui Rapat Dewan Komisiner LPS sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 7, Pasal 18 ayat 3, Pasal 21 ayat 7, Pasal 22 ayat 5, Pasal 23 ayat 17, Pasal 23 ayat 13, Pasal 24 ayat 7, Pasal 26 ayat 6, Pasal 27 ayat 7 dan Pasal 28 ayat 11.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris tersendiri.

Agenda Ketiga:

1. Menerima pengunduran diri Tuan EKO BUDI SUPRIYANTO sebagai Komisaris, Tuan DIDIK MADIYONO sebagai Komisaris dan Tuan GANDHI GANDA PUTRA ISMAIL sebagai Direktur Utama terhitung sejak ditutupnya rapat disertai

dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan selama menjabat. Dengan catatan pembebasan tanggung jawab (*acquiet et de charge*) akan diberikan pada RUPS Tahunan yang akan datang kepada:

- i. Tuan EKO BUDI SUPRIYANTO sebagai Komisaris, untuk periode dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014;
 - ii. Tuan DIDIK MADIYONO sebagai Komisaris dan Tuan GANDHI GANDA PUTRA ISMAIL sebagai Direktur Utama, untuk periode dari tanggal 4 Juni 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014.
2. Mengangkat Tuan NOBIRU ADACHI sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak dipenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS. Pengangkatan Tuan NOBIRU ADACHI berlaku untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3. Sehingga selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur : Ahmad Fajar
- Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono
- Direktur : Laksmi Mustikaningrat

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama (Independen): Sigid Moerkardjono
- Komisaris : Sukoriyanto Saputro *)
- Komisaris : Nobiru Adachi *)

*) Pengangkatan akan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri.
- D. Pada tanggal 30 Desember 2014 telah diadakan RUPS Luar Biasa, yang telah menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut:

Agenda Pertama:

1. Menyetujui Penambahan Modal Perseroan melalui pengeluaran saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun) lembar saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp. 0,01 (nol koma nol satu rupiah) atau sebesar Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah).

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kedalam akta notaris tersendiri mengenai pelaksanaan peningkatan modal tanpa HMETD tersebut.

Agenda Kedua:

1. Menerima pengunduran diri Tuan SUKORIYANTO SAPUTRO sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa yang telah diberikan selama menjabat.
2. Merubah jabatan Dewan Komisaris Perseroan Tuan NOBIRU ADACHI dari sebelumnya sebagai Komisaris menjadi Komisaris Utama Perseroan dan Tuan SIGID MOERKARDJONO dari sebelumnya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
3. Merubah jabatan Direksi Perseroan yaitu Tuan AHMAD FAJAR dari sebelumnya sebagai Direktur menjadi Direktur Utama Perseroan.
4. Mengangkat Tuan YOSHIO HIRAKO dan Tuan EIHITO TAMURA masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru, Pengangkatan Tuan YOSHIO HIRAKO dan Tuan EIHITO TAMURA berlaku untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal pengangkatan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
5. Sehingga selanjutnya susunan pengurus terbaru untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

- Komisaris Utama : Nobiru Adachi *)
- Wakil Komisaris Utama /
(Komisaris Independen) : Sigid Moerkardjono

Direksi Perseroan:

- Direktur Utama : Ahmad Fajar *)
- Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono
- Direktur : Laksmi Mustikaningrat
- Direktur : Yoshio Hirako *)
- Direktur : Eihito Tamura *)

*) Pengangkatan akan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan tersebut tidak terpenuhi atau OJK tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

6. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan susunan pengurus Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

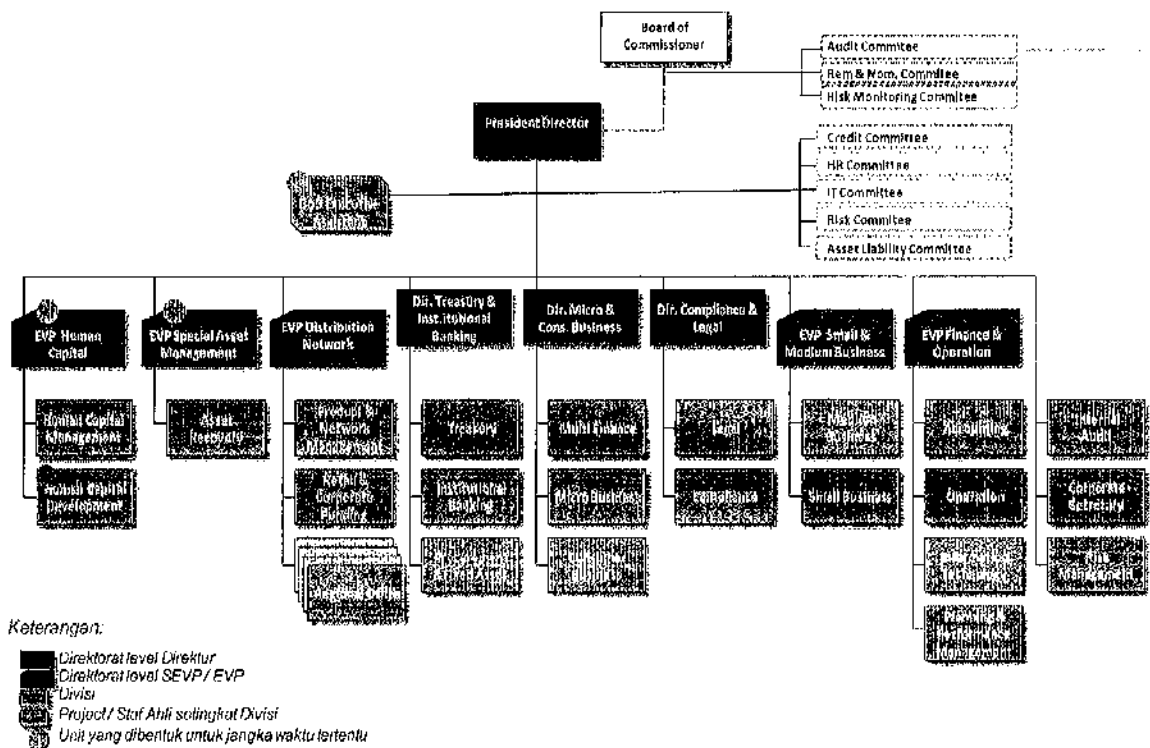
Perubahan terhadap susunan pengurus PT Bank Mutiara Tbk dari keputusan hasil RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Desember 2014, maka jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris PT Bank Mutiara Tbk belum memenuhi ketentuan yang berlaku (jumlah anggota Dewan Komisaris 2 orang termasuk 1 orang Komisaris Independen) sehingga salah satu fungsi Komite Dibawah Dewan Komisaris yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi terdapat kekosongan (*Vacant*) jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

Bank telah menyampaikan pemberitahuan kepada OJK melalui surat No.29.21/S.Dir-CPD/Mutiara/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 Perihal : Komposisi Dewan Komisaris PT Bank Mutiara Tbk, dengan komitmen pemenuhan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi yang akan dilengkapi melalui rencana diadakan RUPS Luar Biasa bulan Maret 2015.

2.2. Struktur Organisasi PT Bank Mutiara Tbk

Dalam rangka menyesuaikan struktur organisasi Bank terhadap adanya perubahan peraturan yang berlaku dari regulator dan menyesuaikan kondisi bisnis bank saat ini, maka Struktur Organisasi PT Bank Mutiara Tbk tahun 2014 yang terakhir berlaku berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Mutiara Tbk Nomor 25.10/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Mutiara Tbk, adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi



7-1A

Catatan :

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mutiara Tbk tanggal 30 Desember 2014 sesuai Akte Pernyataan RUPSLB dengan No. 2 tanggal 8 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn. dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0001199.AH.01.03.TH.2015 dan AHU-0001200.AH.01.03.TH.2015.

Maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mutiara Tbk sebagai berikut:

Dewan Komisaris beranggotakan 2 (dua) orang terdiri dari :

Komisaris Utama : Nobiru Adachi
Wakil Komisaris Utama/Independen : Sigid Moerkardjono

Direksi beranggotakan 5 (lima) orang terdiri dari :

Direktur Utama : Ahmad Fajar
Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur : Laksmi Mustikaningrat
Direktur : Yoshio Hirako
Direktur : Eihito Tamura

2.3. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT Bank Mutiara Tbk memiliki peran dan tugas sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), dengan tugas utama adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan, melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS dan tugas-tugas yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar PT Bank Mutiara Tbk, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawasan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasar Modal dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

(1) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Melakukan Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan :
 - a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun;
 - b. Memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
5. Dewan Komisaris memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

6. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
7. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.
9. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti semua audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
10. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
11. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
12. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
13. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.
14. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
15. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
16. Menetapkan sistim Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Direksi dan Komisaris.
17. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab secara independen.

(2) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
- Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
- Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Pada periode 2014, jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PT Bank Mutiara Tbk beberapa kali mengalami perubahan sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris per 4 Juni 2014 s/d 19 Nopember 2014 sesuai kriteria Bank Indonesia di atas, sebagai berikut:
 - ✓ Anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, dan jumlah anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang.
 - ✓ Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 4 (empat) orang.
 - ✓ Jumlah Komisaris Independen sebanyak 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	Persetujuan BI/OJK
1.	Sigid Moerkardjono	Komisaris Utama/Independen	Indonesia	RUPS tgl 4 Juni 2014	8 September 2011/ 9 Oktober 2012
2.	Didik Madiyono	Komisaris	Indonesia	RUPS tgl 4 Juni 2014	*)
3.	Eko Budi Supriyanto	Komisaris Independen	Indonesia	RUPS tgl 4 Juni 2014	20 Oktober 2009
4.	Sukoriyanto Saputro	Komisaris	Indonesia	RUPS tgl 4 Juni 2014	*)

*) Pengangkatan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris per 20 Nopember 2014 s/d 29 Desember 2014 sesuai kriteria Bank Indonesia di atas, sebagai berikut:
 - ✓ Anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang, dan jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang.
 - ✓ Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan jumlah Komisaris Independen belum sesuai kriteria, yakni sebanyak 33,3% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	Persetujuan BI/OJK
1.	Sigid Moerkardjono	Komisaris Utama/Independen	Indonesia	RUPSLB tgl 20 Nov. 2014	8 September 2011/ 9 Oktober 2012
2.	Sukoriyanto Saputro	Komisaris	Indonesia	RUPSLB tgl 20 Nov. 2014	*)
3.	Nobiru Adachi	Komisaris	Jepang	RUPSLB tgl 20 Nov. 2014	*)

*) Pengangkatan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris per 30 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 belum sesuai kriteria Bank Indonesia di atas, sebagai berikut:
 - ✓ Anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang termasuk 1 orang Komisaris Independen, dan jumlah anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang, sehingga salah satu fungsi Komite Dibawah Dewan Komisaris yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi terdapat kekosongan (*Vacant*) jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sedangkan yang sesuai kriteria, sebagai berikut:

 - ✓ Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia sebanyak 1 (satu) orang, dan 1 (satu) orang berkewarganegaraan dan berdomisili di Jepang.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

✓ Jumlah Komisaris Independen sebanyak 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	Persetujuan BI/OJK
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	Jepang	-RUPSLB tgl. 20 Nov. 2014 -RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	*)
2.	Sigid Moerkardjono	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Indonesia	-RUPST tgl. 21 Juni 2012 -RUPSLB tgl. 30 Des. 2014	8 September 2011/ 9 Oktober 2012 (**)

*) Sedang dalam proses *Fit & Proper Test* di OJK. Pengangkatan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
**) Persetujuan BI untuk Komisaris Independen

Seluruh pengangkatan dan/atau pergantian anggota Dewan Komisaris harus disetujui oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sejalan dengan kriteria utama dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk pengangkatan 1 (satu) orang Komisaris Utama dan seorang Wakil Komisaris Utama Independen melalui RUPSLB, selanjutnya berdasarkan/memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pada periode 2014, rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan Lain
1.	Nobiru Adachi	Komisaris Utama	<i>Representative Director and Senior Managing Director in charge of Corporate Management Dept. of J Trust Co., Ltd.</i>
2.	Sigid Moerkardjono	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Tidak ada

Adapun ringkasan profil anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Komisaris Utama : Nobiru Adachi

Tanggal lahir : 21 Maret 1958, Lulusan Universitas Tokyo Fakultas Hukum tahun 1980, Lulusan Fakultas Ekonomi dari Case Western University tahun 1983, serta Lulusan Fakultas Administrasi Umum dari Kennedy School of Government, Harvard University. Pada April 1980 bergabung dengan Departemen Keuangan Jepang, di mana menjabat sebagai Direktur Kantor Pelayanan Pajak Onomichi di Juli 1986. Kemudian diangkat sebagai Direktur Wakil Menteri Keuangan untuk Urusan Internasional, bagian Sekretariat Menteri di Juni 1997. Pada bulan Juni 1999, adalah Pemeriksa Anggaran di Biro Anggaran. Kemudian menjabat sebagai Direktur di Divisi Riset Biro Internasional pada Juni 2002. Kemudian menjadi Direktur Institut Riset Kebijakan Departemen Keuangan sejak Juni 2004. Setelah itu menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai di Hakodate sejak Juni 2005. Pada bulan April 2006 ditunjuk sebagai Officer di Jasdac Securities Exchange, Inc lalu dipromosikan ke Executive Officer di Juni 2006. Pada Oktober 2008 menjadi Country Head untuk Jepang di ETF Securities Ltd. Kemudian menjabat Direktur

7

Perwakilan di M & A Solusi Japan Co. Ltd pada Oktober 2011. April 2013 masuk sebagai Advisor bagi J Trust Co., Ltd, kemudian menjabat sebagai Managing Director J Trust Co., Ltd pada Juni 2013. Kemudian menjadi Direktur Perwakilan dan Senior Managing Director yang bertanggung jawab atas Corporate Management Dept. di J Trust Co., Ltd, dan pada tanggal 20 Nopember 2014 ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank Mutiara Tbk, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2014 ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Bank Mutiara Tbk.

2. Wakil Komisaris Utama Independen : **Sigid Moerkardjono**

Tempat/tanggal lahir : Surakarta/ 10 September 1952. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Mengawali karier di PT Bank Niaga Tbk Cabang Yogyakarta sebagai Credit Analyst (1976-1978), sebagai Kepala Bagian Operasi (1979-1981), selanjutnya di PT Bank Niaga Tbk Cabang Jakarta sebagai Kepala Divisi Operasi (1981-1983), di PT Bank Niaga Tbk Kantor Pusat sebagai Inspector (SPI) (1983-1988), kemudian menjadi Pimpinan Cabang PT Bank Niaga Cabang Semarang (1988-1990), sebagai Pimpinan Cabang PT Bank Niaga Tbk Cabang Medan (1990-1993), PT Bank Niaga Tbk Kantor Pusat sebagai Kepala Urusan Kredit dan Administrasi (1994), sebagai Kepala Wilayah Indonesia Timur PT Bank Niaga Tbk di Surabaya (1994-1998), PT Bank Niaga Tbk Kantor Pusat sebagai Controller / Kepala SKAI (1999), selanjutnya sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Niaga Tbk (1999), dan sebagai Tim Pengelola di PT Bank Niaga Tbk Kantor Pusat (1999-2000), kemudian sebagai Komisaris/Ketua Komite Audit/Ketua Komite Pemantau Risiko & Anggota Komite Remunerasi Nominasi PT Bank Niaga Tbk (2000-2007), sebagai Wakil Presiden Komisaris dan Anggota komite-komite PT Bank Niaga Tbk (2007-2008), disamping itu sebagai Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko di Bank BTPN (2007-2011). Berdasarkan RUPSLB PT Bank Mutiara Tbk tanggal 21 Juni 2011 ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama, dan selanjutnya berdasarkan RUPS tanggal 21 Juni 2012 diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Mutiara Tbk. Pada RUPS Tahunan tanggal 4 Juni 2014 diangkat sebagai Komisaris Utama Independen, dan berdasarkan hasil RUPSLB tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan sekarang kembali merubah jabatannya menjadi Wakil Komisaris Utama Independen PT Bank Mutiara Tbk. serta mendapat tugas sebagai Ketua Komite Audit PT Bank Mutiara Tbk (antara lain berdasarkan: SK Direksi No.03.12/S.Kep-Dir-HRD/Mutiara/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011, SK Direksi No.31.25/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, SK Direksi No.01.12/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014, dan SK Direksi No.08.08/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 08 September 2014), dan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Mutiara Tbk (antara lain berdasarkan: SK Direksi No.31.27/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, SK Direksi No.01.13/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014, dan SK Direksi No.08.09/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 08 September 2014).

(3) Kriteria Dewan Komisaris

- Seluruh pengangkatan dan/atau pergantian anggota Dewan Komisaris harus disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS (Rapat Dewan Komisiner/RDK sebagai RUPS saat perseroan masih ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) dengan kriteria utama mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan

penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia.

- Untuk pengangkatan 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama Independen melalui RUPS, selanjutnya berdasarkan dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

(4) Status Independensi Dewan Komisaris

- Untuk menghindari benturan kepentingan, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
- Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.
- Sehubungan dengan hal tersebut, pengangkatan Wakil Komisaris Utama Independen berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 2012 sesuai dengan Pernyataan Keputusan RUPS dengan Akte No. 56 tanggal 27 Juli 2012 dan saat itu telah menandatangani Surat Kontrak Kerja dengan pemegang saham (LPS).

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Komisaris Independen telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada BI/OJK dengan redaksional, sebagaimana di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat domisili (copy KTP/SIM terlampir) :
Nomor telepon rumah :
Jabatan :
Nama perusahaan :
Nomor telepon perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

(5) Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris PT Bank Mutiara Tbk telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diperbaharui secara berkala yang terkait beberapa hal sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai $\geq 5\%$ (*lima perseratus*) dari modal disetor pada Bank Mutiara maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).
- Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank, atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

- **Transparansi Hubungan Keluarga**

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Sigid Moerkardjono		√		√		√

- **Transparansi Hubungan Keuangan**

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Nobiru Adachi		√		√		√
2.	Sigid Moerkardjono		√		√		√

- **Transparansi Kepemilikan Saham**

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	%
1.	Nobiru Adachi	J Trust Co. Ltd.	Tidak ada	Tidak ada	0,001
2.	Sigid Moerkardjono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	-

(6) Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2014, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan berbagai rapat berdasarkan jenisnya dengan perincian sebagai berikut :

1. **Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi** selama tahun 2014 sebanyak 19 (sembilan belas) kali, dimana jumlah kehadiran rapat dari seluruh anggota Dewan Komisaris berdasarkan 'periode menjabat' adalah :

Nama	Periode Menjabat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi			
Pontas R. Siahaan (Komisaris Utama)	1 Januari s/d 4 Juni 2014	5	100%
Sigid Moerkardjono (Wakil Komisaris Utama-Independen)	1 Januari s/d 4 Juni 2014 & 30 Desember s/d 31 Desember 2014	5	100%
Sigid Moerkardjono (Komisaris Utama-Independen)	4 Juni s/d 30 Desember 2014	13	92%

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

Eko Budi Supriyanto (Komisaris-Independen)	1 Januari s/d 20 Nopember 2014	16	100%
Didik Madiyono (Komisaris)	4 Juni s/d 20 Nopember 2014	11	100%
Sukoriyanto Saputro (Komisaris)	4 Juni s/d 30 Desember 2014	14	100%
Nobiru Adachi (Komisaris)	20 Nopember s/d 31 Desember 2014	1	100%

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah :

Nama Komisaris	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl
Pontas R. Siahaan	28/1/14	19/2/14	20/3/14	17/4/14	19/5/14	9/6/14	21/7/14	22/7/14	12/8/14	19/8/14	9/9/14	12/9/14	16/9/14
Sigid Moerkardjono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Eko B. Supriyanto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Didik Madiyono	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
Sukoriyanto Saputro	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
Nobiru Adachi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keterangan: √ : Hadir X : Absen													

Nama Komisaris	14	15	16	17	18	19	Σ
	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	
Pontas R. Siahaan	30/9/14	16/10/14	19/10/14	14/11/14	16/11/14	18/12/14	5
Sigid Moerkardjono	X	√	√	√	√	√	18
Eko B. Supriyanto	√	√	√	-	-	-	16
Didik Madiyono	√	√	√	-	-	-	11
Sukoriyanto Saputro	√	√	√	√	√	√	14
Nobiru Adachi	-	-	-	-	-	√	1
Keterangan: √ : Hadir X : Absen							

2. Rapat Khusus Dewan Komisaris selama tahun 2014 sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, dimana jumlah kehadiran rapat dari seluruh anggota Dewan Komisaris berdasarkan 'periode menjabat' adalah :

Nama	Periode Menjabat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Rapat Khusus Dewan Komisaris			
Pontas R. Siahaan (Komisaris Utama)	1 Januari s/d 4 Juni 2014	6	86%
Sigid Moerkardjono (Wakil Komisaris Utama- Independen)	1 Januari s/d 4 Juni 2014 & 30 Desember s/d 31 Desember 2014	7	100%

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

Sigid Moerkardjono (Komisaris Utama-Independen)	4 Juni s/d 30 Desember 2014	16	100%
Eko Budi Supriyanto (Komisaris-Independen)	1 Januari s/d 20 Nopember 2014	19	90%
Didik Madiyono (Komisaris)	4 Juni s/d 20 Nopember 2014	12	85%
Sukoriyanto Saputro (Komisaris)	4 Juni s/d 30 Desember 2014	16	100%
Nobiru Adachi (Komisaris)	20 Nopember s/d 31 Desember 2014	1	100%

Tabel kehadiran rapat untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah :

Nama Komisaris	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl
Pontas R. Siahaan	13/1/14	6/2/14	11/2/14	4/3/14	18/3/14	25/3/14	8/4/14	9/5/14	16/5/14	17/6/14	30/6/14	10/7/14	21/7/14
Sigid Moerkardjono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Eko B. Supriyanto	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Didik Madiyono	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√
Sukoriyanto Saputro	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√
Nobiru Adachi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keterangan: √ : Hadir X : Absen													

Nama Komisaris	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Σ
	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	
Pontas R. Siahaan	18/8/14	20/8/14	4/9/14	17/9/14	0/10/14	14/10/14	15/10/14	14/11/14	26/11/14	10/12/14		6
Sigid Moerkardjono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		23
Eko B. Supriyanto	X	√	X	√	√	√	√	√	-	-		19
Didik Madiyono	√	√	X	√	√	√	√	X	-	-		12
Sukoriyanto Saputro	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		16
Nobiru Adachi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		1
Keterangan: √ : Hadir X : Absen												

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan/atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* (apabila ada).

Dengan demikian penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris PT Bank Mutiara Tbk pada tahun 2014 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

(7) Penilaian (Assessment) Kinerja Dewan Komisaris

Pihak yang melakukan *assessment* terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah pemegang saham (*shareholder*) :

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- Proses Pelaksanaan *Assessment*

Tahapan proses untuk menilai kinerja Dewan Komisaris dilakukan langsung oleh pemegang saham (*shareholder*) mayoritas :

- Periode sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014, masih dalam penanganan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Periode sejak tanggal 20 Nopember 2014, telah diambil alih oleh J Trust Co., Ltd.

- Kriteria (Indikator) Kinerja

Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah *Key Performance Indicator* (KPI) yang disusun dan dinilai langsung oleh pemegang saham (*shareholder*) mayoritas.

(8) Program Pelatihan Dewan Komisaris

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, selama tahun 2014 anggota Dewan Komisaris PT Bank Mutiara Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

Nama	Periode Menjabat	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
Sigid Moerkardjono (Wakil Komisaris Utama-Independen / Komisaris Utama-Independen)	1 Januari s/d 31 Desember 2014	Workshop "Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) & Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)"	BSMR	Jakarta Tanggal 11-12 Desember 2014
Sukoriyanto Saputro (Komisaris)	4 Juni s/d 30 Desember 2014	FORUM "KEY RISK MANAGEMENT CHALLENGES IN 2015 "PREPARING FOR ASIA ECONOMIC COMMUNITY - WAYS STRENGTHEN BANK COMPETIVENESS YET SAFEGUARDING BANKS FROM RISK"	BARA	PADMA RESORT LEGIAN BALI Tanggal 27-28 Nopember 2014
Nobiru Adachi (Komisaris / Komisaris Utama)	20 Nopember s/d 31 Desember 2014	-	-	-

(9) Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada Rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris. Berikut ringkasan hasil rekomendasi serta masukan penting Dewan Komisaris selama tahun 2014 diantaranya :

- Meningkatkan kualitas pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank (*self assessment*) dengan keterlibatan aktif Divisi/Unit Kerja terkait secara optimal agar dapat diperoleh penilaian yang lebih obyektif dengan tidak

- mengabaikan *progress* upaya perbaikan yang telah dilakukan, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat ditetapkan secara tepat dan efektif dalam memitigasi risiko.
2. Agar restrukturisasi kredit debitur bermasalah dilakukan secara tepat sehingga bisa memperbaiki kolektibilitas portofolio kredit dan pendapatan bunga Bank Mutiara (*once and for all solution*), dan bukan hanya bersifat *temporary solution*.
 3. Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) perlu ditingkatkan dan Internal Audit Division ditugaskan untuk mengecek pelaksanaannya.
 4. Sebagai upaya mitigasi terhadap Risiko Likuiditas agar dilakukan optimalisasi yang produktif dan *profitable* atas *idle-fund* yang ada saat ini.
 5. Berkaitan dengan mitigasi risiko kredit agar disusun/disiapkan (apabila belum ada atau belum dilakukan), antara lain :
 - *Template* Nota Analisa Kredit (NAK) untuk berbagai segmen yang relevan.
 - Sistem *Rating & Scoring* untuk berbagai Segmen Kredit.
 - *Template* untuk melakukan monitoring berbagai segmen kredit yang merupakan bagian dari portofolio Bank.
 - Pengelolaan portofolio kredit Bank untuk menjaga keseimbangan *exposure* pada berbagai segmen, membatasi *exposure* kredit pada sektor industri tertentu, wilayah kerja tertentu dan *group* tertentu.
 - Sistem penagihan untuk kredit kecil yang efektif dan sistem penanggulangan kredit bermasalah pada segmen kredit komersial.
 - Prosedur *Stress-Testing* termasuk mengusulkan skenario *Stress-Testing* yang akan digunakan.
 6. Mengingat Bank-bank lain sekelas Bank Mutiara mempunyai angka efisiensi yang lebih baik, Manajemen kembali diingatkan masalah perlunya terus dilakukan upaya dan langkah-langkah efisiensi, karena tekanan biaya yang semakin besar diperlukan prioritas dalam mengeluarkan biaya agar diperoleh margin laba yang lebih besar.
 7. Dalam pengembangan Kredit Konsumer (*Micro Banking*) agar diperhatikan *Risk Model Credit, Business Product* dan *Business Process*. Mengingat kondisi SDM saat ini lebih baik menggunakan tenaga *outsourcing* untuk *Sales* dan *Collection*.
 8. Memastikan Manajemen telah melakukan penerapan Manajemen Risiko secara memadai meliputi kecukupan infrastruktur dan efektifitas pelaksanaan peran unit Manajemen Risiko, sesuai aktifitas Bank dan perkembangannya termasuk peningkatan budaya sadar risiko pada setiap unit bisnis (*risk taker*).
 9. Memastikan bahwa Manajemen telah berupaya mengantisipasi risiko Kepatuhan secara efektif melalui peningkatan peran fungsi unit Kepatuhan secara *ex-ante* pada setiap proses pengembangan aktivitas bisnis Bank.
 10. Agar secara periodik (bulanan) melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai rencana tindak lanjut Manajemen dan realisasinya dalam melakukan pembenahan internal di bidang TI dengan skala prioritas untuk mendukung kelancaran dan keamanan operasional termasuk pengembangan bisnis Bank.

2.4. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam operasional, pengembangan bisnis dan pengelolaan risiko Bank secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank (*prudential banking principle*) untuk meningkatkan *shareholders value* serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, baik yang diterbitkan oleh Regulator perbankan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Lembaga Pasar Modal (Bursa Efek Indonesia), dan/atau otoritas lainnya yang berwenang.

(1) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Periode per 31 Desember 2014 jumlah anggota Direksi terdiri dari 5 (lima) orang yang salah satunya sebagai Direktur Utama dan sebagai Direktur Kepatuhan, yang secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Bank untuk :

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
2. Direksi berkewajiban memiliki itikad baik dan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi berkewajiban menjalankan prinsip-prinsip/asas *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Direksi berkewajiban menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip/asas GCG, Direksi wajib membentuk komite dibawahnya seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Human Resources;
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan;
7. Direksi berkewajiban mengungkapkan kepada pegawai tentang kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
8. Direksi berkewajiban menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, pemegang saham dan pihak regulator;
9. Direksi berkewajiban memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, paling kurang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat;
10. Direksi berkewajiban menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*). Penyampaian rencana korporasi dan penyusunan/penyampaian rencana bisnis berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
11. Direksi harus menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah;
12. Direksi berkewajiban membuat dan memelihara daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus yang berisi Daftar Kepemilikan Saham yang dimiliki oleh Direksi dan Komisaris termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain (bila ada);

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

13. Direksi berkewajiban mengkonsultasikan pemberian kredit diatas jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris;
14. Dalam hubungannya dengan nomor 13 di atas, Direksi harus meyakinkan bahwa pemberian kredit tidak dipecah menjadi nilai yang lebih kecil dibawah ketentuan pemberian kredit yang harus dikonsultasikan;
15. Menetapkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Kerja Bank;
16. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan dan rencana lain yang berhubungan dengan usaha Bank. Rencana tersebut harus diberikan kepada Komisaris dan Pemegang saham untuk disahkan dalam RUPS dan dikomunikasikan kepada segenap pekerja Bank;

(2) Jumlah dan Komposisi Direksi

Mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia:

- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.

Pada periode 2014, jumlah dan komposisi Direksi PT Bank Mutiara Tbk beberapa kali mengalami perubahan sebagai berikut :

- Jumlah dan komposisi Direksi per 26 Februari 2014 s/d 3 Juni 2014 sesuai kriteria Bank Indonesia di atas, sebagai berikut:
 - ✓ Anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 2 (dua) orang Direktur.
 - ✓ Anggota Direksi yang berdomisili di Indonesia sebanyak 4 (empat) orang dari 4 (empat) orang.

Jumlah dan susunan anggota Direksi tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan	
				RUPS	BI/OJK
1.	Sukoriyanto Saputro	Direktur Utama	Indonesia	RUPSLB tgl. 26 Feb 2014	21 Maret 2013
2.	Ahmad Fajar	Direktur	Indonesia	RUPSLB tgl. 26 Feb 2014	12 Maret 2009
3.	Erwin Prasetyo	Direktur	Indonesia	RUPSLB tgl. 26 Feb 2014	4 Juni 2009
4.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Direktur	Indonesia	RUPSLB tgl. 26 Feb 2014	22 April 2014

- Jumlah dan komposisi Direksi per 4 Juni 2014 s/d 19 Nopember 2014 sesuai kriteria Bank Indonesia di atas, sebagai berikut:
 - ✓ Anggota Direksi sebanyak 4 (empat) orang, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama (efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK), 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan, dan 2 (dua) orang Direktur.
 - ✓ Anggota Direksi yang berdomisili di Indonesia sebanyak 4 (empat) orang dari 4 (empat) orang.

Jumlah dan susunan anggota Direksi tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan	
				RUPS	BI/OJK
1.	Gandhi Ganda Putra Ismail	Direktur Utama	Indonesia	RUPS tgl 4 Juni 2014	*)
2.	Ahmad Fajar	Direktur	Indonesia	RUPS tgl 4 Juni 2014	12 Maret 2009
3.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Direktur	Indonesia	RUPS tgl 4 Juni 2014	22 April 2014
4.	Laksmi Musikaningrat	Direktur	Indonesia	RUPS tgl 4 Juni 2014	29 September 2014

*) Pengangkatan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- Jumlah dan komposisi Direksi per 20 Nopember 2014 s/d 29 Desember 2014 sesuai kriteria Bank Indonesia di atas, sebagai berikut:
 - ✓ Anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang, termasuk 1 (satu) orang sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama, dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.
 - ✓ Anggota Direksi yang berdomisili di Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang dari 3 (tiga) orang.

Jumlah dan susunan anggota Direksi tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	BI/OJK
1.	Ahmad Fajar	Direktur (Plt. Direktur Utama)	Indonesia	RUPSLB tgl 20 Nov 2014	12 Maret 2009
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Direktur	Indonesia	RUPSLB tgl 20 Nov 2014	22 April 2014
3.	Laksmi Mustikaningrat	Direktur	Indonesia	RUPSLB tgl 20 Nov 2014	29 September 2014

- Jumlah dan komposisi Direksi per 30 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sesuai kriteria Bank Indonesia di atas, sebagai berikut:
 - ✓ Anggota Direksi sebanyak 5 (lima) orang, termasuk 1 (satu) orang Direktur Utama, 2 (dua) orang Direktur (efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK), dan 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan.
 - ✓ Anggota Direksi yang berdomisili di Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang dari 5 (lima) orang.

Jumlah dan susunan anggota Direksi tersebut adalah:

No	Nama	Jabatan	Domisili	Tanggal Pengangkatan & Persetujuan RUPS	BI/OJK
1.	Ahmad Fajar	Direktur Direktur Utama	Indonesia	- RDK LPS/ Nov 2008 *) - RUPSLB tgl. 30 Des 2014	12 Maret 2009 **)
2.	Felix Istyono Hartadi Tiono	Direktur	Indonesia	- RDK/RUPS LPS tgl. 26 Feb 2014	22 April 2014
3.	Laksmi Mustikaningrat	Direktur	Indonesia	- RDK/RUPS LPS tgl. 4 Juni 2014	29 September 2014
4.	Yoshio Hirako	Direktur	Jepang	- RUPSLB tgl. 30 Des 2014	**)
5.	Eihito Tamura	Direktur	Jepang	- RUPSLB tgl. 30 Des 2014	**)

*) RDK (Rapat Dewan Komisiner) dianggap sebagai RUPS dalam pengangkatan sebagai Direktur

***) Sedang dalam proses *Fit & Proper Test* di OJK. Pengangkatan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) Oleh OJK dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pada periode 2014, anggota Direksi tidak ada yang memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu anggota Direksi tidak ada yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Adapun ringkasan profil anggota Direksi sebagai berikut :

a. Direktur Utama : Ahmad Fajar

Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 22 Januari 1966. Memperoleh gelar Sarjana dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1988, dan gelar Magister Manajemen tahun 2000 di Universitas Padjajaran. Memulai karir di Perbankan pada tahun 1990 sebagai Tata Usaha Kantor Pusat, dan pada tahun 2000 sebagai *Manager Senior Officer - Treasury Liquidity Management Funding* di Bank Bumi Daya. Tahun 2000-2001 sebagai *Manager Senior Officer - Treasury & Capital Market*

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

Portfolio Investment di Bank Mandiri. Tahun 2001-2003 sebagai Manager Profesional Staff - Treasury Management, Treasury Product/Sales Management di Bank Mandiri. Tahun 2003-2004 Srm : TL - *Portfolio Investment Mgr - Treasury* Bank Mandiri, tahun 2004-2008 VP : *DH-Debt & Capital Market - Treasury Debt & Capital Market* di Bank Mandiri. Pada bulan Nopember 2008 dipercaya sebagai Direktur PT Bank Mutiara Tbk. dan sejak tanggal 30 Desember 2014 dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mutiara Tbk.

b. Direktur Kepatuhan : Felix Istyono Hartadi Tiono

Tempat/tanggal lahir : Surakarta, 08 Februari 1959. Lulus Universitas Katholik Parahyangan, Bandung tahun 1985 jurusan Fakultas Hukum, dan tahun 2006 lulus dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta dengan gelar MM/MBA. Memulai karir pada tahun 1986-1990 di PT Wellwood Sejahtera Ekapratama sebagai Legal Officer; tahun 1990 bertugas di PT Bank Rabobank International Indonesia sebagai Legal Officer; selanjutnya tahun 1992 bertugas di PT Bank Rabobank International Indonesia sebagai Manager Legal Affairs; tahun 1994 menjabat di PT Bank Rabobank International Indonesia sebagai Manager Credit Control & Support; tahun 1998 di PT Bank Rabobank International sebagai Manager Credit Risk Control; selanjutnya tahun 2000 masih di PT Bank Rabobank International Indonesia menjabat Direktur Kepatuhan; tahun 2006 berkarir di PT Bank DBS Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan; tahun 2009 bertugas di Bank HSBC Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan; dari tahun 2014 sampai dengan sekarang bertugas di PT Bank Mutiara Tbk sebagai Direktur Kepatuhan dan Legal.

c. Direktur : Laksmi Mustikaningrat

Tempat/tanggal lahir : Blitar, 1 November 1961. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Airlangga tahun 1985. Memiliki pengalaman di dunia perbankan selama 28 tahun, khususnya bidang kredit Retail, Consumer, Mortgage, dan Micro Banking. Pernah berkecimpung di dunia pendidikan sebagai Dosen tidak tetap di Universitas Airlangga pada tahun 1985. Berkarir di PT Bank Niaga sejak tahun 1986, dan pada bulan Desember 2006 ditunjuk sebagai Board of Senior Executive membidangi Mortgage Banking serta Retail Sales & Services sebelum masa transisi PT Bank Niaga Tbk menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk. Setelah masa transisi, ditunjuk sebagai EVP Consumer Finance hingga Juli 2012. Kemudian aktif sebagai Konsultan & Senior Advisor bagi pembentukan APEX Islamic Micro Finance Institution. Pada bulan Maret 2014 ditunjuk menjadi Executive Vice President (EVP) Micro & Consumer Business di PT Bank Mutiara Tbk, dan melalui RUPS Tahunan PT Bank Mutiara Tbk tanggal 4 Juni 2014 ditunjuk sebagai Direktur PT Bank Mutiara Tbk.

d. Direktur : Yoshio Hirako

Lelaki usia 44 tahun. Lulusan University of Tokyo, Faculty of Law, Bachelor of Laws tahun 1994 ini memiliki pengalaman 19 tahun di industri perbankan serta berpengalaman pada pendirian 3 bank baru. Sejak bergabung di AEON Bank, Ltd. Tokyo yang merupakan anak usaha retailer raksasa Jepang, AEON tahun 2007 sebagai Executive Officer, General Manager of Corporate Planning Department hingga Senior Director, Head of Sales and Marketing Division pada tahun 2013, selalu mengedepankan kolaborasi antara bisnis retail dan bisnis perbankan. Kemudian tahun 2013 bergabung dengan ASUKA Holdings Inc. Tokyo sebagai

Representative Director dan COO, serta MONEY DESIGN Co. Ltd. Tokyo sebagai Representative Director dan Vice President. Sejak tanggal 30 Desember 2014 dipercaya menjadi Direktur PT Bank Mutiara Tbk.

e. Direktur : Eihito Tamura

Lelaki usia 43 tahun, lahir tanggal 24 Juni 1971. Lulusan University of Tokyo, Faculty of Engineering, Department of Systems Innovation tahun 1996 ini tidak asing dengan berbagai solusi pembayaran dan jaringan di dunia. Memiliki pengalaman tiga tahun di bidang konsultasi marketing dan strategi, selain berpengalaman lebih dari tujuh tahun pada bisnis perbankan dan sekuritas, serta setahun mendirikan Bank dari awal. Memulai karir di Sanwa Bank, Limited., Tokyo sebagai Associate pada tahun 1996 hingga pertama kali menduduki posisi Eksekutif sebagai Direktur Eksekutif di Cecile Co., Ltd. pada tahun 2006. Kemudian menjabat CEO pada Bitcash Inc., Tokyo sebelum menduduki posisi CEO dan President di Wakatam Inc., Tokyo pada tahun 2011. Sejak tanggal 30 Desember 2014 dipercaya menjadi Direktur PT Bank Mutiara Tbk.

(3) Kriteria Direksi

- Dalam rangka mendapatkan hasil yang objektif serta independen maka seluruh pengangkatan dan/atau pergantian anggota Direksi harus disetujui oleh pemegang saham melalui RUPS (Rapat Dewan Komisiner/RDK sebagai RUPS saat perseroan masih ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) dengan kriteria utama mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia. Sampai dengan periode tanggal 31 Desember 2014 belum seluruh anggota Direksi telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan pemenuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pengangkatan seorang Direktur berdasarkan/memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mayoritas Anggota Direksi memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

(4) Status Independensi Direksi

- Seluruh anggota Direksi PT Bank Mutiara Tbk merupakan Direksi Independen, artinya tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak tidak independen.
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
- Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

(5) **Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga Direksi**

Anggota Direksi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang diperbaharui secara berkala yang terkait hal-hal meliputi:

1. Anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai $\geq 5\%$ (lima persen) dari modal disetor pada PT Bank Mutiara Tbk maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).
2. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
3. Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham pengendali.

- **Transparansi Hubungan Keluarga**

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Ahmad Fajar		√		√		√
2.	Felix I. Hartadi Tiono		√		√		√
3.	Laksmi Mustikaningrat		√		√		√
4.	Yoshio Hirako		√		√		√
5.	Eihito Tamura		√		√		√

- **Transparansi Hubungan Keuangan**

No	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Lainnya	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1.	Ahmad Fajar		√		√		√
2.	Felix I. Hartadi Tiono		√		√		√
3.	Laksmi Mustikaningrat		√		√		√
4.	Yoshio Hirako		√		√		√
5.	Eihito Tamura		√		√		√

- **Transparansi Kepemilikan Saham**

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	%
1.	Ahmad Fajar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
2.	Felix I. Hartadi Tiono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
3.	Laksmi Mustikaningrat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
4.	Yoshio Hirako	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
5.	Eihito Tamura	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

(6) **Rapat Direksi**

Selama tahun 2014 telah diselenggarakan 40 (empat puluh) kali rapat berkala yang dilaksanakan Direksi, baik rapat Dewan Direksi maupun rapat Dewan Direksi dengan Kepala Divisi dan lainnya, membahas segenap persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan.

Frekuensi tingkat kehadiran rapat anggota Direksi pada tahun 2014 sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

No.	Nama Direksi	Periode Menjabat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Sukoriyanto Saputro (Direktur Utama)	1 Januari s/d 4 Juni 2014	20	50%
2	Ahmad Fajar (Direktur & Direktur Utama)	1 Januari s/d 29 Desember 2014 & 30 Desember s/d 31 Desember 2014	38	95%
3	Felix I. Hartadi Tiono (Direktur)	26 Februari s/d 31 Desember 2014	31	77%
4	Laksmi Mustikaningrat (Direktur)	4 Juni s/d 31 Desember 2014	16	40%
5	Erwin Prasetyo (Direktur)	1 Januari s/d 4 Juni 2014	17	42%
6	Benny Purnomo (Direktur)	1 Januari s/d 26 Februari 2014	6	15%
7	Budhiyono Budoyo (Direktur)	1 Januari s/d 26 Februari 2014	5	12%
8	Yoshio Hirako (Direktur)	30 Desember s/d 31 Desember 2014	0	0%
9	Eihito Tamura (Direktur)	30 Desember s/d 31 Desember 2014	0	0%

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pencantuman *dissenting opinions* (apabila ada).

(7) Penilaian (*Assessment*) Kinerja Direksi

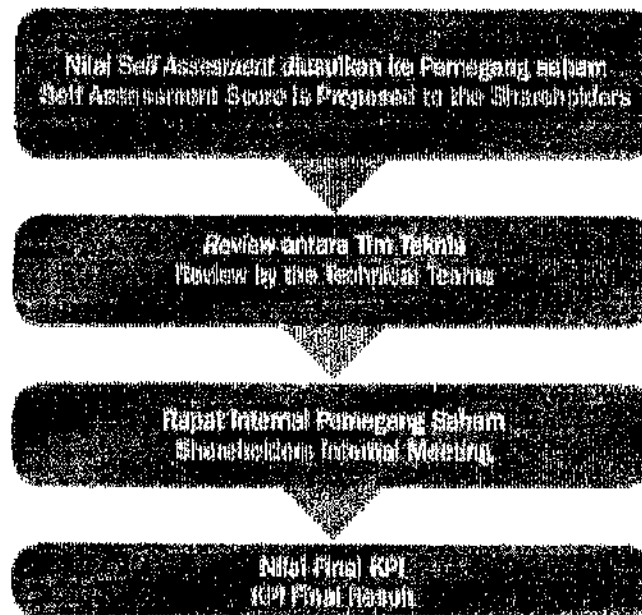
Pihak yang melakukan *assessment* terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan kemudian disetujui oleh pemegang saham (*shareholder*), sampai dengan periode 20 Nopember 2014 masih dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

- Proses Pelaksanaan *Assessment*

Tahapan proses untuk menilai kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut:

- Tahap 1
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan melalui RUPS
- Tahap 2
Menyusun *Draft Key Performance Indicator* (KPI)
- Tahap 3
KPI di-*review* oleh Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi
- Tahap 4
Draft KPI diusulkan kepada Pemegang Saham (LPS)
- Tahap 5
Pembahasan KPI antara Tim Teknis PT Bank Mutiara Tbk dan Tim Teknis Pemegang Saham

- Tahap 6
Penandatanganan bersama KPI antara PT Bank Mutiara Tbk dengan Pemegang Saham
- Kriteria (Indikator) Kinerja
 - Proses penyusunan *Key Performance Indicator (KPI)* Direksi PT Bank Mutiara Tbk menerapkan metode *Balanced Scorecard (BSC)*. Pengukuran kinerja menggunakan empat perspektif, yaitu: Keuangan, Internal Bisnis, *Customer*, *Learning & Growth*.
 - Dengan menerapkan metode BSC ini yang diukur bukan hanya target keuangan tetapi juga proses. PT Bank Mutiara Tbk meyakini bahwa dengan metode BSC dapat memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi serta dapat mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis.
 - Setelah KPI secara *bankwide/direktorat* ditandatangani, setiap bulannya PT Bank Mutiara Tbk selalu memonitor pencapaian kinerja terhadap target sesuai KPI.
 - Setiap akhir tahun buku KPI tersebut akan dievaluasi oleh Pemegang saham untuk mengukur kinerja Direksi, adapun tahapan dalam mengevaluasi nilai KPI pada akhir tahun adalah sebagai berikut:



Catatan : Penilaian (*Assessment*) Kinerja Direksi diatas merupakan penilaian yang dijalankan selama PT Bank Mutiara Tbk. masih ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Pemegang Saham Mayoritas sampai dengan periode tanggal 20 Nopember 2014, sedangkan setelah pengambilalihan saham PT Bank Mutiara Tbk. oleh J.Trust Co.,Ltd. penilaian akan ditentukan kemudian oleh Pemegang Saham baru.

(8) Program Pelatihan Direksi

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Direksi, selama tahun 2014 beberapa anggota Direksi PT Bank Mutiara Tbk telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar, antara lain :

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

No.	Nama	Periode Menjabat	Pelatihan/ Workshop/ Konferensi/ Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
1	Sukoriyanto Saputro (Direktur Utama)	1 Januari s/d 4 Juni 2014	THE 3 rd INTERNATIONAL WORKSHOP ON INTEGRATED PROTECTION SCHEME"	LPS	Denpasar Bali Tang gal, 12-15 Maret 2014
2	Ahmad Fajar (Direktur)	1 Januari s/d 29 Desember 2014	FORUM "KEY RISK MANAGEMENT CHALLENGES IN 2015 "PREPARING FOR ASIA ECONOMIC COMMUNITY -WAYS STRENGTHEN BANK COMPETIVENESS YET SAFEGUARDING BANKS FROM RISK"	BARA	PADMA RESORT LEGIAN BALI Tanggal 27-28 Nopember 2014
	Ahmad Fajar (Direktur Utama)	30 Desember s/d 31 Desember 2014	--	--	--
3	Felix I. Hartadi Tiono (Direktur)	26 Februari s/d 31 Desember 2014	FORUM "KEY RISK MANAGEMENT CHALLENGES IN 2015 "PREPARING FOR ASIA ECONOMIC COMMUNITY -WAYS STRENGTHEN BANK COMPETIVENESS YET SAFEGUARDING BANKS FROM RISK"	BARA	PADMA RESORT LEGIAN BALI Tanggal 27-28 Nopember 2014
4	Laksmi Mustikaningrat (Direktur)	4 Juni s/d 31 Desember 2014	UJI KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 5	LSPP	WISMA BAPINDO JKT Tanggal, 28 Juni 2014

2.5. Kepemilikan Saham

Sesuai yang tercantum dalam Akta Anggaran Dasar (AD) terakhir yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.51 tanggal 20 Nopember 2014, maka Kepemilikan saham PT Bank Mutiara Tbk saat ini menjadi sebagai berikut:

No.	Pemilik	Lembar	Nilai nominal/lembar	Persentase
1.	J Trust Co., Ltd.	793.200.325.675.265 (saham seri A)	Rp. 0,01	99,000%
2.	LPS	7.983.774.324.735 (saham seri A)	Rp. 0,01	0,996%
3.	Pemegang Saham Lama	28.350.177.035 (saham seri B)	Rp. 78,00	0,004%

Berdasarkan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mutiara Tbk tanggal 20 Nopember 2014, telah memberikan persetujuan atas pengambilalihan saham PT Bank Mutiara Tbk oleh J Trust Co., Ltd. dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- a. Pengalihan sebesar 99,996% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam persen) saham perseroan atau sebanyak 801.184.100.000.000 (delapan ratus satu triliun seratus delapan puluh empat miliar seratus juta) saham Seri A milik LPS kepada J Trust Co., Ltd. yang dilakukan dengan tahapan:
 - i. Sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) saham perseroan atau sebanyak 793.200.325.675.265 (tujuh ratus sembilan puluh tiga triliun dua ratus miliar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh lima) lembar saham Seri A akan dialihkan kepada J Trust segera setelah ditutupnya RUPS;
 - ii. Sebesar 0,996% (nol koma sembilan sembilan enam persen) saham perseroan atau sebanyak 7.983.774.324.735 (tujuh triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) lembar saham Seri A Saham Biasa akan dialihkan oleh LPS kepada J-Trust atau pihak yang ditunjuk oleh J-Trust, yang akan dilakukan setelah dipenuhinya kondisi tertentu sesuai dengan amandemen CSPA, sehingga setelah pengalihan tersebut kepemilikan saham J-Trust sesuai dengan Surat OJK Nomor SR-187/D.03/2014 tanggal 10 (sepuluh) Nopember 2014 (dua ribu empat belas) perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) Terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir PT BANK MUTIARA Tbk.
- b. Pengalihan sebesar 0,004% (nol koma nol nol empat persen) saham perseroan atau sebanyak 28.350.177.035 saham (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh lima) Seri B milik Pemegang Saham Lama (Masyarakat) kepada J Trust yang akan dilakukan setelah dipenuhinya kondisi tertentu.

Sebagai konsekuensi dari butir (a). di atas, mengacu pada UU PT, LPS menjadi pemegang saham minoritas dengan kepemilikan sejumlah 7.983.774.324.735 (tujuh triliun sembilan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) lembar saham yang setara dengan 0,996% (nol koma sembilan sembilan enam persen) sehingga LPS menjadi pemegang saham biasa yang tidak lagi memiliki preferensi sebagaimana hak-hak yang melekat pada saham preferen.

2.6. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transaksi yang menyebabkan benturan/perbedaan kepentingan antara Bank dengan pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank, maka bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan/keputusan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari dalam melakukan hubungan bisnis dengan nasabah, rekanan maupun dengan rekan sekerja, serta menjaga kepentingan publik, PT Bank Mutiara Tbk senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk buku pedoman Etika Korporasi PT Bank Mutiara Tbk sebagai standar etika dan perilaku yang wajib dijadikan pedoman oleh seluruh anggota Bank (Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Tetap/Kontrak).

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

Buku pedoman Etika Korporasi PT Bank Mutiara Tbk telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas dengan para nasabah, rekanan atau antara sesama anggota Bank, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Selama tahun 2014 ini **tidak ada** transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut :

No	Nama dan jabatan yg memiliki benturan kepentingan	Nama dan jabatan pengambil keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

2.7. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai $\geq 5\%$ (*lima perseratus*) dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank tersebut, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Selama tahun 2014 ini **tidak ada** kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai $\geq 5\%$ (*lima perseratus*) dari modal disetor.

2.8. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2014 ini **tidak ada** hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

2.9. *Shares option* yang Dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam RUPS dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Pengungkapan mengenai *shares option* minimal mencakup :

- Kebijakan dalam pemberian *shares option*.
- Jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *shares option*.
- Jumlah *shares option* yang diberikan.
- Jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan.
- Harga *opsi* yang diberikan.
- Jangka waktu berlakunya eksekusi *share option*.

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

Selama tahun 2014 ini tidak ada *shares option* dimaksud untuk huruf b), c), d), e), dan f) sebagaimana tabel berikut :

Keterangan /Nama		Jumlah Saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
			Yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	(nama)					
Direksi	(nama)					
Pejabat Eksekutif	(total)					
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

2.10. Buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank

Buy back shares atau *buy back* obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tatacara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi minimal mencakup :

- a. Kebijakan dalam melakukan *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.
- b. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali.
- c. Harga pembelian kembali perlembar saham dan/atau obligasi.
- d. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.

Selama tahun 2014 ini tidak ada *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank yang terjadi di PT Bank Mutiara Tbk.

2.11. Remunerasi dan Fasilitas Lain

A. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Antara lain meliputi:

- a. **Remunerasi** dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, berupa tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya.
- b. **Fasilitas lain** dalam bentuk natura/non natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

2. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dimaksud, meliputi:

- a. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan RUPS Bank.
- b. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, minimal mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain dimaksud, untuk tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :

**Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun *)			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Dalam Rupiah	Orang	Dalam Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	2.953.617.000	5	5.461.721.318
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang **):				
a. Dapat dimiliki (purna jabatan)	4	657.360.000	5	1.077.679.600
b. Tidak dapat dimiliki (asuransi D & O kendaraan)		617.575.000		1.235.175.000
Total	4	4.228.552.000	5	7.774.575.918
Keterangan:				
*) Sebelum dipotong pajak				
**) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah				

- c. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan untuk tahun 2014 sebagai berikut:

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp.2 miliar	-	-
Di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	3	-
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1miliar	2	4
Rp.500 juta ke bawah	-	-
Keterangan:		
*) Yang diterima secara tunai sebelum dipotong pajak		

B. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

- a. **Gaji** adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- b. **Rasio gaji tertinggi dan terendah**, dalam skala perbandingan berikut :
 - a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah.
 - b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- c) Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah.
- d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Gaji yang diperbandingkan dalam ratio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan. Pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT Bank Mutiara Tbk pada tahun 2014 sebagai berikut:

Jenis Rasio	Besarnya Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	19 x
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,11 x
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,39 x
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,16 x

BAB III

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE PT BANK MUTIARA TBK

Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, maka Dewan Komisaris PT Bank Mutiara Tbk telah membentuk Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris yang dipersyaratkan dalam ketentuan *Good Corporate Governance* dengan susunan komite-komite tersebut adalah sebagai berikut :

- Komite Audit (*Audit Committee*)
- Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
- Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration and Nomination Committee*)

Semua komite-komite dibawah Dewan Komisaris diketuai oleh Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau bentuk hubungan lain dengan Bank yang bisa mempengaruhi independensinya.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite-komite dibawah Dewan Komisaris PT Bank Mutiara Tbk mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite (*Committee Charter*) yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia terutama Peraturan Bank Indonesia/Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum dan *best practices* yang ditinjau ulang secara berkala.

3.1. Komite Audit (*Audit Committee*)

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

a. Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

Komite Audit memiliki Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi, syarat keanggotaan, kewenangan, pelaksanaan rapat, masa tugas dan honorarium. Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*) secara periodik perlu dinilai dan dievaluasi kecukupannya oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Audit dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Selama tahun 2014 terdapat 2 (dua) kali perubahan struktur dan keanggotaan Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.12/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014, struktur dan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Sigid Moerkardjono (Komisaris Utama Independen) | : Ketua merangkap Anggota |
| 2. Eko B. Supriyanto (Komisaris Independen) | : Anggota |
| 3. Sukoriyanto Saputro (Komisaris) * | : Anggota |
| 4. Didik Madiyono (Komisaris) * | : Anggota |

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

5. Yusuf Subianto (Pihak Independen) : Anggota/Sekretaris
6. Darmawan Effendi (Pihak Independen) : Anggota

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.08.08/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 08 September 2014, maka struktur dan keanggotaan Komite Audit diubah menjadi sebagai berikut:

1. Sigid Moerkardjono (Komisaris Utama Independen) : Ketua merangkap Anggota
2. Eko B. Supriyanto (Komisaris Independen) : Anggota
3. Sukoriyanto Saputro (Komisaris) *) : Anggota
4. Didik Madiyono (Komisaris) *) : Anggota
5. Sudarmadji Herry Sutrisno (Pihak Independen) : Anggota/Sekretaris
6. Haryanto (Pihak Independen) : Anggota
7. Darmawan Effendi (Pihak Independen) **) : Anggota

*) Belum *Fit & Proper Test*

**) Keanggotaan berakhir pada tanggal 20 September 2014

Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan anggotanya adalah 1 (satu) orang Komisaris Independen lainnya, 2 (dua) Komisaris lainnya (efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK), 1 (satu) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum bisnis dan perbankan. Pengangkatan nama-nama Ketua dan Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

c. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Audit

Secara umum, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (limapuluh perseratus) dari jumlah Komite Audit.
- Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak, moral yang baik, kemampuan pengetahuan dan pengalaman perbankan yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan bank.
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha bank.
- Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.
- Menjaga informasi perusahaan yang bersifat rahasia.

Secara lebih khusus, kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja Anggota Komite Audit PT Bank Mutiara Tbk dapat diuraikan berikut ini:

- **Sigid Moerkardjono**, sebagai Ketua Komite Audit

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Memulai karir perbankan sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1999 di Bank dengan berbagai penugasan yaitu Credit Analyst, Branch Manager, Regional Manager (1976-1999).

Pada *level* atas (strategis) banyak menjalani karir di bidang compliance, audit committee, dan risk monitoring committee, yaitu sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Niaga Tbk. (1999-2000), Komisaris dan juga sebagai Ketua Komite Audit/

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

anggota Komite Pemantau Risiko/anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Niaga Tbk. (2000-2007), Wakil Komisaris Utama dan juga sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko/anggota Komite Audit/anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Niaga Tbk., Anggota Komite Audit dan anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank BTPN (2007-2011).

- **Eko B. Supriyanto**, sebagai Anggota Komite Audit

Bidang Manajemen Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta. Memulai karir sebagai Direktur Biro Riset Infobank dan Penanggung Jawab/Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Infobank sejak tahun 2000. Menjalani berbagai karir dalam bidang riset, konsultan komunikasi, kehumasan, antara lain PT Indonesia Media Network (Direktur), Pengurus Pusat ISEI (Humas), Forum Kebijakan Moneter dan Perbankan (Anggota), Proyek Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (Ketua Riset), Consumer Banking Mapping terhadap 15 Bank Terbesar (Ketua Riset), Consumer Loan Mapping terhadap 15 Bank Terbesar (Ketua Riset), Credit Card Mapping terhadap 10 Bank Penerbit Kartu Kredit (Ketua Riset).

- **Sukoriyanto Saputro**, sebagai Anggota Komite Audit

Sarjana Argonomi Institute Pertanian Bogor yang lulus pada tahun 1980, memulai karir perbankan sejak tahun 1981 sampai dengan 1999 di Bank Exim dengan berbagai penugasan yaitu pegawai pimpinan kredit, kepala seksi kredit, kepala bagian kredit, wakil kepala cabang, Kepala Cabang (1981-1999).

Selanjutnya beliau melanjutkan karirnya di Bank Mandiri dari tahun 1999-2013 dengan jabatan terakhir sebagai Group Head Corporate Secretary. Kemudian beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Bank Mutiara Tbk pada bulan Januari 2013 s.d Juni 2014.

- **Didik Madiyono**, sebagai Anggota Komite Audit

Sarjana Ekonomi Universitas Gadjah Mada jurusan Ekonomi, Yogyakarta pada tahun 1989 ini mengawali karirnya di Bank Duta pada tahun 1989 s.d 1990. Kemudian melanjutkan karirnya di Bank Indonesia dari tahun 1991 s.d 2009 dengan jabatan terakhir sebagai Peneliti Bank Senior pada Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Lalu pada Januari 2010, beliau berkarir di Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Kepala Divisi Penanganan Klaim, dan saat ini sudah menjabat sebagai Direktur Group Pelaksanaan Resolusi Bank. Selanjutnya, beliau dipercaya untuk menjadi Komisaris di PT Bank Mutiara pada bulan Juni - November 2014. Beliau telah mengikuti berbagai pelatihan profesi dalam bidang perbankan di tingkat lokal dan internasional, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, OJK, PPATK, IADI dan lain-lain.

- **Darmawan Effendi**, sebagai Anggota Komite Audit

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1981. Memulai karir perbankan sejak tahun 1981 di Bapindo sampai dengan tahun 1999, kemudian di Bank Mandiri sampai tahun 2008. Berbagai pelatihan mengenai perbankan, hukum bisnis, manajemen dan *leadership* telah diikuti baik di dalam maupun di luar negeri.

- **Haryanto**, sebagai Anggota Komite Audit

Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada tahun 1981. Karir perbankan dimulai tahun 1974 di Bank Niaga sampai dengan tahun 1977 dan tahun 1980 di Bank Pembangunan Indonesia sampai dengan tahun 1999, kemudian di Bank Mandiri sampai dengan tahun 2000, selanjutnya di Bank BTN sejak tahun

2005 sampai dengan tahun 2013. Yang bersangkutan telah mengikuti berbagai pelatihan profesi dalam bidang perbankan di tingkat lokal dan internasional, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Bapindo, Alpia, PDCP Manilla Phillipina.

- Sudarmadji Herry Sutrisno, sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Audit. Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada tahun 1978 dan Magister Manajemen di Institut Teknologi Bandung tahun 1996. Memulai karir sebagai Staf Asisten Direktur Keuangan PT Nurtanio (sekarang PT Dirgantara Indonesia) di Bandung tahun 1979 sampai dengan tahun 1981. Berkarir pada profesi Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik berafiliasi Internasional maupun lokal dengan obyek audit beberapa Bank Pembangunan Daerah dan Lembaga Keuangan sejak tahun 1990. Sampai sekarang aktif mengajar sebagai dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti untuk mata kuliah auditing dan sistem informasi akuntansi.

d. Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi dan integritas yang dipersyaratkan. Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan-laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris antara lain meliputi :

- 1) Membuat rincian kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 2) Melakukan pengawasan atas proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku terpenuhi.
- 3) Menelaah dan memberi *consent* atas laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan terutama yang dipublikasikan baik secara lengkap maupun *high lights* seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, apakah sudah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku serta apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh Anggota Komite Audit.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern dan mengkaji kecukupan Piagam Audit Intern.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- 6) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- 7) Melakukan penelaahan atas ketaatan dan kepatuhan bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- 8) Memberikan masukan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- 9) Memastikan bahwa semua risiko dan kontrol diperhatikan dalam laporan Audit Internal dan Auditor Eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 10) Mengawasi proses *Corporate Governance* dengan memastikan bahwa semua jajaran manajemen telah membudayakan *Corporate Governance*.
- 11) Komite Audit wajib memiliki Pedoman Kerja (*Audit Committee Charter*) yang ditelaah dan diperbaharui bilamana perlu.

f. Rapat Komite Audit

- 1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan :
 - a. Rapat/pertemuan Komite Audit dengan melibatkan Satuan Kerja Audit Intern sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
 - b. Rapat/pertemuan Komite Audit dengan Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya dihadiri oleh 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris yang bukan Anggota Komite Audit.
- 3) Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit, dan apabila Ketua Komite Audit berhalangan rapat dipimpin oleh anggota Komite lainnya yang ditunjuk dan disetujui dalam rapat komite.
- 4) Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 5) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara berdasarkan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- 6) Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 7) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Selama tahun 2014, Komite Audit telah menyelenggarakan 18 (delapan belas) kali rapat, yang terdiri dari rapat Komite Audit dengan SKAI, dengan KAP, dengan Accounting Division, dengan Legal Division, dengan Asset Recovery Division dan dengan Compliance Division.

Frekuensi tingkat kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit sebagai berikut:

Komite Audit	Rapat Dengan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Hadir Σ
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
Sigid Moerkardjono	SKAI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	KAP	√√		√√							√			5
	UKL									√				1

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

Eko B. Supriyanto	SKAI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	KAP	√√		√√								√			5
	UKL											√			1
Sukoriyanto Saputro	SKAI						x	√	√	√	√	√	√	√	6
	KAP											√			1
	UKL									√					1
Didik Madiyono	SKAI						√	√	√	√	√	√	x		5
	KAP											√			1
	UKL									x					
Yusuf Subianto	SKAI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8
	KAP	√√		√√											4
	UKL														
Darmawan Effendi	SKAI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9
	KAP	√√		√√											4
	UKL														
Haryanto	SKAI									√	√	√	√		4
	KAP										√				1
	UKL									√					1
Sudarmadji Herry Sutrisno	SKAI									√	√	√	√		4
	KAP										√				1
	UKL									√					1

Keterangan:
 √ : Hadir
 x : Absen

SKAI : Satuan Kerja Audit Intern
 KAP : Kantor Akuntan Publik
 UKL : Unit Kerja Lainnya

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Sigid Moerkardjono (Ketua/Komisaris Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2014	18	18	100%
Eko B. Supriyanto (Anggota/Komisaris Independen)	01 Januari s/d 20 Nopember 2014	17	17	100%
Sukoriyanto Saputro (Anggota/Komisaris)	09 Juni s/d 30 Desember 2014	9	8	88%
Didik Madiyono (Anggota/Komisaris)	09 Juni s/d 20 Nopember 2014	8	6	75%
Yusuf Subianto (Anggota/Pihak Independen)	01 Januari s/d 07 September 2014	12	12	100%
Darmawan Effendi (Anggota/Pihak Independen)	01 Januari s/d 20 September 2014	13	13	100%
Haryanto (Anggota/Pihak Independen)	08 September s/d 31 Desember 2014	6	6	100%
Sudarmadji Herry Sutrisno (Anggota/Pihak Independen)	08 September s/d 31 Desember 2014	6	6	100%

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

g. Program Kerja dan Realisasi Komite Audit

Program Kerja Komite Audit :

No.	Program Kerja
1	Berkoordinasi dengan SKAI untuk me-review Laporan Hasil Audit (LHA), memantau maupun mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta tindak lanjut hasil audit.
2	Me-review rencana audit KAP tahun buku 2014
3	Me-review draft final audit report akuntan publik tahun buku 2013
4	Me-review rencana audit SKAI tahun 2015
5	Berpartisipasi dalam rapat Direksi dan Komisaris
6	Me-review laporan tahunan
7	Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2013
8	Memberikan rekomendasi pemilihan/mempertahankan dan memberhentikan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris
9	Menyusun rencana kerja (<i>Work Plan</i>) Komite Audit tahun 2015
10	Me-review laporan keuangan publikasi <i>unaudited</i>

Realisasi program kerja/Pelaksanaan Tugas Komite Audit 2014

No.	Realisasi
1	Rapat bulanan sebanyak 12 kali dengan Internal Audit Division/SKAI, untuk mereviu Rencana Audit Tahunan, pelaksanaan audit, laporan hasil audit, tindak lanjut dan penyelesaian temuan audit, kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan isu penting yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
2	Rapat dengan Accounting Division dalam rangkaian pengawasan atas proses penyusunan laporan keuangan dengan menekankan agar standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku dipenuhi.
3	Rapat dengan Kantor Akuntan Publik sebanyak 5 kali, terkait dengan persiapan audit dan progress hasil audit tahun buku 2013 oleh KAP dalam rangkaian pemantauan dan evaluasi oleh Komite guna memastikan pelaksanaan audit tahun buku 2013 akan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Lalu penetapan ruang lingkup audit, time table audit, dan negosiasi honorarium atas audit laporan keuangan Bank Mutiara tahun buku 2014.
4	Rapat dengan Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan untuk mereviu pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan, dan penerapan GCG serta Laporan Pelaksanaan (<i>self assessment</i>) GCG.
5	Rapat dengan Divisi Legal untuk memastikan penanganan perkara hukum dan permasalahan hukum lainnya telah berjalan dengan baik dan dapat melindungi kepentingan Bank.
6	Rapat dengan Asset Recovery Division terkait dengan penyelesaian permasalahan NPL beberapa debitur.
7	Loan Review debitur, Laporan review kolektibilitas atas debitur yang telah dilakukan review oleh SKAI, Laporan tunggakan bunga diatas 2 bulan diluar sampling BI, dan lain-lain

Fokus Pengawasan

- a. Review Laporan Hasil Audit SKAI.
- b. Loan Review terhadap Debitur yang berpotensi dan telah menjadi bermasalah.
- c. Seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- d. Review rencana kerja SKAI.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas eksternal auditor (*audit plan* & TOR).
- f. Pemantauan hasil pemeriksaan BI & BPK.

3.2. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)

Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan aktif dalam penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

a. Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*)

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, struktur organisasi, syarat keanggotaan, kewenangan, pelaksanaan rapat, masa tugas dan honorarium. Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee Charter*) secara periodik perlu dinilai dan dievaluasi kecukupannya oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Pemantau Risiko dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2014 terdapat 2 (dua) kali perubahan struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01.13/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/ 2014 tanggal 01 Juli 2014, struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Sigid Moerkardjono (Komisaris Utama Independen) | : Ketua merangkap Anggota |
| 2. Eko B. Supriyanto (Komisaris Independen) | : Anggota |
| 3. Sukoriyanto Saputro (Komisaris *) | : Anggota |
| 4. Didik Madiyono (Komisaris *) | : Anggota |
| 5. Darmawan Effendi (Pihak Independen) | : Anggota/Sekretaris |
| 6. Yusuf Subianto (Pihak Independen) | : Anggota |

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.08.09/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 08 September 2014, maka struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko diubah menjadi sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Sigid Moerkardjono (Komisaris Utama Independen) | : Ketua merangkap Anggota |
| 2. Eko B. Supriyanto (Komisaris Independen) | : Anggota |
| 3. Sukoriyanto Saputro (Komisaris *) | : Anggota |
| 4. Didik Madiyono (Komisaris *) | : Anggota |
| 5. Haryanto (Pihak Independen) | : Anggota/Sekretaris |
| 6. Sudarmadji Herry Sutrisno (Pihak Independen) | : Anggota |
| 7. Darmawan Effendi (Pihak Independen **) | : Anggota |

*) Belum *Fit & Proper Test*

**) Keanggotaan berakhir pada tanggal 20 September 2014

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan anggotanya adalah 1 (satu) orang Komisaris Independen lainnya, 2 (dua) Komisaris lainnya (efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK), dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang ahli dalam bidang keuangan dan Manajemen Risiko. Pengangkatan nama-nama Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

c. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Pemantau Risiko

- Sigid Moerkardjono, sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- Eko B. Supriyanto, sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- Sukoriyanto Saputro, sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- Didik Madiyono, sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- Darmawan Effendi, sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- Haryanto, sebagai Sekretaris merangkap Anggota Komite Pemantau Risiko
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.
- Sudarmadji Herry Sutrisno, sebagai anggota Komite Pemantau Risiko
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan diatas.

d. Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sebagai organ yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan Pengawasan Aktif penerapan manajemen risiko, Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang diajukan oleh Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 5) Melakukan penelaahan atas ketaatan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan bank.
- 6) Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memberikan nasihat kepada Direksi atas informasi dan /atau peristiwa-peristiwa yang diidentifikasi berpotensi atau mengandung risiko-risiko.
- 7) Melakukan penelaahan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan risiko.
- 8) Mengevaluasi permohonan atau usulan yang diajukan Direksi kepada Dewan Komisaris yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan, sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- 9) Memastikan perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan prosedur dan praktek manajemen risiko pada semua tingkatan dalam Bank guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan Bank dan pengendalian risiko yang sehat.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.

f. Rapat Komite Pemantau Risiko

- 1) Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- 2) Rapat dengan melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan.
- 3) Rapat Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen dan dapat dihadiri oleh Dewan Komisaris.
- 4) Rapat Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh Ketua Komite Pemantau Risiko, dan apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite lain yang ditunjuk dan disetujui dalam rapat Komite.
- 5) Keputusan Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 6) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara setuju 2/3 (dua per tiga) anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- 7) Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 8) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

Selama tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan frekuensi tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota, sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko	Rapat Dengan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Hadir Σ
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
Sigid Moerkardjono	RMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
Eko B. Supriyanto	RMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
Sukoriyanto Saputro	RMD									√	√	√	x	3
Didik Madiyono	RMD									√	√			2
Yusuf Subianto	RMD	√	√	√	√	√	√	√	√					8
Darmawan Effendi	RMD	√	√	√	√	√	√	√	√	√				9
Haryanto	RMD									√	√	√	S	3
Sudarmadji Herry Sutrisno	RMD									x	√	√	√	3

Keterangan:
√ : Hadir
x : Absen
S : Sakit

RMD : Risk Management Division

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Sigid Moerkardjono (Ketua/Komisaris Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2014	12	12	100%
Eko B. Supriyanto (Anggota/Komisaris Independen)	01 Januari s/d 20 Nopember 2014	11	11	100%
Sukoriyanto Saputro (Anggota/Komisaris)	09 Juni s/d 30 Desember 2014	4	3	75%
Didik Madiyono (Anggota/Komisaris)	09 Juni s/d 20 Nopember 2014	2	2	100%
Yusuf Subianto (Anggota/Pihak Independen)	01 Januari s/d 07 September 2014	8	8	100%
Darmawan Effendi (Anggota/Pihak Independen)	01 Januari s/d 20 September 2014	9	9	100%
Haryanto (Anggota/Pihak Independen)	08 September s/d 31 Desember 2014	4	3	75%
Sudarmadji Herry Sutrisno (Anggota/Pihak Independen)	08 September s/d 31 Desember 2014	4	3	75%

g. Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2014, Komite Pemantau Risiko memiliki program kerja sebagai berikut:

- 1) Pembahasan Laporan Profil Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko.

- 2) Memantau dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.
- 3) Berpartisipasi dalam Rapat Direksi & Komisaris.
- 4) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Mutiara Tbk (bilamana diperlukan).
- 5) Mengevaluasi risiko-risiko yang timbul atas dasar 8 jenis risiko dalam kasus-kasus yang terjadi.
- 6) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko tahun 2013.
- 7) Menyusun Rencana Kerja (*Work Plan*) Komite Pemantau Risiko tahun 2014.

h. Realisasi Program Kerja/Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2014 telah direalisasikan/dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pertemuan/rapat dengan Risk Management Division sebanyak 12 kali. Dalam rapat tersebut diundang pula Internal Audit Division untuk membahas profil risiko bulanan sekaligus melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaannya dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Risk Management Division (RMD). Disamping itu, untuk lebih menekankan pemantauan terhadap risiko kredit, pada setiap rapat bulanan juga dipresentasikan tentang Portofolio kredit dan NPL Bank Mutiara.
- 2) Program kerja mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan pembahasan risiko-risiko yang timbul atas dasar 8 jenis risiko, dibahas dalam rapat-rapat Komite tersebut yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Peningkatan Kredit konsumen, pengembangan kredit mikro, perbaikan standar kualitas pembuatan analisa, dokumentasi kredit, struktur persetujuan kredit, penetapan kolektibilitas kredit.
 - Pembakuan Struktur Organisasi baru PT Bank Mutiara Tbk, Implementasi PSAK 50-55, Pengaruh kondisi ekonomi atas penurunan peringkat profil Risiko Bank.
 - Masalah komposisi DPK.
 - Keharusan melakukan *stress test*, upaya-upaya penurunan tingkat risiko dari 8 jenis risiko inheren dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko.
 - Kepatuhan pelaporan baik mengenai ketepatan penyampaian dan keakuratan isi pelaporan.
 - Dan lain-lain.
- 3) Komite Pemantau Risiko telah mengikuti dan berpartisipasi dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2014 sebanyak 12 kali.

3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration and Nomination Committee*)

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan kebijakan remunerasi dan nominasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Bapepam-LK/OJK.

a. Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration and Nomination Committee Charter*)

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration and Nomination Committee*

Charter) yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, syarat keanggotaan, pelaksanaan rapat, masa tugas dan pelaporan. Piagam/Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi (*Remuneration and Nomination Committee Charter*) secara periodik perlu dinilai dan dievaluasi kecukupannya oleh Dewan Komisaris agar fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilaksanakan pada tingkat yang optimal.

b. Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2014 terdapat 3 (tiga) kali perubahan struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.09.10/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014, struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Eko B. Supriyanto (Komisaris Independen) | : Ketua |
| 2. Sigid Moerkardjono (Komisaris Utama Independen) | : Anggota |
| 3. Sukoriyanto Saputro (Komisaris) *) | : Anggota |
| 4. Didik Madiyono (Komisaris) *) | : Anggota |
| 5. Pahot Hutasoit (Kepala Divisi Human Resources Management) | : Anggota/Sekretaris |

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.04.01/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Eko B. Supriyanto (Komisaris Independen) | : Ketua |
| 2. Sigid Moerkardjono (Komisaris Utama Independen) | : Anggota |
| 3. Sukoriyanto Saputro (Komisaris) *) | : Anggota |
| 4. Didik Madiyono (Komisaris) *) | : Anggota |
| 5. Danni T. Suryani (EVP Human Capital) | : Anggota |
| 6. Pahot Hutasoit (Kepala Divisi Human Capital Management) | : Anggota/Sekretaris |

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.01.04/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 01 September 2014, maka struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi diubah menjadi sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Eko B. Supriyanto (Komisaris Independen) | : Ketua |
| 2. Sigid Moerkardjono (Komisaris Utama Independen) | : Anggota |
| 3. Sukoriyanto Saputro (Komisaris) *) | : Anggota |
| 4. Didik Madiyono (Komisaris) *) | : Anggota |
| 5. Pahot Hutasoit (Kepala Divisi Human Capital Management) | : Anggota/Sekretaris |

*) Belum *Fit & Proper Test*

Sebelumnya, Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Independen, 2 (dua) Komisaris lainnya (efektif setelah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK), dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi bidang sumber daya manusia. Namun sejak tanggal 20 Nopember 2014 (hasil keputusan RUPSLB) seorang Komisaris Independen sebagai Ketua dimaksud mengundurkan diri sehingga untuk sementara waktu jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi '*Vacant*' /kosong.

c. Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

- Eko B. Supriyanto, sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan di atas.

- Sigid Moerkardjono, sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan di atas.
- Sukoriyanto Saputro, sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan di atas.
- Didik Madiyono, sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja sama seperti yang telah diuraikan di atas.
- Pahot Hutasoit, sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Pendidikan terakhir : STMIK BUDI LUHUR, Jurusan Manajemen Informatika. Kursus dan Seminar yang pernah diikuti yaitu PMTK (pendidikan Terpadu Manajemen Komputer), IZZI Computer Education tentang aplikasi Management Dan Oxford Course Indonesia, I & II. Pengalaman bekerja di PT. Warna-Warni Perdana, Divisi Umum. Meniti karir di PT Bank Mutiara Tbk sejak 03 November 1997 dan sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Human Capital Management Division Head PT Bank Mutiara Tbk.

d. Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugasnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :

1) Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

2) Terkait dengan Kebijakan Nominasi :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

3) Komite wajib memastikan bahwa :

- Kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kebijakan remunerasi sesuai dengan prestasi kinerja individual.
- Kebijakan remunerasi sesuai dengan kewajaran "peer group".
- Kebijakan remunerasi sesuai dengan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang dari bank.

f. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
- 2) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri oleh paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.
- 3) Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- 4) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 5) Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- 6) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Selama tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan frekuensi tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota, sebagai berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Dengan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Hadir Σ
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	
Eko B. Supriyanto	HCMD		√√	√	√	√	√√√	√				√		10
Sigid Moerkardjono	HCMD		√√	√	√	√	√√√	√				√		10
Sukoriyanto Saputro	HCMD						√√	√				√		4
Didik Madiyono	HCMD						√√	√				√		4
Pahot Hutasoit	HCMD		√√	√	√	√	√√√	x				√		9

Keterangan:
√ : Hadir
x : Absen
S : Sakit

HCMD : Human Capital Management Division

Nama	Periode Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Eko B. Supriyanto (Ketua/Komisaris Independen)	01 Januari s/d 20 Nopember 2014	10	10	100%
Sigid Moerkardjono (Anggota/Komisaris Independen)	01 Januari s/d 31 Desember 2014	10	10	100%

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

Sukorlyanto Saputro (Anggota/Komisaris)	09 Juni s/d 30 Desember 2014	4	4	100%
Didik Madiyono (Anggota/Komisaris)	09 Juni s/d 20 Nopember 2014	4	4	100%
Pahot Hutasoit (Anggota/Pejabat Eksekutif)	01 Januari s/d 31 Desember 2014	10	9	90%

g. Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2014, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki program kerja sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kebijakan remunerasi PT Bank MutiaraTbk
2. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif tahun 2014 untuk disampaikan kepada RUPS
3. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
4. Melakukan *review/evaluasi* terhadap implementasi kebijakan remunerasi
5. Melakukan *review/evaluasi* mengenai pencapaian KPI Direksi tahun 2013 dan usulan KPI tahun 2014 untuk selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham (LPS)
6. Rapat rutin dengan Human Resources Division (HRD)
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2013
8. Menyusun rencana kerja (*Work Plan*) Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2015

h. Realisasi Program Kerja/Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2014 telah direalisasikan/dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Telah dilaksanakan pertemuan/rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali rapat dengan Human Capital Management Division.
- 2) Program kerja mengenai Komite Remunerasi dan Nominasi, dibahas dalam rapat-rapat Komite tersebut yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - Membahas usulan remunerasi dan fasilitas Direktur Utama dan Direktur.
 - Pembahasan KPI Direksi untuk tahun 2014.
 - Evaluasi kinerja Direksi 2014 dalam bentuk KPI.
 - *Review* remunerasi dan apresiasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Pembahasan program perbaikan Human Resources Bank Mutiara.
 - Pembahasan program training beserta perkembangannya.
 - Pembahasan perubahan pejabat di HCMD.
 - Dan lain-lain.

Komite-Komite Dibawah Direksi

Untuk dapat mengidentifikasi dan mengelola seluruh jenis risiko yang dihadapi Bank selain dilakukan oleh unit kerja/Risk Management Division, dan membentuk Komite Pemantau Risiko yang berada pada tingkat Dewan Komisaris, maka Direksi PT Bank Mutiara Tbk juga telah menetapkan Komite-Komite Dibawah Direksi sesuai dengan struktur organisasi yang berfungsi memberikan bimbingan/saran/rekomendasi mengenai kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko Bank. Rekomendasi dari setiap komite menjadi acuan Direksi dalam proses pengambilan keputusan.

Komite-Komite Dibawah Direksi PT Bank Mutiara Tbk diisi oleh anggota Direksi. Komposisi keanggotaan komite disusun sesuai dengan kompleksitas tugas dan tanggung jawab komite. Komite-Komite Dibawah Direksi antara lain :

1. Komite Manajemen Risiko (*Risk Committee*)

Struktur dan Keanggotaan

Komite Manajemen Risiko adalah Komite dalam Sistem Manajemen Risiko Bank yang bersifat non-struktural, berkedudukan di Kantor Pusat yang merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran dan langkah perbaikan dalam forum rapat minimal diselenggarakan 1 (satu) kali dalam triwulanan. Pembentukan Komite ini berdasarkan pada Ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam pelaksanaannya, Komite Manajemen Risiko membentuk Sub Komite dengan tugas pokok masing-masing. Adapun Sub Komite yang dimaksud adalah: Credit Risk Committee dan Operational Risk Committee.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.01.17/S.Kep-Dir-RMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 01 September 2014, Struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko :

Ketua : Direktur Utama
Wakil ketua : Direktur Compliance & Legal
Sekretaris : Kepala Divisi Risk Management

1. Anggota dengan Hak Suara (*Voting Member*)

a. Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)

- Direktur Utama
- Direktur Treasury & Institutional Banking
- Direktur Compliance & Legal
- EVP/Direktur Micro & Consumer Business

b. Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)

- EVP Small & Medium Business
- EVP Finance & Operation
- EVP Special Asset Management
- EVP Distribution Network
- EVP Human Capital

2. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Voting Member*)

a. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*)

- Internal Audit Division Head

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- Compliance Division Head
 - Legal Division Head
 - Accounting Division Head
 - Operation Division Head
 - Planning Performance Management Division Head
 - Corporate Secretary Division Head
 - Risk Management Division Head
- b. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*) yang hadir sesuai keterkaitan dengan agenda/ topik.
- Kepala Divisi dan Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasan rapat komite.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, yang sekurang-kurangnya meliputi :

- Penyusunan Kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud.
- Penetapan (*Justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*Irregularities*).

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2014, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut :

No.	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	13 Maret 2014	Penetapan (<i>Justification</i>) hal-hal yang terkait dengan keputusan/ rencana keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, dalam rangka pemberian Kredit Serba Guna (KSG) kepada 1 (satu) debitur.
2	17 Maret 2014	<i>Draft SOP Pelaksanaan Penilaian Kualitas Kredit (PPKK).</i>
3	19 Maret 2014	Rapat perubahan BWMK terkait perubahan Direksi dan penambahan EVP, permohonan pengesahan Direksi atas Revisi PPK 2011 Khusus Article 221-BWMK (Revisi 4), Article 222-BWMK Kredit Bermasalah (Revisi 2), BAB II Article 230 tentang Kewenangan (Revisi 3).
4	11 April 2014	Usulan perubahan Manual Produk Kredit Executing Multifinance, Usulan perubahan Manual Produk KKS-KKB.
5	21 Juli 2014	Laporan Profil Risiko Triwulan II/ Juni 2014.
6	30 September 2014	Penetapan <i>Safety Level</i> pada <i>Liquidity Contingency Plan</i> .
7	16 Oktober 2014	Laporan Profil Risiko Triwulan III/September 2014.

2. Asset & Liability Committee (ALCO)

Sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia, dimana Bank membentuk *Asset & Liability Committee* (ALCO) yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kompleksitas Bank. *Asset & Liability Committee* (ALCO) adalah suatu komite yang bertanggung jawab

menetapkan kebijakan tingkat suku bunga dan strategi pengelolaan aktiva dan pasiva Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan

Asset & Liability Committee (ALCO) tidak lagi merupakan Sub Komite dari Komite Manajemen Risiko, melainkan komite tersendiri yang bertanggung jawab kepada Direksi.

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.03.02/5.Kep-DIR/RMD-TRD/Mutiara/IX/2014 tanggal 03 September 2014, Struktur dan keanggotaan *Asset & Liability Committee* (ALCO) sebagai berikut:

Susunan Anggota ALCO :

Ketua : Direktur Utama
Wakil ketua : Direktur Treasury & Institutional Banking
Sekretaris : Kepala Divisi Treasury

1. Anggota dengan Hak Suara (*Voting Member*)
 - a. Anggota Tetap dengan Hak Suara (*Permanent Voting Member*)
 - Direktur Utama
 - Direktur Treasury & Institutional Banking
 - EVP/Direktur Micro & Consumer Business
 - EVP Distribution Network
 - b. Anggota Tidak Tetap dengan Hak Suara (*Non-Permanent Voting Member*)
 - EVP Small & Medium Business
 - EVP Finance & Operation
 - EVP Special Asset Management
 - EVP Human Capital
2. Anggota Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Voting Member*)
 - a. Anggota Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Permanent Non-Voting Member*)
 - Director Compliance & Legal
 - Multi Finance Division Head
 - Consumer Business Division Head
 - Product & Network Division Head
 - Retail & Corporate Funding Division Head
 - Medium Business Division Head
 - Small Business Division Head
 - Micro Business Division Head
 - Institutional Banking Division Head
 - Risk Management Division Head
 - Compliance Division Head
 - b. Anggota Tidak Tetap Pemberi Kontribusi Tanpa Hak Suara (*Contributing Non-Permanent & Non-Voting Member*) yang hadir sesuai keterkaitan dengan agenda/topik.
 - Accounting Division Head
 - Planning Performance Management Division Head
 - Legal Division Head
 - Kepala Kantor Wilayah yang terkait dengan materi yang menjadi agenda pembahasan rapat komite.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

Tugas dan Tanggung Jawab

Asset & Liability Committee (ALCO) memiliki tugas utama sebagai berikut :

- Mengkaji Kebijakan dan strategi *Asset & Liability Management*, Pengelolaan Risiko Likuiditas, Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*, Risiko Nilai Tukar, dan masalah ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*).
- Kaji ulang atas penetapan harga (*Pricing*) aktiva dan pasiva guna memastikan bahwa *Pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana dan memelihara struktur neraca Perseroan, sesuai dengan strategi ALM Perseroan.
- Kaji ulang penetapan limit untuk *Banking Book*.
- Menetapkan metodologi tarif *Fund Transfer Pricing* (FTP) sebagai dasar untuk mengukur kinerja unit kerja.
- ALCO juga mengkaji kebijakan, prosedur dan penetapan limit terkait risiko suku bunga dalam *trading book*.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2014, *Asset & Liability Committee* (ALCO) telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut :

No.	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	10 Januari 2014	<i>Economy Outlook</i> di Indonesia yang terkini, <i>Liquidity</i> , <i>Review</i> realisasi Net Interest Margin (NIM), Penetapan NIM di periode bulan yang berjalan, Penetapan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP), Penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dalam mata uang Rupiah dan Valas, dan Penetapan suku bunga kredit.
2	12 Februari 2014	<i>Economy Outlook</i> di Indonesia yang terkini, <i>Liquidity</i> , <i>Review</i> realisasi Net Interest Margin (NIM), Penetapan NIM di periode bulan yang berjalan, Penetapan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP), Penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dalam mata uang Rupiah dan Valas, dan Penetapan suku bunga kredit.
3	11 Maret 2014	<i>Economy Outlook</i> di Indonesia yang terkini, <i>Liquidity</i> , <i>Review</i> realisasi Net Interest Margin (NIM), Penetapan NIM di periode bulan yang berjalan, Penetapan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP), Penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dalam mata uang Rupiah dan Valas, dan Penetapan suku bunga kredit.
4	11 April 2014	<i>Economy Outlook</i> di Indonesia yang terkini, <i>Liquidity</i> , <i>Review</i> realisasi Net Interest Margin (NIM), Penetapan NIM di periode bulan yang berjalan, Penetapan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP), Penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dalam mata uang Rupiah dan Valas, dan Penetapan suku bunga kredit.
5	12 Mei 2014	<i>Economy Outlook</i> di Indonesia yang terkini, <i>Liquidity</i> , <i>Review</i> realisasi Net Interest Margin (NIM), Penetapan NIM di periode bulan yang berjalan, Penetapan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP), Penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dalam mata uang Rupiah dan Valas, dan Penetapan suku bunga kredit.
6	12 Juni 2014	<i>Economy Outlook</i> di Indonesia yang terkini, <i>Liquidity</i> , <i>Review</i> realisasi Net Interest Margin (NIM), Penetapan NIM di periode bulan yang berjalan, Penetapan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP), Penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dalam mata uang Rupiah dan Valas, dan Penetapan suku bunga kredit.

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

7	22 Juli 2014	<i>Economy Outlook</i> di Indonesia yang terkini, <i>Liquidity, Review</i> realisasi Net Interest Margin (NIM), Penetapan NIM di periode bulan yang berjalan, Penetapan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP), Penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dalam mata uang Rupiah dan Valas, dan Penetapan suku bunga kredit.
8	14 Agustus 2014	<i>Economy Outlook</i> di Indonesia yang terkini, <i>Liquidity, Review</i> realisasi Net Interest Margin (NIM), Penetapan NIM di periode bulan yang berjalan, Penetapan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP), Penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dalam mata uang Rupiah dan Valas, dan Penetapan suku bunga kredit.
9	10 September 2014	<i>Economy Outlook</i> di Indonesia yang terkini, <i>Liquidity, Review</i> realisasi Net Interest Margin (NIM), Penetapan NIM di periode bulan yang berjalan, Penetapan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP), Penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dalam mata uang Rupiah dan Valas, dan Penetapan suku bunga kredit.
10	21 Oktober 2014	<i>Economy Outlook</i> di Indonesia yang terkini, <i>Liquidity, Review</i> realisasi Net Interest Margin (NIM), Penetapan NIM di periode bulan yang berjalan, Penetapan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP), Penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dalam mata uang Rupiah dan Valas, dan Penetapan suku bunga kredit.
11	11 Nopember 2014	<i>Economy Outlook</i> di Indonesia yang terkini, <i>Liquidity, Review</i> realisasi Net Interest Margin (NIM), Penetapan NIM di periode bulan yang berjalan, Penetapan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP), Penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dalam mata uang Rupiah dan Valas, dan Penetapan suku bunga kredit.
12	10 Desember 2014	<i>Economy Outlook</i> di Indonesia yang terkini, <i>Liquidity, Review</i> realisasi Net Interest Margin (NIM), Penetapan NIM di periode bulan yang berjalan, Penetapan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP), Penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dalam mata uang Rupiah dan Valas, dan Penetapan suku bunga kredit.

3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (*IT Steering Committee*)

Komite Pengarah Teknologi Informasi berfungsi membantu Direksi dalam merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan kebijakan dalam setiap tahapan penggunaan teknologi sistem informasi sejak proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya teknologi informasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data kegiatan usaha PT Bank Mutiara Tbk sehingga dapat memberikan hasil yang benar, akurat, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Struktur dan Keanggotaan

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi PT Bank Mutiara Tbk yang berlaku, maka diikuti dengan perubahan Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi sesuai Surat Keputusan Direksi No.26.06/S.Kep-Dir-ITD/Mutiara/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 sebagai berikut :

Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi :

1. Ketua, merangkap anggota : EVP Finance & Operation
2. Sekretaris, merangkap anggota : Kepala Divisi Information Technology
3. Anggota-anggota :
 - EVP / Direktur Micro & Consumer Business

- EVP Small & Medium Business
- EVP Distribution Network
- Kepala Divisi Risk Management
- Kepala Divisi Operation
- Kepala Divisi Compliance
- Kepala Divisi Accounting
- Kepala Divisi Procurement & Fixed Asset

Tugas dan Tanggung Jawab

Pada intinya, Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk dengan tujuan, diantaranya adalah :

- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan rencana strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha PT Bank Mutiara Tbk.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha PT Bank Mutiara Tbk.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi yang telah dibuat oleh PT Bank Mutiara Tbk dan juga menetapkan status prioritas proyek teknologi informasi serta bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank).
- 4) Melakukan *review* dan evaluasi secara berkala atas implementasi proyek-proyek teknologi informasi yang dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.
- 5) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati.
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.
- 7) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan aktifitas pengawasan dan pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
- 8) Membantu Direksi dalam menetapkan penerapan prinsip-prinsip sistem pengawasan dan pengamanan terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang mengandung risiko tinggi, khususnya yang menyangkut teknologi *database*, komputer mikro, dan komunikasi data.
- 9) Memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- 10) Membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dalam penggunaan Teknologi Informasi agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PT Bank Mutiara Tbk.
- 11) Membantu Direksi dalam menetapkan pengendalian manajemen yang meliputi perencanaan, penetapan kebijaksanaan, standar dan prosedur, serta organisasi yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Informasi pada PT Bank Mutiara Tbk.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- 12) Membantu Direksi dalam menetapkan sistem kontrol terhadap sistem aplikasi Teknologi Informasi yang akan digunakan yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharannya.
- 13) Memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam menetapkan *vendor* terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak ketiga, apabila diperlukan.
- 14) Melakukan analisa atas usulan pengembangan dan atau pembelian aplikasi / *software* yang diajukan oleh *End User* / unit kerja.
- 15) Analisa yang dimaksud pada angka 14) diatas sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - Tujuan pengembangan dan atau pembelian.
 - Tingkat kebutuhan dan kepentingan Bank untuk melakukan pengembangan dan atau pembelian.
 - Kesesuaian dengan Rencana Kerja Tahunan Bank.
 - Fitur-fitur pengamanan dan pengendalian yang terdapat pada aplikasi / *software*, perangkat keras/*hardware* dan jaringan komunikasi tersebut.
 - *Maintenance* dan *support* dari pihak *vendor*.
 - Aspek biaya dan manfaat.
 - Kecukupan kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan teknologi informasi oleh pihak ketiga.
- 16) Membuat rekomendasi kepada Direksi sebagai hasil proses analisa yang dilakukan.
- 17) Berkoordinasi dan menyampaikan kepada unit kerja terkait mengenai Rencana Strategis Teknologi Informasi yang mendukung kegiatan strategis usaha Bank, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- 18) Melakukan analisa terhadap perkembangan dan perubahan teknologi sistem informasi terutama di bidang perbankan.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2014, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Pembahasan
1	17 Januari 2014	Maintenance S1 Tahun 2014
2	17 April 2014	1) Aplikasi LOS Konsumer dan Mikro 2) Interface Internet Banking & Core 3) Maintenance Hardware Security Internet Banking 4) Hardware untuk Web Teller 5) Progress Project IT
3	24 Juli 2014	1) Status Project Upgrade Core Banking BFEQ 4.0 2) Status Project PSAK - Migrasi CBS ke Bank Vision 3) Tagihan Profesional Service Misys 4) Lain-lain
4	29 Agustus 2014	1) Status Project PSAK yang meliputi : a. Migrasi CBS ke Bank Vision b. PD/LGD, Migrasi Pinjaman Equation ke Bank Vision dan PSAK 2) Tagihan Misys atas kelebihan transaksi Fixed Income
5	07 Nopember 2014	1) Upgrade Core Banking 2) Koneksi Virtual Private Network (VPN) 3) Aplikasi Human Resource

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

6	24 Nopember 2014	Perubahan Jadwal Upgrade Core Banking
7	30 Desember 2014	1) Host Security Module 2) Email Microsoft Exchange

4. Komite Human Resources (*HR Committee*)

Struktur dan Keanggotaan

Sesuai Surat Keputusan Direksi No.01.03/S.Kep-DIR-HCMD/Mutiara/IX/2014 tanggal 01 September 2014, Struktur dan keanggotaan Komite Human Resources sebagai berikut:

Susunan Anggota Komite Human Resources :

Ketua : Direktur Utama
 Anggota : Direktur Treasury & Institutional Banking
 Direktur Micro & Consumer Business
 Direktur Compliance & Legal
 EVP Human Capital
 Kepala Divisi Human Capital

Tugas dan Tanggung Jawab

Pada intinya, Komite Human Resources dibentuk dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan rencana strategis mengenai ketenaga-kerjaan yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank, antara lain:

- Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kebutuhan kegiatan usaha bank.
- Kebutuhan pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan wawasan seluruh karyawan.
- Pemantauan atas kinerja karyawan yang terkait dengan *reward and punishment*.
- Pemantauan dan penyelesaian berbagai masalah ketenaga-kerjaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan Tata Usaha dan Tata Laksana terkait dengan ketenaga-kerjaan yang baik dan aman.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2014, Komite Human Resources telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat dan melakukan berbagai program kerja yang membahas agenda sebagai berikut :

No.	Tanggal	Agenda Pembahasan
1.	10 Maret 2014	Usulan Mutasi dan promosi Pimpinan Cabang; Usulan Kepala Divisi Kredit/SLD
2.	20 Maret 2014	Usulan permohonan KPR Karyawan; Hasil evaluasi kontrak kerja karyawan; Usulan Pensiun karyawan
3.	25 Maret 2014	Usulan mutasi dan promosi di Divisi Kredit/MLD dan SLD; Fasilitas kendaraan bagi Komisaris, Direksi & EVP; Kenaikan <i>Job Grade</i> secara bertahap; Hasil <i>assessment</i> bukan satu-satunya pertimbangan untuk promosi
4.	08 April 2014	Penunjukan Personel Banking Outlet Manager; Usulan promosi/ mutasi pada Kantor Cabang/Capem/Kas
5.	23 Mei 2014	Usulan Pjs.Pimpinan Capem Medan Asia; Usulan Dept. Head dan penyesuaian gaji Dept. Head; Usulan Struktur Organisasi Mikro

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

6.	26 Agustus 2014	Pembentukan Tim OEP dan Tim NPL; Pembentukan EVP Human Capital; Usulan promosi Kepala Divisi & Dept. Head, serta Mutasi Dept. Head; Penyesuaian seluruh SK Direksi tentang Komite; Kaji kembali dan tindak lanjut Komite Audit yang telah melampaui masa kerja; Perpanjang masa jabatan Pjs.Kepala Divisi Kredit/CLD (6 bulan); Pemutusan kontrak kerja Pimpinan Cabang
7.	07 September 2014	Penggantian Kepala Divisi SKAI & Corporate Secretary; Penggantian Pimcab Yogya dan Depok; Fasilitas kendaraan bagi pejabat yang ditempatkan pada Tim Efisiensi; Pembahasan hasil pertimbangan Tim Penyelesaian Karyawan (TPK)
8.	25 September 2014	Usulan kerjasama Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk program pensiun
9.	22 Oktober 2014	Usulan Dept. Head; Remunerasi dan Tunjangan kepangkatan Divisi Mikro
10.	05 Nopember 2014	Usulan kandidat Kepala Divisi Compliance; Usulan kandidat/promosi Dept. Head; Penugasan rangkap untuk Pimpinan Cabang Kemang & Kuningan; Strategi Human Capital terhadap pejabat yang tidak bergabung
11.	24 Nopember 2014	Usulan kandidat Kepala Divisi Compliance; Usulan kandidat/promosi Dept. Head; Penugasan rangkap untuk Pimpinan Cabang Kemang & Kuningan; Pemisahan Kanwil II & III
12.	02 Desember 2014	Usulan kandidat Kepala Divisi Multifinance, Medium Business; Usulan kandidat Pimpinan Cabang Kuningan & Semarang; Usulan mutasi Dept. Head dan Divisi; Penempatan Dept. Head untuk Kantor Wilayah

5. Komite Kredit (*Credit Committee*)

Struktur dan Keanggotaan

Komite Kredit PT Bank Mutiara Tbk terdiri dari para pejabat pemutus kredit, pengusul (*voting member*), dan *non-voting member*.

Komite kredit membuat keputusan atas permohonan kredit (*cash loan and non-cash loan*) debitur/calon debitur melalui rapat yang dihadiri oleh pejabat pemegang kewenangan memutus kredit sesuai limit yang ditetapkan, pengusul (*voting member*), dan dapat bersama dengan pejabat unit kerja/divisi lain, seperti Divisi *Legal*, Divisi *Compliance*, Divisi *Operation*, dan Divisi *Risk Management* yang diminta opininya dalam rapat tersebut sebagai *non-voting member*.

Disamping itu sesuai penetapan limit kredit, terdapat pula Pemegang Keputusan Kredit (PKK) adalah individu yang diberi kewenangan oleh Direksi (memutus kredit secara sirkular yaitu tanpa melalui rapat dan tanpa *non voting member*) berdasarkan kemampuan, kompetensi dan integritas yang baik.

Dengan demikian sesuai limit kredit yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit yang berlaku sejak tanggal 17 Desember 2014 (Ref. SK Direksi No.17.09/S.Kep-DJR-SBD-RMD/MUTIARA/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014), kewenangan Komite Kredit PT Bank Mutiara Tbk terdiri atas :

Kategori	Baru, Tambah, Perubahan
A1	Di atas Rp.20 miliar
A2	Di atas Rp.10 miliar s/d Rp.20 miliar
A3	Di atas Rp.2 miliar s/d Rp.10 miliar

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

PKK A	Di atas Rp.1 miliar s/d Rp.2 miliar
PKK B	Di atas Rp.200 juta s/d Rp.1 miliar
PKK C	Di bawah Rp.200 juta

Komite Kredit Kategori A1 merupakan komite tertinggi dalam struktur kewenangan memutus kredit.

Sedangkan keanggotaan Komite Kredit berdasarkan limit kredit adalah sebagai berikut:

Kategori	Pemutus Kredit	Pengusul	Non-Voting Member
A1	Direktur Utama + Direktur <i>Treasury & Institutional Banking</i> + EVP Sponsor. atau Direktur Utama + Direktur <i>Treasury & Institutional Banking</i> + EVP Bisnis Non Sponsor + EVP Sponsor	Kepala Divisi <i>Medium Business</i> /Kepala Divisi <i>Multi Finance</i> /Kepala Divisi <i>Consumer Business</i> /Kepala Divisi <i>Institutional Banking</i> bersama <i>Department Head</i> dan <i>Section Head/Account Officer/Reviewer</i> , atau Kepala Divisi <i>Small Business</i> bersama UKM Manager + Account Officer	Direktur <i>Compliance & Legal</i> atau EVP <i>Finance & Operation</i> , didampingi oleh : Kepala Divisi <i>Risk Management</i> ; Kepala Divisi <i>Operation</i> Kepala Divisi <i>Compliance</i> Kepala Divisi <i>Legal</i> .
A2	Direktur <i>Treasury & Institutional Banking</i> / EVP <i>Bisnis Non Sponsor</i> + EVP Sponsor. atau Direktur <i>Treasury & Institutional Banking</i> + EVP <i>Bisnis Non Sponsor</i> .	Kepala Divisi <i>Medium Business</i> /Kepala Divisi <i>Multi Finance</i> /Kepala Divisi <i>Consumer Business</i> /Kepala Divisi <i>Institutional Banking</i> bersama <i>Department Head</i> dan <i>Section Head/Account Officer/Reviewer</i> , atau Kepala Divisi <i>Small Business</i> bersama UKM Manager + Account Officer	Kepala Divisi <i>Risk Management</i> Kepala Divisi <i>Operation</i> Kepala Divisi <i>Compliance</i> Kepala Divisi <i>Legal</i> .
A3	EVP Sponsor/EVP <i>Bisnis Non Sponsor</i> + Kepala Divisi <i>Bisnis</i> bukan pengusul.	Kepala Divisi <i>Medium Business</i> /Kepala Divisi <i>Multi Finance</i> /Kepala Divisi <i>Consumer Business</i> /Kepala Divisi <i>Institutional Banking</i> bersama <i>Department Head</i> dan <i>Section Head/Account Officer/Reviewer</i> . atau Kepala Divisi <i>Small Business</i> bersama UKM Manager + Account Officer	Kepala Divisi <i>Risk Management</i> Kepala Divisi <i>Operation</i> Kepala Divisi <i>Compliance</i> Kepala Divisi <i>Legal</i> .
PKK A	Pemegang Keputusan Kredit (PKK) <i>Business</i> dan Pemegang Keputusan Kredit (PKK) <i>Credit Risk</i>	Account Officer dan/atau <i>Team Leader</i> serta Kepala Cabang dan atau Kepala Kantor Wilayah serta <i>Reviewer</i>	Tanpa <i>Non Voting Members</i>
PKK B	Pemegang Keputusan Kredit (PKK) <i>Business</i> dan Pemegang Keputusan Kredit (PKK) <i>Credit Risk</i>	Account Officer dan/atau <i>Team Leader</i> serta Kepala Cabang dan atau Kepala Kantor Wilayah serta <i>Reviewer</i> .	Tanpa <i>Non Voting Member</i>
PKK C	Pemegang Keputusan Kredit (PKK) <i>Business</i> atau Pemegang Keputusan Kredit (PKK) <i>Credit Risk</i>	Account Officer dan atau <i>Team Leader</i> serta Kepala Cabang dan atau Kepala Kantor Wilayah serta <i>Reviewer</i>	Tanpa <i>Non Voting Member</i>

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit bertanggung jawab untuk menelaah dan memberikan keputusan atas aplikasi/permohonan fasilitas kredit berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dalam rangka pemenuhan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang sehat, antara lain mencakup permohonan fasilitas kredit baru, penambahan fasilitas atau *plafond* kredit, perpanjangan fasilitas kredit, perubahan fasilitas kredit, penggantian agunan fasilitas kredit, perubahan jangka waktu fasilitas kredit/*Rescheduling*, restrukturisasi kredit bermasalah, dan sebagainya.

Keputusan kredit untuk Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) dilaksanakan berdasarkan Rapat Komite Kredit (RKK) dan Pemegang Keputusan Kredit (PKK) yang berpedoman pada Kebijakan Perkreditan Mutiara Bank (KPMB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT Bank Mutiara Tbk yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama tahun 2014, Komite Kredit telah melaksanakan rapat sesuai kebutuhan dan permohonan kredit. Selanjutnya program kerja yang dilaksanakan adalah memastikan keputusan kredit dalam Rapat Komite Kredit (RKK) dan Pemegang Keputusan Kredit (PKK) berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) telah sesuai dengan pedoman pada Kebijakan Perkreditan Mutiara Bank (KPMB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT Bank Mutiara Tbk yang berlaku.

BAB IV
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK, AUDIT INTERN
DAN AUDIT EKSTERN

4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam menjalankan usahanya, PT Bank Mutiara Tbk mempunyai komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Fungsi kepatuhan yang bersifat permanen merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan. Agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan. Fungsi Kepatuhan yang bersifat *ex-ante* (sebelum terjadi *event* yang tidak diharapkan) hendaknya dapat terlaksana secara menyeluruh (*comprehensive*), yaitu tidak hanya melalui tersedianya kebijakan/peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tetapi juga pencegahan langsung oleh para pelakunya. Hal ini dapat tercipta jika telah terjadi internalisasi budaya kepatuhan secara menyeluruh bagi seluruh karyawan sehingga karyawan juga diharapkan memiliki kesadaran atas risiko di masing-masing unit kerjanya.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang "Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum" yang berlaku sejak tanggal 01 September 2011.

Adapun pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk :

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Perkembangan tantangan dan risiko usaha bank yang semakin besar, maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*. Upaya yang bersifat *ex-ante* sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu PT Bank Mutiara Tbk senantiasa berupaya meningkatkan peran dan Fungsi Kepatuhan, serta satuan kerja kepatuhan dalam pengelolaan Risiko Kepatuhan.

Peran Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di Bank, dengan :

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan. Untuk melaksanakan evaluasi yang tepat dan akurat dapat dilakukan melalui rapat-rapat, baik rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi maupun rapat komite-komite.
- b. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Direksi berkewajiban :

- 1) Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.

Kerangka Kerja Kepatuhan (*Compliance Framework*)

Kerangka Kerja Kepatuhan menyajikan kebijakan dan pedoman/Standar Operasional Prosedur kepatuhan serta pengawasan bagi Bank. Kebijakan dan Pedoman Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan ketaatan pada hukum, peraturan, perundang-undangan, kebijakan internal dan kode etik dan pedoman tingkah laku. Kebijakan dan Pedoman disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dan *best practice* yang berlaku dalam rangka mengidentifikasi, menilai, memonitor dan mengontrol risiko kepatuhan secara terus menerus di seluruh kegiatan usaha dan aktivitas di Bank.

Bank melaksanakan upaya/inisiatif strategis sebagai tolak ukur pelaksanaan mitigasi risiko kepatuhan sejalan dengan perkembangan, tantangan serta risiko usaha Bank yang semakin besar dan kompleks. Upaya yang dilakukan dapat bersifat *ex-ante* maupun *ex-post*.

Fungsi Kepatuhan maupun peran satuan kerja kepatuhan kedepannya selain memiliki kemampuan pemantauan yang bersifat *ex-ante* serta melakukan pengelolaan Risiko Kepatuhan secara berkesinambungan selaras dengan penerapan manajemen risiko di Bank secara keseluruhan.

Kunci Keberhasilan dan Tantangan Dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan

Fungsi dari Direktur Kepatuhan dalam sebuah organisasi telah diterapkan selama lebih kurang 16 tahun sejak Bank Indonesia menerbitkan PBI No: 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) di organisasi perbankan. Selama jangka waktu tersebut, PT Bank Mutiara Tbk terus berupaya meningkatkan sinergi antara fungsi kepatuhan dan fungsi bisnis dapat terjaga dan tetap berjalan dengan baik apabila serangkaian faktor kunci keberhasilan (*key success factor*) dapat dipenuhi, yaitu :

• ***Start From The Top***

Komitmen tinggi dari manajemen puncak (Direksi dan Komisaris), termasuk para pejabat eksekutif organisasi tersebut. Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan yang telah ditetapkan harus diupayakan semaksimal mungkin oleh seluruh jajaran manajemen sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.

• ***Compliance Culture***

Adanya budaya 'patuh' disemua jajaran pekerja dan manajemen merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam menjaga strategi sinergi antara fungsi kepatuhan dan fungsi bisnis sebagaimana diinginkan. Secara konkrit untuk menjamin bahwa kepatuhan telah disepakati sebagai salah satu budaya perusahaan, maka perlu dituangkan dalam berbagai ketentuan internal bank yang berlaku, antara lain dalam ketentuan GCG, kode etik, serta kebijakan dan prosedur kepatuhan lainnya. Dengan demikian penerapannya dapat dipantau dan ditingkatkan.

• ***Compliance Procedure and Policy in Place***

Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan formal merupakan kunci keberhasilan karena hal tersebut mencerminkan kesiapan dan kesungguhan suatu organisasi untuk menerapkan fungsi kepatuhan sebagaimana diamanatkan oleh regulator. Di dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan tersebut harus jelas tergambar uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi kepatuhan dalam mengelola risiko yang dihadapi oleh organisasi, termasuk tata cara pengelolaan isu-isu utama risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, penilaian dan mitigasi risiko kepatuhan.

• ***People and Infrastructure***

Faktor kunci keberhasilan penerapan fungsi kepatuhan di suatu organisasi pada akhirnya akan bertumpu pada keberadaan sumber daya manusia dan infrastruktur lainnya seperti teknologi sistem informasi baik untuk pelaporan maupun penyimpanan data. Dalam hal ini perlu dicermati kondisi sumber daya manusia, dalam artian diperlukan sumber daya manusia yang memiliki *multi-talent* atau *skills* mengingat isu-isu kepatuhan yang demikian luas cakupannya dan senantiasa berubah secara dinamis.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

PBI No: 13/2/PBI/2011 yang merupakan penyempurnaan dari PBI No: 1/6/PBI/1999 adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) mencakup penyempurnaan dari segi organisasi di perbankan, tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, sesuai dengan kerangka manajemen risiko, dalam mendukung terciptanya budaya kepatuhan. Berdasarkan pada peraturan tersebut, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah :

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- d. Mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur kepada unit kerja/karyawan melalui Surat Edaran atau internal memo maupun internal email.
- e. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

berdasarkan prinsip kehati-hatian Bank, *Good Corporate Governance* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- g. Melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan terhadap ketentuan internal serta mekanisme sistem pelaporan dan pengendalian intern.
- h. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

PT Bank Mutiara Tbk dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank dan untuk memastikan agar Bank mematuhi semua Peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah memiliki seorang **Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan** yang merupakan anggota Direksi yang penunjukannya telah memenuhi persyaratan independensi dan kriteria lain yaitu :

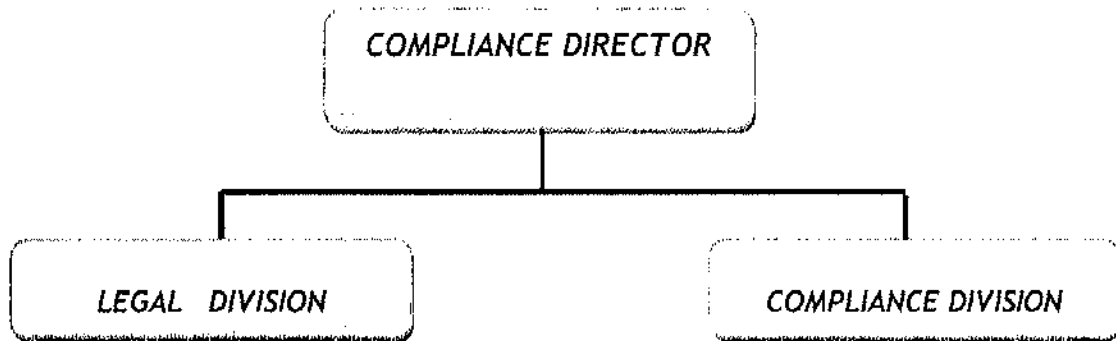
1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Tidak ada rangkap jabatan dengan Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama.
3. Tidak membawahkan fungsi-fungsi :
 - a. Bisnis dan operasional (kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran dana dan kegiatan keagenan).
 - b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank.
 - c. *Treasury*.
 - d. Keuangan dan akuntansi.
 - e. Logistik dan pengadaan barang/jasa.
 - f. Teknologi informasi.
 - g. Audit Intern.
4. Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi unit kerja Dibawah Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan untuk Tahun 2014, antara lain berdasarkan :

- Surat Keputusan (SK) Direksi No.19.01/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, Direktur Kepatuhan membawahi Divisi *Compliance* (CPD) dan Divisi *Legal*(LGD).
- Diubah dengan SK Direksi No.08.02/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014, Direktur Kepatuhan membawahi CPD, LGD, *Risk Management Division* (RMD), dan *Human Capital Management Division* (HCMD).

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

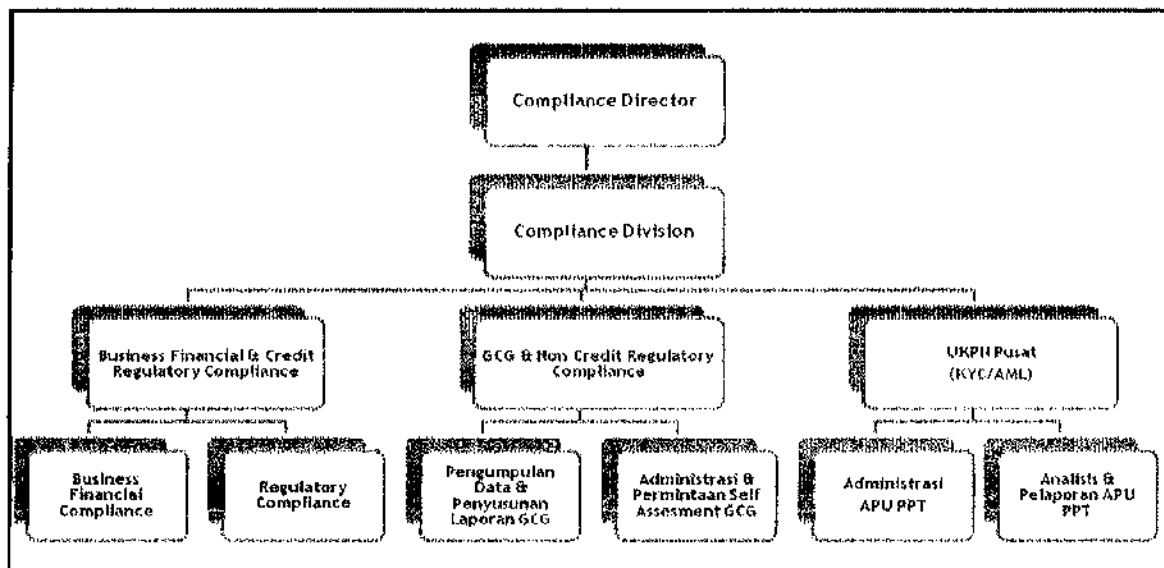
- Terakhir untuk Struktur Organisasi Tahun 2014 dirubah lagi dengan SK Direksi No.25.10/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014, Direktur Kepatuhan membawahi CPD dan LGD, dengan ilustrasi gambar sebagai berikut :



Keterangan :

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan (Compliance Division) PT Bank Mutiara Tbk yang diterbitkan berdasarkan SK Direksi No.25.10/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014.

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan (*Compliance Division*)



Keterangan :

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan (*Compliance Division*) PT Bank Mutiara Tbk – berdasarkan Memo No.123/MEMO/CPD/2014 tanggal 02 April 2014.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dibantu oleh Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*) yang membawahi Unit/Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja GCG dan Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN).

Kepala Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance Division*)

Sesuai ketentuan Bank Indonesia maka Kepala Divisi Kepatuhan (*Compliance Division Head*) PT Bank Mutiara Tbk telah memenuhi kriteria yaitu :

- a. Memenuhi persyaratan independensi.
- b. Menguasai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan atau tidak merangkap jabatan struktural lain.
- d. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Kepala Divisi Kepatuhan (Compliance Division Head) telah dilaporkan kepada Bank Indonesia yang mengacu ketentuan pelaporan bagi Pejabat Eksekutif mengenai Bank Umum.

Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan

PT Bank Mutiara Tbk telah membentuk Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan sebagai unit kerja yang **independen** yaitu:

- a. Dibentuk secara tersendiri di Kantor Pusat Bank, namun melaksanakan tugasnya di seluruh jaringan kantor Bank.
- b. Bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya.
- c. Mempunyai akses langsung pada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

Pejabat dan staf di Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan tidak ada yang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank, Divisi/Satuan Kerja Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

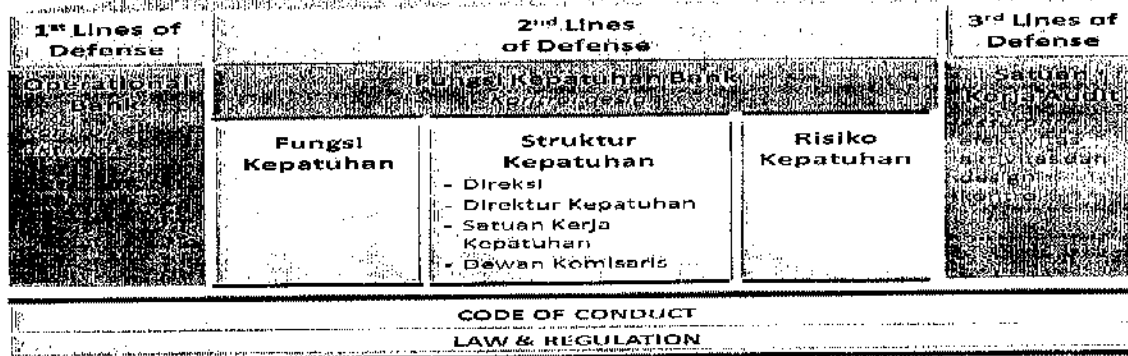
- a. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- b. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- c. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain :
 - Memastikan kepatuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - Sosialisasi/pelatihan kepada seluruh pegawai Bank mengenai ketentuan yang berlaku terkait dengan fungsi Kepatuhan.
 - Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- g. Melakukan *Compliance Checklist* secara *on-site* atas aktivitas yang berkaitan dengan perizinan pembukaan/relokasi/penutupan dan peningkatan status jaringan kantor.

Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Kerangka kerja pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui pendekatan yang didasarkan pada 3 (tiga) lini pertahanan yaitu :



- **First line of defense**, merupakan peran lini pertahanan pertama yang diwakili oleh Unit Bisnis dan Unit Pendukung yang berfungsi sebagai unit pengambil dan pemilik risiko (*risk taking and risk owner unit*), dimana mereka mengejar pertumbuhan usaha dan mengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek risiko.
- **Second line of defense**, merupakan lini pertahanan kedua yang dilakukan oleh *Risk Management Division* dan *Compliance Division* yang berfungsi sebagai *risk control unit*, yang tugasnya antara lain: menetapkan kerangka dan regulasi internal mengenai pengelolaan risiko, baik yang sifatnya finansial maupun nonfinansial; melakukan pemantauan terhadap bagaimana fungsi bisnis dan nonbisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko, dan prosedur standar operasional yang telah ditetapkan → *ex ante* (upaya preventif / pencegahan).
- **Third Line of Defense**, merupakan lini Pertahanan Ketiga yang dilaksanakan oleh auditor internal yang berfungsi sebagai *risk assurance*. Auditor bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Peran utama auditor internal terkait manajemen risiko adalah melakukan *review* dan evaluasi berkala terhadap kerangka dan tata kelola risiko di Bank secara keseluruhan yang dilakukan oleh lini pertahanan pertama dan kedua untuk memastikan kedua lini ini berjalan sesuai dengan perannya masing-masing → *ex post* (review setelah kejadian).

Program Kerja yang Terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, selama tahun 2014 Divisi Kepatuhan (*Compliance Division*) yang membawahi Unit/Satuan Kerja Kepatuhan, Unit Kerja GCG dan Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) telah melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank pada seluruh unit kerja sebagai berikut :

1. Pemantauan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

a) Indikator kepatuhan Bank dari perkembangan masing-masing faktor yang dimonitor antara lain:

Faktor-Faktor yang Dimonitor	Indikator/Rasio		Keterangan
	Semester I Posisi Juni 2014	Semester II Posisi Desember 2014	
Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) (Risiko Kredit, Operasional & Pasar)	14,88%	13,58%	Patuh, berada di atas ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) <i>BMPK Kredit :</i> Pelanggaran Pelampauan <i>BMPK Surat Berharga :</i> Pelanggaran Pelampauan	Nil Rp.91.733 juta Nil Rp.201.573 juta	Nil Rp.191.510 juta Nil Rp.338.080 juta	Patuh, tidak ada pelanggaran BMPK Masih terdapat pelampauan BMPK, namun terus diupayakan agar tahun 2015 dapat diselesaikan Patuh, tidak ada pelanggaran BMPK Masih terdapat pelampauan BMPK, namun terus diupayakan agar tahun 2015 dapat diselesaikan
Posisi Devisa Neto (PDN)	7.45%	3.18%	Patuh, PDN sesuai ketentuan Bank Indonesia dan posisinya terus dijaga dengan baik.
Kualitas Aktiva Produktif (KAP)/ Non Performing Loan (NPL) : NPL Gross NPL Net	14.87% 5.91%	12.24% 5.45%	Tidak Patuh, NPL Gross menurun tidak signifikan dan terus diupayakan agar di tahun 2015 semakin membaik. Tidak Patuh, NPL Net tidak sesuai ketentuan BI atau diatas 5% dan terus diupayakan agar di tahun 2015 semakin

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

			membalik.
Giro Wajib Minimum (GWM) :			
GWM Utama/Primer	9.35%	11.68%	Patuh, sesuai ketentuan BI (8%).
GWM Sekunder	16.06%	19.22%	Patuh, sesuai ketentuan BI (2.5%).
GWM Valas	8.95%	8.77%	Patuh, sesuai ketentuan BI (8%).
Tingkat Kesehatan Bank (TKB)	4 (kurang sehat)	4 (kurang sehat)	
Profil Risiko Bank :			
Profil Risiko	4	4	
Risiko Inheren	<i>Moderate To High</i>	<i>Moderate To High</i>	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Fair	Fair	

- b) Masih terdapat ratio LDR Bank dibawah ketentuan yang berlaku sehingga dikenakan kewajiban untuk menambah setoran GWM sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Masih terdapat sanksi peringatan/teguran, administrasi dan denda terhadap proses dan penyampaian Laporan Rutin Bank kepada Regulator, antara lain:
- Masih terdapat sanksi dan denda dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia atas keterlambatan antara lain : penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Tahunan 2013, penyampaian laporan *action plan* perbaikan BMPK, penyampaian laporan tahunan penggunaan teknologi, penyampaian RBB tahun 2014-2016, dan sebagainya. Sedangkan kesalahan dalam penyampaian pelaporan LHBK tanggal 26 Maret 2014 Form 201 (1 item).
 - Surat Peringatan I dari BEI atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Interim yang berakhir per 31 Maret 2014.
 - Surat Peringatan/Teguran Administratif dan/atau sanksi denda dari Otoritas Jasa Keuangan atas keterlambatan penyampaian laporan perubahan daftar rincian pihak terkait.
- d) Struktur dan komposisi Dewan Komisaris hasil keputusan RUPSLB pada tanggal 30 Desember 2014 belum memenuhi ketentuan dengan jumlah 2 orang dan Bank telah menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dengan komitmen penambahan Komisaris melalui RUPSLB paling lambat bulan Maret 2015.
- e) Posisi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 20 Nopember 2014 masih kosong, karena Komisaris Independen hanya seorang yang sudah merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko.
- f) Monitoring kredit belum dilakukan dengan optimal (aspek kepatuhan) yang dapat berdampak pada:
- Cukunya informasi kemampuan dan perkembangan bisnis debitur.
 - Proses Perpanjangan Fasilitas Kredit (Perpanjangan Sementara).
 - Tidak terjadi lagi proses Perpanjangan Fasilitas Kredit yang dilakukan mendekati

- jatuh tempo, sehingga kualitas analisis menjadi optimal.
- *Bridging Finance* pada saat debitur mendapat bayaran dari bowhir/relasi bisnisnya dapat termonitor dengan baik.
 - Tingkat kolektibilitas yang belum sesuai dengan ketentuan.
 - Penurunan kualitas dari aspek kinerja, prospek usaha dan kemampuan membayar dan bisnis debitur tidak terdeteksi sejak dini.
- g) Proses pemberian kredit belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan), sehingga berdampak:
- Lemahnya monitoring kesesuaian penggunaan kredit pada *end-user* (misal: *bridging BP takeover* dari Bank N dan faktor kepentingan pribadi pengawas BP), serta mengantisipasi munculnya kredit-kredit bermasalah dari debitur yang lainnya.
 - Masih lemahnya kualitas SDM di unit bisnis, yang sudah mulai ditindaklanjuti melalui upaya pemberian *training*, serta adanya program Banking Development Officer (BDO) dan Banking Development Staff (BDS).
 - Pemenuhan kelengkapan dokumen (legalitas usaha, misal : UUG untuk usaha industri antara lain: PT PI, IWT, S, dan SKDP a/n. PT MPP, PT ASH, PT PMM).
 - Kepatuhan atas Keputusan RKK (Laporan Keuangan yang belum *Audited*, antara lain: PT ASH. PT AF; Kecukupan dan pengikatan agunan CV. J).
- h) Bank telah memiliki Kebijakan dan SOP terkait penetapan kualitas kredit sesuai dengan PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Kualitas Aset Bank Umum, namun belum mencakup penentuan kualitas kredit bagi fasilitas kredit debitur yang telah jatuh tempo dan belum dilakukan perpanjangan dengan perjanjian kredit baru (contoh: BPK, CV REI, PT ASH).
- i) Bank telah mengimplementasikan perhitungan PSAK 50/55 dalam pelaporan Bank, namun perhitungan PSAK 50/55 secara manual hanya dilakukan untuk perhitungan CKPN kredit secara individual karena PSAK *engine* untuk melakukan perhitungan PSAK 50/55 secara otomatis masih dalam proses pengembangan. Untuk CKPN Kolektif, besarnya Probability of Default telah dilakukan secara auto system oleh PSAK *engine* (Bank Vision).
- j) Masih terdapat *fraud* internal di Kantor Cabang Medan, Serpong, dan Kuningan yang sudah diselesaikan oleh Bank.
- k) Pemenuhan komitmen dan batas waktu penyelesaian atas hasil temuan Tim Pengawas OJK yang masih belum selesai atau sebagian masih dalam proses penyelesaian sehingga diperlukan permohonan perpanjangan komitmen penyelesaian kepada OJK, serta diperlukan komitmen upaya penyelesaian yang lebih intensif dan efektif.
2. Melakukan pemantauan atas aktivitas yang berkaitan dengan perizinan pembukaan/ relokasi/penutupan dan peningkatan status jaringan kantor yaitu melalui :
- Penyusunan *Compliance Checklist* persiapan kantor untuk memastikan kesiapan fisik gedung, kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan aktiva yang akan digunakan sebelum pengajuan permohonan izin kepada Bank Indonesia.
 - Koordinasi dengan *project manager* (Unit Kerja terkait yang berwenang).
 - Melakukan *review* dokumen yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- Melakukan kunjungan (*on-site*) sekaligus untuk melihat dan memastikan kesiapan sarana dan prasarana ke lokasi kantor yang diajukan permohonannya kepada Bank Indonesia.

Sampai dengan periode Desember 2014 PT Bank Mutiara Tbk telah mengajukan Pembukaan maupun Relokasi, dan Perubahan Status Jaringan Kantor yang telah disetujui, belum dapat disetujui atau masih dalam proses persetujuan Bank Indonesia dan telah diklasifikasikan dengan rincian :

Keterangan	Status Januari s/d Desember 2014 Disetujui Bank Indonesia		Dalam Proses Persetujuan	Belum Dapat Disetujui
	Business Plan	Realisasi		
Pembukaan Kantor	1	-	-	1*)
Relokasi Kantor	5	5	-	-
Penutupan Kantor	-	-	-	-
Penurunan/ Peningkatan Status	-	-	-	-

*) Tidak disetujui OJK berdasarkan Surat OJK No.S-41/PB.12/2014 tanggal 16 April 2014, sedangkan untuk relokasi kantor semuanya sudah memperoleh izin tertulis melalui surat dari OJK.

Sampai dengan periode Desember 2014 jumlah jaringan kantor sebanyak 61 kantor dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Kantor	Jumlah	
	Sampai dengan Juni 2014	Sampai dengan Desember 2014
Kantor Wilayah	4	4
Kantor Cabang	23	23
Kantor Cabang Pembantu	35	35
Kantor Kas	3	3
Total	61	61

- Mengikuti proses pengambilan keputusan manajemen bank dengan mengkaji/ menguji terlebih dahulu terhadap setiap rencana/rancangan peraturan intern Bank maupun kebijakan/keputusan manajemen apakah telah patuh pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, termasuk pula memberikan arahan dan saran dalam mengikuti proses Rapat Komite Kredit (RKK), Rapat Teknis, Rapat penetapan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), Rapat ALCO, Rapat Penyusunan Kebijakan dan SOP, dan rapat-rapat lainnya terkait dengan penerapan kepatuhan dalam menentukan kebijakan dan aktivitas Bank.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

4. Melakukan pemantauan penerapan kebijakan dan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) kegiatan operasi Bank pada setiap satuan kerja/Divisi terkait, yang memberikan "*Compliance Opinion*" atas penerapan kebijakan dan prosedur kepatuhan seperti permohonan masukan/opini dari Divisi/unit kerja lain dalam rangka persiapan peluncuran produk dan aktivitas baru agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
5. Mensosialisasikan Kesadaran kepatuhan untuk seluruh jajaran insan Bank Mutiara dengan :
 - Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan prosedur, peraturan dan ketentuan yang berlaku yang diselenggarakan secara internal bank maupun oleh pihak eksternal di tempat pelatihan yang ditentukan kepada seluruh karyawan di unit kerja/Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang/Capem/Kas, antara lain pelatihan terkait dengan APU-PPT, GCG, Kepatuhan, dan lain-lain.
 - Rapat Budaya setiap hari Rabu oleh seluruh Divisi/unit kerja, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang/Capem/Kas yang senantiasa mengingatkan karyawan untuk melaksanakan aktivitas kinerja sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
6. Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan untuk membangun Budaya Kepatuhan di seluruh unit organisasi Bank sehingga pengelolaan Risiko Kepatuhan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan transaksi dan aktivitas operasional Bank. Pengelolaan Risiko Kepatuhan Bank meliputi :
 - Pengukuran Profil Risiko untuk Risiko Kepatuhan
 - Risiko Kepatuhan yang dihadapi.
 - Mitigasi Risiko Kepatuhan yang telah dilaksanakan.
 - Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi ke depan.

Hasil dari *Self Assessment* atas *Compliance Risk* yang menjadi bagian dari Laporan *Risk Profile* Bank tahun 2014 telah disampaikan kepada OJK sebagai berikut :

No	Periode/Posisi Penilaian	Peringkat Risiko Inheren	Trend	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Trend
1	Triwulan 2/Juni 2014	<i>Moderate to High</i> (Maret 2014 = <i>Moderate to High</i>)	Tetap	<i>Fair</i> (Maret 2014 = <i>Fair</i>)	Tetap
2	Triwulan 4/Des. 2014	<i>Moderate To High</i> (Sept. 2014 = <i>Moderate to High</i>)	Tetap	<i>Fair</i> (Sept 2014 = <i>fair</i>)	Tetap

7. Menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK tentang pelaksanaan tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dalam bentuk :
 - Laporan Rencana kerja kepatuhan, yang dimuat dalam rencana bisnis Bank.
 - Laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia/OJK dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2014 terkait kebijakan Direksi tidak ada Laporan Khusus yang diterbitkan, kecuali disampaikan *Laporan Action Plan* karena penilaian GCG "4"(Kurang Baik).

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- Laporan kepatuhan, yang ditandatangani oleh Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan disampaikan secara semesteran (setiap periode Juni dan Desember) serta disajikan secara komparatif dalam 2 (dua) periode laporan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Selama tahun 2014 telah disampaikan Laporan Kepatuhan kepada OJK dengan perincian sebagai berikut :

Laporan Kepatuhan	Nomor Surat	Tanggal Surat
Semester I	No.24.01/S-Dir-CPD/Mutiara/VII/2014	24 Juli 2014
Semester II	No.29.07/S-Dir-CPD/Mutiara/I/2015	29 Januari 2015

8. Terkait tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan melalui UKPN Kantor Pusat dan UKPN Kantor Cabang/Capem telah melakukan pengawasan terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan PBI No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 dan SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta telah melakukan penyesuaian *action plan* pelaksanaan program APU dan PPT antara lain:

1. Laporan Realisasi Pengkinian Data PT Bank Mutiara Tbk Periode Januari 2014 s/d Desember 2014” sesuai target yang telah disusun oleh seluruh kantor dalam Laporan Kepatuhan Semester II Tahun 2013 terdahulu. Selanjutnya disusun kembali “Laporan Rencana Pengkinian Data Tahun 2015 PT Bank Mutiara Tbk Posisi Data Desember 2014” yang berpedoman pada format lampiran dalam SE BI No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013.
2. Dilakukan *Upgrade* Sistem Smart-AML dan diimplementasikan pada seluruh kantor dalam rangka *filtering* penerimaan nasabah dan nasabah *exist*, *Walk in Customer (WIC)* berdasarkan *watch-list (DHN, Politically Exposed Person (PEP), SUN list, OFAC, SUS Saction, Internal Blacklist and Custom List)* dari BI dan OFAC, *monitoring suspicious transaction* dan *cash transaction*, pengelompokan risiko nasabah berdasarkan *Risk Based Approach (RBA)*, dan kegiatan lainnya terkait dengan APU-PPT.

Dalam rangka penerapan *governance structure*, senantiasa dilakukan penyempurnaan struktur organisasi, penataan fungsi dan tanggung jawab yang lebih jelas, termasuk di dalamnya UKPN di Kantor Pusat maupun di setiap Kantor Cabang/ Capem/ Kas, yang implementasinya antara lain sebagai berikut :

1. Buku Kebijakan dan Prosedur Standar APU-PPT edisi Tahun 2013 (Revisi 2), sudah dibagikan kepada seluruh Kepala Divisi dan Kantor Cabang/Capem/Kas;
2. Tugas dan Tanggung Jawab UKPN di Kantor Pusat dan Cabang (SK Dir. No.019/Mutiara/SK-DIR/III/2010 tanggal 17 Maret 2010) tentang tugas dan tanggung jawab UKPN Pusat dan Cabang, serta Peningkatan kompetensi seluruh karyawan melalui pelatihan APU PPT dilakukan minimal sekali dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pengelompokan dan Penanganan Nasabah Berdasarkan Risiko/*Risk Based Approach* (SK Dir. No.020/Mutiara/SK-DIR/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 untuk penanganan nasabah berdasarkan risiko (*risk based approach*);
4. Kebutuhan Informasi dan Dokumen Calon Nasabah/Nasabah dan *Walk In*

Customer/WIC (SK Dir No.123/Mutiara/SK-DIR/V/2010 tanggal 19 Mei 2010).

Governance Process dalam penerapan APU dan PPT, adalah merupakan kualitas proses dari ketersediaan *governance structure* yang dapat diuji efektivitasnya, dalam pelaksanaan *Governance Process* terkait APU dan PPT, antara lain implementasinya sebagai berikut :

1. Bank telah mengimplementasikan sistem aplikasi *Smart AML (Red Flag)*, dan pada seluruh Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kas, serta melakukan administrasi atau tata usaha data nasabah pada *core banking system* menjadi lebih baik melalui Pengkinian Data Nasabah secara berkesinambungan & penerapan *Single CIF*;
2. Pemetaan nasabah berdasarkan risiko (*Customer Risk Based Approach*) dalam rangka pemantauan yang ketat terhadap rekening nasabah yang termasuk dalam kategori Risiko Tinggi, yaitu PEP, *Dormant Account*, Kegiatan Usaha Nasabah Berisiko Tinggi, dan kategori risiko tinggi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

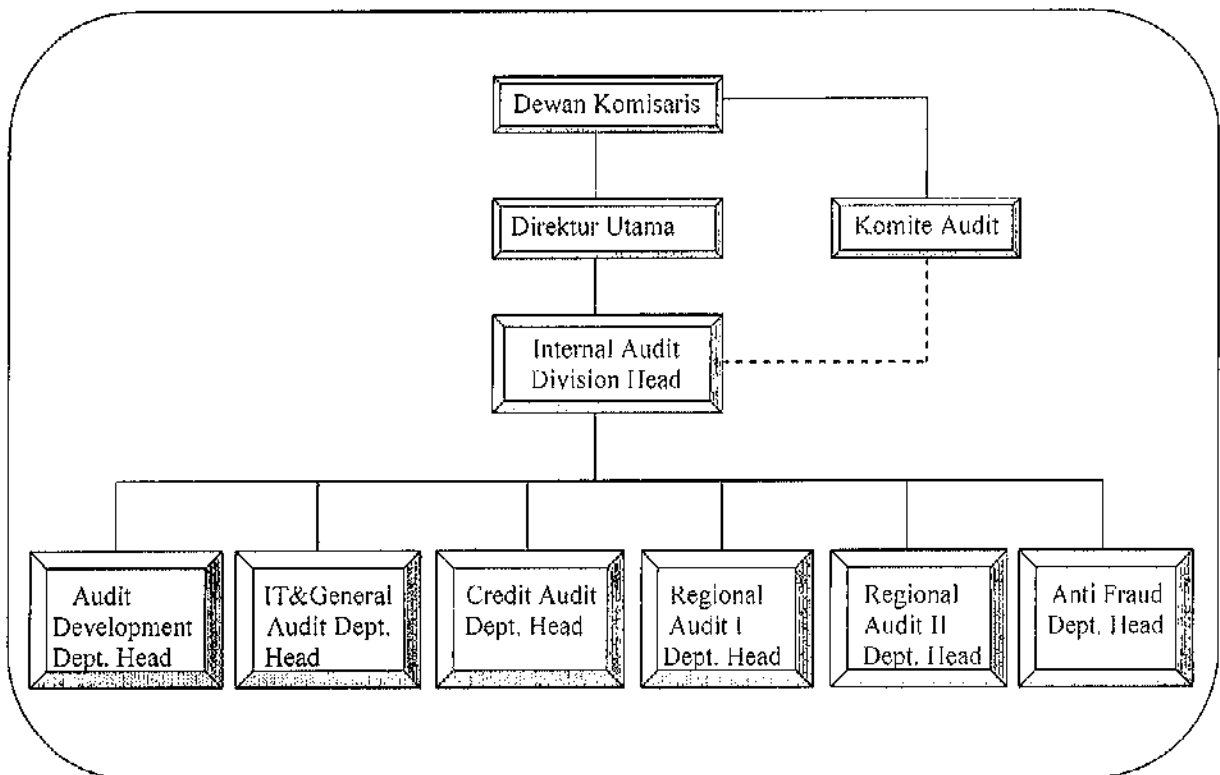
4.2. Fungsi Audit Intern

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) PT Bank Mutiara Tbk merupakan Independen unit yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya, meliputi aktivitas *Assurance* dan *Consulting* bidang *Risk/Control* yang didisain untuk dapat memberikan nilai tambah, dapat meningkatkan operasional, membantu dan mengamankan pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan cara melakukan evaluasi efektivitas dan meningkatkan fungsi *Control*, *Risk Management* dan *Governance Process*.

Dalam rangka pelaksanaan peran tersebut diatas, SKAI berperan sebagai *Strategic Business Partner* bagi semua unit kerja dan unit kerja telah merasakan manfaat keberadaan SKAI bagi pengamanan dan peningkatan bisnis.

Dalam rangka menjaga independensi fungsi audit intern, posisi SKAI berada dibawah langsung dan melapor kepada Direktur Utama, dan mempunyai garis koordinasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI berperan sebagai mata dan telinga Direktur Utama terhadap penegakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta pengamanan kegiatan operasional Bank terkait dengan aktivitas penghimpunan dana, kredit, biaya dan *fee based income*. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SKAI telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB) yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT Bank Mutiara Tbk Tahun 2014



SKAI membantu Bank dalam mencapai tujuan dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern/control serta GCG. Aktivasnya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, teknologi, dan sistem informasi serta fungsi-fungsi pendukung di Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya, SKAI berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan karyawan Bank sesuai penugasan audit tanpa dibatasi oleh pihak manapun.

Audit Charter adalah dokumen formal yang mendefinisikan: Tujuan, Aktivitas SKAI, Kewenangan dan Tanggung Jawab SKAI dalam Organisasi, termasuk hubungannya dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai garis koordinatif kepada Komite Audit untuk mengkomunikasikan hasil-hasil kerja SKAI kepada Direksi dan Komisaris. SKAI PT Bank Mutiara Tbk bertugas membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk memastikan kelengkapan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), membuat *Annual Audit Plan* yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan pelaksanaannya dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Dalam menetapkan pandangan dan pemikirannya, Kepala Divisi Internal Audit diberikan ruang yang bebas dan obyektif serta bebas dari tekanan pihak manapun (*independence*), sehingga terhindar dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya.

Dalam melaksanakan audit, SKAI membuat analisa dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan/audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi

obyektif tentang kegiatan yang perlu mendapat perhatian khusus oleh semua tingkatan manajemen, juga mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Audit dilakukan dengan metodologi *Risk Based Audit* bertujuan untuk melakukan evaluasi kelengkapan dan penilaian kehandalan/efektivitas dari SPI untuk dapat meminimalisir risiko, disamping itu temuan audit akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan *corrective action* atas kelemahan SPI.

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Audit Internal dan Pelatihan

Untuk terus meningkatkan kompetensi auditor SKAI secara berkesinambungan sehingga mampu menjalankan fungsi audit intern secara profesional, maka kualifikasi/sertifikasi profesi yang diperlukan bagi auditor SKAI adalah :

- Semua SDM SKAI telah mempunyai Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 untuk Auditor dan Tim Leader, Level 1 dan 2 untuk Department Head dan Level 1,2 dan 3 untuk Kepala SKAI.
- Selain itu, untuk mendukung kompetensi teknis, SKAI telah mempunyai 3 (tiga) orang auditor yang mempunyai *Certified Bank Internal Audit* dari LSPP.

Seiring dengan dinamika perusahaan, SKAI dituntut untuk melakukan penyesuaian yang berkelanjutan agar mampu mempertahankan standar kinerja. Untuk itu PT Bank Mutiara Tbk senantiasa mengikutsertakan petugas dan pejabat SKAI ke pelatihan baik internal maupun eksternal agar diperoleh kualifikasi yang :

- a. Memiliki pengetahuan yang memadai secara umum dan teknis dalam bidang tugas yang relevan dengan spesialisasinya.
- b. Mempunyai perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun dan loyal.
- c. Memiliki kemampuan mempertahankan kualitas profesi yang profesional.
- d. Memiliki kecakapan interaksi dan komunikasi secara lisan maupun tulisan.
- e. Dapat meningkatkan perannya menjadi konsultan dan *catalyst*.

Evaluasi atau Kaji Ulang Pelaksanaan Audit Intern Bank

Untuk melakukan evaluasi atau kaji ulang atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) serta perbaikan yang mungkin dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, maka paling kurang setiap tiga tahun sekali dilakukan evaluasi atau kaji ulang oleh auditor/pihak ekstern, yang terakhir telah dilakukan pada tahun 2013 untuk periode audit 2011-2013 dan dinyatakan bahwa SKAI telah memenuhi ketentuan SPFAIB. Untuk evaluasi/kaji ulang periode berikutnya atas hasil kerja SKAI Bank dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) akan dilaksanakan pada tahun 2016.

Tujuan dan Tahapan Pelaksanaan Audit Intern Bank

SKAI dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk memastikan terlaksananya SPI yang bertujuan untuk :

- a. Memastikan pengamanan dana masyarakat, meliputi deposito, giro, tabungan serta dana pihak ketiga lainnya.

- b. Pengamanan *Assets* berupa audit atas Kualitas Aktiva produktif (kredit) melalui audit unit kerja pengelola kredit dan *Loan Review (end to end process)* untuk memastikan bahwa proses kredit (*Inisiasi, Analisa, Keputusan, Pencairan dan Monitoring*) telah dilakukan secara *prudent*.
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan, pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, efektif dan mengawasi kegiatan tertentu seperti kegiatan sistem teknologi informasi (*Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift, dan lain-lain*).
- d. Kebenaran dan keutuhan informasi, termasuk pencatatan kewajiban Bank dan rekening administratif yang akurat, lengkap dan tepat waktu.
- e. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan, termasuk penilaian aspek-aspek yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan Bank.
- f. Penilaian *awareness* lini manajemen/supervisi terhadap 8 (delapan) komponen SPI.

Pra Audit diawali dengan pemilihan metode pendekatan audit seperti *Scope Audit* berdasarkan hasil *assessment, Audit Program* terkait, *Mandays*, penetapan *sample size*, tehnik pengujian, bukti minimal dan cara mendapatkannya.

Penetapan penugasan ditetapkan oleh Kepala Divisi Internal Audit berdasarkan saran dari *Regional Head/General Audit Head* dan hasil pra audit.

Penugasan Audit dimulai dengan pembuatan surat tugas, *entry meeting, field audit, exit meeting*, pembuatan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) dan hasil audit berupa hasil penilaian SPI akan dicerminkan dalam *Audit Rating* dengan kualifikasi *Strong, Satisfactory, Fair, Marginal* dan *Unsatisfactory*.

Hasil audit akan ditindaklanjuti dengan pembuatan *summary report* ke Direktur Utama dan atas kelemahan SPI akan ditindaklanjuti dengan pembuatan *corrective action*.

4.2.1. Pelaksanaan Audit Intern

A. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Yaitu pemeriksaan dengan ruang lingkup aspek kegiatan operasional Bank, dengan tujuan menilai efektivitas SPI terutama penilaian atas sistem dan prosedur yang berlaku serta implementasinya. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada seluruh Kantor Cabang/Capem dan Divisi-Divisi Kantor Pusat. Pada tahap awal menuju *Risk Based Audit* maka pada awal tahun telah digunakan metodologi *COSO Framework* (5 komponen) *Up dates 2014* yang meliputi:

- a. *Control Environment*
- b. *Risk Assessment*
- c. *Information & Communication*
- d. *Monitoring*
- e. *Control Activity*

B. Pemeriksaan Khusus (*Anti Fraud*)

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terkait investigasi fraud yang mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 09 Desember 2011 dan penugasan khusus dari pihak manajemen baik di Kantor Pusat maupun Kantor

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

Cabang/Capem. Pemeriksaan ini dilakukan menurut kebutuhan dan urgensi serta bersifat insidental.

Pada tahun 2014 SKAI telah melakukan *special audit* terhadap kasus-kasus sebanyak 7 (tujuh) kasus *fraud* dan 4 (empat) penugasan khusus.

C. Pemeriksaan Pasif (*On Desk Audit*)

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara *on desk* yang meliputi monitoring kepada penyelesaian DMTL, Rekening Perantara, penelitian dan pembuatan rekapitulasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kantor Cabang/Capem.

4.2.2. Realisasi/Pencapaian Penugasan Audit Intern

Pada tahun 2014, SKAI telah melaksanakan pemeriksaan umum (*General Audit*) dan pemeriksaan khusus (*Special Audit*) sebanyak 79 obyek pemeriksaan, yang terdiri dari 21 Kantor Cabang, 37 Kantor Cabang Pembantu, dan 10 Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat dan 11 (sebelas) penugasan/audit khusus.

Adapun pencapaian terhadap Rencana Audit dengan Realisasi Audit sebagai berikut :

Obyek Audit	2014			2013		
	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian (%)	Rencana Audit	Realisasi Audit	Pencapaian (%)
Kantor Cabang	21	21	100	21	21	100
Kantor Cabang Pembantu	37	37	100	33	35	106
Kantor Kas *)						
Unit Kerja/Divisi Kantor Pusat	19	10	52,63	10	13	125
Penugasan Khusus	-	11	100	-	9	100
Total Audit	77	79	100	64	78	121
Loan Review	90	90	100	50	84	
Audit Tematik	3	3	100	3	3	100

Keterangan :
 *) Pemeriksaan Kantor Kas menjadi satu kesatuan dengan audit cabang yang menjadi Induknya.
 **) Audit di Divisi tidak tercapai karena pada tahun 2014 ada proses divestasi yang petugasnya menggunakan beberapa tenaga auditor, terhadap divisi2 yang belum diaudit pada tahun 2014 akan diprioritaskan untuk diaudit pada thn 2015.

4.2.3. Temuan Pemeriksaan Audit Intern

Berikut ini kesimpulan temuan penting beberapa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat/Kredit sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada Kantor Cabang/Capem

Hasil Audit SKAI pada Kantor Cabang/Capem, secara umum dapat diungkapkan bahwa pengendalian intern sudah cukup efektif dimana temuan-temuan audit banyak disebabkan karena kelalaian dan kurang maksimalnya kontrol/monitoring yang dilakukan oleh petugas maupun supervisornya terhadap transaksi dan laporan harian.

2. Bidang Kredit

Dari hasil audit bidang kredit/*Loan Review*, ditemukan kelemahan mitigasi risiko kredit atas risiko bisnis debitur (kewajaran omzet usaha dan Laporan Keuangan) dan kurangnya monitoring pasca pencairan kredit.

3. Pemeriksaan pada seluruh Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat

Hasil audit SKAI pada Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat pada umumnya temuan audit lebih disebabkan karena belum terlaksananya kegiatan sesuai dengan SOP yang berlaku serta belum lengkapnya SOP yang ada. Hal tersebut terjadi terutama karena saat ini adanya perubahan risiko yang belum termitigasi dalam SOP.

4.3. Fungsi Audit Ekstern

Pengawasan terhadap PT Bank Mutiara Tbk. selain dilaksanakan oleh auditor internal, juga dilaksanakan oleh auditor eksternal, diantaranya BI/OJK dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern, maka PT Bank Mutiara Tbk mengacu kepada dan berupaya untuk memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana yang diatur dalam ketentuan BI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tersedianya laporan keuangan yang memadai serta kecukupan proses pelaporan keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Guna mendukung tercapainya laporan keuangan yang memadai dan kecukupan proses pelaporan keuangan, maka peran Auditor Eksternal (dalam hal ini Kantor Akuntan Publik) sangatlah penting.

Peran dan fungsi auditor eksternal antara lain adalah:

1. Memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Memastikan laporan keuangan internal sudah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pengungkapan informasi (*disclosure*) secara transparan kepada masyarakat luas melalui Bank Indonesia, Media Cetak, YLKI, LPPI, dan sebagainya serta ditampilkan pada *Home Page* atau *WebSite* PT Bank Mutiara Tbk, dengan alamat www.mutiarabank.co.id.

Transparansi kondisi keuangan bank diatur dalam:

1. Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
2. Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

Implementasi penyajian dan penyusunan laporan keuangan PT Bank Mutiara Tbk disampaikan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang terdiri dari:

- Laporan Tahunan
- Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- Laporan Keuangan Bulanan
- Laporan Keuangan Konsolidasi

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari :

- 1) Informasi umum, yang meliputi :
 - a. Kepengurusan;
 - b. Kepemilikan;
 - c. Perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank;
 - d. Strategi dan kebijakan manajemen;
 - e. Laporan manajemen.
- 2) Laporan Keuangan tahunan, yang meliputi :
 - a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b. Laporan Laba Rugi Komprehensif;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d. Laporan Arus Kas;
 - e. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi.
- 3) Opini dari Akuntan Publik.
- 4) Jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposures*) yang dihadapi Bank serta praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank.
- 5) Seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.
- 6) Aspek pengungkapan (*disclosure*) lain sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dalam hal belum tercakup dalam angka (1) sampai dengan angka (5) diatas.
- 7) Informasi lainnya.

Dalam menjalankan fungsi *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu fungsi transparansi kondisi keuangan, Bank telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*Audited*) dan tahun 2013 (*Audited*). Sesuai dengan RUPS PT Bank Mutiara Tbk yang telah diselenggarakan pada tanggal 04 Juni 2014, bahwa RUPS memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dalam rangka kebutuhan atas Audit Laporan Keuangan tahun buku 2014.

Untuk Laporan Keuangan tahun buku 2014 dan 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjadi & Tamara (*An Independent Member Firm of Morison International*) dengan opini "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" dalam segala hal yang material.

Informasi ringkas Laporan Keuangan Tahunan posisi Desember 2014 (*Audited*) dan tahun 2013 (*Audited*) dapat kami sampaikan sebagai berikut :

**Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

Laporan Keuangan

ASET (Audited)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2014	31-12-2013
1	Giro pada Bank Indonesia	1.321.263	2.446.981
2	Giro pada Bank Lain - Neto	151.026	229.488
3	Penempatan pada Bank Indonesia & Bank Lain - Neto	1.1435.819	157.001
4	Surat-Surat Berharga - Neto	1.684.151	695.395
5	Tagihan Derivatif - Neto	117	0
6	Kredit yang Diberikan - Neto	7.234.672	10.128.316
7	Agunan yang Diambil Alih - Neto	0	0

LIABILITAS dan EKUITAS

LIABILITAS (Audited)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2014	31-12-2013
1	Simpanan Nasabah: - Pihak Berelasi - Pihak Ketiga	24.736 11.002.003	42.378 11.515.703
2	Simpanan dari Bank lain	48.745	1.063.369
3	Liabilitas Derivatif	126	1.606

EKUITAS (Audited)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2014	31-12-2013
1	Modal Saham yg ditempatkan & disetor penuh	10.223.155	8.973.675
2	Tambahan modal disetor	178.759	178.759
3	Uang Muka Setoran Modal	300.000	1.249.480
4	Surplus Revaluasi Aset Tetap	128.907	132.425

LABA (RUGI) (Audited)

(dalam jutaan rupiah)

No	Pos-Pos Tertentu	31-12-2014	31-12-2013
1	LABA (RUGI) BERSIH	(662.007)	(1.136.045)
2	LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(0,0008)	(0,0017)

Rasio-Rasio Keuangan Yang Penting (Audited)

	Pos-Pos Tertentu	31-12-2014	31-12-2013
Permodalan	- Rasio KPMM yang tersedia untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	13,65%	14,32%
	- Rasio KPMM yang tersedia setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional	13,58%	14,03%
	Aktiva Tetap terhadap Modal	31,90%	22,97%
Aktiva Produktif	- Aktiva Produktif bermasalah	22,21%	20,23%
	- NPL - Gross	12,24%	12,28%
	- NPL - Neto	5,45%	3,61%
	- PPAP terhadap Aktiva Produktif	18,71%	17,34%
	- Pemenuhan PPAP	112,08%	104,81%

**Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

Rentabilitas	- ROA	(4,96)%	(7,58)%
	- ROE	(57,88)%	(142,48)%
	- NIM	0,24%	1,67%
	- BOPO	135,91%	173,80%
Likuiditas	LDR	71,14%	96,31%
Kepatuhan	Giro Wajib Minimum (GWM)		
	- GWM Primer Rupiah	11,68%	19,49%
	- GWM Sekunder Rupiah	19,22%	16,81%
	- GWM Valas	8,77%	8,13%
	PDN (Per posisi Neraca terhadap Modal Akhir Tahun)	3,18%	13,65%

BAB V
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN

5.1. Penerapan Manajemen Risiko

PT Bank Mutiara Tbk telah menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dengan perubahannya dalam PBI Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 serta Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dengan perubahannya dalam SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, dan ketentuan Bank Indonesia lainnya terkait dengan manajemen risiko.

Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut, penerapan manajemen risiko dan tata kelola Bank (*Good Corporate Governance*) yang tepat dan sehat akan memiliki peran dalam meningkatkan nilai tambah dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi risiko dan kerugian Bank di masa mendatang yang disesuaikan dengan kompleksitas serta kondisi internal bank.

Untuk mencapai tujuan diatas, maka diperlukan adanya budaya risiko (*risk awareness*) dan kemampuan teknis yang memadai daripada seluruh unit kerja di Bank Mutiara, dimana hal ini menjadi tanggung jawab dan melibatkan seluruh unit kerja di Bank Mutiara.

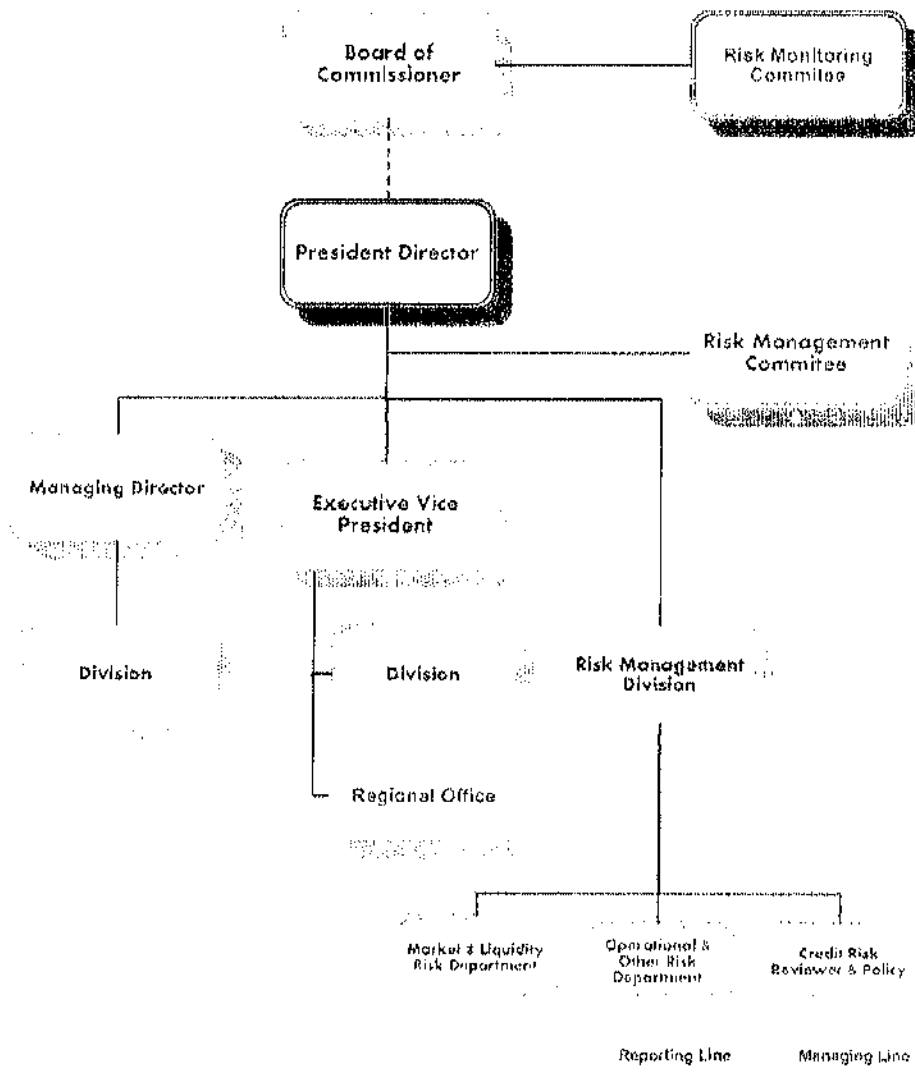
Efektifitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko oleh PT Bank Mutiara Tbk meliputi 4 (empat) pilar yaitu :

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari pengawasan Manajemen,

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Bank serta memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan risiko Bank serta pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*) di tingkat Komisaris dan di tingkat Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*).

Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun dan menyesuaikan kebijakan strategi serta pedoman penerapan manajemen risiko serta untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko berjalan efektif. Mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko, serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan untuk membahas permasalahan yang spesifik pada jenis risiko tertentu dan membutuhkan putusan segera dengan dilakukan rapat RMC yang bersifat terbatas, atau yang disebut sub-RMC. Terdapat 2 (dua) sub-RMC yaitu *Credit Risk Committee* dan *Operational Risk Committee*, yang dibentuk untuk membahas permasalahan-permasalahan yang menyangkut risiko kredit, risiko operasional dan risiko lainnya.

Berikut adalah Struktur Organisasi Manajemen Risiko pada PT Bank Mutiara Tbk :



b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko,

Penerapan manajemen risiko di PT Bank Mutiara Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank Mutiara Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya. Penetapan limit dikelola dalam kegiatan usaha dan produk dan telah disesuaikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan limit tersebut ditinjau secara berkala untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko

Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap ke delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko reputasi. Salah satu pengukuran risiko tercermin

dalam Laporan Profil Risiko triwulanan dan Laporan *Risk Control Self Assessment / RCSA*, dan untuk pemantauan risiko dilakukan antara lain dengan cara mengevaluasi limit transaksi treasury, serta pengendalian risiko antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *high*. Sistem Informasi Manajemen Risiko yang diaplikasikan antara lain *system Value at Risk (VaR) Forex* dan *Interest Rate Bond* yang dapat di akses Divisi Treasury dan melaporkannya secara berkala kepada Direksi.

d. **Sistem pengendalian internal yang efektif dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank.**

Pengendalian internal telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko pada aktivitas fungsional yang memiliki eksposur risiko. Selain itu adanya pemisahan fungsi yang jelas antara unit kerja operasional (*risk taking unit*) dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian risiko (*risk management unit*).

Penerapan manajemen risiko di PT Bank Mutiara Tbk telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, diantaranya Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR sebagai ketentuan tertinggi dalam memberikan arahan kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko dalam rangka mengamankan PT Bank Mutiara Tbk atas risiko yang dihadapi dalam aktivitas bisnisnya.

PT Bank Mutiara Tbk telah membentuk Divisi/Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai unit kerja independen yang berfungsi untuk membuat kebijakan dan memantau risiko-risiko yang ada di dalam kegiatan serta proses bisnis.

Beberapa aspek/upaya yang telah dilakukan Manajemen dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko, antara lain :

- a. Melakukan pengkinian kebijakan, dan prosedur disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
- b. Melakukan pengukuran Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating (RBBR)*, dengan menggunakan 4 cakupan penilaian yaitu Laporan Profil Risiko, Laporan *Good Corporate Governance*, aspek Rentabilitas dan Permodalan.
- c. Dalam upaya meningkatkan kompetensi pegawai Bank dalam hal Manajemen Risiko, Manajemen secara berkelanjutan mengikutsertakan pegawai Bank dalam Sertifikasi Manajemen Risiko, sehingga dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
- d. Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2015-2018.
- e. Melakukan *upgrade Core Banking System* dengan membentuk Tim Migrasi BFEQ 4.0.
- f. Pemenuhan CAR ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) dan melakukan perhitungan ATMR sesuai dengan Regulasi terbaru.

Terkait penilaian Profil Risiko yang berpedoman pada ketentuan/Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Perubahan atas Surat Edaran No.5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maka risiko-risiko yang dikelola oleh PT Bank Mutiara Tbk dalam melakukan aktivitasnya dibagi menjadi 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan. Masing-masing risiko dinilai dari dua aspek, yakni Risiko Inheren (risiko yang melekat) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Risiko Inheren merupakan risiko yang terkandung dalam aktivitas Bank,

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

sementara Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan kemampuan Bank dalam mengendalikan risiko dalam aktivitas tersebut. Kedua penilaian tersebut diperlukan untuk menentukan gambaran umum risiko Bank, yang kerap disebut Profil Risiko. Sebagai panduan dalam mengelola kedelapan jenis risiko tersebut, PT Bank Mutiara Tbk memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) yang senantiasa diperbarui/disesuaikan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh jenis risiko yang melekat (*Inherent Risk*) pada Bank, maka diperlukan bentuk struktur organisasi pengelolaan yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, kemampuan Bank serta tujuan dan kebijakan PT Bank Mutiara Tbk melalui penyusunan Laporan Profil Risiko secara triwulanan oleh unit kerja/Risk Management Division sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berikut ini hasil pengukuran atas Profil Risiko PT Bank Mutiara Tbk berdasarkan Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko periode Desember 2014 (penilaian OJK) dibandingkan dengan periode September 2014 :

Profil Risiko	Desember 2014 (OJK)			September 2014		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	Moderate To High	Marginal	4	Moderate To High	Fair	4
Risiko Pasar	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
Risiko Likuiditas	Moderate To High	Fair	4	Moderate To High	Fair	4
Risiko Operasional	Moderate To High	Fair	4	Moderate To High	Fair	4
Risiko Hukum	Moderate To High	Fair	4	Moderate To High	Fair	4
Risiko Strategik	Moderate To High	Fair	4	Moderate To High	Fair	4
Risiko Kepatuhan	Moderate To High	Fair	4	Moderate To High	Fair	4
Risiko Reputasi	Moderate	Fair	3	Moderate To High	Fair	4
Peringkat Komposit	Moderate To High	Fair	4	Moderate To High	Fair	4

Penilaian OJK atas Laporan Profil Risiko Bank posisi 31 Desember 2014 sesuai surat OJK No.SR-23/PB.31/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Laporan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank Saudara Posisi 31 Desember 2014.

Setelah dilakukan pengukuran atas Profil Risiko periode Desember 2014 dihasilkan peringkat komposit risiko adalah *Moderate To High* yang mempunyai *trend* risiko tetap dibandingkan peringkat komposit Triwulan sebelumnya periode September 2014.

Dengan melihat peringkat komposit risiko inheren berada pada posisi Moderate To High dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada posisi Fair, maka peringkat Profil Risiko per Desember 2014 adalah peringkat 4 (empat).

Berdasarkan Laporan Profil Risiko Bank periode Desember 2014 (data kualitatif), dapat diuraikan 8 jenis risiko utama sebagai berikut :

a. Risiko Kredit

Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan atau potensi kegagalan nasabah (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai perjanjian, baik karena tidak mampu ataupun tidak mempunyai niat baik atau karena sebab-sebab lain, sehingga Bank mengalami kerugian.

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengantisipasi risiko kredit di antaranya:

- Pengelolaan Risiko Kredit dilakukan dengan melibatkan Unit Bisnis dan *Non Voting Member* (dalam hal ini Risk Management Division, Operation Division, Compliance Division, dan Legal Division) melalui mekanisme Rapat Komite Kredit, yang dilaksanakan sesuai dengan batas kewenangan dari masing-masing pemegang kewenangan memutus kredit.
- Mekanisme persetujuan kredit untuk segmen Micro, Small, dan Consumer Business melalui Komite Kredit dan Pemegang Kewenangan Kredit (PKK). PKK adalah individu yang diberi kewenangan memutus kredit oleh Direksi berdasarkan kemampuan, kompetensi dan integritas yang baik.
- Melakukan penetapan limit / Batas Wewenang Memutus Kredit yang di-*review* secara berkala dan melakukan penyempurnaan terhadap proses kredit PT Bank Mutiara Tbk antara lain perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) untuk segmen Small Business yang telah berjalan selama ini sehingga proses pengambilan keputusan kredit berjalan lebih cepat namun tetap berpedoman terhadap azas *prudential banking*.
- Melengkapi Bank dengan Kebijakan Perkreditan Bank Mutiara dan Pedoman Pelaksanaan Kredit yang secara berkala dilakukan peninjauan kembali selain itu terus melengkapi dan menyempurnakan *Standard Operation Procedure* bidang perkreditan.
- Melakukan monitoring terhadap portofolio Bank, pemantauan dilakukan antara lain terhadap segmentasi kredit, kualitas kredit, serta terhadap 25 maupun 100 Debitur Inti.
- Melakukan penyempurnaan atas Nota Analisa Kredit yang disertakan dengan *spread sheet* laporan keuangan.
- Membentuk *Mutiara Credit Culture Enforcement Team* dengan tujuan untuk membangun budaya kredit yang akan menghasilkan kualitas kredit Bank Mutiara dimasa yang akan datang.
- Melakukan perbaikan pada *Non Performing Loan*, dengan melakukan penyelesaian kredit bagi Debitur yang bermasalah.
- Melakukan penyusunan Portofolio Kredit per Sektor Industri yang digunakan untuk menyusun *Mutiara Industry Code & Catalogues*, dan Rekomendasi *Approved Industries* dan *Target market*.
- Pemberian kredit dengan tidak mengabaikan BMPK, limit dan konsentrasi kredit.

Dengan melaksanakan manajemen risiko kredit yang baik dapat menghasilkan pengelolaan kredit secara sehat dan *prudent*, sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan membawa arah positif bagi Bank untuk menjadikan integritas dan independensi dalam proses penilaian risiko kredit dimaksud.

b. Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat pergerakan variabel pasar dari portfolio yang dimiliki oleh Bank baik transaksi tunai maupun transaksi derivatif, yang dapat merugikan Bank. Yang

termasuk dalam variabel pasar adalah suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas termasuk turunan dari jenis risiko pasar tersebut.

Risiko suku bunga (*Interest Rate Risk*), merupakan potensi risiko yang cukup signifikan bagi PT Bank Mutiara Tbk karena penyaluran dana selain dalam bentuk kredit, juga berupa portofolio investasi pada surat berharga khususnya surat berharga valas yang rata-rata berjangka waktu panjang dengan suku bunga tetap. Kondisi ini akan menekan *Net Interest Margin* (NIM) saat suku bunga dana cenderung meningkat. Beberapa antisipasi/strategi dan mitigasi risiko Bank dalam menyikapi kondisi ini adalah:

- Perseroan melakukan perbaikan terhadap struktur komposisi aktiva produktif dan non produktifnya agar lebih menguntungkan posisi Bank.
- Mengupayakan pengelolaan struktur kewajiban bank (*liabilities*) dalam meningkatkan sumber pendanaan jangka panjang, dengan jalan memberikan suku bunga yang menarik dan kompetitif pada Deposito tiga bulan hingga satu tahun.
- Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari *government funding* dengan jangka waktu panjang.
- Menerapkan *floating rate* pada pemberian kredit jenis tertentu, sehingga risiko penurunan suku bunga tidak membebani Bank dan sebaliknya juga tidak akan membebani debitur jika suku bunga meningkat.
- Memonitor perkembangan harga pasar (*market pricing*) sekaligus memperkokoh kebijakan *pricing* aktiva maupun pasiva melalui forum rapat *Assets Liability Committee* (ALCO) dengan membahas beberapa perhitungan penting seperti *cost of money*, *base lending rate* dan perhitungan lainnya. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di dalam Bank khususnya yang berkaitan dengan risiko suku bunga dapat diantisipasi sedini mungkin.
- Melakukan monitoring atas likuiditas, aktifitas dan risk limit Divisi *Treasury*. Secara harian dan melaporkannya ke Direksi.
- Menyajikan system Value at Risk (VaR) Forex dan *Interest Rate Bond* yang dapat diakses Divisi *Treasury* dan melaporkannya secara berkala kepada Direksi, untuk memitigasi risiko perubahan nilai valuta terhadap mata uang asing maupun perubahan suku bunga pada Surat Berharga yang dimiliki Bank dan juga simulasi kenaikan maupun penurunan mata uang maupun Surat Berharga yang ditransaksikan.

Sementara itu, sebagai bank devisa, Bank Mutiara tentunya tidak dapat terlepas dari risiko nilai tukar (*Foreign Exchange Rate Risk*) atau risiko fluktuasi nilai tukar sebagai akibat belum stabilnya kondisi ekonomi makro Indonesia maupun negara lain akibat krisis keuangan global yang sangat dirasakan. Kondisi ini mengharuskan Bank menjaga posisi aktiva dan pasiva valasnya dalam posisi sesuai ketentuan Bank Indonesia, untuk menghindari potensi kerugian jika terjadi fluktuasi nilai tukar.

Variabel pasar ini tidak hanya berupa fluktuasi nilai tukar ataupun fluktuasi suku bunga, tetapi juga meliputi fluktuasi nilai pasar dari portofolio yang dimiliki Bank, seperti di antaranya adalah portofolio surat berharga yang diperdagangkan.

Strategi Bank untuk memitigasi risiko ini adalah sebagai berikut:

- Senantiasa melakukan *monitoring* pergerakan harga dari portofolio investasi Bank, sehingga dapat segera diambil tindakan sedini mungkin jika terjadi indikasi merugikan melalui Market to Market.
- Mengelola dan melakukan mitigasi risiko konsentrasi dengan membuat aturan yang lebih jelas mengenai batas transaksi mulai dari batas pemutus, batas limit antarbank, *limit dealer*, batas per sektor ekonomi, geografi dan lain-lain.

- Melakukan analisa yang mendalam (*rating, maturity, issuer, underlying transaction, listed & market price*) sebelum melakukan investasi.

Bank membentuk Komite ALCO yang bertanggung jawab dalam menetapkan strategi dalam pengelolaan aset dan liabilitas Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bank juga telah menetapkan batasan-batasan seperti batas transaksi Pertukaran Mata Uang Asing (*Foreign Exchange*), *Bank Notes, Money Market*, dan Surat Berharga. Dari sisi pengembangan IT (*Information Technology*), Bank mengoptimalkan aplikasi OPICS, dan telah diimplementasikan sebagai sistem yang mendukung transaksi *Treasury*.

c. Risiko Likuiditas

Dalam pengelolaan risiko likuiditas yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah atau *counter-party* yang telah jatuh waktu. Beberapa strategi yang dilakukan Bank untuk mengantisipasi hal tersebut adalah:

- Melakukan portofolio investasi ke arah investasi yang lebih likuid.
- Mendorong bertumbuhnya jumlah investasi dana-dana murah atau nasabah kategori *low cost fund*.
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap, proyeksi cash flow*) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin.
- Mengintensifkan *collection* terhadap kredit bermasalah sehingga dapat lebih ditingkatkan.
- Mempercepat proses likuidasi aktiva tidak produktif yakni Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).
- Meningkatkan kerjasama dengan Bank Lain agar dapat memanfaatkan fasilitas Call Money maupun Repo Surat Berharga intern bank.

PT Bank Mutiara Tbk berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan *gap* likuiditas (*maturity gap* dan proyeksi arus kas) untuk mengantisipasi risiko likuiditas sedini mungkin, dan juga mengendalikan risiko likuiditas khususnya pada saat kondisi stress.

Bank juga telah menyusun *Contingency Funding Plan*, selain juga senantiasa memelihara kemampuannya dalam melakukan akses ke pasar uang dengan terus membina hubungan dengan bank koresponden. Untuk mendeteksi risiko likuiditas, PT Bank Mutiara Tbk telah mempunyai *Standard Operation Procedure LCP (Liquidity Contingency Plan)* dan melakukan pemantauan likuiditas secara harian untuk dilaporkan kepada Direksi.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan faktor manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Seiring dengan pertumbuhan Bank, pengelolaan risiko operasional juga menjadi perhatian Bank. Untuk mencegah kerugian karena adanya risiko operasional maka Bank melakukan hal-hal berikut :

- Setiap adanya produk ataupun aktivitas baru Bank selalu dilakukan kajian risiko sesuai dengan ketentuan dari regulator.
- Melakukan peninjauan ulang dan penyempurnaan SOP di masing-masing unit kerja secara berkala.
- Memastikan ketersediaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) yang diuji secara berkala sebagai antisipasi jika terjadi gangguan IT.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- Pengelolaan risiko operasional juga dilakukan dengan memperkuat keamanan dan kehandalan teknologi informasi, sehingga kegagalan sistem maupun *human error* dapat ditekan.
- Melakukan Penetapan batas kewenangan dalam melakukan transaksi operasional.
- Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Selain itu membentuk *Anti Fraud Department* dalam SKAI sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian intern.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan frekuensi pelatihan internal maupun eksternal di bidang perkreditan, pemasaran produk dan motivasi kerja.
- Untuk melakukan identifikasi kejadian risiko yang terjadi di Cabang serta memiliki dampak kerugian, maka pemantauan dilakukan menggunakan *Operational Risk Report*.
- Melakukan peningkatan pada *IT Security System* untuk seluruh sistem yang ada pada PT Bank Mutiara Tbk.
- Melakukan pencatatan atas data kerugian, dimana data tersebut digunakan sebagai salah satu parameter dalam pengukuran Profil Risiko Operasional.
- Bank telah melakukan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) yang merupakan metodologi untuk identifikasi sumber-sumber risiko, yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko, memantau *trend* tingkat risiko, serta mengendalikan dan mitigasi risiko. Pelaksanaan Identifikasi melalui RCSA tersebut akan diterapkan pada seluruh unit kerja secara bertahap.
- Bank telah memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) dimaksudkan untuk minimalisasi risiko, menangani dampak dari gangguan/bencana, serta percepatan proses pemulihannya agar kegiatan operasional dan pelayanan kepada nasabah tetap dapat berjalan dengan baik.

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian finansial maupun non finansial yang diakibatkan faktor eksternal seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan, yang berdampak pada kemampuan teknologi Bank dan kegiatan operasional bisnis Bank terutama pelayanan kepada nasabah, Bank telah menerapkan Kebijakan maupun Standard Operational Procedure *Business Continuity Plan* (BCP).

Tim Organisasi BCP yang dibentuk Bank memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan BCP dalam penanganan aktivitas bisnis dalam keadaan darurat (*disaster*) sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Bank. Pada tahun 2014 Bank telah melakukan penyempurnaan BCP dengan *Review Business Impact Analysis* (BIA) sesuai dengan *business process*, dan telah melakukan sosialisasi dan simulasi pelaksanaan BCP sesuai dengan *scenario* yang telah ditetapkan ke seluruh cabang, selanjutnya melakukan *Review* Kebijakan dan SOP, *Review* Prosedur Alternatif (*Contingency Plan*), dan melakukan Uji Coba BCP di Kantor Cabang tertentu dengan simulasi bencana kebakaran dengan mengaktifkan lokasi alternatif dekat dengan Kantor Cabang.

Pada bulan Desember 2014, telah terjadi kebakaran di kantor cabang Pasar Klewer Kota Solo dan Bank telah melaksanakan prosedur BCP terhadap kantor cabang Pasar Klewer tersebut, antara lain :

- Terkait dengan tidak dapat dilakukannya operasional kantor cabang Pasar Klewer, maka operasional sementara dialihkan ke Kantor cabang induknya yaitu Kantor Cabang Slamet Riyadi Solo.
- Pelaksanaan pemindahan lokasi (relokasi) kantor cabang Pasar Klewer mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PB1/2011 Pasal 53 ayat 3 dan 4.

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah suatu risiko yang disebabkan karena adanya kelemahan aspek yuridis/hukum atau karena tidak terdokumentasikannya transaksi tersebut dengan baik. Risiko ini tidak terbatas pada risiko yang timbul dari kemungkinan kontrak/perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, tuntutan hukum/gugatan pihak ketiga, ketidaksesuaian dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kelemahan perikatan, pengikatan jaminan yang tidak sempurna, ketidakanggupan penerapan putusan pengadilan, keputusan pengadilan yang dapat mengganggu atau mempengaruhi operasi atau kondisi Bank.

Pengelolaan Risiko Hukum dilakukan dengan cara :

- Melakukan peninjauan kembali (*review*) atas dokumen hukum, perjanjian maupun kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
- Inventarisasi atas kasus-kasus hukum yang terjadi termasuk didalamnya memantau perkembangan dari setiap kasus hukum yang ada. Penanganan kasus hukum disusun berdasarkan skala prioritas dan seluruh perkembangannya terpantau dengan baik dan selalu dilaporkan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti melalui penyelesaian yang mengandung potensi risiko hukum paling sedikit.
- Fungsi Legal Division yang memiliki peranan penting dalam memberikan analisa / *review* dari sudut pandang legal terkait dengan produk atau aktivitas baru Bank, memberikan masukan dari sisi hukum akibat adanya perubahan regulasi, melakukan *review* atas perjanjian-perjanjian yang dibuat antara Bank dengan Pihak ketiga, selain itu juga menangani permasalahan hukum yang terkait dengan litigasi.

f. Risiko Strategis

Risiko strategis, risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini dilakukan dengan cara:

- Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk periode tahun 2015-2018 yang digunakan sebagai pedoman oleh Manajemen dan karyawan.
- Melakukan pemantauan atas kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi dengan sasaran/*target* yang ingin dicapai oleh Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank tersebut.
- *Planning Performance Division* yang secara rutin melakukan pemantauan berkala (*performance review*) atas pencapaian kinerja dari tiap divisi dan Bank secara keseluruhan.
- Merevisi pengkinian atas strategi yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan kondisi internal maupun eksternal, sehingga akan menjadi realistis dengan pencapaian sasaran Bank.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan, risiko yang disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku menjadi perhatian utama. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi risiko ini adalah dengan:

- Menyusun Kebijakan Kepatuhan dan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- Pemantauan terhadap pengkinian data nasabah dan penerapan single CIF serta penanganan rekening pasif / *dormant*.
- Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai dengan amanat dalam Peraturan Bank Indonesia, di mana PT Bank Mutiara Tbk secara rutin melakukan sosialisasi kepada unit-unit terkait melalui Divisi Kepatuhan.
- Penyusunan Laporan Kepatuhan serta melakukan uji kepatuhan.
- Menyusun *action plan* dalam rangka memenuhi ketentuan regulator.
- Peningkatan fungsi Compliance Division untuk melakukan uji kepatuhan atas setiap regulasi, baik ketentuan internal maupun eksternal.

h. Risiko Reputasi

Risiko reputasi sebagai tiang kepercayaan memberikan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank yang dapat mempengaruhi *image* Bank, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap Bank relatif meningkat.

Sebagai wujud perhatian Bank terhadap risiko reputasi, maka pengelolaan risiko reputasi dilakukan dengan cara:

- Pemantauan terhadap publikasi media, yang bekerja sama dengan jasa pihak ketiga oleh Corporate Secretary.
- Melakukan pemantauan terhadap keluhan nasabah melalui Product & Networking Management Division guna menangani keluhan dengan segera, serta melakukan optimalisasi fungsi *Call Center* dalam penanganan keluhan nasabah.
- Sebagai bagian dari masyarakat, maka PT Bank Mutiara Tbk juga ikut ambil bagian dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility*, serta ikut melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial lainnya bersama dengan nasabah, termasuk di dalamnya sebagai sponsor dalam berbagai kegiatan masyarakat.
- Meningkatkan pelaksanaan Transparansi Informasi Keuangan kepada *stakeholder* seperti penyajian informasi keuangan, penyempurnaan *website* Bank, serta melaksanakan press release dengan media.

PT Bank Mutiara Tbk menyakini bahwa setiap aspek efektivitas pelaksanaan manajemen Bank yang baik (termasuk manajemen risiko dan sistem pengendalian internal) dalam kaitannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG) akan memperbaiki reputasi.

Salah satu perwujudannya adalah dengan diberikannya penghargaan kepada Bank Mutiara sebagai Best Company for Leadership - Banking - Indonesia dari IAIR, salah satu majalah internasional yang mengulas ekonomi dan kesinambungan global pada IAIR Awards, Hong Kong, Februari 2014.

Reputasi dan dukungan pemegang saham baru secara profesional membantu manajemen dalam rangka meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kinerja yang lebih baik dan program-program kerja yang berimplikasi langsung pada pengelolaan risiko reputasi.

Rencana Tindak (*Action Plan*) Manajemen Risiko di Tahun 2015 adalah :

1. Risiko Kredit

- Penanganan debitur kolektibilitas 2 dengan cara mengingatkan debitur via SMS Blast sebelum tanggal pembayaran untuk menyiapkan dana, monitoring terhadap usaha debitur dan pembayaran kewajiban, melakukan pemanggilan untuk debitur kolektibilitas

2c (>60 hari) serta pemenuhan syarat-syarat kredit dan menjaga perpanjangan kredit yang jatuh tempo.

- Penanganan NPL agar turun dibawah 5% dengan memaksimalkan penagihan, PKPU, lelang agunan, mempailitkan debitur, dan melakukan *Write Off*.
- Ekspansi kredit dengan jenis kredit yang *Low Risk* (selektif) dengan mengisi *rundown* selama Q1 dan selanjutnya mengisi sesuai RBB 2015 dan menata kembali proses kredit dan kewenangan pemutus kredit.
- Penanganan surat berharga (Re-CSPA 12 September 2014) dimana hak tagih atas security deposit, terkait dengan 3 koperasi dan *escrow account*, MLA Hongkong telah beralih ke LPS maka akan dilakukan *write off*.
- Pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai /CKPN < 100 %

2. Risiko Pasar

Memperkuat mitigasi risiko yang disebabkan oleh meningkatnya eksposur risiko pada banking book dan trading book, untuk produk treasury yang kompleks dengan cara menyiapkan SOP dan Kebijakan Market Risk apabila ada penambahan eksposur risiko.

3. Risiko Likuiditas

- Menurunkan konsentrasi grup depositan besar (saat ini ± 40% dari total DPK) dengan membuat pembatasan suku bunga maksimal untuk setiap depositan, menurunkan portofolio top 4 jumbo deposit, memberikan batasan / kuota portofolio deposito kepada depositan besar & grupnya dan Bank akan meningkatkan transaksi ritel dengan menjual *bundling product*. Bank juga telah membentuk *task force transactional banking* dan melakukan *enhancement* terhadap IT Infrastruktur.
- Sumber dana masih didominasi oleh dana jangka pendek (1-3 bulan) yg bersifat *liabilities sensitive* (*lend long borrow short*) dengan cara pemberian kredit difokuskan untuk Kredit Modal Kerja dan jangka pendek.
- Akses pada sumber pendanaan terutama pasar uang & bank relatif kurang, dengan cara meningkatkan *credit lines* dari bank-bank atau lembaga keuangan dengan mengandalkan nama J Trust dan mengaktifkan hubungan kerjasama dengan perusahaan perusahaan Jepang di Indonesia.
- *Update Liquidity Countingency Plan* (LCP) dengan memperhitungkan sumber-sumber pendanaan diluar DPK termasuk dukungan dari pemegang saham

4. Risiko Operasional

- Terkait dengan gangguan *email*, *PABX* dan *reuters* telah dilakukan perbaikan dan Bank akan melakukan migrasi dari Zimbra ke Microsoft Exchange (untuk email),
- Implementasi PSAK 50/55 telah diterapkan pada LBU Desember 2014, sehingga penerapan PSAK 50/55 sudah sesuai dengan regulasi dan secara paralel Bank mempersiapkan Engine PSAK secara otomatis.
- Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui meningkatkan standar, proses perekrutan dan program pendidikan karyawan baru, kemudian adanya standar kompetensi untuk pemangku jabatan bisnis dan menjaga karyawan-karyawan kompeten untuk tetap bekerja di Bank Mutiara (*Retention Program*).

5. Risiko Hukum

- Adanya gugatan / tuntutan hukum terhadap Bank dilakukan dengan cara menghadapi gugatan dengan mengoptimalkan tenaga *internal lawyer* dan memanfaatkan jasa hukum dari eksternal *Lawyer*, melakukan monitoring dan pelaporan perkara-perkara yang ada.

- Kekeliruan atau tidak hati-hati dalam bertindak sebagai akibat dari kurangnya pemahaman dan ketaatan hukum oleh karyawan dilakukan upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum karyawan melalui training-training yang diadakan Bank maupun secara khusus dan sosialisasi secara berkala.

6. Risiko Strategik

- Bank akan melakukan monitoring yang intensif terhadap realisasi pencapaian RBB.
- Bank akan melakukan monitoring yang intensif terhadap kondisi eksternal yang akan mempengaruhi kondisi Bank dan segera merevisi RBB pada kesempatan pertama bila ada kendala eksternal yang mempengaruhi pencapaian RBB.
- Bank akan membuat *mapping* (pemetaan) rasio-rasio keuangan terhadap *peer group* dan menyusun rencana tindakan untuk senantiasa menyetarakan kinerja tersebut.
- Bank telah membentuk Tim Efisiensi untuk menurunkan rasio BOPO.

7. Risiko Kepatuhan

- Kepatuhan terhadap pelaporan rutin dan terjadwal (Regulator & Instansi terkait) dengan menerapkan *Compliance Report Monitoring* (CRM).
- Kepatuhan terhadap ketentuan CAR, NPL, BMPK. Untuk rasio CAR akan dilakukan penambahan modal secara bertahap tahun 2014-2018 dan untuk penanganan pelampauan BMPK khususnya TDI a/n PT Sakti Persada Raya dan Damar Kristal akan dihapus buku serta penanganan pelampauan BMPK PT Sinar Central Sandang akan dijajaki menurunkan eksposurnya dengan menjual agunan.
- Komposisi Dewan Komisaris independen yang belum memenuhi ketentuan sehingga salah satu fungsi komite dibawah Dewan Komisaris juga belum memenuhi persyaratan, dan Bank telah menyampaikan kepada OJK melalui surat No.29.21/S.Dir-CPD/Mutiara/XII/2014 tgl.29.12.2014 dan akan dilakukan RUPS.

8. Risiko Reputasi

Melakukan kegiatan-kegiatan korporasi yang positif untuk mengimbangi pemberitaan yang negatif, melakukan pemberitaan positif kepada publik antara lain kerjasama dengan *stakeholder*, merencanakan penggantian nama Bank, dan menurunkan biaya dana (*Cost of Fund*) yang relatif tinggi sehingga dana tumbuh karena reputasi yang baik.

Dengan rencana tindak (*action plan*) diatas, diharapkan peringkat tingkat kesehatan Bank Mutiara menjadi lebih baik/sehat.

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Komite Pemantau Risiko secara rutin tiap bulan melakukan rapat dengan Divisi Manajemen Risiko untuk membahas profil risiko yang meliputi inherent risk dan kualitas penerapan manajemen risiko dari 8 (delapan) risiko.

Dewan Komisaris mengevaluasi hasil paparan profil risiko dari Komite Pemantau Risiko dan Divisi Manajemen Risiko, dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala kepada Direksi, diantaranya kebijakan perkreditan mengenai penghapusbukuan (*write off*) dan review Dewan Komisaris atas *committed line* yang diberikan untuk debitur diatas Rp 25 Miliar. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko-Risiko Bank secara efektif.

5.2. Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*)

Untuk dapat mengelola Bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PB1/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Pengendalian Intern bagi Bank Umum, mewajibkan Bank untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern secara efektif terhadap seluruh kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank.

Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control System*) merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkesinambungan (*on going basis*) dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern secara efektif akan membantu Bank dalam :

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank.
- b. Menjamin tersedianya informasi dan laporan yang lebih akurat.
- c. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengurangi dampak keuangan/risiko terjadinya kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan efisiensi biaya.

Untuk keperluan diatas PT Bank Mutiara Tbk telah mengadopsi prinsip Pengendalian Intern berdasarkan COSO Model dengan 5 (lima) komponen yang harus dikendalikan sebagai berikut :

1. *Control Environment* (CE)

CE adalah himpunan standar, ketentuan, proses dan struktur organisasi yang memberikan dasar untuk melaksanakan SPI bagi seluruh organisasi. BOD dan Manajemen melaksanakan *Tone At The Top* atas pentingnya SPI termasuk standar berperilaku. CE terdiri dari nilai-nilai integritas dan etika organisasi, parameter yang memungkinkan BOD dan Manajemen untuk melaksanakan pengendalian operasional perusahaan, efektivitas struktur organisasi, tugas individu, hambatan kinerja, insentif, dan hukuman untuk mendorong akuntabilitas kinerja, yang dihasilkan CE akan berdampak luas pada SPI secara keseluruhan.

2. *Risk Assessment* (RA)

RA melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan, sehingga RA membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. RA juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak dari kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan dalam model bisnis yang dapat membuat SPI tidak efektif. Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.

3. *Information Communication* (IC)

IC diperlukan perusahaan untuk Pelaksanaan SPI dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen memperoleh atau menghasilkan dan

menggunakan bentuk informasi yang relevan dan berkualitas, baik sumber internal dan eksternal untuk mendukung komponen lain dari SPI. Komunikasi harus dilakukan secara kontinyu, dengan cara memberikan, berbagi dan memperoteh informasi yang diperlukan. Komunikasi Internal adalah sarana yang informasinya disebarluaskan ke seluruh organisasi, mengalir ke atas, bawah dan rekan kerja dalam level yang sama dimana memungkinkan pribadi untuk menerima pesan yang jelas dari manajemen demikian sebaliknya. Komunikasi Eksternal terdiri dari dua aktivitas, yaitu memungkinkan menerima informasi eksternal yang relevan, dan memberikan informasi kepada pihak eksternal.

4. *Monitoring Activities*

Monitoring terdiri dari Evaluasi Berkelanjutan (*On going Evaluation*), Evaluasi Terpisah (*Separate Evaluation*), atau kombinasi keduanya digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen SPI, adalah Hadir (*Present*) dan Berfungsi (*Fuctioning*). Evaluasi Berkelanjutan dibangun kedalam bisnis proses pada level berbeda yang memberikan informasi terkait dengan kesalahan/kelataian pada kesempatan pertama. Evaluasi Terpisah dilakukan secara periodik akan bervariasi pada lingkup dan frekuensi tergantung kepada hasil *risk assessment*, efektivitas dari Evaluasi Berkelanjutan dan pertimbangan lain manajemen. Temuan dari hasil Evaluasi dicatat dan dikomunikasikan kepada Manajemen.

5. *Control Activities* (CA)

CA adalah arahan manajemen yang ditetapkan melalui Kebijakan dan Prosedur untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan perusahaan. CA dilakukan di semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan semua Informasi Teknologi (IT). CA dapat berupa *control preventive* atau *detective* yang sifatnya dapat dilakukan secara manual dan otomatis seperti otorisasi, persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan laporan kinerja bisnis. Pemisahan Tugas (*Segregation of Duties*) dapat digunakan sebagai pembangunan dan pengembangan CA. Ketika Pemisahan Tugas tidak dapat dijalankan, manajemen harus memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian alternatif.

Masing-masing komponen terkait satu sama lain, harus dikendalikan secara terpadu (*integrated*) dan tanggung jawab implementasinya menjadi tanggung jawab semua unit kerja dengan tujuan penerapannya sebagai berikut :

1. **Strategic**, Rencana Bisnis Bank telah dimengerti, sejalan dan didukung oleh semua unit kerja.
2. **Operation**, berjalan dengan efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan prasarana.
3. **Reporting**, akurat dan dapat dipercaya.
4. **Compliance**, aktivitas dan transaksi telah tunduk dengan ketentuan serta hukum.

Selama tahun 2014 rata-rata *Audit Rating* secara *bank wide* sebagai berikut :

No	Risk Owner	Audit Rating			Penjelasan
		2013	2014	Rating	
1	Cabang	76,47	75,52	Satisfactory	SPI sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu penyempurnaan terbatas pada SOP dan Kepatuhan SDM dalam penyelenggaraan operasional.
2	Divisi	78,03	79,62	Satisfactory	SPI sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu penyempurnaan terbatas

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

					pada SOP dan Kepatuhan SDM dalam penyelenggaraan operasional.
3	Divisi Kredit	74,84	71,83	Fair	SPI pada unit semua unit Kredit masih banyak kelemahan di berbagai komponen SPI (5 Komponen) dan harus dilakukan penyempurnaan/ <i>corrective action</i> terhadap SOP, Sistem dan SDM.

BAB VI
PENYEDIAAN DANA, RENCANA STRATEGIS BANK, TRANSPARANSI
DAN PENGUNGKAPAN ASPEK LAINNYA

A. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur/group inti per posisi tanggal 31 Desember 2014, dengan tabel sebagai berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait *)	25	6.212
2.	Kepada Debitur Inti :	25	3.387.943
	- Individu	16	1.785.839
	- Group	9	1.602.104

Keterangan:
*) Jumlah Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait termasuk:

- Pinjaman kepada Pejabat Eksekutif Bank yang diberikan dalam rangka Kredit Karyawan PT Bank Mutiara Tbk.

Kredit diberikan kepada Debitur Inti terdiri dari pemberian kredit kepada 16 (enam belas) debitur individu sejumlah total Rp.1.785.839 juta dan 9 (sembilan) group debitur sejumlah total Rp.1.602.104 juta.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, penyediaan dana kepada pihak terkait (*Related Party*) dan debitur/group inti telah dilakukan dengan baik dan tidak terdapat pelanggaran BMPK, namun masih terdapat pelampauan BMPK yang merupakan aset-aset peninggalan manajemen lama. Kemudian Manajemen secara periodik telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Action Plan* / Rencana Tindakan Penyelesaian terhadap pelampauan BMPK kepada Bank Indonesia yang memuat Rencana Penyelesaian Pelampauan BMPK, Target Penyelesaian, dan *Progress* Penyelesaian.

Proses kredit telah melalui Rapat Teknis untuk memitigasi berbagai kemungkinan yang timbul sebelum pemberian penyediaan dana kepada debitur. Dalam setiap pengambilan keputusan penyediaan dana telah diputuskan bersama dalam Rapat Komite Kredit sesuai Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK). Khusus ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selalu diinformasikan dalam Nota Analisa Kredit (NAK) dengan berpedoman pada Memo tentang jumlah Modal Bank yang dikeluarkan setiap bulan oleh Divisi Accounting.

Bank telah memiliki kebijakan internal mengenai mekanisme pemantauan penyediaan dana dengan memperhatikan penyebaran/diversifikasi portfolio dengan pembagian pengelolaan pada masing-masing bisnis unit berdasarkan segmentasi kredit, yaitu Retail Business, Consumer Business, Small Business, Medium Business, dan Multi Finance.

PT Bank Mutiara Tbk telah menetapkan kebijakan internal mengenai limit penyediaan dana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 serta perubahannya dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan berdasarkan Memorandum Prosedur No.28.09/M.Dir-EVP.MB/Mutiara/II/2013 yang pada dasarnya Bank telah menetapkan *in-house limit* sebesar maksimal 80% dari Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

B. Rencana Strategis Bank

PT Bank Mutiara Tbk senantiasa melakukan upaya yang maksimal untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan, antara lain dengan menyusun rumusan langkah-langkah berupa "Rencana Strategis Bank" yang akan diambil manajemen dalam mendayagunakan sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan pada akhirnya tujuan akan tercapai.

Pengungkapan rencana strategis PT Bank Mutiara Tbk mengacu kepada ketentuan BI/OJK, yang intinya dapat disampaikan, sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) PT Bank Mutiara Tbk telah sesuai dengan visi dan misi Bank. Terkait dengan hal ini dapat disampaikan:
 - ✓ *Corporate Plan* dan *Business Plan* telah disusun sesuai dengan visi dan misi Bank. Fokus bisnis utama PT Bank Mutiara Tbk adalah: Treasury, Small dan Medium Enterprises, Consumer dan Mikro serta menjadi bank penyedia jasa keuangan yang berkualitas dan profesional, yang membangun pelayanan kepada nasabahnya melalui kedekatan hubungan sebagai mitra usaha serta disesuaikan dengan potensi sumber daya yang dimiliki dan skala usahanya. Berbagai strategi dan program telah disiapkan oleh manajemen untuk dapat menjadikan PT Bank Mutiara Tbk sebagai "Bank Fokus" terbaik pilihan masyarakat dan menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia yang aman, terpercaya memiliki layanan istimewa, menghasilkan produk-produk berkualitas, dengan performa terpercaya, bersih dan kuat sesuai dengan filosofi Mutiara.
 - ✓ Hal ini telah dituangkan dalam buku Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Koreksi/Revisi RBB disertai lampiran Surat Persetujuan Dewan Komisaris tercakup didalamnya kepada Bank Indonesia/OJK.
- Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. Terkait dengan hal ini dapat disampaikan:
 - ✓ Pemilik mendukung dan berkomitmen dalam memperkuat permodalan PT Bank Mutiara Tbk dengan melakukan penambahan modal yang disepakati adalah sebesar Rp.1.249,48 miliar agar CAR diatas 14% sesuai dengan persyaratan PBI No.14/18/PBI/ 2012 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (ICAAP) sehingga CAR menjadi diatas 14%. Dengan telah beralihnya kepemilikan kepada pemilik yang baru yaitu J Trust Co, Ltd.juga telah berkomitmen untuk memperkuat dan menjaga permodalan sesuai ICAAP dan *peer* bank dan telah juga menambah modal disetor di akhir tahun 2014 sebesar Rp.300 miliar.

1. Rencana Korporasi (*Corporate Plan*)

Adalah rencana strategis dalam jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Bank, merupakan sasaran yang perlu didukung perumusan kebijakan dan strategi perusahaan.

Formulasi penyusunan *Corporate Plan* dimulai dari penentuan tujuan → analisa internal maupun eksternal → penyusunan strategi → penerapan strategi → memonitor strategi → kembali lagi kepada penyempurnaan tujuan.

Penentuan tujuan dapat berupa visi yang mendefinisikan tujuan jangka panjang dari organisasi dan misi yang merupakan penerjemahan dari visi agar lebih dapat dimengerti oleh *stakeholder*. Analisa internal dan eksternal merupakan tahap dari mengumpulkan dan menganalisa data yang ada melalui analisa SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/kesempatan, dan *Threats*/ancaman yang dimiliki perusahaan).

Sebagai langkah strategis manajemen baru dalam menyelesaikan permasalahan fundamental PT Bank Mutiara Tbk, pada tahun 2009 Bank telah melakukan penajaman visi dan misi sebagai berikut:

Visi

"MENJADI BANK FOKUS TERBAIK PILIHAN MASYARAKAT"

Dengan fokus bisnis utama bank adalah : *Small dan Medium Enterprises, Consumer* dan Mikro serta *Treasury*.

Bank Mutiara akan senantiasa berupaya menjadi bank penyedia jasa keuangan yang berkualitas dan profesional, yang membangun pelayanan kepada nasabahnya melalui kedekatan hubungan sebagai mitra usaha.

Misi

"MEMBERIKAN YANG TERBAIK DENGAN MENGUTAMAKAN PELAYANAN, KENYAMANAN DAN KEPUASAN NASABAH UNTUK HASIL YANG OPTIMAL"

Berkaitan dengan Misi, Bank Mutiara memberikan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan, kenyamanan, dan kepuasan nasabah secara optimal, serta akan menjadi bank fokus terdepan dengan *core value "SPIRIT"* sebagai perwujudan dari *service excellence, professionalism, integrity, relationship, innovative, dan trust*.

Adapun strategi kelanjutannya dilakukan dengan pendekatan SWOT antara lain :

a. SWOT Analisis

S - Strengths

- Memiliki akses yang baik terhadap jaringan bisnis UKM untuk pelaku bisnis dari etnik tertentu.
- Memiliki keunggulan *relationship* dengan nasabah-nasabah dana.
- Pemilik baru adalah J Trust, perusahaan keuangan dari Jepang sehingga memperkuat *image* perusahaan.
- Memiliki portofolio pembiayaan *consumer* melalui multifinance cukup dominan, namun memiliki kredit bermasalah paling kecil, hampir 0%.
- Memiliki 61 kantor untuk pembiayaan UMKM.
- Memiliki tenaga *marketing* dana yang cukup handal.
- Merupakan perusahaan publik, sehingga memungkinkan mendapatkan dana dari pasar modal untuk tujuan ekspansi di masa mendatang.
- Keunggulan produk *treasury (money changer)*.

W- Weaknesses

- Struktur pendanaan didominasi oleh *high cost fund* khususnya deposito.
- Produk dana belum didukung oleh teknologi perbankan yang memadai.

- Jumlah staff yang memiliki kemampuan analisa kredit yang memadai masih minim.
- Masih terdapat debitur yang melampaui BMPK.
- Kepercayaan *business counterparty* masih belum sepenuhnya pulih terutama dari bank-bank asing akibat isu negatif maupun gejolak politik yang muncul dari kasus Bank Century serta menunggu pengalihan kepemilikan dari LPS, sehingga banyak L/C yang ditolak dan pemberian *bank line* yang terbatas yang pada akhirnya menyulitkan Bank Mutiara dalam menjalankan transaksi ekspor impor.
- Penerapan teknologi perbankan dan *electronic channel* yang masih kurang memadai sehingga belum mendorong pertumbuhan dana murah dan tidak adanya *product champion*.
- Penyebaran jaringan kantor yang masih belum optimal karena lebih terkonsentrasi di Jakarta.
- Perubahan ketentuan/regulasi permodalan [CAR sesuai ICAAP, PBI No.14/18/PBI/2012] menyebabkan CAR Bank Mutiara di bawah CAR minimum 14% [*risk profile* kategori 5] sehingga membatasi kemampuan ekspansi aset dan jaringan kantor Bank.
- Bank saat ini beroperasi di bawah skala yang memadai, dan tidak sesuai dengan profil struktur biaya tetap overhead, sehingga sulit mencapai kinerja yang setara dengan *best performer* industri dan *peer group*.
- Perkembangan lingkungan industri dengan CAR rata-rata 17-18% menempatkan kekuatan keuangan Bank Mutiara berada pada posisi yang *inferior* terhadap pesaing.
- *Corporate brand* belum mampu menjadi pendukung kemudahan akuisisi bisnis yang efisien.
- Infrastruktur bisnis Mikro, *Consumer* dan *Small* sebagai bisnis utama belum mampu mendukung pembentukan *portfolio* yang mendukung percepatan penyeteraan kinerja.
- Produktivitas belum sebanding dengan jumlah cabang dan biaya tenaga kerja.
- Perlunya perbaikan kualitas kredit.
- *Cost of Fund* yang masih tinggi.
- MIS yang terintegrasi belum optimal.

O- Opportunities

- Adanya kesempatan optimalisasi pengembangan jaringan di Jawa dan luar Jawa.
- Pasar transaksi valuta asing dan *Bank Notes* masih dapat dioptimalkan ditambah dengan transaksi Devisa Umum yang belum optimal.
- Potensi pertumbuhan aset khususnya segmen UKM dari pelaku bisnis etnik tertentu masih dapat ditingkatkan.
- Peluang sektor *consumer & retail* masih terbuka.
- Peluang pembiayaan mikro yang belum terjamah Bank masih sangat terbuka.
- Bank telah menjalin kerjasama dengan beberapa institusi yang memiliki *customer based* dan jaringan distribusi yang luas untuk pengembangan usaha di beberapa bidang seperti *funding*, kredit dan *fee based income*.
- Dengan *Loan to GDP ratio* terendah sebesar 25%, Indonesia diharapkan menghadapi perubahan struktural dalam siklus kredit.
- Segmen UMK tetap merupakan segmen kredit yang tumbuh paling cepat.
- Adanya insentif dari regulator untuk kredit mikro.

T- Threats

- Persaingan yang ketat dalam penghimpunan dana murah dengan memanfaatkan *e-banking* dan *electronic channel* lainnya.
- Masih terdapat potensi gugatan hukum dari nasabah maupun *counterparty* terkait dengan masalah-masalah manajemen lama.
- Kegagalan *recovery* atas aktiva produktif bermasalah dan AYDA.
- Terjadi pemburukan *portfolio aset* kredit dalam jumlah material yang berdampak menurunnya CAR.
- Meningkatkan tingkat suku bunga dapat mengencangkan likuiditas bank.
- Bank berskala kecil lebih sensitif pada ancaman reputasi.

b. Kebijakan Manajemen (Policy Statement)

Searah dengan upaya pencapaian target bisnis, Bank Mutiara telah menetapkan dan menjalankan 5 fokus target prioritas untuk tahun 2014 sebagai landasan bagi pertumbuhan bisnis, sebagai berikut :

1. Pengembangan Bisnis :
 - Evaluasi & Pengembangan bisnis *lending & funding*
 - KPI & Financial model yang terukur
 - *Budget Control*
 - MIS yang terintegrasi
 - *Early Warning System* yang kuat
 - Penyelesaian NPL
2. *Business Process*
 - Mapping potensial *customer* dan kompetitor
 - Menyusun proses bisnis yang efektif & efisien
 - Program promosi yang terintegrasi
 - Monitoring disiplin *sales process*
3. *Risk Management*
 - Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan dan proses bisnis
 - Penyempurnaan *Early Warning System*
 - *Quality Control*
4. Sumber Daya Manusia
 - Pemenuhan SDM yang kompeten
 - Program *Training* berkelanjutan
 - Jenjang karir yang menarik
 - Skema insentif
 - Budaya perusahaan yang kuat
5. Infrastruktur
 - Optimalisasi jaringan kantor
 - Pengembangan IT yang mendukung bisnis
 - Membangun IT yang terintegrasi

c. Kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

1. Penguatan implementasi *dual control* dan peningkatan kualitas melalui:

- a. Penerapan RCSA (*Risk Control Self Assessment*)
 - b. Penerapan COSO Based Komponen
 - c. Penerapan *Risk Based audit (pilot project)*
 - d. Menyusun *Audit Rating System*
2. Pengembangan dan perbaikan 8 jenis profil risiko manajemen yang terpisah dengan pengelola bisnis.
 3. Peningkatan kualitas implementasi komite kredit (NAK dibantu oleh konsultan, training kredit & LK oleh tenaga internal Bank).
 4. Peningkatan kualitas pelaksanaan ALCO untuk mendapatkan penetapan suku bunga produk bank yang kompetitif.
 5. Peningkatan kualitas advis / rekomendasi manajemen terkait pengelolaan risiko, Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Penguatan kualitas bidang kepatuhan (GCG) dan budaya perusahaan :

- i) Penguatan kualitas kebijakan manajemen maupun keputusan mengenai produk, jasa dan layanan, serta pengelolaan perusahaan yang tertuang dalam surat keputusan, surat edaran, SOP baik internal Bank maupun eksternal dengan cara memberikan masukan kepada divisi-divisi, mensosialisasikan, melakukan *assesment*, dan lain-lain.
- ii) Penerapan prinsip mengenal nasabah, terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dengan sosialisasi dan melakukan pengkinian data.
- iii) Penguatan implementasi program budaya perusahaan sesuai standar yang ditetapkan.

d. Strategi Pengembangan Bisnis

Dengan adanya kebijakan yang baru dimana sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank untuk saat ini dimana bank sedang berupaya menguatkan permodalan. Untuk kemudian pada fase selanjutnya bank berupaya melakukan penguatan implementasi dual control dan peningkatan kualitas bisnis kembali di tahun kedepan melalui: rencana pengembangan bisnis yang lebih terfokus pada bidang atau segmen mikro, kecil dan menengah, berupa *retail* dan *commercial*, serta berupaya memperbaiki komposisi pendanaan pada CASA yang lebih baik.

Selain itu setelah menjalin kerjasama melalui "Bancassurance" juga akan lebih banyak mengembangkan produk guna mendukung dana murah, serta lebih mengoptimalkan jaringan yang telah ada. Bank juga akan mulai melakukan perbaikan pada *upgrading core system* guna mendukung dan mengembangkan "E-Banking" dan "M-Banking" untuk lebih memberikan kemudahan bagi Nasabah primanya, disamping untuk dapat bersaing dengan produk liabilitas bank lainnya.

e. Strategi Pengembangan SDM

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*) yang telah dilakukan di tahun 2014, sebagai berikut :

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

1. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain meliputi :
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, berupa tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, dan bentuk remunerasi lainnya.
 - b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
2. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dimaksud, meliputi:
 - a. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan RUPS Bank.
 - b. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, minimal mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain dimaksud.
 - c. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan untuk tahun 2014, sebagai berikut :

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp.2 miliar	-	-
Di atas Rp.1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	3	-
Di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1miliar	2	4
Rp.500 juta ke bawah	-	-
Keterangan:		
*) Yang diterima secara tunai sebelum dipotong pajak		

3. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
 - a. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan/pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
 - b. Rasio gaji tertinggi dan terendah per Desember 2014, dalam skala perbandingan sebagai berikut :
 - a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1:19
 - b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1:1,11
 - c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1:1,39
 - d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1:2,16

Gaji yang diperbandingkan dalam ratio gaji tersebut adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan.
Pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

2. Rencana Bisnis (*Business Plan*)

Adalah rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (1 tahun) dan jangka menengah (3 tahun) termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai penetapan target dan waktu.

Rencana Bisnis yang disusun harus memperhatikan faktor eksternal/internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menjadi arah kebijakan dan pengembangan usaha Bank juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi. Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan pegawai pada semua jenjang organisasi yang ada.

Penyusunan Rencana Bisnis Bank mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 perihal Rencana Bisnis Bank Umum, yang paling kurang mencakup ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko dan kinerja Bank saat ini, proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan, proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya, rencana pendanaan, rencana penanaman dana, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi dan SDM, rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya.

Rencana Bisnis Bank ini harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat setiap akhir Nopember sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan 1(satu) kali, paling lambat pada akhir semester pertama tahun berjalan apabila:

- Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank, dan/atau
- Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja Bank berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.
- PT Bank Mutiara Tbk telah menyusun RBB secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Terkait dengan hal ini dapat disampaikan:
 - ✓ RBB telah disusun berdasarkan kepada asumsi perkembangan ekonomi makro kedepan dan kemampuan Bank sendiri disertai dengan penerapan prinsip kehati-hatian sehingga tercipta RBB yang realistis, komprehensif dan terukur (*achiveable*). Bank juga cukup responsif terhadap perkembangan kondisi internal dan eksternal dengan melakukan Revisi RBB tahun 2014-2016 pada tanggal 30 Juni 2014 melalui Surat ke OJK No.30.01/ S-Dir-PPD/Mutiara/VI/2014.
- Direksi telah melaksanakan RBB secara efektif. Hal ini dilakukan Direksi, antara lain dengan cara melakukan pemantauan efektifitas pelaksanaan RBB, sebagai berikut:

- ✓ Pemantauan pencapaian realisasi RKAP/RBB kepada pemegang saham secara bulanan.
- ✓ Pemantauan pencapaian realisasi RBB disampaikan ke Bank Indonesia secara rutin per Triwulanan.
- ✓ Pemantauan pencapaian realisasi terhadap RBB dilakukan secara langsung setiap akhir bulan dengan melakukan "rapat prognosa bulanan" agar pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan.
- Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB. Terkait dengan hal ini dapat disampaikan:
 - ✓ Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB melalui penyusunan laporan pengawasan rencana bisnis (rutin per semesteran) yang disampaikan kepada OJK dan rapat bulanan Direksi-Komisaris. Dalam laporan dan rapat tersebut, selain bertindak sebagai pengawas, Komisaris juga memberikan arahan dan masukan strategi kedepan Bank.

a. **Rencana Bisnis Jangka Pendek**

a.1. **Total Asset**

Kinerja PT Bank Mutiara Tbk selama Desember 2014 menurun Rp.1.935,27 miliar, dari Rp.14.576,09 miliar pada Desember 2013 menjadi Rp.12.640,82 miliar. Penurunan aset ini adalah dampak kerugian yang diakibatkan penurunan kredit imbas dari keterbatasan permodalan, serta penurunan pada dana pihak ketiga dan pelunasan kewajiban interbank untuk optimalisasi likuiditas dengan adanya penurunan kredit.

a.2. **Total Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Penurunan Dana Pihak Ketiga hingga September 2014 sebesar Rp.696,29 miliar dari Desember 2013 Rp.11.558,08 miliar menjadi Rp.10.861,79 miliar adalah merupakan upaya bank dalam mengatur likuiditas yang optimal dengan tidak adanya ekspansi kredit terkait terbatasnya rasio CAR. Sampai dengan akhir Desember tahun 2014 dana pihak ketiga telah menurun sebesar Rp.532,20 miliar atau 4,6% sehingga menjadi Rp.11.025,88 miliar pada Desember 2014.

Melihat kondisi perkembangan keuangan dengan adanya penambahan modal dari pemilik baru J Trust di akhir periode 2014 sebesar Rp.300 miliar guna mengurangi ketergantungan dana mahal, maka bank berupaya memperbaiki komposisi dana pihak ketiga kepada pertumbuhan dana yang lebih murah dengan menargetkan pertumbuhan dana murah CASA di Desember 2015 sebesar 17,5%, dimana semula hanya 12,9% di Desember 2013 demikian juga di periode 2 tahun selanjutnya dimana di tahun 2016 menjadi 20,9% dan di tahun 2017 menjadi 21,7%. Hal ini diharapkan dapat menekan tingginya biaya dana, namun akan berdampak pada peningkatan NIM dari 1,7% di Desember 2013 menjadi 2,8% di Desember 2014 dan diharapkan di tahun 2016 menjadi 4,6% serta 5,9% di tahun 2017 diharapkan akan mengangkat penambahan laba di tahun 2015 dan dua periode selanjutnya.

a.3. Kredit Yang Diberikan

Kredit selama tahun 2014 menurun cukup besar terkait terbatasnya permodalan bank, penurunan dari Rp.11.131,05 miliar pada Desember 2013 menjadi Rp.7.843,70 miliar pada Desember 2014 atau menurun Rp.3.287,35 miliar. Untuk Desember 2014 kredit sudah memperhitungkan adanya *write off* sebesar Rp.500 miliar dan guna mempertahankan rasio permodalan sesuai ICAAP 14% yang berakibat penurunan kembali *outstanding* kredit dibandingkan Desember 2013, serta adanya beberapa pelunasan kredit bermasalah, pengalihan kredit ke bank lain juga adanya beberapa penundaan pencairan kredit di awal tahun mengingat CAR yang sangat terbatas sebagai pemenuhan persyaratan CAR minimal sesuai ICAAP yang turut meningkat, yakni sekitar 11%-14% berakibat Bank cukup selektif menyalurkan kredit dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, terlebih dengan sangat terbatasnya CAR sehingga lebih berfokus pada pemeliharaan portofolio kredit.

Ekspansi kredit kedepan tahun 2015-2017 akan berfokus pada kredit kecil, menengah dan mikro.

a.4. Laba Rugi

Dalam tahun 2014, perolehan/akumulasi laba rugi bank tahun berjalan di periode Desember 2014 masih terlihat merugi sebesar minus Rp.556,15 miliar. Hal ini dikarenakan selain adanya beberapa debitur yang menurun kolektibilitasnya, juga faktor penurunan *outstanding* kredit seperti telah dijelaskan sebelumnya yang mengakibatkan penurunan pendapatan bunga bersih, sementara biaya *overhead* tetap bergerak naik, hal ini terjadi karena:

1. Sejumlah isu negatif yakni menjelang peralihan kepemilikan LPS bank hingga triwulan ke-3 yang menimpa Bank Mutiara, juga telah meningkatkan biaya dana atau dengan kata lain Bank terpaksa meningkatkan suku bunga untuk mempertahankan dana pihak ketiga sehingga *cost of fund* meningkat dari 8,6% tahun 2013, menjadi 9,9% di periode per Desember 2014.
2. Total biaya *overhead* pada Desember 2014 sebesar Rp.516,90 miliar masih sedikit diatas target yang ditetapkan sebesar Rp.488,14 miliar. Jika dilihat per komponen biaya *overhead* dapat dijelaskan sebagai berikut, biaya umum administrasi terealisasi Rp.176,75 miliar sedikit diatas target yang ditetapkan sebesar Rp.152,10 miliar, namun demikian terdapat sedikit penghematan untuk beban promosi dari target yang diberikan Rp.17,49 miliar terealisasi menjadi Rp.13,41 miliar serta beban lainnya yang terdiri dari biaya premi penjaminan dan lain lain dari target semula Rp.29,72 miliar terealisasi sebesar Rp.19,63 miliar. Untuk biaya personalia juga telah melebihi anggaran dari target yang ditetapkan sebesar Rp.288,83 miliar terealisasi menjadi Rp.307,11 miliar, hal ini terjadi karena adanya pembebanan uang pisah/pesangon.
3. Pada biaya operasional lainnya terdapat adanya pembebanan uang pisah/pesangon Rp.17,8 miliar pada akhir tahun dalam proses pengalihan telah meningkatkan biaya personalia.
4. Bank juga membebankan biaya kasus hukum FBME GBP 5 Juta atau Rp.97,68 miliar.

5. Bank membentuk biaya CKPN sekitar Rp.182 miliar untuk menutup kekurangan.
6. Pada komponen pendapatan operasional selain bunga masih belum bisa optimal terutama pendapatan atas komisi provisi, dampak masih ditahannya penyaluran kredit. Demikian juga dengan Surat Berharga dari *Mark to Market* yang tidak bisa optimal masih terhimpas dari pergerakan pasar yang menurun di akhir periode Desember 2014 ini.
7. Tingginya beban non operasional terkait dengan adanya *remapping* dari biaya yang sebelumnya dibukukan sebagai biaya operasional, antara lain biaya pengacara, biaya konsultan dan biaya ongkos tanggungan.

Adapun untuk target kedepan sebagai berikut :

Dengan adanya penambahan modal dari pemilik baru diakhir tahun ini sebesar Rp.300 miliar dan secara bertahap maksimal dengan angka yang sama untuk tahun selanjutnya, diharapkan pada periode berikutnya bisnis bank kembali tumbuh serta perolehan laba kembali normal terutama dengan adanya target ekspansi untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dengan adanya pertumbuhan kredit sebesar Rp.1.652,63 miliar dengan mayoritas adalah kredit *high yield loan* dan disertai dengan penurunan *cost of fund*, pada akhirnya NIM akan membaik dari 0,5% menjadi 2,8% pada tahun 2015. Dengan adanya ekspansi kredit dan pengembangan bisnis treasury, pendapatan *fee base* yang bertumpu pada hasil komisi dan provisi kredit serta pendapatan transaksi devisa juga diharapkan turut meningkat pula. Hasil *recovery aset* bermasalah juga sangat signifikan sekitar Rp.168 miliar dalam menyumbang pendapatan sehingga menghasilkan secara gabungan dari komponen laba tersebut akan mampu menghasilkan laba yang positif diakhir tahun 2015 sebesar Rp.53,28 miliar, serta diharapkan terus berkesinambungan ke periode berikut diharapkan pada tahun 2016 menjadi laba sebesar Rp.24,27 miliar, menurun karena laba benar-benar hasil operasional bisnis bank, dan meningkat menjadi Rp.74,80 miliar di tahun 2017.

Pada sisi biaya *overhead*, kenaikan pada tahun selanjutnya mayoritas diperuntukkan untuk menunjang bisnis dan inisiatif strategi baru seperti: biaya-biaya terkait perluasan jaringan, pemindahan kantor pusat, belanja modal dan biaya IT untuk menunjang bisnis serta kenaikan biaya personalia. Untuk tahun selanjutnya, pada pos biaya personalia pada tahun 2016 sebesar Rp.449,18 miliar dan Rp.651,57 miliar di tahun 2017, hal ini terkait dengan rencana penambahan karyawan baru untuk mendukung pembukaan kantor baru dan ekspansi kredit mikro serta kenaikan COLA dan bonus berdasarkan kinerja. Rencana strategis baru tersebut juga mempengaruhi pengeluaran biaya umum dan administrasi, sehingga meningkat menjadi Rp.184,11 miliar pada tahun 2015 dan menjadi Rp.234,65 miliar dan Rp.287,02 miliar berturut-turut untuk tahun 2016 dan tahun 2017. Selain terkait dengan ekspansi bisnis, kenaikan biaya umum administrasi, juga telah termasuk biaya relokasi kantor pusat yang didepresiasi serta kelanjutan rencana belanja dan biaya IT untuk ekspansi bisnis serta tidak tertutup kemungkinan *upgrading/* penggantian *core banking* agar lebih mengakomodir pengembangan bisnis turut meningkatkan BUA. Untuk biaya promosi terutama untuk mendukung pertumbuhan bisnis DPK naik menjadi Rp.29,05 miliar di tahun 2015, dan Rp.37,40 miliar di tahun 2016 serta Rp.39,66 miliar di tahun 2017. Hal ini

diperlukan untuk promosi-promosi bisnis guna mendukung kegiatan bisnis utama serta menguatkan *image* dan pengenalan produk Bank Mutiara mengingat adanya target pertumbuhan bisnis yang mulai kembali normal.

Biaya PPAP dibentuk sejalan dengan pertumbuhan kredit baru dan asumsi sebagian kecil ekspansi baru (2%) menurun kolektibilitasnya, seperti terlihat dibawah ini.

Tabel Biaya Bentuk PPA Pertumbuhan Kredit baru

	December-15	December-16	December-17
Loan Growth	1.662.630	2.493.198	2.331.775
Provision for New NPL	1.620	2.443	2.285
Provision for New Ekspansi	16.526	24.932	23.318
	18.146	27.375	25.603

Note:

- 1) 1% PPA untuk kredit baru
- 2) Diasumsikan 2% dari ekspansi baru menjadi NPL dengan perincian:
 - 5% macet (100% PPAP)
 - 15% diragukan (50% PPAP)
 - 80% kurang lancar (15% PPAP)
- 3) PPAP untuk NPL dihitung setelah pengurangan nilai agunan yang diasumsikan meng-cover 80% dari *outstanding*.

Untuk tahun 2015, pembentukan biaya PPA Rp.18,15 miliar tersebut dapat ditutup dengan pemulihan dari asset bermasalah sebesar Rp.168,14 miliar sehingga secara net PPA *release* sebesar Rp.149,90 miliar seperti terlihat pada tabel laba rugi.

Pada tahun 2016, laba yang diperoleh setelah pajak diperkirakan akan menurun menjadi Rp.24,27 miliar dengan tidak adanya perolehan dari hasil pemulihan aktiva bermasalah. Namun hal ini dapat diartikan pula bahwa pada tahun 2016, bank telah menghasilkan laba dari operasional bank dan diharapkan kondisi ini terus berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya.

Strategi-strategi yang akan dilakukan untuk periode 2015 sampai dengan tahun 2017 guna mendukung perolehan laba sehingga tercipta struktur neraca dan laba rugi yang baik adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan *fee based Income* di tahun 2015, antara lain :
 - Peningkatan *fee based income remittance* :
 - ✓ Melakukan *marketing* yang intensif untuk mengoptimalkan transaksi *remittance* berupa meningkatkan layanan *cash enchainment* kiriman uang baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri.
 - ✓ Meningkatkan kerjasama *remittance* seperti Mandiri D/S, BCA D/S, Fire, MoneyGram.
 - ✓ *Reward* dan Promosi berupa pemberian penghargaan kepada cabang yang berprestasi dan mendukung promosi produk *remittance*.
 - ✓ Aliansi dengan bank lainnya maupun perusahaan lainnya yang memiliki aplikasi *system remittance*.
 - Menambah dan meningkatkan kerjasama *Interbank Line*.
 - Mempertuas bisnis ke dalam jaringan yang dimiliki J Trust termasuk di Jepang, Korea dan Singapura (*Expanding cross-border transaction in the region*).

- Meningkatkan transaksi PIB di cabang-cabang
 - Meningkatkan *fee based* dari kerjasama penerbitan Bank Garansi kepada perusahaan yang memiliki ijin *Bonding* (KGB)
 - Meningkatkan *fee based income treasury* :
 - ✓ Optimalisasi *treasury gallery* dan *treasury unit* yang ada sebagai sarana *one stop service* untuk kegiatan jual beli valas, konsultasi *market*.
 - ✓ Pemberian fasilitas *Treasury Line* seperti *tom*, *spot*, *forward*, dan *swap* untuk setiap nasabah *corporate* dan *money changer* untuk bisa menghasilkan *profit* bagi bank serta meningkatkan *volume*.
 - Kegiatan *Warehousing* berupa Penempatan surat berharga dalam instrumen reksadana, dimana pengelolaannya dilakukan oleh MI (Manajer Investasi).
 - Meningkatkan *fee based* di bidang perkreditan dengan cara meningkatkan transaksi nasabah dan mengembangkan *product bundling* dan penetapan tarif khusus.
2. Sampai dengan Desember 2014, bermodalkan jaringan kantor yang luas (61 kantor), Bank Mutiara akan terus melakukan optimalisasi jaringan yang sudah ada dan mengembangkannya sesuai dengan kemampuan permodalan yang juga telah ditentukan dalam ICAAP. Sedangkan untuk pembukaan mikro direncanakan menjadi 26 kios organik dan 25 *outlet* in organik berupa replika kios, untuk rencana pengembangan jaringan kantor kios maupun *outlet*.
 3. Terus melakukan pengembangan IT *Core Banking* dan infrastrukturnya sebagai salah satu pendukung percepatan pengembangan bisnis.
 4. Meningkatkan manajemen *yield* dan *investment* untuk memperoleh hasil yang lebih optimal.
 5. Peninjauan ulang dan melakukan pengembangan atas produk dan penetapan *pricing* yang lebih kompetitif, namun tetap memberikan keuntungan sehingga mampu bersaing dalam rangka meningkatkan *interest spread* dan *fee based income*.

a.5. Rasio Keuangan

1. Permodalan :

Ditinjau dari rasio penyediaan modal minimum, CAR (*market, credit & operational risk*) yakni sebesar 14,03% pada akhir tahun 2013 dan telah menjadi lebih baik dengan adanya tambahan modal disetor Rp.300 miliar menjadi sebesar 14,77% pada periode Desember 2014. Kondisi CAR dibawah 14% ini diperkirakan akan terus berlanjut pada bulan Januari dan Februari 2015 sebelum adanya penyeteran modal kembali pada akhir Triwulan I atau bertahap dalam tahun 2015. Pada bulan Maret 2015, CAR diperkirakan akan meningkat kembali menjadi 15,31% dan pada saat ini juga bank mulai meningkatkan baki debit kreditnya. CAR diperkirakan akan menjadi 14,96% di tahun 2016 dan 15,17% di tahun 2017. Bank berupaya tetap menjaga CAR agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta *Good Corporate Governance* dan senantiasa tetap dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Rentabilitas :

NIM terus membaik dari 0,3% pada realisasi tahun 2014 dan menjadi sekitar 2,8% pada tahun 2015, serta diproyeksikan untuk tahun 2016 menjadi sebesar 4,6% dan di tahun 2017 sebesar 5,9%, bank tetap mengusahakan perbaikan beberapa faktor yang menghambat NIM .

Beberapa upaya untuk meningkatkan NIM adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan penghimpunan dana murah

Peningkatan DPK dengan memperhitungkan biaya dan suku bunga yang kompetitif serta melakukan efisiensi biaya terkait pendanaan, misalnya biaya-biaya operasional, *cash in safe*, dan lain-lain.

Upaya memperbaiki *funding mix* dengan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan program untuk giro dan tabungan serta pengembangan pelayanan terus dilakukan.

Bank berupaya untuk meningkatkan jumlah rekening (*Number of Account*) melalui kerjasama dengan divisi kredit dan referensi dari nasabah *existing* serta perusahaan-perusahaan untuk *payroll* karyawannya. Melalui peningkatan jumlah rekening ini diharapkan saldo dana murah akan terus bertambah. Selain itu penambahan fitur ATM diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada nasabah sehingga leluasa dalam bertransaksi di unit ATM mana saja.

b. Melakukan *yield enhancement*

Selain mengurangi biaya dana, peningkatan NIM juga dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan bunga kredit dengan strategi-strategi sebagai berikut :

- Meneruskan program-program seperti *crash program* untuk penyelesaian kredit bermasalah, seperti yang telah berjalan selama tahun 2013 hingga Akhir tahun 2014.
- Mengembangkan dan melakukan ekspansi kredit mikro, yang direncanakan tahun 2015 mulai dibuka 26 kios dan 25 outlet mikro. Pembukaan kios mikro di tahun 2014 hingga 2015 direncanakan tersebar di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
- Melaksanakan ekspansi kredit *Consumer* dan *Small* dengan cepat, namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- Melakukan penjualan AYDA dan menempatkan di aktiva yang produktif.
- Mengontrol perkembangan deposito sebagai sumber dana mahal agar tidak terlalu cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan peningkatan kredit.
- Mengalihkan sebagian penempatan BI harian yang suku bunganya lebih rendah ke penempatan aset produktif lainnya dengan suku bunga yang lebih tinggi sepanjang dana tersebut masih belum dapat disalurkan kedalam bentuk kredit.

Rasio rentabilitas yang lain, seperti ROA dari negatif 4,86% di Desember 2014 menjadi sebesar 0,58% pada tahun 2015 dan diharapkan dapat membaik terkait laba yang dihasilkan. ROE membaik dari negatif 56,7% pada tahun 2013 menjadi 5,7% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 ROE dan ROA turun dikarenakan penurunan laba yang diperoleh murni dari operasional tanpa

adanya *recovery* aset yang diharapkan dalam periode-periode selanjutnya laba yang didapat adalah hasil secara operasional dan berkesinambungan.

3. Likuiditas :

PT Bank Mutiara Tbk senantiasa akan memenuhi ketentuan yang berlaku untuk pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah - primer sebesar 8 % dan sekunder sebesar 2,5%. Termasuk pemenuhan GWM valas menjadi sebesar 5% sejak Maret 2011, dan memenuhi rasio GWM valas sampai 8% mulai Juni 2011 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Likuiditas untuk operasional sehari-hari diperkirakan akan tetap terjaga dengan baik, dimana penempatan pada SUN dan SBI meningkat dari penempatan penambahan modal bank. Rasio LDR diproyeksikan sebesar 91,0% di tahun 2015 serta untuk periode tahun 2016 sebesar 91,8% dan 91,8% di tahun 2017, sebagai upaya bank untuk mengoptimalkan pendapatan bunga bersih. LDR akan tetap dijaga agar berada diantara 78,0% hingga dibawah 92,0% agar tidak terkena disinsentif ketentuan GWM telah berlaku sejak bulan Maret 2011.

4. Kualitas Aset :

- a. Adanya peningkatan prosentasi untuk kolektibilitas dari 3,6% di tahun 2013 menjadi 4,9% di tahun 2014 sebagian besar karena disebabkan penurunan *outstanding* kredit. Namun seiring adanya pertumbuhan kredit di periode-periode selanjutnya, rasio *Non Performing Loan* (NPL) dapat terus membaik. Rasio NPL diharapkan terus dibawah 5% pada tahun 2015 serta diproyeksikan terus membaik di tahun 2016 menjadi sebesar 3,6%, menjadi 3,1% di tahun 2017.
- b. Rasio kredit bermasalah diproyeksikan akan terus membaik dan senantiasa diupayakan berada dibawah batas maksimal ketentuan Bank Indonesia. Hal ini dilakukan melalui upaya *monitoring* dan penanganan kredit bermasalah seperti penagihan, restrukturisasi dan juga ekspansi kredit baru yang diproyeksikan lancar serta tidak adanya NPL baru. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki kualitas aset produktif dan non produktif adalah sebagai berikut:
 - Melakukan restrukturisasi debitur bermasalah yang kooperatif dan prospektif.
 - Memaksimalkan penagihan dengan jasa pihak ketiga.
 - Stratafikasi debitur yang bisa di-PKPU (Peninjauan Kembali Penyelesaian Utang) dan yang bisa dipailitkan.
 - Menagih surat berharga yang dihapus buku melalui pengadilan.
 - Melakukan penilaian ulang terhadap seluruh AYDA dan agunan debitur hapus buku.
 - Optimalisasi Balai Lelang dan KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik).
 - Memonitor proses perkara L/C bermasalah.
 - Melakukan litigasi ataupun gugatan hukum kepada debitur yang tidak kooperatif.
 - Melakukan reorganisasi yang mengarah kepada penajaman unit kerja.
 - Menunjuk *advisor* bidang akuntansi, hukum dan *appraisal*.

- c. Bank Mutiara senantiasa berupaya membentuk PPA sesuai Peraturan Bank Indonesia, sehingga pemenuhannya selalu diproyeksikan sekurang-kurangnya sebesar 100%.

5. Rasio Kredit Terhadap Total Aktiva Produktif :

Semula 80% di tahun 2013 menjadi sebesar 67,0% di September 2014 dan 55,7% di Desember 2014 sejalan dengan menurunnya pertumbuhan kredit yang diterapkan di tahun 2014, komposisi penyaluran kredit terhadap total aktiva produktif diproyeksikan menjadi menurun dengan adanya pertumbuhan aset yang meningkat. Sedangkan untuk periode berikutnya di tahun 2015 naik menjadi sebesar 70,6% serta sebesar 73,8% di tahun 2016 dan 75,4% di tahun 2017 adalah dampak dari pertumbuhan kredit yang diharapkan dapat kembali tumbuh dan normal di periode berikutnya.

6. Rasio UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Terhadap Total Kredit :

Demikian halnya dengan target penyaluran Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang juga diproyeksikan untuk periode kedepannya dapat kembali terus meningkat setiap tahunnya. Rasio UMKM terhadap total kredit diproyeksikan di tahun 2014 sebesar 41,8% serta 43,7% di tahun 2015 kembali tumbuh menjadi 44,3% di tahun 2016, dan untuk periode selanjutnya tahun 2017 diproyeksikan tumbuh di kisaran 44,7% serta disesuaikan dengan pertumbuhan kredit yang berjalan.

b. Rencana Bisnis Jangka Menengah

Dalam mempersiapkan masa peralihan kepada kepemilikan yang baru, bank telah menetapkan beberapa target jangka menengah dengan dasar rencana jangka pendek sebagai awal atau *base figure* bisnis yang dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun 2014 (base figure)

Konsolidasi, Transformasi, Reorganisasi, Positioning

1. Evaluasi bisnis & infrastruktur
2. Penyelesaian NPL (restruktur, Collection & WO), Special Mention Collection
3. Memperbaiki kinerja keuangan
4. Konsolidasi bisnis (Organisasi, NPL, Bisnis) dan Persiapan ekspansi bisnis (Bisnis Micro SME dan Retail)
5. *Set up* strategi bisnis yang terarah
6. Rekrut *Sales Force*
7. Pelatihan fokus pada Micro SME, & Consumer
8. Memperbaiki dan mengoptimalkan kantor cabang serta jaringan distribusinya
9. Kontinjensi Liabilitas

Tahun 2015

Expand, Optimisasi, Pertumbuhan

1. Pengembangan bisnis Micro SME, Trade Finance, dan Treasury
2. Mengembangkan produk program Konsumer
3. Optimalisasi infrastruktur

4. Fokus pada pertumbuhan Micro, Kecil dan Menengah
5. Rekrut *Sales Force*
6. Pengembangan program untuk bisnis Micro SME, Commercial, Trade Finance
7. Optimalisasi CASA
8. Kontinjensi Liabilitas

Tahun 2016

Meningkatkan (Infrastruktur, Kapasitas, Kapabilitas) dan Pertumbuhan

1. Mempersiapkan infrastruktur *implant & agency banking*
2. Menambah jaringan kantor
3. Membangun *Core Banking System* terintegrasi
4. *Restructure Remunerasi System*
5. Fokus pada pertumbuhan Micro, kecil dan menengah
6. Persiapan *commercial banking business*
7. Pengembangan CASA untuk kredit Micro, kecil dan menengah, *Commercial, Trade Finance & Consumer*
8. Pertumbuhan CASA
9. Pengembangan *internet & mobile banking*
10. Kontinjensi Liabilitas

Tahun 2017

Pangsa Pasar

1. Memperbesar pangsa pasar
2. Fokus pada pertumbuhan Micro, kecil dan menengah
3. Pertumbuhan *Retail Banking*
4. Pertumbuhan CASA
5. Kontinjensi Liabilitas

c. Rencana Bisnis Jangka Panjang

Untuk perkembangan bisnis jangka panjang selanjutnya dapat diuraikan dengan fokus *strategy* sebagai berikut :

Tahun 2018

Ekspansi yang terintegrasi

1. Pangsa pasar, Laba
2. *Integrated banking* Micro kecil dan menengah
3. Pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan
4. Penambahan jaringan kantor

Tahun 2019

Ekspansi yang terintegrasi

1. Memperkuat posisi pasar dan memperkuat laba yang berkelanjutan
2. *Integrated banking* Micro SME & Commercial, Retail Consumer
3. Perkuatan pertumbuhan bisnis

C. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya**

Sebagai perusahaan terbuka, PT Bank Mutiara Tbk telah memberikan informasi keterbukaan mengenai kondisi keuangan dan non-keuangan Bank kepada para *stakeholders* melalui Publikasi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Triwulanan dan Laporan lainnya yang disampaikan kepada regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta *stakeholders* lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Tahunan tersebut setidaknya dimuat pada dua koran berperedaran nasional di Indonesia, untuk Laporan Triwulanan setidaknya dimuat pada satu koran berperedaran nasional di Indonesia serta dapat diakses melalui situs *website* Bank Mutiara.

Disamping mempublikasikan Laporan Keuangan tersebut, PT Bank Mutiara Tbk juga menyusun dan menyampaikan publikasi Laporan Tahunan (*Annual Report*). Laporan Tahunan (*Annual Report*) diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi Bank secara menyeluruh termasuk kepemilikan, perkembangan usaha dan kinerja Bank kepada publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Bank. Laporan Tahunan (*Annual Report*) wajib disampaikan kepada Pemegang Saham, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pemeringkat Indonesia, Asosiasi Perbankan di Indonesia (PERBANAS), Institut Bankir Indonesia (IBI), 2 (dua) Lembaga Penelitian di Bidang Ekonomi dan Keuangan yang kompeten, 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan yang terkenal.

Laporan Tahunan (*Annual Report*) tersebut cakupan isinya cukup luas, meliputi Informasi Umum, Laporan Keuangan Tahunan, Opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP), transparansi terkait Kelompok Usaha, transparansi laporan kepegawaian, transparansi laporan sesuai ketentuan PSAK, Eksposur dan Manajemen Risiko dan Informasi lain yang berhubungan erat dengan Operasional Bank.

Adapun Informasi Umum meliputi: Susunan Pengurus, Rincian Kepemilikan Saham, perkembangan usaha Bank, sasaran, strategi dan kebijakan manajemen, struktur organisasi, aktivitas utama, Teknologi Informasi, jaringan kantor, dan hal-hal penting yang diperkirakan akan terjadi di masa mendatang, jumlah dan struktur SDM. Sedangkan Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun yang merupakan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) beserta opininya.

Transparansi juga harus diterapkan pada informasi mengenai produk-produk Bank sehingga memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank. Transparansi ini dapat berupa informasi dalam bahasa Indonesia yang disampaikan kepada nasabah secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk baik lisan maupun tulisan. Informasi minimal mencakup nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat, tatacara penggunaan produk, biaya-biaya produk, perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk Bank termasuk ada atau tidaknya penjaminan produk. Apabila terdapat perubahan, Bank segera memberitahukan kepada nasabah. Informasi mengenai produk tersebut harus jelas, termasuk letak dan kemudahan dibacanya.

Bank juga secara berkesinambungan melakukan pengkinian data nasabah, sehingga data pribadi yang disampaikan nasabah kepada Bank juga selain harus transparan juga merupakan data yang terkini, hal ini selain untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan Bank dan juga untuk meminimalisir risiko lainnya yang diakibatkan ketidakbenaran atau ketidak akuratan data nasabah. Bank

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

juga harus meminta persetujuan tertulis dari nasabah jika Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data pribadi Nasabah kepada Pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Transparansi juga harus dilaksanakan pada penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah sehingga hak-hak nasabah dalam bertransaksi dengan Bank senantiasa terjamin. Pengaduan nasabah harus segera ditindaklanjuti agar tidak menurunkan reputasi bagi Bank dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Bank memiliki waktu 2 (dua) hari kerja untuk penyelesaian pengaduan lisan dan 20 (dua puluh) hari kerja penyelesaian pengaduan tertulis.

Bank harus memiliki unit dan atau fungsi khusus di setiap kantor Bank yang menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah dan wajib mempublikasikan keberadaan unit ini kepada masyarakat. Hasil penanganan dan penyelesaian pengaduan tersebut secara triwulanan dilaporkan kepada Bank Indonesia.

D. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorar* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Maksud mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah jika dampak penyimpangannya > Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selama tahun 2014 jumlah kasus kecurangan (*Internal Fraud*) yang dilakukan oleh pegawai Bank dan/atau pihak eksternal Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan atau dampak penyimpangan > Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tabel berikut :

(satuan)

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh						Keterangan
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap		
	Thn sbm-nya	Thn berjln 2014	Thn sbm-nya	Thn berjln 2014	Thn sbm-nya	Thn berjln 2014	
Total fraud	-	-	1	2	-	-	1. Pemberian Kredit bermasalah di Cabang Medan Asia 2. Pemalsuan Bilyet Giro Bank di Cabang Serpong
Telah selesai	-	-	1	2	-	-	
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-	
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	
Telah	-	-	-	-	-	-	

ditindaklanjuti melalui proses hukum							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Terhadap kasus kecurangan (*Internal Fraud*), baik yang dilakukan oleh pegawai Bank dan/atau pihak eksternal Bank telah dilaporkan kepada OJK/Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Selanjutnya monitoring kasus tersebut dilakukan oleh SKAI, dan terhadap pegawai Bank yang terlibat sudah ditangani oleh Tim Penyelesaian Karyawan (TPK).

E. Penerapan Strategi Anti Fraud

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, maka dalam rangka menerapkan Strategi Anti Fraud Bank Mutiara (SAFBM), PT Bank Mutiara Tbk telah menerbitkan SK Direksi No.05.02/S.Kep-Dir-IAD/Mutiara/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012 tentang SOP Strategi Anti Fraud Bank Mutiara, yang mengatur 4 (empat) pilar Anti Fraud, yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi dan Monitoring.

Strategi Anti *Fraud* yang telah diimplementasikan selama tahun 2014 antara lain :

1. Pencegahan :

- a. Sosialisasi lanjutan Anti *Fraud* di Divisi dan Cabang
- b. Penandatanganan Pakta Integritas
- c. Menerbitkan buku Etika Korporasi
- d. Mendistribusikan SOP Anti *Fraud*
- e. Penyusunan *Fraud Risk Assessment* (FRA)
- f. Penetapan program *Know Your Employee* (KYE)

2. Deteksi :

- a. Melengkapi *Whistleblower System* (WBS)
- b. Sosialisasi WBS
- c. Melakukan *suprise audit* di Kas Kantor Cabang dan Surat Berharga
- d. Aktivitas *surveillance* atas aktivitas kredit

3. Investigasi :

- a. *Collecting Data Fraud*/kasus
- b. Penetapan Tim Investigasi
- c. Pemeriksaan Dokumen
- d. Wawancara
- e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- f. *On The Spot* (OTS) untuk tujuan *cross check* fakta di lapangan
- g. Melakukan analisis data
- h. Pelaporan hasil investigasi
- i. Penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan sanksi

4. Monitoring :

- a. Melakukan monitoring atas pelaksanaan sanksi
- b. Menyampaikan Laporan Anti *Fraud* kepada Bank Indonesia

Kemudian SOP tersebut telah memuat strategi Deteksi tindak *fraud* dengan menetapkan kebijakan *Whistleblower System* (WBS) meliputi :

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- 1) Penetapan sarana pelaporan *fraud* seperti Kotak Pos, SMS dan Portal Anti *Fraud*.
- 2) Penetapan pejabat yang berhak mengakses WBS, dalam hal ini dipegang oleh Direktur Utama yang dalam pelaksanaannya investigasi dilakukan oleh SKAI/Departemen Anti *Fraud*.
- 3) Pemberian kerahasiaan informasi dan jaminan identitas pelapor.
- 4) Pemberian penghargaan bagi pelapor yang informasinya mengandung kebenaran dan dapat mencegah terjadinya *fraud*.

Disamping itu dalam pencegahan tindak *fraud*, PT Bank Mutiara Tbk telah melaksanakan strategi Pencegahan sebagai berikut :

- 1) Program Anti *Fraud Awareness* untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait, antara lain dengan menyusun dan melakukan kampanye/sosialisasi semboyan "*No Fraud Tolerance*" sebagai semboyan Anti *Fraud* dan penandatanganan Anti *Fraud Charter*, *Annual Disclosure* dan Pakta Integritas.
- 2) Prosedur Rekrutmen yang efektif, yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan.
- 3) *Know Your Employee* (KYE) yaitu upaya pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan pada unit kerja.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Dalam rangka penerapan Strategi Anti Fraud Bank Mutiara, yaitu penerapan Pilar Deteksi, maka bank telah menetapkan kebijakan yang mengatur mekanisme pelaporan *Fraud* (*Whistleblowing System*) yang telah ditransparankan dan diterapkan secara konsisten agar dapat menimbulkan kepercayaan bagi seluruh karyawan Bank terhadap kehandalan dan kerahasiaan *Whistleblowing System*. Kejadian mencurigakan/pelanggaran yang diketahui oleh pegawai wajib dilaporkan kepada manajemen dengan menggunakan sarana *Whistleblowing System* (WBS) Bank antara lain :

- SMS/WhatsApp dikirimkan kepada Nomor : 0813 1504 5555.
- Portal anti fraud dengan alamat/address http://10.11.11.30/mutiara_serasi.
- Kotak Pos 99 Jakarta 10000.

Perlindungan *Whistleblower*

- Bank berkomitmen untuk melindungi pelapor *Fraud* yang beritikad baik dan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta *best practices* yang berlaku dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
- Perlindungan yang diberikan kepada pelapor meliputi perlindungan Bank terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan/pangkat, diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam arsip pribadi pegawai (*personal file record*).

Penanganan Pengaduan

Pengaduan/laporan pelanggaran yang masuk ke dalam WBS dan mengandung kebenaran dengan didukung bukti-bukti yang menguatkan akan dilaporkan Direksi untuk mendapatkan tindak lanjut investigasi oleh Tim Audit Investigasi.

Pengelola Pengaduan

WBS Bank Mutiara dikelola dan dimonitor oleh Departemen Anti Fraud yang berada dibawah Struktur Organisasi SKAI dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

Jumlah Pengaduan

Sejak WBS ditetapkan pada tahun 2012 hingga bulan Desember 2014 telah terdapat informasi masuk yang disampaikan oleh pegawai melalui sarana WBS dengan data sebagai berikut :

SARANA WBS	JUMLAH INFORMASI	MATERI	KETERANGAN
SMS	42 kali	1. Terkait Rekening 2. Terkait Kondisi Kas Cabang	• Ditindaklanjuti 44
PORTAL	2 kali	1. Terkait Penggunaan <i>Username</i> 2. Terkait Profesionalitas pegawai	
KOTAK POS 99 JAKARTA 10000	-		
TOTAL	44 kali		Ditindaklanjuti 44 (100%)

F. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh Bank

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2014 jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank Mutiara Tbk yang telah diajukan melalui proses hukum sebagaimana tabel berikut :

1. Bank Sebagai Tergugat/Termohon/Terlawan/Terlapor

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	9	2
Dalam proses penyelesaian	21	0
Total	30	2

2. Bank Sebagai Penggugat/Pemohon/Pelawan/Pelapor

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
A. Perkara terkait <i>fraud</i> dan TPPU yang dilakukan oleh karyawan		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian		2
Total		2
B. Perkara terkait perlawanan atas eksekusi putusan pengadilan yang menghukum Bank untuk mengembalikan dana		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian	1	
Total	1	
C. Perkara terkait sengketa kepemilikan dana		
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

Dalam proses penyelesaian	1	
Total	1	

Masalah hukum yang umumnya dihadapi Bank adalah :

- Masalah Perdata yang dihadapi Bank berkaitan dengan klaim dari investor produk investasi milik PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, sengketa kepemilikan atas *Security Deposit* serta Surat-Surat Berharga, perlawanan dari debitur atas rencana lelang dan perselisihan kepemilikan dana.
- Masalah Pidana adalah masalah yang dihadapi oleh pejabat Bank maupun mantan pejabat Bank, yang saat ini dalam proses hukum oleh pihak yang berwajib dan beberapa diantaranya dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri, namun juga ada yang telah mendapatkan putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh Bank antara lain :

- Memastikan penanganan kasus, baik yang ditangani oleh internal maupun eksternal *lawyer* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Memonitor perkembangan penanganan kasus-kasus hukum baik yang ditangani oleh internal maupun eksternal *lawyer*.

G. Penggunaan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi/*Vendor* TI

Berdasarkan PBI No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 Nopember 2007, dan SE BI No.9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 Perihal Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Bank dapat menggunakan jasa pihak lain/pihak penyedia jasa teknologi informasi untuk menyelenggarakan kegiatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis.

Penggunaan pihak penyedia jasa TI menyebabkan Bank memiliki ketergantungan terhadap jasa yang diberikan secara berkesinambungan dan atau dalam periode tertentu yang dapat mempengaruhi timbulnya risiko Bank berupa risiko operasional, kepatuhan, hukum dan reputasi antara lain karena adanya kegagalan penyedia jasa dalam menyediakan jasa, pelanggaran terhadap pengamanan atau ketidakmampuan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

a. Proses Pemilihan dan Penentuan Pihak Penyedia Jasa Teknologi Informasi

Secara umum proses pemilihan dan penentuan pihak penyedia jasa teknologi informasi/*calon vendor* TI (terkait dengan kerjasama sistem/program) di PT Bank Mutiara Tbk meliputi :

a.1. Mendapatkan sumber informasi calon *vendor* TI dari:

- Pengalaman sebelumnya dalam berinteraksi dengan calon *vendor*.
- Jaringan perkenalan rekan-rekan sesama IT perbankan.
- Browsing di internet.
- Masukan unit bisnis/Divisi/Cabang/internal lainnya.
- Seminar atau pelatihan.

a.2. Kriteria dan dasar pertimbangan dalam menentukan calon *vendor* TI yang akan dipilih :

Memenuhi nilai total tertinggi/maksimal 100 dari gabungan 3 aspek penilaian yaitu:

- Aspek Fungsional, bobot 40% dengan maksimal nilai 40.
- Aspek Teknis, bobot 30% dengan maksimal nilai 30.
- Aspek Finansial, bobot 30% dengan maksimal nilai 30.

a.3. Prosedur permohonan persetujuan calon *vendor* TI yang akan dipilih:

- Melakukan *review* terhadap rencana bisnis tahunan yang berisi daftar proyek yang akan dijalankan, dan menyusun skala prioritas terhadap proyek yang akan dijalankan tersebut.
- Mengumpulkan *requirement*/kebutuhan fungsional dari unit bisnis.
- Mengumpulkan *requirement*/kebutuhan teknis dari Divisi IT.
- Melihat *requirement*/kebutuhan *financial*/*Budget* dari rencana bisnis tahunan.
- Penyusunan TOR (*Term Of Reference*) berdasarkan *requirement* fungsional dan teknis.
- Mengirimkan undangan presentasi beserta TOR kepada beberapa calon *vendor* TI.
- Calon *vendor* TI melakukan presentasi.
- Calon *Vendor* TI mengirimkan *proposal* penawaran berdasarkan TOR.
- Mengundang POC (*Proof Of Concept*) calon *vendor* TI (jika dimungkinkan untuk POC).
- Calon *vendor* TI melakukan POC (jika dimungkinkan untuk POC).
- Melakukan penilaian seluruh aspek (nilai total maksimal 100) terdiri dari :
 - Aspek Fungsional (nilai maksimal 40), dinilai oleh unit bisnis sebagai user.
 - Aspek Teknis (nilai maksimal 30), dinilai oleh Divisi IT.
 - Aspek Finansial (nilai maksimal 30), dinilai oleh Divisi Procurement & Fixed Asset.
- Penilaian calon *vendor* TI dibahas dalam rapat Komite IT (jika proyek bersifat strategis).
- Komite IT sesuai kewenangannya memberikan rekomendasi kepada Direksi.
- Direksi memberikan persetujuan atau menolak terhadap rekomendasi Komite IT.
- Setelah disetujui Direksi berdasarkan batas kewenangan limit yang berlaku, maka Divisi Procurement & Fixed Asset menindaklanjuti proses *engagement vendor* TI selanjutnya, yaitu : proses *Purchase Order*/pembuatan Surat Perintah Kerja, Kontrak dan lain-lain.

b. Pemantauan/Pengawasan *Vendor* TI Dalam *Vendor Management*

Bank wajib memiliki program pemantauan data *vendor* TI secara berkesinambungan untuk memastikan penyedia jasa/*vendor* TI telah melaksanakan pekerjaan/ memberikan jasa sesuai dengan kontrak/perjanjian kerjasama dengan melakukan :

- Pemantauan pencapaian SLA (*Service Level Agreement*) dari *vendor-vendor* TI utama.
- Kunjungan kerja rutin ke lokasi kerja/*data center* dari *vendor* TI utama.
- Permintaan laporan keuangan tahunan (*Audited*) *vendor* TI utama.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

- Permintaan hasil audit independen dari lembaga terkait misalnya ISO.
- Rapat berkala dengan *vendor* TI utama.
- Pemantauan *progress* penyelesaian proyek IT secara berkala sesuai prinsip *Project Management*.

Berikut adalah daftar proyek IT dan *Vendor* TI yang bekerjasama dengan PT Bank Mutiara Tbk selama Tahun 2014 :

No	Nama Vendor	Nama Proyek	Tujuan Penggunaan Proyek	Status
1	PT. Megawastu Solusindo	Treasury Retail	Integrasi proses jual beli valas antara cabang dengan kantor pusat	<i>Determinate</i> karena <i>vendor</i> tidak sanggup menyelesaikan
2	PT. Visionet Internasional	Pengadaan Network Security	Meningkatkan pengamanan jaringan	Selesai
3	PT. Visionet Internasional	Pengadaan Hardware Web Teller	Menyediakan Hardware untuk aplikasi Web Teller	Selesai
4	PT. Tridas Widianara	Modul pelaporan IFTI (International Financial Transfer Instruction) untuk transaksi Moneygram	Otomasi Pelaporan IFTI ke GRIPS PPAK terkait transaksi Moneygram	Selesai
5	PT. Teravin Technovations	Internet Banking untuk Corporate	Nasabah korporasi dapat menggunakan layanan internet banking	Selesai <i>Development</i> , menunggu izin OJK untuk <i>launching</i>
6	PT. Misys International Financial Systems	Upgrade Core Banking System - Bank Fusion Equation	Menyempurnakan fungsi-fungsi core banking terbaru	Selesai <i>Development</i> , rencana <i>Live</i> di Januari 2015
7	PT. Vaia Indonesia	Project Management Office (PMO) untuk upgrade Core Banking System	Memastikan upgrade Core Banking System berjalan dengan lancar	Mengikuti proyek Upgrade Core Banking System
8	PT. Multipolar Technology	Modul PSAK 50/55	Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan PSAK 50 / 55	<i>On Progress</i>
9	PT. Tri Daya Asira	Interface RTGS New Generation & SKN dengan Core Banking System	Otomasi RTGS New Generation & SKN sehingga tidak perlu <i>double input</i>	<i>On Progress</i>

BAB VII

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

7.1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk Kegiatan Sosial merupakan bentuk implementasi dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dari PT Bank Mutiara Tbk yang diyakini dapat menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, serta mampu menanggapi berbagai perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya bisa menciptakan hubungan yang saling bermanfaat antara PT Bank Mutiara Tbk dengan masyarakat luas.

PT Bank Mutiara Tbk senantiasa berusaha menciptakan suasana kegiatan operasi yang harmonis dengan masyarakat luas dan peduli lingkungan, sehingga diharapkan dapat menjadi perusahaan yang terus dicintai masyarakat. Terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan dinamis diyakini sebagai kondisi ideal bagi kelangsungan dunia usaha di manapun.

Dilandasi suatu pemikiran bahwa perusahaan adalah bagian dari suatu masyarakat, maka PT Bank Mutiara Tbk menyadari bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk mengembangkan dan memberdayakan kehidupan masyarakat di sekitarnya melalui program "Mutiara Peduli" yang fokus dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial-keagamaan, peduli lingkungan hidup, dan tanggap darurat dalam setiap bencana alam.

Lima Pilar CSR

Guna mewujudkan segenap perihal di atas maka PT Bank Mutiara Tbk melakukan berbagai upaya dengan memperhatikan lima pilar CSR, sebagai prinsip dalam pelaksanaan di lapangan. Adapun kelima pilar dimaksud adalah sebagai berikut:

- ***Building Human Capital***
Secara internal, Bank berupaya untuk menciptakan SDM yang andal. Sedangkan secara eksternal, Bank senantiasa berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat, utamanya melalui *community development*.
- ***Strengthening Economies***
Bank berupaya mendapatkan laba dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan ekonomi komunitas di lingkungan sekitar dimana perusahaan beroperasi.
- ***Assessing Social Tension***
Bank senantiasa menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
- ***Encouraging Good Governance***
Dalam menjalankan bisnisnya, Bank senantiasa menjalankan *good corporate governance* dengan baik.
- ***Protecting The Environment***
Bank senantiasa berupaya menjaga kelestarian lingkungan.

Program CSR Tahun 2014

Sepanjang tahun 2014 PT Bank Mutiara Tbk terus berperan serta dalam membangun masyarakat dalam kerangka pelaksanaan program CSR sebagaimana rincian penyaluran dana program CSR yang fokus dalam beberapa bidang kegiatan sebagai berikut :

Tabel Kegiatan dan Realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan :

No	KEGIATAN	REALISASI (Rp)
1	Pendidikan	107.000.000,-
2	Kesehatan dan Kemanusiaan	215.864.800,-
3	Sosial-Keagamaan	129.957.100,-
TOTAL		452.821.900,-

Secara lebih rinci berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PT Bank Mutiara Tbk dalam program CSR sebagai berikut:

1. Pendidikan

Salah satu program CSR dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh PT Bank Mutiara Tbk adalah program bantuan sumbangan pendidikan yang bekerja sama dengan Pondok Pesantren Arr-Rojaul Hikmah Tambun, Jawa Barat berupa pemberian bantuan santunan untuk pendidikan bagi para santri.

Selain itu, ada pula pemberian bantuan biaya bagi pemberdayaan umat dalam rangka pemberdayaan dibidang ekonomi, yang diharapkan dengan pemberdayaan umat di bidang ekonomi ini dapat lebih memberikan pengetahuan bagi masyarakat di kawasan Madura dan sekitarnya.

Kemudian, dilakukan pula pemberian bantuan santunan pendidikan bagi siswa-siswi melalui *Sampoerna Foundation* yang bergerak di bidang pendidikan bagi siswa-siswi yang kurang mampu.

Tabel rincian penyaluran dana program CSR untuk kegiatan pendidikan pada tahun 2014 :

Tabel Kegiatan Pendidikan

No	NAMA KEGIATAN	REALISASI (Rp)
1	Bantuan Pendidikan kepada Pondok Pesantren Ar-Rojaul Hikmah	2.000.000,-
2	Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Umat masyarakat Madura	50.000.000,-
3	Bantuan Pendidikan bagi siswa-siswi melalui yayasan "Sampoerna Academy"	55.000.000,-
TOTAL		107.000.000,-

2. Kesehatan dan Kemanusiaan

Program rutin PT Bank Mutiara Tbk dalam rangka kegiatan CSR di bidang kesehatan dan kemanusiaan adalah penyelenggaraan kegiatan Donor Darah yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Kegiatan ini diselenggarakan di lingkungan gedung Kantor Bank Mutiara yang diadakan rutin 2 (dua) kali dalam setahun.

Selain itu, PT Bank Mutiara Tbk juga turut serta dalam beberapa kegiatan amal dalam rangka pemberian bantuan kepada korban banjir di Jawa Tengah dan pembuatan lampu jalan di jalan Desa Wasian Manado.

Tabel rincian penyaluran dana program CSR untuk kegiatan kesehatan dan kemanusiaan pada tahun 2014 :

Tabel Kegiatan Kesehatan dan Kemanusiaan

No	NAMA KEGIATAN	REALISASI (Rp)
1	Donor Darah PT Bank Mutiara Tbk (2 x dalam setahun)	8.974.800,-
2	Kegiatan Amal untuk korban banjir di Jepara Jawa Tengah	100.000.000,-
3	Bantuan 2 unit sepeda dan 50 pohon pucuk merah di Solo	4.890.000,-
4	Bantuan Dana kesejahteraan masyarakat Solo	75.000.000,-
5	Bantuan Pembuatan lampu jalan di Desa Wasian Manado	10.000.000,-
6	Bantuan Pengobatan bencana Gunung Kelud	2.000.000,-
7	Bantuan Korban bencana melalui "Perbankan Peduli"	15.000.000,-
TOTAL		215.864.800,-

3. Sosial dan Keagamaan

Bentuk kegiatan CSR dalam bidang sosial dan keagamaan yang dijalankan oleh PT Bank Mutiara Tbk di tahun 2014 meliputi pembangunan atau renovasi rumah ibadah, baik berupa Masjid, Mushollah, Pesantren yang berada di lingkungan masyarakat, perkantoran maupun di lingkungan pendidikan, serta tempat ibadah lainnya. Termasuk pemberian santunan kepada anak yatim yang berada di lingkungan Bank Mutiara yang dikoordinir oleh pengurus Masjid Al-Ijtihad Setiabudi Jakarta.

Penyelenggaraan kegiatan kurban yang disalurkan kepada masyarakat tidak mampu di sekitar lingkungan Kantor Pusat Bank Mutiara.

Tabel rincian penyaluran dana program CSR untuk kegiatan sosial dan keagamaan pada tahun 2014 :

Tabel Kegiatan Sosial dan Keagamaan

No	NAMA KEGIATAN	REALISASI (Rp)
1	Bantuan Rumah Quran Masjid Al-Anshor	5.000.000,-
2	Bantuan Pembangunan Masjid di Daerah Sumenep	17.400.000,-
3	Bantuan Pembangunan Mushollah Al-Hasyim Sumenep	4.000.000,-
4	Bantuan Pembangunan Mushollah Annur	2.000.000,-
5	Bantuan Pembangunan Masjid Al-Ijtihad Setiabudi	5.000.000,-
6	Bantuan Renovasi Mushollah Wali Songo Desa Talango	4.000.000,-
7	Bantuan Acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Setiabudi	5.000.000,-
8	Bantuan Kegiatan pengajian akbar	1.857.100,-
9	Bantuan Renovasi Masjid Al-Ijtihad Setiabudi	5.000.000,-
10	Bantuan Yayasan Yoseph Yeemye di Makassar	5.000.000,-
11	Bantuan Untuk SDI Cikal Harapan Banten	3.000.000,-
12	Bantuan Rehabilitasi Mushollah Baiturrahmah	4.200.000,-
13	Bantuan Santunan anak Yatim Piatu di Masjid Al-Ijtihad Setiabudi di bulan Ramadhan	12.850.000,-
14	Santunan Anak Yatim Piatu TPA Al-Amal Jakarta	2.500.000,-
15	Kegiatan Mutiara Ramadhan Bank Mutiara Cabang Solo	3.500.000,-
16	Bantuan Pondok Pesantren di Madura	17.950.000,-
17	Bantuan Pengecoran kubah Masjid Alkautsar	4.000.000,-
18	Bantuan Mushollah Nurul Iman Desa Compor Baral	4.200.000,-
19	Mutiara Ramadhan Cabang Kertajaya	3.000.000,-
20	Pemotongan Hewan Qurban di Jakarta	20.500.000,-
TOTAL		129.957.100,-

Rencana Program CSR Tahun 2015

Selain tetap memperhatikan dan meningkatkan aktivitas yang sesuai dengan lima pilar CSR PT Bank Mutiara Tbk sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, PT Bank Mutiara Tbk juga akan mendukung program inisiatif OJK dalam bidang edukasi keuangan (dalam bidang Perbankan). Dukungan terhadap program tersebut bernama SIKAPI yang telah dijalankan pada periode tahun 2014 terhadap masyarakat di sekitar Kantor Pusat, sebagai perwujudan kepedulian PT Bank Mutiara Tbk terhadap masyarakat.

7.2. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2014 PT Bank Mutiara Tbk tidak pernah melakukan kegiatan politik atau memberikan sumbangan dana untuk kegiatan politik.

No	Nama Kegiatan Politik	Jumlah (Rp)
NIHIL		

Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank

- Implementasi GCG membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan oleh PT Bank Mutiara Tbk. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk melihat sejauh mana kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.
- PT Bank Mutiara Tbk melaksanakan *self assessment* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan bahwa Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG.
- Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG PT Bank Mutiara Tbk untuk Semester II/Posisi Desember 2014 sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	4	Kurang Baik
Konsolidasi	---	(jika ada subsidiary company)
Analisis		
<p>Berdasarkan Kertas Kerja <i>Self Assessment</i> pelaksanaan GCG dan data/dokumen pendukung lainnya yang relevan (hasil audit internal dan eksternal, data/informasi financial / non financial Bank), maka dapat disampaikan hasil <i>self assessment</i> pelaksanaan GCG Bank adalah sebagai berikut :</p> <p>A. <u>Faktor Kekuatan:</u></p> <p>a. <u>Governance Structure:</u></p> <p><i>Governance structure adalah struktur kekuasaan berikut persyaratan pejabat yang ada di Bank sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.</i></p> <p>Terkait dengan implementasi <i>governance structure</i>, antara lain dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan RUPS yang terakhir pada tahun 2014 melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 30 Desember 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari orang yang ahli dan berpengalaman, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai, serta Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan. • Komposisi Direksi mempunyai kompetensi, integritas dan telah teruji, dan mempunyai pemahaman yang baik terhadap industri keuangan perbankan, serta Direksi telah melakukan upaya-upaya meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG. • Telah dibentuk Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris dan dibawah Direksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta anggota komite-komite mempunyai kompetensi dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. • Telah memiliki Kebijakan dan <i>Standard Operation Procedure/SOP</i> tentang 		

Handwritten signature/initials

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Benturan Kepentingan, dan senantiasa di-update.

- Telah mempunyai infra Struktur Organisasi bidang Manajemen Risiko, bidang Kepatuhan dan bidang Legal, dengan kompetensi SDM yang memadai.
- Telah memiliki Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern/SKAI dengan kompetensi SDM yang memadai dan dapat bekerja secara independen.
- Telah menunjuk Kantor Akuntan Publik/KAP yang memenuhi aspek legalitas serta standar profesional akuntan publik untuk melakukan audit.
- Telah memiliki Kebijakan, Prosedur/SOP dan Manual Produk, serta tahapan kelengkapan sistem dan infrastruktur sesuai kebutuhan yang senantiasa di-update sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku, serta telah menerapkan PSAK 50 & 55 terkait dengan perhitungan CKPN.
- Telah memiliki kebijakan Batas Wewenang Memutus Kredit/BWMK secara individual ataupun kolegal sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing dari jajaran manajemen.
- Laporan Keuangan Publikasi disampaikan secara transparan, dan informasi terkait produk bank diantaranya suku bunga deposito maupun suku bunga dasar kredit juga disampaikan secara transparan sesuai dengan ketentuan.
- Telah dijalankan program Banking Development Staff (BDS) dan Banking Development Officer (BDO) yang terstruktur sesuai *roadmap* yang telah disusun, serta "Special Hire" untuk beberapa posisi dan *advisor*. Adanya *champion business* serta telah dibentuk Tim *Branch Roll Out* untuk transformasi cabang-cabang agar lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Cabang-cabang sesuai kebutuhan sebagai ujung tombak penjualan dan pelayanan, dan juga rekrutmen dan pelatihan *new staff*.

b. Governance Process:

Governance process adalah pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan.

Terkait implementasi *governance process* antara lain dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagaimana sudah jelas diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan ketentuan yang berlaku.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, telah melakukan pengawasan / memberikan nasehat kepada Direksi, memberikan arahan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, telah melakukan monitor dan mengingatkan Direksi untuk menindak-lanjuti semua temuan audit internal maupun audit eksternal, serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional.
- Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris maupun Komite-Komite dibawah Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

tidak pernah masuk dalam ranah Benturan Kepentingan.

- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan baik sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun sebagai Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), Direksi telah membentuk dan mengangkat Anggota Komite dan Satuan Kerja tertentu yang bertanggung jawab kepada Direksi, a.l. : Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Legal, SKAI, Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite ALCO, dan sebagainya.
- Bidang Manajemen Risiko dan Bidang Kepatuhan sebagai *second line of defence* telah bekerja secara independen dan berpedoman ketentuan yang berlaku.
- Bank senantiasa berupaya menurunkan tingkat pelanggaran menjadi lebih baik dan semaksimal mungkin menghindari pelanggaran dalam upaya membangun Budaya Kepatuhan.
- SKAI/Internal Audit sebagai lini pertahanan ketiga (*third line of defence*) telah bekerja secara independen dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- Aktivitas operasional bank telah berjalan secara independen tanpa adanya intervensi dari Pemegang Saham (*shareholder*) atau pihak berkepentingan lainnya (*stakeholder*).
- Proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP Terdaftar) telah memenuhi prosedur yang berlaku dan asas/prinsip GCG, dan proses transparansi Laporan Keuangan Publikasi senantiasa dilakukan dan disajikan dengan baik.
- Implementasi tahapan peningkatan Kompetensi SDM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai kebijakan dan SOP serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang secara bertahap didukung pula oleh sistem infrastruktur yang memadai.
- Proses penerapan Manajemen Risiko telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, pengambilan keputusannya telah sesuai kebijakan & prosedur yang berlaku.
- Telah berupaya memenuhi target atas rencana strategis bisnis bank melalui kebijakan-kebijakan yang senantiasa disesuaikan dengan memperhatikan faktor persaingan dan kondisi perekonomian, serta prinsip kehati-hatian.
- Proses penyelesaian Pelampauan BMPK masih terus diupayakan melalui *action plan* yang disampaikan kepada Pemegang Saham dan pihak Regulator, dan diharapkan dapat segera diatasi dengan adanya setoran modal yang merupakan komitmen dari J-Trust.
- Telah dilakukan proses uji coba terhadap Kebijakan dan SOP Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP) dengan disaksikan dan di-review oleh pihak independen, dan telah dilengkapi pula prosedur alternatif pada masing-masing SOP di setiap unit kerja.
- Mengimplementasikan *Compliance Report Monitoring* (CRM) secara lebih efektif,

74 KA

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

dan telah disusun SOP Unit kerja dalam rangka memperbaiki bisnis proses termasuk didalamnya terkait dengan kebijakan, organisasi, pemegang kewenangan kredit dan SLA pemberian kredit.

c. Governance Outcomes:

Governance Outcomes adalah hasil dari pelaksanaan GCG baik dari aspek hasil kinerja maupun cara-cara/praktek-praktek yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut.

Terkait *governance outcomes* antara lain dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi atau nasehat kepada Direksi dalam upaya meningkatkan kinerja dan *values* bank melalui Rapat Direksi dan Komisaris (Radirkom dan Rapat *Review* Putusan RKK), Rapat Komite dibawah Komisaris dan melalui surat kepada Manajemen.
- Pemegang saham baru (J-Trust) telah berkomitmen untuk melakukan penambahan modal secara berkala, dimana J-Trust akan melakukan penambahan modal secara bertahap sesuai kebutuhan.
- Direksi telah mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham/PS melalui Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS, memelihara komunikasi terhadap seluruh jajaran terkait visi dan misi perusahaan, peningkatan kompetensi karyawan.
- Komite-komite telah memberikan rekomendasi maupun arahan kepada Dewan Komisaris terkait permasalahan pengendalian interen, manajemen risiko dan lainnya yang bermanfaat.
- Temuan Satuan Kerja Audit Interen/SKAI maupun auditor eksternal sebagian besar telah diselesaikan sesuai dengan target waktu, dan secara berkesinambungan akan terus meningkatkan monitoring atas tindak lanjut DMTL kepada unit terkait.
- Laporan Kepatuhan, Laporan TKB secara semesteran telah disampaikan kepada Regulator dengan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku, dan Laporan Profil Risiko secara triwulanan telah disampaikan kepada pihak Regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
- Upaya pemenuhan kuantitas dan kualitas/kompetensi SDM, serta tahapan pemenuhan kebijakan dan SOP serta sistem dan infrastruktur pendukung, berimbang terhadap berjalannya kegiatan operasional dan bisnis yang memadai sesuai ketentuan, yang dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan BMPK (pencairan kredit telah memperhitungkan permodalan bank).
- Informasi produk dan jasa serta informasi lainnya a.l. SBDK, Pengumuman Suku Bunga Penjaminan LPS, telah disampaikan kepada nasabah secara transparan baik tertulis maupun lisan.
- Tim Penyelesaian Karyawan (TPK) dilakukan secara intensif dalam menindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan permasalahan *fraud* yang dilakukan

Handwritten signature/initials

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

karyawan sebagai bagian dari moral *enforcement*, dan lebih mengintensifkan penerapan Kebijakan *Anti Fraud* termasuk *whistleblower*.

- Bank telah melaksanakan ketentuan terkait Pengelolaan Pengaduan Nasabah dan Pelaporannya kepada pihak Regulator.

B. Faktor Kelemahan:

a. Governance Structure :

- Hasil RUPS terkini yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2014 jumlah Dewan Komisaris belum terpenuhi, dimana jumlahnya baru 2 orang dan Bank telah menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dengan komitmen penambahan Komisaris melalui RUPS paling lambat bulan Maret 2015 (aspek akuntabilitas).
- Masih terdapat satu Komite dibawah Komisaris yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi, yang sementara Ketua komitennya "*vacant*", karena jumlah komisaris independen baru ada 1 (satu) orang yang hanya dapat merangkap 2 (dua) komite, sedangkan jumlah Komite dibawah Komisaris terdapat 3 (tiga) Komite.
- Kecukupan dan kompetensi Sumber Daya Manusia/SDM (aspek SDM) dan infrastruktur sistem untuk mendukung bisnis bank yang masih perlu dipenuhi dan lebih ditingkatkan (aspek akuntabilitas).

b. Governance Process :

- Monitoring kredit belum dilakukan dengan optimal (aspek kepatuhan) yang dapat berdampak pada:
 - Cukupnya informasi kemampuan dan perkembangan bisnis debitur.
 - Tidak terjadi lagi proses Perpanjangan Fasilitas Kredit yang dilakukan mendekati jatuh tempo, sehingga kualitas analisis menjadi optimal.
 - *Bridging Finance* pada saat debitur mendapat bayaran dari bowhir/relasi bisnisnya dapat termonitor dengan baik.
 - Penurunan kualitas dari aspek kinerja, prospek usaha dan kemampuan membayar dan bisnis debitur tidak terdeteksi sejak dini.
- Masih adanya proses pemberian kredit yang belum dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan), sehingga berdampak:
 - Optimalnya monitoring kesesuaian penggunaan kredit pada *end-user* (misal: *bridging* Bakti Pos *takeover* dari Bank Niaga dan faktor kepentingan pribadi pengawas Bakti Pos), serta mengantisipasi munculnya kredit-kredit bermasalah dari debitur yang lainnya.
 - Meningkatkan kualitas SDM di unit bisnis, yang sudah mulai ditindaklanjuti melalui upaya pemberian *training*, serta adanya program Banking Development Officer (BDO) dan Banking Development Staff (BDS).
 - Pemenuhan kelengkapan dokumen (legalitas usaha, misal : UUG untuk usaha industri antara lain: PT Pensonic Indonesia, I Wayan Tunas, Soetikno, dan SKDP a/n. PT Mega Prima Pertamina, PT Air Sumber Hidup, PT Prima Mangan Mandiri).

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG

- Kepatuhan atas Keputusan RKK (Laporan Keuangan yang belum *Audited*, antara lain: PT Air Sumber Hidup, PT Arjuna Finance).
- Rasio NPL diatas ketentuan, dan penurunan *earning* serta berimbas pada penurunan nilai Tingkat Kesehatan Bank dan Penerapan GCG.
- Belum optimalnya *Core system* untuk mendukung MIS dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga berdampak pada *governance outcomes* yaitu:
 - Meminimalkan teguran dan sanksi akibat laporan terlambat dan kurang akurat (aspek kepatuhan).
 - Mengoptimalkan *Security Dual Control* pada *Core system* untuk verifikasi perubahan data nasabah (pengkinian data) yang dilakukan oleh CS/UKPN Cabang.
- Masih terdapatnya pelanggaran rasio-rasio penting, diantaranya rasio NPL, BMPK, LDR, sehingga perlu perbaikan dan peningkatan *governance process*, diantaranya peningkatan *awareness* terhadap Kebijakan dan Prosedur serta ketentuan lainnya yang berlaku.
- *Awareness* yang belum optimal dari Pemimpin Kantor dan Manajer Operasi (KBO) terhadap penerapan APU-PPT yang telah didukung otomasi Sistem Smart AML, sehingga masih terdapat temuan SKAI dan OJK, antara lain: Pengkinian Data dan CIF Ganda. Hal ini kedepannya akan ditindaklanjuti adanya Surat Teguran Ke Cabang/Capem terkait dan diusulkan ke Human Capital Management Division untuk menjadi salah satu komponen penilaian KPI Cabang/Capem.

c. Governance Outcomes :

- Meningkatnya Ratio kredit bermasalah/NPL Gross dan NPL Nett diatas ketentuan yang berlaku sehubungan dengan adanya penurunan kolektibilitas kredit dari beberapa debitur, dimana hal ini berimbas pada memburuknya rentabilitas dan permodalan Bank.
- Masih terdapat Pelampauan BMPK (Kredit a.n. PT SCS & PT, SPR, dan Surat Berharga a.n. JPM) yang belum dapat diselesaikan, *action plan* sudah disetujui oleh OJK per surat tanggal 12 Juni 2014, namun dengan adanya komitmen dan realisasi penambahan setoran modal diharapkan tahun 2015 sudah tidak ada lagi pelampauan BMPK.
- Ratio LDR dibawah ketentuan yang berlaku, sehingga kena kewajiban untuk menambah setoran GWM sesuai ketentuan yang berlaku.
- Masih terdapat sanksi peringatan/teguran, administrasi dan denda terhadap proses dan penyampaian Laporan Rutin Bank kepada Regulator, antara lain:
 - Masih terdapat sanksi dan denda dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia atas keterlambatan ataupun kesalahan dalam penyampaian pelaporan, antara lain atas keterlambatan : penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Tahunan 2013, penyampaian laporan *action plan* perbaikan BMPK, penyampaian laporan tahunan penggunaan teknologi, penyampaian RBB tahun 2014-2016, dan sebagainya.
 - Surat Peringatan/Teguran Administratif dan/atau sanksi denda dari Otoritas

7.1x

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG

Jasa Keuangan atas keterlambatan penyampaian laporan perubahan daftar rincian pihak terkait.

- Masih terdapat beberapa Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) tahun 2014 atas hasil audit SKAI dan audit OJK yang belum diselesaikan.
- Masih terdapat *fraud* internal di Cabang Medan dan Cabang Serpong dimana hal ini sudah ditangani oleh Tim Penyelesaian Karyawan (TPK).

Berdasarkan analisis Kekuatan dan Kelemahan atas 11 Faktor *Self Assessment* Pelaksanaan GCG, dan memperhatikan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka penilaian Profil Risiko Bank, maka hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG PT Bank Mutiara Tbk untuk Semester II/Posisi Desember 2014 adalah **peringkat 4 (Kurang Baik)**.

**Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)**

Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*) GCG

Sehubungan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG PT Bank Mutiara Tbk untuk Tahun 2014 dalam Peringkat 4 (Kurang Baik), maka untuk tercapainya perbaikan pelaksanaan GCG Bank selanjutnya dengan peringkat GCG yang lebih baik, bersama ini kami sampaikan pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*) perbaikan GCG sebagai berikut :

Dari 11 faktor/pilar penilaian pelaksanaan GCG, maka untuk memperbaiki dari Peringkat 4 (Kurang Baik) menjadi Peringkat 3 (Baik), beberapa hal secara bertahap perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut:

No.	Permasalahan Pokok/Signifikan	Langkah Perbaikan/ Rencana Tindakan Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Kendala/Hambatan Penyelesaian (apabila ada)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Komposisi Dewan Komisaris independen yang belum memenuhi ketentuan sehingga salah satu fungsi komite dibawah komisaris juga belum memenuhi persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah jumlah Komisaris Independen • Telah disampaikan ke OJK melalui surat No. 29.21/S.Dir-CPD/Mutiara/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 • Akan dilakukan RUPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki jumlah Komisaris sesuai dengan regulasi • Q1 (Rencana RUPS dilakukan tanggal 30 Maret 2015) 	
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) saat ini <i>vacant</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah jumlah Komisaris Independen • Telah disampaikan ke OJK melalui surat No. 29.21/S.Dir-CPD/Mutiara/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 • Akan dilakukan RUPS 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki jumlah Komisaris sesuai dengan regulasi • Q1 (Rencana RUPS dilakukan tanggal 30 Maret 2015) 	
4.	Penanganan Benturan Kepentingan

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

5.	<p>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</p> <p>1. Kepatuhan terhadap pelaporan rutin dan terjadwal (Regulator & Instansi terkait)</p> <p>2. <i>Awareness</i> yang belum optimal dari pemimpin kantor dan manajer operasi (KBO) terhadap penerapan APU-PPT yang telah didukung otomasi sistem <i>Smart AML</i>.</p> <p>3. Kepatuhan terhadap ketentuan NPL dan CAR</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bank akan mengimplementasikan Compliance Report Monitoring (CRM) yang disosialisasikan dengan Memo No. 002/memo/CPD/1/2015 tanggal 6 Januari 2015. CRM ditujukan untuk meningkatkan fungsi monitoring terhadap kewajiban Bank dalam pelaporan kepada <i>External</i>. Rekapitulasi data laporan dari seluruh divisi Menginput data laporan ke PIC masing-masing divisi Go Live CRM <p>Mengusulkan ke HCMD untuk menjadi salah satu komponen penilaian KPI Cabang</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan rasio NPL dan CAR Dilakukan dengan memaksimalkan penagihan, PKPU, lelang agunan, mempailitkan debitur. Hasil yang akan dicapai sebesar Rp. 257,5 	<ul style="list-style-type: none"> Meminimalkan jumlah denda, sanksi dan teguran selama tahun 2015 dan periode-periode selanjutnya. Februari 2015 Februari 2015 Maret 2015 Juni 2015 <p><u>Cash Inflow :</u> 2015</p> <table border="0"> <tr><td>Rp. 7,3 M</td><td>Q1</td></tr> <tr><td>Rp. 37,6 M</td><td>Q2</td></tr> <tr><td>Rp. 39,6 M</td><td>Q3</td></tr> <tr><td>Rp. 172,6 M</td><td>Q4</td></tr> </table> <p><u>NPL Nett :</u></p> <table border="0"> <tr><td>4,7%</td></tr> <tr><td>4,5%</td></tr> <tr><td>4,2%</td></tr> <tr><td>4,2%</td></tr> </table> <p><u>NPL Gross</u> 8,6%</p>	Rp. 7,3 M	Q1	Rp. 37,6 M	Q2	Rp. 39,6 M	Q3	Rp. 172,6 M	Q4	4,7%	4,5%	4,2%	4,2%	
Rp. 7,3 M	Q1															
Rp. 37,6 M	Q2															
Rp. 39,6 M	Q3															
Rp. 172,6 M	Q4															
4,7%																
4,5%																
4,2%																
4,2%																

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

		<p>Miliar</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan <i>Write Off</i> minimal sebesar Rp. 200 M di Semester I th 2015 sehingga akan menurunkan NPL Gross. Akan diajukan penambahan <i>write off</i> sebesar Rp. 200 M di semester 2 (pada saat revisi RBB 2015) Untuk Rasio CAR akan dilakukan penambahan modal secara bertahap, sbb: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Maret 2015 Rp 300 M ✓ Des 2016 Rp. 300 M ✓ Des 2017 Rp. 300 M <p>Memproses kejadian <i>Fraud</i> s/d adanya keputusan sanksi dari Direksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desember 2015 <p>2015</p> <p>15,31% Q1/2015 15,14% Q2/2015 14,87% Q3/2015 15,08% Q4/2015</p> <p>Sudah diimplementasikan sejak Januari 2012</p>	
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	Telah dibentuk unit kerja <i>anti fraud department</i> pada unit kerja SKAI sesuai SK Direksi No.05.02/S.Kep-Dir-IAD/Mutiara/VI/2012 tentang SOP Strategi Anti Fraud, yang mengatur mengenai organisasi <i>Anti Fraud</i> serta Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Unit <i>Anti Fraud</i>	Meminimalisir <i>Fraud</i> menjadi <i>Zero Fraud</i>	
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	-----	-----	-----
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	-----	-----	-----

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

9.	<p>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposures</i>) Ketaatan terhadap ketentuan BMPK</p>	<p>Pemenuhan BMPK</p>	<p>1) Penanganan Pelampauan BMPK khususnya TDI a/n.PT. SPR, dan PT. DKM, akan dihapus buku. • Semester I/ 2015</p> <p>2) Untuk Penanganan Pelampauan BMPK PT. SCS akan diawasi menurunkan eksposurnya dengan menjual agunan. • Semester I/ 2016</p>	
10.	<p>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG, dan Pelaporan Internal</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>	<p>-----</p>
11.	<p>Rencana Strategis Bank Realisasi bisnis dan keuangan masih belum mencapai target RBB yang telah ditetapkan. Bilamana perlu, RBB akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis terakhir dan kemampuan Bank termasuk didalamnya kendala-kendala yang akan dihadapi Bank untuk pencapaian target.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank akan melakukan monitoring yang intensif terhadap realisasi pencapaian RBB • Bank akan melakukan monitoring yang intensif terhadap kondisi eksternal yang akan mempengaruhi kondisi Bank & segera merevisi RBB pada kesempatan pertama bila ada kendala eksternal yang mempengaruhi pencapaian RBB • Memonitor pencapaian melalui <i>review</i> pencapaian target dan rapat prognosa keuangan Bank • Melakukan Revisi RBB sesuai ketentuan 	<p>1) <i>Variance</i> terhadap target lebih baik</p> <p>2) Revisi dibawah 10%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Q4 • Q2 	

Rencana Implementasi GCG 2015

Rencana peningkatan GCG tahun 2015, adalah lebih meningkatkan pelaksanaan 5 prinsip dasar GCG yakni: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip GCG tersebut diimplementasikan dalam mendukung rencana pengembangan bisnis PT Bank Mutiara Tbk tahun 2015, yaitu "*Expand, Optimisasi, Pertumbuhan*", yang antara lain implementasi peningkatan GCG Tahun 2015 dalam mendukung :

- Pengembangan bisnis Micro SME, Trade Finance, dan Treasury
- Mengembangkan produk program Konsumer
- Optimalisasi infrastruktur
- Fokus pada pertumbuhan Micro, kecil dan menengah
- Rekrut *Sales Force*
- Pengembangan program untuk bisnis Micro SME, Commercial, Trade Finance
- Optimalisasi CASA
- Kontinjensi Liabilitas

Selain itu, peningkatan implementasi GCG tahun 2015 adalah untuk mendukung aspek kepatuhan dan prinsip kehati-hatian dalam mendukung pengembangan bisnis, namun juga perlu terus ditingkatkan untuk:

- Mewujudkan visi misi perusahaan, PT Bank Mutiara Tbk akan diarahkan menjadi salah satu 'Bank Fokus' terbaik di Indonesia yang aman, terpercaya memiliki layanan istimewa, menghasilkan produk-produk berkualitas, dengan performa terpercaya, bersih dan kuat sesuai dengan filosofi mutiara, disesuaikan dengan potensi sumberdaya yang dimiliki dan skala usahanya.
- Mendukung aspek kepatuhan dan kehati-hatian dalam mendukung berbagai strategi dan program telah disiapkan oleh manajemen dengan memfokuskan kepada pengembangan bisnis retail melalui kredit mikro, kecil dan menengah sehingga diharapkan memperoleh hasil yang tinggi (*high yield loan*) yang pada akhirnya akan meningkatkan Net Interest Margin (NIM).
- Mendukung perkuatan jaringan usaha bank dengan merencanakan pembukaan beberapa kantor cabang untuk mendukung pula percepatan perluasan *customer base* dana pihak ketiga, sehingga penguasaan dana pihak ketiga akan lebih merata, tidak berkonsentrasi pada deposan besar tertentu saja. Implementasi penerapan *good corporate governance* Tahun 2015 juga memperhatikan efektifitas terkait ekspansi belanja modal dalam pengembangan sistem teknologi guna menunjang bisnis.
- Terus mengupayakan perbaikan ratio-ratio keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain ratio-ratio: CAR, BMPK, PDN, NPL, GWM, LDR termasuk pembentukan dan perhitungan CKPN dan PPA sesuai ketentuan.
- Melakukan upaya dalam meminimalisir tindakan *fraud*, pelanggaran (denda, sanksi, teguran) akibat keterlambatan pelaporan melalui upaya peningkatan *Compliance Report Monitoring* (CRM), serta
- Upaya-upaya peningkatan implementasi GCG Tahun 2015 lainnya dalam mendukung perbaikan kinerja PT Bank Mutiara Tbk, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

Demikianlah Revisi Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2014 ini kami sampaikan, atas perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 04 Agustus 2015
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

Hormat kami,



Ahmad Fajar
Direktur Utama



Sigid Moerkardjono
Wakil Komisaris Utama
Independen

Revision

**Report on the Implementation of
Good Corporate Governance (GCG)
2014**

This report is compiled based on Bank Indonesia Regulation Number: 8/4/2006 dated 30 January 2006 concerning implementation of Good Corporate Government "For commercial banks", and the regulation of Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 on 05 October 2006 on "Bank Indonesia Regulation Number 8/14/PBI/2006 dated January 30, 2006", as well as Bank Indonesia circular letter No. 15/15 DPNP dated 29 April 2013 subject "implementation of Good Corporate Government For public Bank"

Contents

CHAPTER I INTRODUCTION	1
CHAPTER II General Meeting of Shareholders (RUPS/GMS), Implementation of Commissioners and Directors Duties.....	12
CHAPTER III COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF COMMITTEES' TASK PT BANK MUTIARA, TBK	44
CHAPTER IV The application of the function of Internal Audit, compliance and Audit external call.....	72
CHAPTER V IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS.....	93
CHAPTER VI PROVIDING FUNDS, BANK STRATEGIC PLAN, TRANSPARENCY AND OTHER ASPECTS OF DISCLOSURE.....	105
CHAPTER VII FUNDING FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES	127
Self Assessment on Implementation of GCG Bank	130
Report on the Implementation of Action Plan GCG	137
GCG 2015 Impelemtation Plan	140

CHAPTER I
INTRODUCTION
Commitment of PT Bank Mutiara Tbk

In the implementation of Good Corporate Governance, there are two things that need to be attentive, that is ethics and regulation. Encouragement of ethics (ethical driven) dating from the consciousness of individuals businessmen to run business practices that give priority to the survival of the company, the interests of stakeholders and avoid ways to creates a momentary advantage. On the other hand, the impetus from regulations (regulatory driven) "require" companies to comply against the legislation in force. PT Bank Mutiara, Tbk has a commitment to continue the implementation and perfecting GCG that prioritizes the moral and ethical principles and practices of healthy banking business in accordance with the provisions in force.

Implementation of GCG principles necessary to encourage the creation of business banking practices. Therefore the implementation of GCG principles need to be supported by three interrelated pillars, they are: the State and its apparatus as a regulator, the corporate world as market participants and the public as users of the service and the business world. The application of the regulation as well as the basic principles of Good Corporate Governance in the banking industry is the main requirement in order to protect the interests of all parties (stakeholders) and also we are always paying attention to the interests and protection of all parties, as well as free from conflict of interest. Ethics and behavior are essential in building a corporate culture, which is set out in the PT Bank Mutiara, Tbk Corporate Ethics book which applies to all employees and management

Implementation of PT Bank Mutiara, Tbk GCG refers to the standard banking industry in General, with various conditions and based on laws and regulations include the Bank Indonesia Regulation number 8/4/2006 dated January 30th2006 concerning implementation of Good Corporate Government "For commercial banks", and the regulation of Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dated October 05th2006 on "Bank Indonesia Regulation Number amendments 8/14/PBI/2006 dated January 30th, 2006" , as well as Bank Indonesia circular letter No. 15/15 DPNP dated April 29th2013 subject "implementation of Good Corporate Government For commercial banks", the financial services Authority Regulatory/Supervisory capital market and financial institution (Bapepam and LK) of delivery annual report of the Issuer or Public Company, the legislation of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning limited liability companies, as well as provisions The ASEAN Corporate Governance is Scorecard standard Corporate Governance practices on an ASEAN countries , as well as the best practices.

Implementation of PT Bank Mutiara, Tbk GCG based on the principles of GCG are very important to be done in an effort to boost public confidence, improve performance, and maximize the value added to the shareholder (maximizing shareholder value) and guarantee the realization of a healthy banking system in General. It aims to maintain the continuity of the Bank's business is highly dependent on the trust of the community that should be reflected in the performance and management of the professional Bank and the ability of the Bank to manage risk, as well as transparency in the community.

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

PT Bank Mutiara, Tbk at the end of this year have already passed on the final stages of handling over from the old owners, namely Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) into a new investor ownership. Several stages of the transition from LPS to new investors has been undertaken such as due diligence and the last was the election winner. The extraordinary general meeting of shareholders by LPS in the framework of the transition of ownership has also been conducted namely on November 20, 2014 with new owner J Trust which had been designated as the winner of the LPS.

J Trust is a financial company from Japan which has officially graduated in past stages of the process of fit and proper. As new investors, J Trust has been fully committed to develop PT Bank Mutiara, Tbk to be more advanced in the days to come as exemplified by extraordinary general meeting on December 30, 2014 with an agenda of new capital deposits amounting to Rp. 300 billion and appointing of new managing position to strengthen future business growth. For a while the vision and mission remain well-run fixed forwarded and ongoing strategic and fundamental step as the company. PT Bank Mutiara, Tbk has continued to sharpening its vision and mission as follows:

Vision & Mission

Bank already established their vision and mission, which currently has been socialized and implemented thoroughly through the activities of operational and corporate culture.

Vision

“BE THE BEST FOCUS BANK CHOOSSED BY COMMUNITY”

With a focus core business bank are : Small and Medium Enterprises, Consumer and Micro, and also Treasury and International Banking.

PT Bank Mutiara Tbk will always tried to become financial bank service providers qualified and professional, which built services to customer through proximity good relations in business partners.

MISSION

“Give the best by prioritizing service, comfort, and satisfaction customers to optimal results”

Related with the mission of PT Bank Mutiara Tbk gives the best with our priorities are service, comfort, and customer satisfy optimally, and also will be bank focus and lead with core value **“SPIRIT”** as the embodiment of S = Service Excellence, P = Professionalism, I = Integrity, R = Relationship, I = Innovative, and T = Trust, which is the description as follows:

Service Excellence

Caring
Speed
Appearance
Sympathetic
sincerity

Professionalism

Circumspection
Discipline
Competent
Dedication
Persistent

Integrity

Responsible
Ethics
Free from conflict
Interest
Moral courage
Interdependence

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

<u>Relationship</u>	<u>Innovative</u>	<u>Trust</u>
Cooperation	Creative	Honest
Communicative	Renewal	Commitment
Trust	Idea	Reliable
Familiarity	Imaginatively	Righteous
Appreciation	Risk mitigatic	Mutual respect

The descriptions of Corporate Value “**SPiRiT**” containing noble values, that is a commitment to “do changing to become better”, where vision, mission, and corporate value must entrenched and pervasive within each individual employee of PT Bank Mutiara Tbk for applied in carry out the duties and responsibilities. As illustration picture as follows:

The principles of GCG

The application of GCG at PT Bank Mutiara Tbk includes the implementation of five principle of fundamental GCG that known as “**TARiF**” is: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.

The Principles of GCG				
Transparency	Accountability	Responsibility	Independency	Fairness
Openness in the fringe material and relevant information as well as openness in carrying out the process of retrieval.	Clarity of function and implementation of the bank's organs so that liability implementation running effectively.	The suitability of the management of the bank with the applicable legislation and the principles of managing a healthy bank.	The management of the Bank in a professional manner with no influence/pressure from any party.	Justice and equality in fulfilling the stakeholder's rights arising under the Treaty and the regulations that apply

As an intermediation institution, PT Bank Mutiara Tbk should ensure that all levels of the bank in every business aspect have done the basic principles of GCG that needed to achieve sustainability with prioritize shareholders, customers as well as other stakeholders. The more detailed information regarding the principles of GCG, can be delivered as follows :

1. Transparency

Has an element of disclosure and to provide information on time, adequate, clear, accurately, and comparable and also easily accessed by shareholders and stakeholders. Internally, Bank is also committed to apply transparency of information to employees. The implementation of transparency is needed so that bank can running a business objectively, professional, and cover the interests of consumers.

2. Accountability

Has an element of clarity of function in the organization and how to accountable. To ensure accountability, so that function, task, and authority of the various function on the organization and accountable, has been set up clearly in accordance with the function of each work guidelines systems, so the performance of all parts of the organizations can be transparent and measurable. Therefore, bank must manage in healthy, measurable, and professional with considered the interests of shareholders, customers, and stakeholders. Accountability is a prerequisite needed to achieve a sustainable performance.

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

3. Responsibility

Has an element of compliance with laws and internal regulations of the bank and responsible. As a form of responsibility, Bank is committed to always comply with the laws and internal policies has set the bank is responsible to society and environment.

4. Independency

Has an element of independence from the other domination and objectivity in carrying out its duties and obligations, or it can be interpreted that the organs of banks carrying out their activities independently and objectively, and also to avoid the influence from any domination party. Bank committed to conducting its business independently so that the organs of banks and all the ranks below not dominate and intervention by any party that may affect the objectivity and professionalism in carrying out their duties and responsibilities.

5. Fairness

Has an element of fair and equal opportunity treatment in accordance with the proportions. Bank continues to ensure that rights and interests of shareholders can be fulfilled as we provide fair and equal treatment to all stakeholders.

Five fundamental principles GCG will support the implementation of the 4(four) major cause on The Risk Based Bank Rating, which sustainably focus on fixes and improvement, i.e.: Capital & Earning, Fixed Risk Profile and improvement on the implementation of GCG by increase five fundamental principle GCG in supporting infrastructure development on core business, and strengthening Corporate image.

11 (eleven) main factors in implemented GCG

According the provisions of Bank Indonesia that the implementation of principles of GCG (TARIF) at least should be applied to the eleven main factors in implementation GCG PT Bank Mutiara Tbk as illustrated by the image below. The eleventh factors can be submitted as follows:

1. Implementation of duties and responsibilities board of commissioners
2. Implementation of duties and responsibilities of director
3. The implementation of the tasks committee
4. Handling conflicts of interest
5. Implementation of the compliance function
6. Implementation of internal audit function
7. Implementation of the external audit function
8. Implementation of risk management including the internal control system
9. Provision of funds to related parties and large exposures
10. Transparency of financial and non-financial, GCG implementation report and internal reporting
11. Bank strategy plan

Below is an illustration of the 11 (eleven) factors GCG assessment that covering 3 aspect of governance system that must be done in a comprehensive, structured, and based on five fundamental principles of GCG, as follows:

11 (eleven) GCG
assessment Factors
in accordance of
Bank Indonesia

3 Aspects of Governance System

- The assessments of the governance structure aims to assess the adequacy of the governance structure and the infrastructure bank to allow the implementation of GCG produce outcome that match to the expectation on stakeholders PT Bank Mutiara Tbk.
- The assessment of Governance process aims to assess the effectiveness of the implementation of GCG Principles are supported by adequate infrastructure governance structure of PT Bank Mutiara Tbk, so as to produce outcomes that correspond to the expectations of stakeholders.
- The assessment of governance outcome aims to assess the quality of outcomes that met the expectation of stakeholders PT Bank Mutiara Tbk, which is the result of the implementation of GCG principles supported by the structure and infrastructure good governance.

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Furthermore, the implementation of the GCG principles into 11 main factors can be done through the self-assessment. The implementation of self-assessment should be conducted in a comprehensive, structured, and based on five basic principles of GCG (TARIF), as well as being classified into a governance system that includes three aspects of the governance system, is : Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome, as explained above.

Governance Systems

To realize the principles of “TARIF”, then governance systems was built which includes three pillars, as illustration below here :



As a brief explanation related to the three pillar of governance system that can be delivered as follows :

Governance Structure

Governance Structure is a system that regulates how PT Bank Mutiara Tbk directed and controlled to improve their business performance thoroughly accountable and manifesting shareholder value in the long term (sustainable), without ignoring the interests of other stakeholders. As a system, The logical consequence is GCG need a device advocates more commonly known as Governance Structure which formed in order to assess sufficiency structure and infrastructure governance of PT Bank Mutiara Tbk for diplomatic of GCG procedure outcome in accordance with the stakeholders expectation. We can said that the components included in the governance structure of PT Bank Mutiara TBK are RUPS, Board of commissioners, Director, committees, and work unit of bank. As for that including infrastructure governance PT Bank Mutiara Tbk, among others , are the policies and procedures of PT Bank Mutiara Tbk, which always refers and adapted to the legislation which applied, management information system as well as the duties and function (tupoksi) on each organizational structure.

Governance Process

In addition to requiring line governance structure, implementation of GCG PT Bank Mutiara, Tbk also need implementation with clear rules of the game in a form commonly known as governance mechanism or process which can be accounted for and at the same time necessary with the purpose to assess the effectiveness of the process of the implementation of GCG principles supported by adequacy of infrastructure and governance structure of PT Bank Mutiara, Tbk resulting outcomes that correspond to the expectations of stakeholders. It can be said, the governance process is the activities undertaken to implement the rules of the game clear procedures and relationships between the parties who take decisions with the parties that do control (supervision) against the decision. This is for the sake of guarantee and/or overseeing the operation of a governance system in PT Bank Mutiara, Tbk. As such, it is hoped, these activities can be

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

run in a healthy and effective in accordance with the directions that have been set and/or be able to minimize the occurrence of conflict of interest, as well as to minimize the incidence of risk that has a policy that was decided.

Governance outcomes

There are two outcomes that are expected from the implementation of GCG, i.e.: improved performance and reduced conflict of interest. In addition, refer to the provisions of Bank Indonesia, also delivered essential that the 3rd pillar, i.e.: governance outcomes, aims to assess the quality of the learning outcomes in the stakeholder expectations have PT Bank Mutiara, Tbk is the result of the process of the implementation of GCG principles and supported by quantity and the quality of the structure and adequacy of infrastructure, so that the creation of good corporate governance.

The increase in the value of the company and capital

- In doing the whole of the Corporation's policies and strategies, the bank enhancement-oriented company's value to shareholders, through financial or non-financial performance. For instance, on the side of the non-financial, the Bank seeks to strengthen its office network with the relocation or increase new office network, as well as the development of micro-financing, strengthen corporate culture to fit with the vision-mission, continuing and completing the implementation of GCG and capital expenditures in the system technology to support business.
- J Trust as the new shareholder has committed to fully develop PT Bank Mutiara, Tbk's future mainly to retail market, one of them is capital plan began at the end of 2014 and gradually to support business expansion, the next few years according to support business expansion needs. The remittance of capital by J. Trust aims to keep the ratio of the capital of CAR to keep it compete in the banking market particularly in accordance with the peer group in Indonesia.

Increasing The Value of Companies and Capital

- In implementing all policies and strategy of the company, bank oriented in increasing the company's value for shareholders through financial and non-financial performance. As an illustration, in the non-financial side, Bank seeks to strengthen the office networks and with relocation or expand, as well as the development of microfinance, strengthening vision and mission of the company, continue and enhance the implementation of GCG and capital expenditures in technology system to support the business.
- J Trust as a new shareholders have committed to develop PT Bank Mutiara Tbk , especially for the retail market, with being a capital increase started at the end of 2014 and gradually for the next few years as needed to support business expansion. Capital injection by J Trust aims to maintain the CAR capital ratio, so it remains competitive in the banking market, especially accordance with the peer group in Indonesia.
- With the capital injection substantiating the bank's capital as a based besides to credit growth in the future, it will certainly bring to the completion of the legal lending limit. Besides that, it also to make maximum efforts to improve Net Non-Performing Loan (NPL), and increase efforts to monitor the strict order of the collectability of credit quality is maintained and smoothly.

The implementation of GCG and Bank Soundness

The implementation of GCG for PT Bank Mutiara Tbk always undertaken in consequent and sustainable, supported by a strong commitment from the company's organs and ranks below. The basic principle in realization of commitments for are:

1. Having a clear and reality of vision and mission statement, with a mission : "Give the best by prioritizing service, comfort, and satisfaction customers to optimal results" and vision: "Be The Best Bank Focus Community Choices."
2. Having a company's value that provides a good moral attitude of bank in implementing business.
3. Having guidelines methodology of the board of commissioners and management of working in running the role of directors and duty.
4. Having a business ethics and guidelines company behavior that the procedures done by involving the company's organs and ranks below. Business Ethics and guidelines behavior conducted continuously and consistently so that created company culture that is a manifestation of the company's values.
5. In their function as intermediating institution and part of world business care and actively preserve the natural resources and the environment.
6. Having a regulations company and cooperative agreement that could support an atmosphere conducive work.
7. Having a whistle-blowing system to allow obtaining reports and complaints as well as suggestions and criticism from employees and other stakeholders.
8. Having a policies and procedures as reference in running the business, and also evaluated according to the needs and development of applicable regulations.

The implementation of GCG principles among them by submitting reports on the implementation of GCG PT Bank Mutiara Tbk every year to the parties stakeholders based on regulations. As an effort improve and increase the quality of GCG implementation, PT Bank Mutiara Tbk regularly increase the quality of GCG implementation, PT Bank Mutiara Tbk regularly conducts self-assessment that comprehensive with the implementation of GCG to monitor and evaluate the implementation and did not not plan further studies, including corrective action if it necessary in order to obtain better results.

Formally, the implementation of GCG is one of the factors the assessment of the health level beside risk profile, earning, and capital either for individual or consolidated bank as stated in the Bank Indonesia regulation number 13/1/PBI/2011 January 5,2011, and Bank Indonesia Circular Number 13/24/DPNP October 25,2011 about public bank rating, The assessment of health of banks based on Risk Based Bank Rating (RBBR). According to theregulations, it is conducted an assessment of four factors that includes:

➤ **Risk Profile**

Self-assessment against the risk profile assessment process is the overall process of risk identification, risk analysis and evaluation of the risks faced by banks, which are illustrated as follows:

- **Inherent Risk** – Inherent risk is the risk that is inherent in the bank's business activity, whether or not quantifiedcan be quantified that could potentially affect the financial position of the bank. Inherent risk can be any parameter that is ex-post as well as parameters that are ex-ante.
- **Risk Control System** – Application of quality risk management is the elaboration of the implementation of Basel II Pillar 2 Supervisory review that has been spelled out in Indonesia through the Banking

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Regulations of Bank Indonesia Concerning the application of the Management risks. The assessment of Inherent risk and risk and RCS next generate net risk per type of risk and the conclusion of the bank's overall composite risk.

➤ **Good Corporate Governance (GCG)**

Implementation of GCG include implementation of 5 (five) principle/asa GCG that is among other things:

Transparency, accountability, responsibility, independency, fairness. The five basic principles/GCG manifested in:

- implementation of the duties and responsibilities of Board of Commissioners
- implementation of the duties and responsibilities of Directors ' answers
- completeness and implementation Committee
- handling conflicts of interest
- the implementation of compliance functions bank
- Application of internal audit function
- the application of external audit function
- Application of risk management including the internal control system
- the provision of funds to related parties (Related Party) and the provision of Funds (Large Exposure)
- Transparency of financial and Non-financial conditions of the bank report, the implementation of GCG and internal reporting
- conveniently located bank Plan

➤ **Capital/Capital**

The bank's capital should be able to absorb all of the risk that is in the bank. This capital assessment include:

• Capital Adequacy:

- capital adequacy that can absorb the risk
- the adequacy of capital to support business plans and
- the quality of capital (tier 1 composition)

• Capital Management:

- the effectiveness of planning and the use of capital to generate income
- capital organic Fertilization
- the ability of the bank to access a source of capital

Earnings

Factor income is assessed based on the Performance aspects of bank Earnings, sources of earning income, diversification, sustainability and earning.

Other strategies in order to improve the performance of the bank's achievements that support the results of the assessment of the level of Health is strengthening the Bank Let along with improvements to the composition, consumer credit, business development small and micro business, strengthen the Office network with the add new offices and relocation strengthening of corporate image and brand awareness as well as the development of investor relation functions to support the implementation of the management plan of the divestment, ikuiditas effective and efficient for a sustainable operating profit improvement the company's capabilities, improving by doing a restructuring of the Organization as needed, which of course

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

implementation of all supported the principle of prudence and the application of Corporation governance is good.

In addition, in line with the application of the principle of prudential banking, packed the achievement ratio-financial ratio of the slashes sub-genre were to the attention of and maintained to satisfy the provisions of the regulation between fulfillment ratio-financial ratio associated with PPA/CKPN, CAR, NPL, PDN, BMPK, Loss/profit.

The strategic measures that will be taken

PT Bank Mutiara Tbk will be one of the "Bank's focus" Indonesia best adapted to the potential of resources owned and the scale of its business. Various strategies and programmes have been prepared by management to be able to make the PT Bank Mutiara, Tbk as the "Bank's focus best choice society and became one of the leading banks in Indonesia which have safe, reliable service exceptional, producing quality products, with reliable performance, clean and strong compliance with the philosophy of pearls.

For the next three years this American PT Bank Mutiara, Tbk will focus to the development of retail business through microcredit, small and medium enterprises so that the expected results will ultimately high increasing Net Interest Margin (NIM). Retaining business bank network with the opening of a planned twenty-two Office, each Office annually in 2016 and 2017 will support also the acceleration of the expansion of the customer base and the third party funds mastery will be more evenly, do not concentrate on only certain large depositors.

J Trust as new shareholders has been fully committed to develop PT Bank Mutiara, Tbk mainly to retail, with only plans capital increase at the end of the year 2014 according to needs by 2017 to the ratio of capitalizationCAR to be competitive on the market banking especially in accordance with the peer group in Indonesia.

With remittance this capital has strengthened the bank's capital as a basis for other than loan growth in the future also be used improve Net Non-Performing Loan and will certainly speed up the completion of the maximum limit of granting of credit (LEGAL LENDING LIMIT).

As for the whole in carrying out policies and strategic companies, bank oriented on increasing the company's value for shareholders through performance.

Financial and non-financial. For example, on the side of the non-financial Bank is attempting to strengthen its office network with the relocation or addition of office network, as well as micro development, strengthen company culture appropriate vision, mission, continuing and completing the implementation of good corporate governance and capital expenditures in the system technology to support business.

Business Development Strategy

There was a new policy where currently the bank is making efforts to strengthen capital in accordance with the Bank Indonesia regulations number 14/26/PBI/2012 about the business activities and office networks based on core capital bank. The next phase of the bank seeks to strengthen the implementation dual control and improve back the quality of business in the next years, through :

1. Strengthening implementation of dual control and quality improvement through :
 - Implementation of RCSA (Risk Control Self-Assessment)

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- Implementation of COSO based on component:
 - a. The implementation of Risk Based Audit (pilot project)
 - b. Composing audit rating system
- 2. Development and improvement of 8 kinds of risk profiles with business management
- 3. Improving the quality of credit an implementation committee (NAK aided by consultants, training & credit, and LK by exertion internal bank
- 4. Quality improvement from the implementation of ALCO to get the determination of interest rate products competitive bank.
- 5. The quality of an increase in advis / recommendations management related risk management , general policy risk management

Strengthening the quality of compliance GCG and company culture :

- 1. Strengthening quality management policies and decisions about product, service, and services, as well as the company management declared in decision letter, circular letter , and SOP for internal and external bank with give any input to the division, socialize, conduct assessment, etc.
- 2. Implementation of the principle about customer, related with Anti-money laundering and combating the financing of terrorism program, with socialization and update data.
- 3. Strengthening implementation program of company culture according to standard set.

GCG Implementation Phase

In preparing for the transition to new ownership, Bank already set up several short and medium terms that can be presented as follows:

On 2014

Consolidation, Transformation, Re-organization, Positioning

- 1. Business Evaluation and infrastructure
- 2. Completion of NPL (re-structure, Collection & WO), Special Mention Collection
- 3. Improving financial performance
- 4. Business Consolidation (Organization, NPL, Business) and Preparation of business expansion (Micro SME and Retail Business)
- 5. Set up a business strategy focused
- 6. Recruit Sales Force
- 7. Training focused on Micro SME and Consumer
- 8. Improve and optimize branch offices and distribution network
- 9. Contingent liabilities

On 2015

Expand, Optimization, Growth

- 1. Develop Micro SME, Trade Finance, and Treasury business
- 2. Develop consumer product program
- 3. Optimize infrastructure
- 4. Focused on the growth of Micro, small, and Medium

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

5. Recruit Sales Force
6. Develop program for Micro SME, Commercial, Trade Finance Business
7. Optimize CASA
8. Contingent liabilities

On 2016

Increasing (Infrastructure, Capacity, Capability) and Growth

1. Prepare Infrastructure Implant and Banking Agency
2. Additional office network
3. Build up integrated of Core Bank system
4. Restructure Remuneration system
5. Focused on the growth of Micro, small, and medium
6. Prepare Commercial Banking Business
7. Develop CASA for Micro, small, and medium credit, Commercial, Trade Financial & Consumer
8. The Growth of CASA
9. Develop Internet and Mobile Banking
10. Contingent liabilities

On 2017

Market Share

1. Enlarging Market Share
2. Focus on the growth of Micro, small, and medium
3. The growth of Retail Banking
4. The growth of CASA
5. Contingent liabilities

CHAPTER II

General Meeting of Shareholders (RUPS/GMS), Implementation of Commissioners and Directors Duties

General Meeting of Shareholders (RUPS/GMS)

General Meeting of Shareholders (RUPS) is the highest order in company's organization that has the authority not granted to directors and boards of commissioners within the limits specified in Republic Indonesia's Constitution No. 40 on 2007 about limited liability companies, and/or articles of association of the company article 18. RUPS authorized to :

- Evaluating the performance of the boards of commissioners and directors related with the company's annual report the company or approve yearly report included financial and supervisory duty of board of commissioners reports and provide release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to director's members and boards of commissioners based the actions of management and supervision has done each.
- Taking a decision which is concerning with organization structure, for example changes in the constitution, combination, consolidation, taking, separation, dissolution, and liquidate the company.
- Lifting and dismiss members of commissioner and director's company.
- Determine the salary or honorarium and other benefit as well as Director's tantiem and board of commissioners
- Giving a power and authority to the boards of Commissioners to appoint Public Accountant (KAP) Registered (Included registered public accountant) in Indonesia that is affiliated with one of The International Public Accountant and recorded in the financial services authority capital market to audit the company's financial report and set up an amount of honorarium.

RUPS consists of annual and extraordinary RUPS that shall be held as the company's statutes and applicable regulations.

In the forum of RUPS, Shareholders has a right to receive an information relate with the company's board of Directors and/or Board of Commissioners, as long as the agenda item.

During 2014, PT Bank Mutiara Tbk had organized five times of RUPS, thatwas:

- a. One times annual meeting on June 4, 2014
- b. Four times extraordinary meeting, that was on 26 February 2014, 20 October 2014, 20 November 2014, and 30 December 2014.

(1) Annual Meeting

On June 4, 2014 has been held annual meeting, which had produced some importance decisions, among others are:

First Agenda

1. Approve the annual report for the financial book ended on December 31,2013 that was contained in the book of annual report 2013, included Supervisory board of commissioners reports in highlights summary which was presented at this meeting.

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

2. Authorize the company's financial report that consisting of Financial position report and the company's profit/loss also the document, for the book year ending on December 31, 2013 which had been checked/audited by Public Accountant office Tjahjadi & Tamarawith their opinions "Normal without exception" as expressed in their report number: 0210/T&T-GA/R-1/2014, on April 8, 2014 is contained in annual book report 2013.
3. Give the disclaimer (Volledig acquit et decharge) to the members of board of commissioners and company's director based on the actions of management and supervision carried out respectively during the financial year ended December 31, 2013 and applicable legislation.

Second Agenda

To approve all profit/loss on year book 2013 accumulated with balanced profit/loss and without dividend payment.

Third Agenda

Give an authority to boards of commissioners to :

1. Appoint Public Accountant office to audit the company's financial report on 2014 with requirement has a good reputation also registered on financial services authority.
2. Determine the amount of honorarium to Public Account office appointed with due regard to effectiveness and efficiency as well as the financial capacity of the company.

Forth Agenda

1. Dismiss with respectfully commissioners and member of the company's directors since closed meeting accompanied gratitude to their services during serving, it is for :

Mr. Pontas R. Siahaan as President of Commissioner

Mr. Sigid Moekardjono as Vice President of Commissioner/ Independent Commissioner

Mr. Eko Budi Supriyanto as Independent Commissioner

Mr. Sukoriyanto Saputro as President director

Mr. Ahmad Fajar as Director

Mr. Erwin Prasetio as Director

2. Lifted up the members of boards of commissioners and company's director, as follows:

Boards of Commissioners

- President commissioner /Independent Commissioner : **Mr. Sigid Moekardjono**
- Commissioner : **Mr. Didik Madiyono**
- Independent Commissioner : **Mr. Eko Budi Supriyanto**
- Commissioner : **Mr. Sukpriyanto Saputro**

The Company's Director

- President director : **Mr. Gandhi Ganda Putra Ismail**
- Director : **Mr. Ahmad Fajar**
- Director : **Mrs. Laksmu Mustikaningrat**

This appointment is effective since passed due diligence and compliance by the financial services authority and fulfill the applicable legislation, with requirement if the requirements established by the financial services authority with respect to the appointment was not fill or it does not give an approval, then the appointment was canceled without requiring the approval of RUPS. The appointment applies for a terms until the 3rd close of annual meeting, it counted since, removal of concerned with shall not reduce the right

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

RUPS to dismiss the board member of the company's commissioners and director if at any time before his term ends.

3. Therefore, the latest board members to the company's commissioners and directors are, as follows:

The board company's commissioners:

- President Director/Independent Commissioner : **Mr. Sigid Moekardjono**
- Commissioner : **Mr. Didik Madiyono**
- Independent Commission : **Mr. Eko Budi Supriyanto**
- Commissioner : **Mr. Sukoriyanto Saputro**

The company's Director

- President director : **Mr. Gandhi Ganda Putra Ismail**
- Director : **Mr. Ahmad Fajar**
- Director : **Mr. Felix Istyono Hartadi Tiono**
- Director : **Mrs. Laksmi Mustikaningrat**

Notes : *)Effectively upon the results of the fit and proper test by the service financial authority and completed the legislation in force. The Functional Task of chief executive directors, Mr. Ahmad Fajar as Director, in effect since June 4,2014 and will end after the chief executive director definitive approval or pass the fit and proper test results from Financial Service Authority.

***) Became effective on September 29,2014 after receiving approval from Financial Services Authority because pass the Fit and Proper Test result as Director of PT Bank Mutiara Tbk.

Fifth Agenda

1. Delegated the authority to the board of commissioners to determine the amount of salary and benefits to company directors appointed by the meeting and to adjust the amount of salary and allowance for Mr. Felix Istyono Hartadi Tiono with the amount of salary and director allowance that appointed by the meeting.
2. Determine the amount of honorarium and allowance for the company's board of director accordance meeting based on the decision of the board of commissioners meeting LPS Number 052/RDK-LPS/2014 June 4,2014

(2) **Extraordinary Meeting**

A. On February 26,2014 has been held extraordinary meeting, that has resulted in several importance decisions, as follows:

First Agenda

1. The acceptance of resign:
 - a. Mr. Benny Purnomo as Director; and
 - b. Mr. Budhiyono Budoyo as Director

That became effective on February 26, 2014 over gratitude of their services which has been awarded during his tenure with the provision of release and discharge full responsibility (acquit et de charge) based on the actions by the management during books on 2013 and 2014 will be decided in Annual Meeting book on 2013 and 2014.

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

2. The approval of boards of commissioner to lift the Executive Vice President on same levels that responsible to president director, in order to execute the function during this be implemented by a member of the boards of director who resigned and other function (asset recovery and handling of non-performing loans) that the company needed, where the mechanism and appointment process commended to the Director and boards of commissioner.

Second Agenda

1. Approval to appoint Mr. Felix Hartadi Tiono as The company's director who execute the compliance function which becomes effective since declare passed the test of eligibility and compliance by Financial Services Authority and fulfill the appliance legislation, For a term until the third annual meeting closed after the appointment, with provision if the requirement that established by Financial Service Authority related with the appointment of Mr. Felix Istyono Hartadi Tiono doesn't fulfill and The Financial Services Authority doesn't give the approval, so the appointment be canceled without the required approval of the General Meeting of Shareholders. During the appointment of Mr. Felix Istyono Hartadi Tiono not efective yet, Mr. Erwin Prasetyo remained as The company's Director still in charge with the compliance function. After the appointment of Mr. Felix Istyono Hartadi Tiono is effective, then Mr. Erwin Prasetyo still remained as The company's Director until the closing of annual meeting on 2013.
2. Approved the remuneration and facilities to the new board members with the director is in charge with the compliance function based on latest annual meeting's decisions (valid after passed the test of feasibility and compliance from the financial services authority) and before it's effective, the new members of direction will receive a remuneration amounting 80% of the amount received after his appointment became effective.

Therefore the structure of company's director members, as follows:

- President director : Mr. Sukoriyanto Saputro
- Director : Mr. Ahmad Fajar
- Director : Mr. Erwin Prasetyo
- Director who in charge with Compliance Function : Mr. Felix Istyono Hartadi Tiono

Notes : *) It's effective on April 22,2014 after get the approval from The Financial Services Authority based on passed Fit and Proper test as Director who in charge with Compliance Function.

Then, along with J Trust Co., Ltd (Investment institutions headquartered in Tokyo, Japan) has been establishment as new owner of PT Bank Mutiara Tbk, that qualified divest shares or strategic sale of PT Bank Mutiara Tbk after earlier J Trust Co., Ltd joined Fit and Proper Test by The Financial Services Authority, so PT Bank Mutiara Tbk has been enter a new change of ownership phase and the committee's structure that reflected on the decision made by extraordinary meeting of PT Bank Mutiara Tbk this next.

- B. On October 20, 2014 has been held extraordinary meeting, that has resulted in several importance decisions, as follows:

Based on the opinions of the boards of commissioners, chairman, said the meeting decided :

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- a. Approved a draft takeover of the company as the money proposed by company directors and approval of the board of commissioners.
 - b. Approved the concept of the Deed of take-over of the Company as attached to the Company Takeover Plan
- C. On November 20, 2014 has been held extraordinary meeting, that has resulted in several importance decisions, as follows:

First Agenda

1. Approved the conversion stock of Series A and Convertible Preferred Stock become common stock of series A with conversion ratio one to one.
2. Give the approval of returned back PT Bank Mutiara, Tbk's stock by J Trust Co. Ltd. From Deposit Insurance Agency, as follows :
 - a. Diversion of company's stock 99.996% (ninety nine point nine hundred ninety six percent) or as much as 801.184.100.000.000 (eighty hundred one trillion one hundred and eighty-four billion one hundred) from Stocks A series belonged to Deposit Insurance Agency to J Trust Co. Ltd that performed by stage :
 - i. The company's stock amount 99.00% (ninety nine percent) or as much as 793.200.325.675.265 (seventy hundred ninety three trillion two hundred billion three hundred twenty five million six hundred seventy five thousand two hundred sixty five) sheets of A series' stock will be transferred to J Trust soon after RUPS closed.
 - ii. The company's stock amount 0,996% (zero point nine hundred nity six percent) or as much as 7.983.774.324.735 (seven trillion nine hundred eighty three billion seven hundred seventy four million three hundred and twenty four thousand seven hundred thirty five) sheets of A series' stock will be transferred by Deposit Insurance Agency soon after fulfillment of certain conditions in accordance with the CSPA's amendments, so after the transferred of J-Trust's shares ownership, in accordance with The Financial Services Authority's letter number SR-187/D.03/2014 on November 10(ten),2014 (twenty and forth-teen) about the result of Fit and Prosper test on PT Bank Mutiara Tbk's candidate controlling shareholders and the latest controlling shareholders.
 - b. Diversion of Company's stock 0.004% (zero point zero zero four percent) or as much as 28.350.177.035 (twenty-eight billion three hundred and fifty million one hundred and seventy seven thousand and thirty-five) B series belonged to old shareholders (society) to J Trust which will done after the fulfillment of certain conditions.
3. As consequences of grain (a). above, refers to UU PT, Deposit Insurance Agency become minority shareholders with ownership's amount 7.983.774.324.735 (seven trillion nine hundred eighty three billion seven hundred seventy four million three hundred and twenty four thousand seven hundred thirty five) stock sheets same as 0,996% (zero point nine hundred ninety six percent) so The Deposit Insurance Agency become common shareholder has not preference as the rights attached to the preference shares.

Second Agenda

1. Approve the changes to the entire budget of the company include changing the article about changes to stock series A preferred stock that can be converted in (Convertible Preferred Stock) into shares of series A common stock as listed in article 5 paragraph 1 and article 7

paragraph 28, as well as deleting the article – article containing provisions on general meeting of shareholders through the Board meeting where the GOVERNMENT Commissioner as listed in Chapter 12 verse 7 Article 18, paragraph 3, article 21 paragraph 7, section 22 paragraph 5, article 23 paragraph 17, article 23rd paragraph 13, article 24 ayat7, article 26 paragraph 6, article 27 verse 7 and article 28 paragraph 11.

2. Give authority to the Board of Directors of the company to declare a change of statutes in the notary deed.

Third Agenda

1. Accepted the resign letter from Mr. EKO BUDI SUPRIYANTO as Commissioner, Mr. DIDIK MADIYONO as Commissioner and Mr. GANDHI GANDA PUTRA ISMAIL as President director counted since the closing of the meeting accompanied by gratitude for services rendered during their tenure. With notes of disclaimer responsibility (acquiet et de charge) will give on next annual meeting to:
 - i. Mr. EKO BUDI SUPRIYANTO as Commissioner, for period 1 January- 20 November 2014.
 - ii. Mr. DIDIK MADIYONO as Commissioner and Mr. GANDHI GANDA PUTRA ISMAIL as President director, for period 4 June – 20 November 2014.
2. Appoint Mr. NOBIRU ADACHI as the company's Commissioner effective since passed the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (FSA) and meet the regulations of the applicable legislation, with the provisions if the requirements set out by the FSA related with the appointment are not met by the FSA does not give his consent, then the appointment becomes void without the required approval of the General Meeting of Shareholders. The appointment of Mr. NOBIRU ADACHI valid for a term of office until the closing of Annual general meeting 3 (three) from the date of the appointment concerned with not reducing the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss the members of the Board of Commissioners at any time before his tenure ends.
3. Then, The next structure of company's board be :

Director

- Director : Mr. Ahmad Fajar
- Director : Mr. Felix Istyono Hartadi Tiono
- Director : Mrs. Laksmi Mustikaningrat

Boards of Commissioner

- President Commissioner (Independent) : Mr. Sigid Moekardjono
- Commissioner : Mr. Sukoriyanto Saputro
- Commissioner : Mr. Nobiru Adachi

*) The appointment will be effective since passed the test of Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (FSA) and met the regulations of the applicable legislation. If the requirements set out by the FSA in connection with the appointment is not met or the FSA does not give his consent, then the appointment becomes void without the required approval of the General Meeting Shareholders.

4. Authorize the Board of Directors of the company to declare a change in the company's board of management of Deed Admitted

D. On December 30, 2014 has been held extraordinary meeting, that has resulted in several importance decisions, as follows:

First Agenda

1. Agreed to increase the company's capital through the issuance of shares without rights issue as much as 30.000.000.000.000 (Thirty Trillion) sheets of A series' stock with amount Rp. 0,01 (zero point zero one rupiah) or as much as Rp. 300.000.000.000 (Three hundred billion Rupiah).
2. Delegating authority to the board of directors to declare the result of the capital increase after the completion of the capital increase without the issuance of shares also give authorize to the company's director to declare in separate notarial deed regarding the implementation of the capital increase without the issuance of shares.

Second Agenda

1. Accepted the resign letter from Mr. SUKORIYANTO SAPUTRO as boards of commissioner, counted since the meeting was closed and also with gratitude for his services during his tenure.
2. Change the position of Mr. NOBIRU ADACHI from boards of commissioner become President Commissioner and Mr. SIGID MOERKADJONO as President Commissioner and Independent Commissioner become Vice President of Commissioner and Independent Commissioner.
3. Change the Company's director position is Mr. AHMAD FAJAR from Director become President director
4. Appointed Mr. YOSHIO HIRAKO and Mr. EIHITO TAMURA each as New company's Director, appointed Mr. YOSHIO HIRAKO and Mr. EIHITO TAMURA will effective for term of office until the closing of the 3rd Annual counted from date of appointment concerned without prejudice to the RUPS's right to stop members of the board of directors at any time before his term ends.
5. So the next new structure of committees for boards of commissioner member and Director, as follows :

Boards of Commissioner :

- President Commissioner: Mr. Nobiru Adachi
- Vice President of Commissioner / (Independent Commissioner) : Mr. Sigid Moerkardjono

The Company's Director

- President Director : Mr. Ahmad Fajar
- Director : Mr. Felix Istyono Hartadi Tiono
- Director : Mrs. Laksmi Mustikaningrat
- Director : Mr. Yoshio Hirako
- Director : Mr. Eihito Tamura

*) Appointed shall be effective immediately passed the Fit and Proper Test by the financial services authority and completed the legislation in force. If the requirement set by The Financial Services Authority related with the appointment does not fulfill or The Financial

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Services Authority didn't give approval, then the appointment be canceled without approval from RUPS.

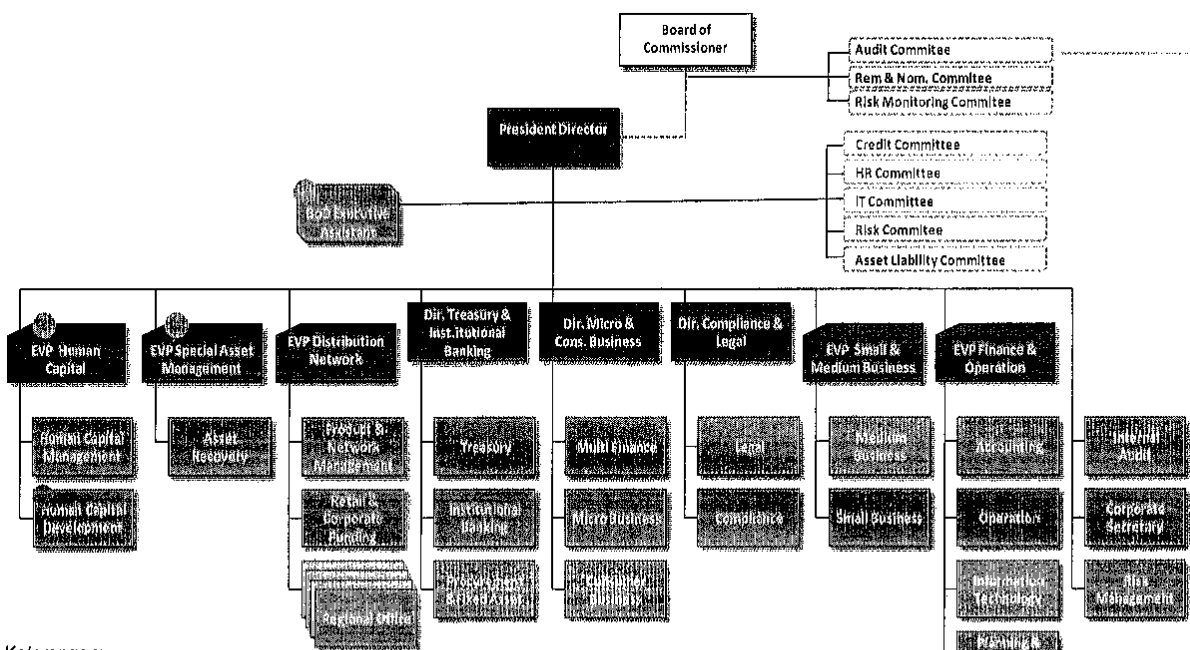
6. Authorize the company's Director to declare the organizational structure changing in separate notarial deed. Changes to the composition of the board of PT Bank Mutiara Tbk from the decision of the extraordinary general meeting of shareholders on 30 December 2014, then the number and composition of the Board of Commissioners' members of PT Bank Mutiara Tbk has not met the applicable provisions (the number of the Board of Commissioners' members 2 people including 1 person Independent Commissioner) so one of the functions of the Committee Under the Board of Commissioners Remuneration and Nomination Committee there is a vacancy on Committee Chairman's remuneration and Nomination.

The Bank has delivered notice to FSA through letter No. S/29.21. Dir-CPD/Pearls/XII/2014 29 December 2014 subject: The composition of the Board of Commissioners of PT Bank Mutiara, Tbk, with total fulfillment number of the commitment of the Board of Commissioners' members into at least three (3) people and not exceeded the number of Board members who will come through the plan held extraordinary general meeting on March 2015.

The Organization Structure of PT Bank Mutiara Tbk

In order to adjust the organizational structure of the Bank against any change required from applicable regulation and adjusting the business conditions of the bank today, Then the organization structure of PT Bank Mutiara, Tbk 2014 the latter applies based on the decision letter of Directors and Board of Commissioners together with PT Bank Mutiara, Tbk No. 25.10/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2015 on 25 August 2014 about Organization Structure of PT. Bank Mutiara Tbk, as follows:

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)



Keterangan:

- Direktorat level Direktur
- Direktorat level SEVP / EVP
- Divisi
- Project / Staf Ahli setingkat Divisi
- Unit yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu

NOTES:

The decision statement of PT Bank Mutiara Tbk’s General Meeting of shareholders (RUPSLB) on 30 December 2014 according to statement certificate of RUPSLB with No. 2 on 8 January 2015 that exposed by Notary Jose Dima Satria, SH., M.Kn. with approval from law ministry and Republic Indonesia’s Human right No. AHU-0001199.AH.01.03.TH.2015 and AHU-0001200.AH.01.03.TH.2015.

So the PT Bank Mutiara Tbk’s organization structure of Commissioner and Director, as follows:

Boards of Commissioner consisted of two people consisting of :

- President Commissioner : Mr. Nobiru Adachi
- Vice President of Commissioner/Independent : Mr. Sigid Moerkardjono

Director consisted of five people consisting of :

- President director : Mr. Ahmad Fajar
- Director : Mr. Felix Istyono Hartadi Tiono
- Director : Mrs. Laksmi Mustikaningrat
- Director : Mr. Yoshio Hirako
- Director : Mr. Eihito Tamura

2.3 Boards of Commissioner

The Board of Commissioners of PT Bank Mutiara, Tbk has a very important role and task in the implementation of Good Corporate Governance (GCG), with the main task is keeping an

eye on policy and implementation of the policy by the Board of Directors in the running of the company, perform the tasks in accordance with the decisions taken in RUPS and task specified in the Articles of Association of PT Bank Mutiara, Tbk, Bank Indonesia's Regulations, regulatory oversight of the financial services authority, the financial services authority regulations of capital market and other related regulations.

(1) Duties and responsibilities of Board of Commissioners

The Board of Commissioners undertakes the duties and responsibilities as follows:

1. The Board of Commissioners is obligated to provide sufficient time to carry out the duties and responsibilities optimally.
2. Board of Commissioners is obligated to ensure the implementation of Good Corporate Governance in any business activities of the bank on all levels or level of organization.
3. The Board of Commissioners is obligated to carry out supervision against the execution of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors
4. Conduct active supervision of Compliance Function by:
 - a. Evaluating the implementation of bank compliance functions at least twice a year.
 - b. Give suggestions in order to improve the quality of implementation of bank compliance functions
5. The Board of Commissioners gives suggestions in order to improve the quality of implementation of the compliance functions to the President Director with a copy to the Director in charge of Compliance Function.
6. In conducting supervision, compulsory Commissioner direct, monitor, and evaluate the implementation of the strategic policy of the bank.
7. In the conduct of supervision, the Board of Commissioners are prohibited from getting involved in decision making operational activities of the bank, unless:
 - a. The provision of funds to related parties as set forth in the provisions of Bank Indonesia Maximum Limit of granting of Credit commercial banks; and
 - b. Other matters set out in the articles of Association of the bank or the applicable legislation
8. Decision making by the Board of Commissioners as mentioned above does not negate the responsibility of the Board of Directors of the implementation of the Bank's Executive Board.
9. The Board of Commissioners is obligated to ensure that the Directors have been follow up all audit and recommendations of internal bank audit, external auditors, the Financial Services Authority supervision results/Bank Indonesia and/or other authorities supervision results.
10. The Board of Commissioners is obliged to inform the financial services authority/Bank Indonesia no later than seven working days it finds:
 - a. Violations of legislation in the field of banking and finance; and
 - b. The State or approximate the circumstances that can compromise the continuity of the bank's business.
11. In order to support the effective implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners is obligated to make form at least:

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- a. Audit committee
 - b. the risk Monitoring Committee
 - c. Remuneration and Nomination Committee
12. The appointment of Committee members conducted by the Board of Directors based on the decision of the Board of Commissioners
 13. The Board of Commissioners is obligated to ensure that the Committee has been formed to perform tasks effectively.
 14. The Board of Commissioners is obliged to have based of conduct upon the guidelines binding for each Member of the Board of Commissioners, at least include setting ethic work, working time, and set up a meeting.
 15. Lead The General Meeting of Shareholders (RUPS)
 16. Set a system performance evaluation and remuneration of Directors and Commissioners
 17. The Board of Commissioners is obliged to perform duties and responsibilities in independently

(2) The number and composition of the Board of Commissioners

Bank Indonesia provision refers to:

- The number of members of the Board of Commissioners at least three people and did not exceed the number of members of the Board of Directors
- At least one member of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia.
- At least 50% of the total members of Board of Commissioners are independent Commissioners.

From 2014, the number and composition of the Board of Commissioners of PT Bank Mutiara, Tbk several times amended as follows:

- The number and composition of the Board of Commissioners per 4 June 2014 to 19 November 2014 Bank Indonesia criteria above, as follows:
 - ✓ Member of the Board of Commissioners as many as four people and the number of members of the Board of Directors of as many as four people.
 - ✓ Member of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia as many as four people.
 - ✓ The number of independent Commissioners as much as 50% of the total membership of the Board of Commissioners.

The number and arrangement of the members of the Board of Commissioners are :

No.	Name	Position	Domicile	The date of the appointment and consent	
				RUPS	BI/OJK
1.	<u>Sigid Moerkardjono</u>	President of Commissioner / Independent Commissioner	Indonesia	RUPS on 4 June 2014	8 September 2011/9 October 2012
2.	<u>Didik Madiyono</u>	Commissioner	Indonesia	RUPS on 4 June 2014	*)
3.	<u>Eko Busi Supriyanto</u>	Independent Commissioner	Indonesia	RUPS on 4 June 2014	20 Oktober 2009
4.	<u>Sukoriyanto Saputro</u>	Commissioner	Indonesia	RUPS on 4 June 2014	*)
*) Appointment effective since the stated eligibility and compliance tested by the financial services authority (OJK) and complete applicable regulations.					

**Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)**

- The number and composition of the Board of Commissioners on November 20, 2014 to December 29, 2014 not same yet with Bank Indonesia criteria above, as follows:
 - ✓ A member of the Board of Commissioners as much as three people and the number of members of the Board of Directors of as many as three people.
 - ✓ Member of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia as much as two people.

While the numbers of Independent Commissioners does not yet fit the criteria, i.e. as much as 33.3% of the total membership of the Board of Commissioners.

The number and arrangement of the members of the Board of Commissioners are:

No.	Name	Position	Domicile	The Date of the appointment and consent	
				RUPS	BI/OJK
1.	<u>Sigid Moerkardjono</u>	President of Commissioners	Indonesia	RUPSLB on 20 November 2014	8 September 2011/9 October 2012
2.	<u>Sukoriyanto Saputro</u>	Commissioner	Indonesia	RUPSLB on 20 November 2014	*)
3.	<u>Nobiru Adachi</u>	Commissioner	Japan	RUPSLB on 20 November 2014	*)

*) Appointment effective since the stated eligibility and compliance tested by the financial services authority (OJK) and complete applicable regulations.

- The number and composition of the Board of Commissioners on December 30, 2014 to December 31, 2014 not same yet with Bank Indonesia criteria above, as follows:
 - ✓ Member of the Board of Commissioners as much as two people including one person independent Commissioner, and the number of members of the Board of Directors of as much as five people, so one of the functions of the Committee Under the Board of Commissioners Remuneration and Nomination Committee against the vacancy Chairman's Remuneration and Nomination Committee.

Meanwhile, in the appropriate criteria, as follows:

- ✓ Member of the Board of Commissioners are domiciled in Indonesia as much as one person and one person state of Japan.
- ✓ The number of independent Commissioners as much as 50% of the total members of Board of Commissioners

The number and arrangement of the members of the Board of Commissioners are:

No.	Name	Position	Domicile	The Date of the appointment and consent	
				RUPS	BI/OJK
1.	<u>Nobiru Adachi</u>	President of Commissioners	Japan	- RUPSLB on 20 November 2014 - RUPSLB on 30 December 2014	*)
2.	<u>Sigid Moerkardjono</u>	Vice President of Commissioner	Indonesia	- RUPSLB on 21 June 2012 - RUPSLB on 30 December 2014	8 September 2011/9 October 2012 **)

*) Are in the process of Fit & Proper Test in OJK. Appointment effective since the stated Fit and Proper test by the financial services authority and meets applicable regulations.
**) Approval for independent Commissioner

The whole appointment and/or substitution of members of the Board of Commissioners must be approved by the shareholders through the general meeting of shareholders in accordance with

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

extraordinary meeting with the main criteria taking into account the integrity, competence, professionalism and financial reputation sufficient compliance with the requirements of the assessment of Fit and Proper test by the financial services authority. For the appointment of one individual Commissioner and Independent commissioner through RUPSLB, then based on the recommendations of the Committee take notice/Remuneration and Nomination.

From 2014, a duplicate post Members of the Board of Commissioners are as follows:

No.	Name	Position	Other Positions
1.	<u>Nobiru Adachi</u>	President of Commissioner	Representative Director and Senior Managing Director in charge of Corporate Management Dept. of J Trust Co., Ltd.
2.	<u>Sigid Moerkardjono</u>	Vice President of Commissioner / Independent	none

A for a summary profile of the board of commissioners as follows:

1. President Commissioner: **Nobiru Adachi**

Date of birth : 21 March 1958, Graduate from the University of Tokyo Faculty of law in 1980, graduate of the Faculty of Economics from Case Western University in 1983, and a graduate of the Faculty of public administration from the Kennedy School of Government University, Harvard University. In April 1980, joined the Japan Financial Department, where served as Office's Director of the tax services in Onomichi July 1986. Later appointed as Director of the Vice Minister of finance for international business, part of the Secretariat of the Minister in June 1997. In June 1999, was the examiner in the Budget Bureau of the budget. Later, served as Director of the Research Division of the Bureau International in June 2002. Later became the Director of the policy Research Institute Department of Finance since June 2004. After that, became Director-General of Customs in Hakodate since June 2005. In April 2006 was appointed Officer in the Jsdq. In October 2008 became a County Head for Japan at ETF Securities Ltd. Then served as Representative Director at M & A Solutions Japan co. Ltd. in October 2011. April 2013 on as Advisor for J Trust Co., Ltd., later served as Managing Director of J Trust Co., Ltd in 2013. Later became Representative Director and Senior Managing Director in charge with Corporate Management Dept. at J Trust Co., Ltd, and on 20 November 2014 he was appointed as Commissioner of PT Bank Mutiara, Tbk, later on December 30, 2014 was appointed as President Commissioner of PT Bank Mutiara, Tbk.

2. Vice President of Commissioner : **Sigid Moerkardjono**

Date of Birth: Surakarta/ 10 September 1952. Achieved his bachelor on Gajah Mada University, Yogyakarta. Initiated his career at PT Bank Niaga Tbk Branch of Yogyakarta as a Credit Analyst (1976-1978), as head of operations (1979-1981), next PT Bank Niaga Tbk, Jakarta branch as Chief of the Division of operations (1981-1983), on PT Bank Niaga Tbk Headquarters, as Inspector (SPI) (1983-1988), then became the leader of a branch of PT Bank Niaga, Semarang Branch (1988-1990), as the Chairman of the branch of PT Bank Niaga Tbk Cang Medan (1990-1993), PT Bank Niaga Tbk Headquarters as head of Credit and Administrative Affairs (1994), as head of the region of eastern Indonesia PT Bank Niaga Tbk in Surabaya (1994-1998), PT Bank Niaga Tbk as the Head Office of Controller/head of SKAI (1999), then as Director of compliance at PT Bank Niaga Tbk (1999), and as a Team Manager at PT Bank Niaga Tbk Central Office (1999-2000), and then as a Commissioner/Chief Audit Committee/Risk Monitoring Committee Chairman Committee member

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Remuneration Nominees PT Bank Niaga Tbk (2000-2007), as Vice President Commissioner and a member of the committees of PT Bank Niaga Tbk (2007-2008) authority, in addition as a member of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee members at the Bank SHORT BTPN (2007-2011). Based on RUPSLB PT Bank Mutiara, Tbk 21 June 2011, he was appointed as Vice President Commissioner, and further based on RUPS 21 June 2012, he was appointed Vice Principal of independent Commissioner in PT Bank Mutiara, Tbk. at Annual Meeting On 4 June 2014 appointed as Independent Commissioner, and based on the results of RUPSLB on December 30, 2014 is now back up to change his post to become Vice Chairman of the independent PT Bank Mutiara, Tbk. And be Chairman of the Audit Committee of PT Bank Mutiara, Tbk (among others based on the ; Director's SK No.03.12/S.Kep-Dir-HRD/Mutiara/X/2011 on 3 October 2011, Director's SK No. 31.25/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2012 on 31 Juli 2012, Director SK No.01.12/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2014 on 1 July 2014, and Director's SK no 08.08/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 on 8 September 2014), and as The Chairman of the Supervisory Committee (among others based on : Director's SK No.31.27/S. Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2012 on 31 July 2012, Director's SK NO. 01.13/S. Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/ 2014 on 01 July 2014, and Director's SK No. 08.09/S. Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 on 8 September 2014).

(3) The Criteria of boards of Commissioner

- The whole appointment and/or substitution of members of the Board of Commissioners must be approved by the shareholders through RUPS (Board meeting of Commissioner/RDK as the RUPS when the company is still handled by the Lps/LPS) and the main criteria consider integrity, competence, professionalism and financial reputation, are adequate in accordance with the requirements of the assessment of Fit and Prosper Test which has been set by the financial services authority (OJK)/Bank Indonesia.

(4) The Status of the Independence of Boards of Commissioners

- To avoid importance conflict, all members of the Board of Commissioners is not mutually have financial ties and family relations with other Commissioners and/or Directors.
- The whole of the independent Commissioners have no financial ties, management, ownership and family relations to second degree with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or the Shareholders Controlling the Bank which may affect their ability to act independently.
- Related with that matters, the appointment of a Deputy Commissioner of the independent based on Annual Meeting on 21 June 2012 in accordance with the decision statement of RUPS with the certificate No. 56 on 27 July 2012 and then it has signed a contract with the Shareholders.

The Independence's Statements of the Independent Commissioners.

The Independent Commissioner has made Independence's statement letter and has been submitted to BI/OJK with editorial, as follows :

**Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)**

A Letter of Independence Statement

I signed below :
 Name :
 Place/ Date of birth :
 Domicile Address :
 Phone no. :
 Position :
 Company Name :
 Company's phone no :

With this I declare:

1. Don't have financial ties, management, ownership and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Bank, which may affect my ability to act independently as set forth in the provisions of the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.
2. In the future, I am found to have relations as mentioned on number 1 above, then I'm willing to give the position of independent Commissioner and willing to be replaced.

I certify that the statement, that i have made in truth.

(5) Transparency and Financial Relations, Management, and families Board of Commissioners
 PT Bank Mutiara Tbk's member of the Board of Commissioners has made and signed an affidavit which are updated periodically, which related a few things as follows:

- The Member of the Board of Commissioners hasn't stock until \geq 5% (five percent) of paid-in capital in the Bank or Pearl Bank and other companies (inside and outside the country).
- Independent Commissioners have no financial ties, management, ownership and/or family relations with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or the Shareholders Controlling the Bank, or the relationship with the Bank, which may affect its ability to act independently.

Transparency Family Relation

No.	Name	Boards of Commissioner		Director		Others Shareholders	
		YES	NO	YES	NO	YES	NO
1.	<u>Nobiru Adachi</u>		✓		✓		✓
2.	<u>Sigid Moeekardjono</u>		✓		✓		✓

Transparency Financial Relations

No.	Name	Boards of Commissioner		Director		Others Shareholders	
		YES	NO	YES	NO	YES	NO
1.	<u>Nobiru Adachi</u>		✓		✓		✓
2.	<u>Sigid Moeekardjono</u>		✓		✓		✓

Transparency Ownership

No.	Name	Others Company	Other Bank	financial institution is not a Bank	%
1.	<u>Nobiru Adachi</u>	J Trust Co. Ltd,	None	None	0,001
2.	<u>Sigid Moeekardjono</u>	None	None	None	-

(6) Board of Member's Meeting

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

In 2014, the Board of Commissioners has organized various meetings on the basis of its kind with the details as follows:

- a) **Board of Commissioners with Directors** meeting during the year 2014 by as much as 19 (nineteen) times, where the number of attendance meetings of all members of the Board of Commissioners based on 'The Period Served' are:

Name	The Period Served	Total Number Of Presence	%Attendance
Boards of Commissioner's Special Meeting			
<u>Pontas R. Siahaan</u> (President Commissioner)	1 January– 4 June 2014	6	86%
<u>Sigid Moekardjono</u> (The Deputy Commissioner Of The Independent_	1 January – 4 June 2014 & 30 December – 31 December 2014	7	100%
<u>Sigid Mierkardjono</u> (President of Commissioner – Independent)	4 June – 30 December 2014	16	100%
<u>Eko Budi Supriyanto</u> (Commissioner-Independent)	1 January – 20 November 2014	19	90%
<u>Didik Madiyono</u> (Commissioner)	4 June – 20 November 2014	12	85%
<u>Sukoriyanto Saputro</u> (Commissioner)	4 June – 30 December 2014	16	100%
<u>Nobiru Adachi</u> (Commissioner)	20 November -31 December 2014	1	100%

The Table of Meeting Attendance for each Member of the Board of Commissioners are:

Nama Komisaris	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl
	28/1/14	19/2/14	20/3/14	17/4/14	19/5/14	9/6/14	21/7/14	22/7/14	12/8/14	19/8/14	8/9/14	12/9/14	16/9/14
<u>Pontas R. Siahaan</u>	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sigid Moekardjono</u>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<u>Eko B. Supriyanto</u>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<u>Didik Madiyono</u>	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
<u>Sukoriyanto Saputro</u>	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	√
<u>Nobiru Adachi</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keterangan: √ : Hadir X : Absen													

**Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)**

Commissioner's Name	14	15	16	17	18	19	Σ
	30/9/14	15/10/14	16/10/14	14/11/14	19/11/14	18/12/14	
<u>Pontas R. Siahaan</u>	-		-	-	-	-	5
<u>Sigid Moerkardjono</u>	X	✓	✓	✓	✓	✓	18
<u>Eko B. Supriyanto</u>	✓	✓	✓	-	-	-	16
<u>Didik Madiyono</u>	✓	✓	✓	-	-	-	11
<u>Sukoriyanto Saputro</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14
<u>Nobiru Adachi</u>	-	-	-	-	-	✓	1
Information: ✓ : Attendance X : Absent							

b) The Board of Commissioners's Special Meeting for 2014 as many as 23 (twenty three) times, where the number of attendance meetings of all members of the Board of Commissioners based on ' the period Served ' are:

Name	Period Served	Attendance numbers	%Attendance
The Board of Commissioners's Special Meeting			
<u>Pontas R. Siahaan</u> (President Commissioner)	1 January s/d 4 June 2014	6	86%
<u>Sigid Moerkardjono</u> (Independent Vice President Commissioner)	1 January s/d 4 June 2014 & 30 December s/d 31 December 2014	7	100%
<u>Sigid Moerkardjono</u> (Independent President Commissioner)	4 June s/d 30 December 2014	16	100%
<u>Eko Budi Supriyanto</u> (Independent Commissioner)	1 January s/d 20 November 2014	19	90%
<u>Didik Madiyono</u> (Commissioner)	4 June s/d 20 November 2014	12	85%
<u>Sukoriyanto Saputro</u> (Commissioner)	4 June s/d 30 December 2014	16	100%
<u>Nobiru Adachi</u> (Commissioner)	20 November s/d 30 December 2014	1	100%

Table of The meeting presence to each member of the Board of Commissioners is

Nama Komisaris	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tgl 13/1/14	Tgl 5/2/14	Tgl 11/2/14	Tgl 4/3/14	Tgl 18/3/14	Tgl 25/3/14	Tgl 8/4/14	Tgl 9/6/14	Tgl 16/6/14	Tgl 17/6/14	Tgl 30/6/14	Tgl 18/7/14	Tgl 21/7/14
<u>Pontas R. Siahaan</u>	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
<u>Sigid Moerkardjono</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>Eko B. Supriyanto</u>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>Didik Madiyono</u>	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>Sukoriyanto Saputro</u>	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<u>Nobiru Adachi</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keterangan: ✓ : Hadir X : Absen													

**Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)**

Nama Komisaris	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Σ
	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	Tgl	
Pontas R. Siahaan	18/8/14	20/8/14	4/9/14	17/9/14	9/10/14	14/10/14	15/10/14	14/11/14	25/11/14	18/12/14		6
Sigid Moerkardjono	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		23
Eko B. Supriyanto	X	√	X	√	√	√	√	√	-	-		19
Didik Madiyono	√	√	X	√	√	√	√	X	-	-		12
Sukoriyanto Saputro	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		16
Nobiru Adachi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√		1
Keterangan: √ : Hadir X : Absen												

Decision-making meeting of the Board of Commissioners has been made based on deliberation, consensus and/or most votes in that case is not the case consensus discussion. The results of the meeting of the Board of Commissioners have poured in the treatise and well documented, including the inclusion of dissenting options (if any). Thus the board of commissioners's meeting PT Bank Mutiara Tbk in 2014 have met regulation.

(7) Performance assessment of the Board of Commissioners

The Party who do assessment against the performance of the Board of Commissioners are shareholders:

- **The implementation of the assessment**

The Stages of the process to assess the performance of the Board of Commissioners is conducted directly by the majority shareholder :

- a. The period up to November 20, 2014, still in the handling by LPS
- b. The period since November 20, 2014, has been taken over by J Trust Co., Ltd

- **Performance Indicator**

The Indicators used to assess the performance of the Board of Commissioners is a key performance indicator (KPI) were prepared and evaluated directly by the majority shareholders.

(8) Boards of Commissioner Training Program

To support the implementation of the Board of Commissioners duties, during 2014 the Board of Commissioners of PT Bank Mutiara Tbk has attended various training programs, workshops, conferences, seminars, among others :

**Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)**

Name	Period Served	Training, Workshop, Conference and seminar	Organizer	Place and Time
<u>Slgld Moekardjono</u> (Independent Vice President of Commissionner/ President of Commissionner)	1 January s/d 30 December 2014	Workshop " Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) & Supervisory Review and Evaluation Process	BSMR	Jakarta, 11-12 December 2014
<u>Skuoriyanto Saputro</u> (Commissionner)	4 June s/d 30 December 2014	FORUM "KEY RISIK MANAGEMENT CHALLENGES IN 2015 "PREPARING FOR ASIA ECONOMI COMMUNITY WAYS STRNGHTEN BANK COPETIVENESS YET SAFEGUARDING BANKS FROM RISK"	BARA	PADMA RESORT LEGIAN BALI on 27-28 November 2014
<u>Nobiru Adachi</u> (Commissionner / President of Commissionner)	20 November s/d 31 december 2014	-	-	-

(9) Board of Commissioner Recommendation

Board of Commissioner played an active role providing input and recommendations through discussions at Board Meeting or Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as discussions in committees under the Board of Commissioners that help smooth the task of supervision by the Board of Commissioners. The following summarizes the recommendations as well as an important input for the Board of Commissioners in 2014, including :

- 1) Improve the quality of assessment soundness and risk profile (self-assessment) with the active involvement of the Division / Unit Related work optimally in order to obtain more objective assessment by not ignoring the progress that may have been carried out, so that corrective measures can be set appropriately and effectively mitigate risk.
- 2) In order for debt restructuring troubled borrowers done precisely so that it can improve the collectibility of the loan portfolio and the Mutiara bank's interest income (once and for all Solution), and not merely a temporary solution.
- 3) The implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML and CFT) should be increased and the Internal Audit Division was assigned to check its implementation.
- 4) In an effort to mitigate to risk liquidity in order to do the optimization of productive and profitable on-idle funds that exist today.
- 5) Related with the credit risk mitigation, to be prepared / set (if not already there or not done), among others:
 - Credit Note Analysis Template (NAK) for the various segments of the relevant.
 - Scoring Rating System for various segments of the credit Templates for monitoring various credit segment which is part of the Bank's portfolio.
 - Templates for monitoring various loan segments that are part of the Bank's portfolio
 - Bank credit portfolio management to balance exposure in various segments, limit the credit exposure on a specific industry sector, specific work areas and certain groups.
 - The billing system for small credit and effective countermeasures system of problem loans in the commercial loan segment.
 - Stress-Testing procedures include Stress-Testing propose scenarios that will be used.

- 6) Considering Other banks same as Mutiara Bank have a number of better efficiency, management are reminded about the need for continued efforts and efficiency measures, because the greater cost pressures required to pay a priority in order to obtain a greater profit margin.
- 7) In the development of the Consumer Credit (Micro Banking) in order to be considered Risk Model Credit, Business Product, and Business Process. Given the condition of human resources are currently better use outsourced personnel for sales and collection.
- 8) Ensure Management has been conducting the implementation of risk management adequately covers the adequacy of infrastructure and the effectiveness of the implementation of the role of the risk management unit, according to the Bank's activities and its development including improved risk-aware culture of at each business unit (risk taker).
- 9) Ensure that the management has sought to anticipate the compliance risk effectively through an increase in the role of the compliance unit function was ex-ante on any bank business activity development process.
- 10) In order to periodically (monthly) report in writing to the Board of Commissioners regarding the follow-up plan management and its realization in conducting internal improvements in the IT field with a scale of priorities to support the smooth operational and security including the business development bank.

2.4 Director

The Directors are fully responsible for operations, business development and risk management of the Bank in a professional manner with emphasis on the principle of prudence Bank (banking prudential principle) to increase shareholders value and always based on regulations and conditions, both published by banking regulators such as the financial services authority, Bank Indonesia, capital market Institutions (Indonesia stock exchange), and/or other competent authorities.

1) Duties and Responsibilities of the board of Directors

The period as of December 31, 2014 the number of members of the board of Directors consists of 5 (five) persons one of them as a Director and as the Director of Compliance, who together carry out the duties and responsibilities to the Bank for :

1. The directors take full responsibility in carrying out their duties for the benefit of the Company in achieving its goals and objectives;
2. The Directors is obliged to have good ethics and in accordance with the authority and responsibility to run the tasks as set out in the articles of association of the Company with heed to the laws and regulations that apply;
3. The Directors is obliged to follow the principle of-principle/principles of Good Corporate Governance (GCG) in every Bank's business activities at all levels of the organization;
4. The board of directors is obliged to follow up on audit findings and recommendations of the Internal Audit Unit (SKAI), external auditor, results of supervision of the financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and/ or supervision result of other authorities;
5. In order to implement the principles of GOOD CORPORATE GOVERNANCE principle/, directors are obligated to form committees under which such risk management Committee, Steering Committee on information technology, and Human Resources Committee;

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

6. The Board of Directors is obligated to give an account with the implementation of its duties to the shareholders through annual general meeting shareholders.
7. The Director shall be obliged to reveal to employees about policies of the Bank are located in the areas of employment;
8. The Board of Directors shall be obliged to provide data and information that is accurate, relevant, and timely to the Board of Commissioners, shareholders, regulators and parties;
9. The Board of Directors shall be obliged to have the guidelines and code of conduct binding work for each Member of the Board of Directors, at least include setting work ethic, working time, and the arrangement of the meeting;
10. The Board of Directors shall be obliged to draw up a strategic plan in the form of corporate plan (Corporate Plan) and business plan (Business Plan). Corporate plan submission and preparation/submission of a business plan are based on the provisions of the financial services authority;
11. The Board of Directors must convene the General Meeting OF Shareholders upon request of shareholders that have a legitimate the Financial Services Authority;
12. The Board of Directors shall be obliged to create and maintain a list of shareholders and a special List that contains the list of ownership thanks to Shares owned by directors and Commissioners include their family in banks and in other companies (if any);
13. The board of directors is obliged to consult the granting of credit above a certain amount to the Board of Commissioners;
14. The board of directors to do with the number 13 above, the board of Directors shall assure that the granting of credit is not broken down into smaller value under the terms of the provision of credit that should be consulted;
15. Set the Vision, Mission, and Values Work Culture of the Bank;
16. Create annual budget and work plan and other plans associated with the bank. The plan should be given to the board of commissioners and shareholders for approval at the annual general meeting and communicated to all workers Bank.

2) The number and composition of the Board of Directors

Referring to the provisions of Bank Indonesia

- The number of members of the board of Directors at least 3 (three) people
- All members of the board of Directors domiciled in Indonesia.

In the Period of 2014, the Number and Composition of the board of Directors of PT Bank Mutiara Tbk amended several times as follows :

- The Amount and Composition of the board of Directors per 26 February 2014 s/d 3 June 2014 according to the criteria of Bank Indonesia above, is as follows:
 - ✓ Members of the board of Directors 4(four) peoples, including 1 (one) president Director, 1 (one) Director of compliance, 2 (two) Directors.
 - ✓ Members of the Bod are domiciled in Indonesia as many as 4 (four) of 4(four) peoples

The number and arrangement of Directors member:

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

No	Name	Position	Domicile	Date of Appointment	
				RUPS/GMS	BI/OJK
1.	<u>Sukoriyanto Saputro</u>	Managing Director	Indonesia	RUPSLB on 26 February 2014	21 March 2013
2.	<u>Ahmad fajar</u>	Director	Indonesia	RUPSLB on 26 February 2014	12 March 2009
3.	<u>Erwin Prasetyo</u>	Director	Indonesia	RUPSLB on 26 February 2014	4 June 2009
4.	<u>Felix Istyono Hartadi Tiono</u>	Director	Indonesia	RUPSLB on 26 February 2014	22 April 2014

- The Amount and Composition of the board of Directors per 4 June 2014 s/d 19 November 2014 according to the criteria of Bank Indonesia above, is as follows:
 - ✓ Members of the board of Directors is as much as 4(four) peoples, including 1 (one) president Director (effective after passed the test of eligibility and compliance by the FSA), one (1) Director of Compliance, and two (2) Director
 - ✓ Member of the board of Directors are domiciled in Indonesia as many as 4 (four) 4 (four)peoples.

The number and arrangement of Director memberis:

No	Name	Position	Domicile	Date of Appointment	
				RUPS/GMS	BI/OJK
1.	<u>Gandhi Ganda Putra Ismail</u>	Managing Director	Indonesia	RUPS on 4 June 2014	*)
2.	<u>Ahmad fajar</u>	Director	Indonesia	RUPS on 4 June 2014	12 March 2009
3.	<u>Felix Istyono Hartadi Tiono</u>	Director	Indonesia	RUPS on 4 June 2014	22 April 2014
4.	<u>Laksmi Mustikaningrat</u>	Director	Indonesia	RUPS on 4 June 2014	29 September 2014
*) The appointment was effective since passed the Fit and Proper Test by the financial Services Authority and meet the laws and regulations that apply					

- The Amount and Composition of the board of Directors per 20 November 2014 s/d 29 December 2014 according to the criteria of Bank Indonesia above, is as follows:
 - ✓ Members of the board of Directors 3 (Three) people, including 1 (one) as the Implementation of the Task (plt.) Director, and 1 (one) Director of Compliance
 - ✓ Member of the Board of Directors are domiciled in Indonesia as many as 3 (Three) people from 3 (three).

The number and Members of Directors

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

No	Name	Position	Domicile	Date of Appointment	
				RUPS/GMS	BI/OJK
1.	<u>Ahmad Fajar</u>	Director (Managing Director)	Indonesia	RUPSLB on 20 Nov 2014	12 March 2009
2.	<u>Felix Istyono Hartadi Tiono</u>	Director	Indonesia	RUPS on 20 Nov 2014	22 April 2014
3.	<u>Laksmi Mustikaningrat</u>	Director	Indonesia	RUPS on 20 Nov 2014	29 September 2014

- The Amount and Composition of the board of Directors per 30 December 2014 s/d 31 December 2014 according to the criteria of Bank Indonesia above, is as follows:
 - ✓ Members of the board of Directors as many as 5 (five) people, including 1 (one) president Director, 2 (two) Director (effective upon passed the test of eligibility and compliance with the FSA), and 1 (one) Director of Compliance.
 - ✓ Member of the Board of Directors are domiciled in Indonesia as many as 3 (three) people from 5 (five) persons.

The number and Members of Directors

No	Name	Position	Domicile	Date of Appointment	
				RUPS/GMS	BI/OJK
1.	<u>Ahmad Fajar</u>	Director (Managing Director)	Indonesia	- RDK LPS/Nov 2008 *) - RIJPSI R I PS on 30 December 2014	12 March 2009 **)
2.	<u>Felix Istyono Hartadi Tiono</u>	Director	Indonesia	-RDK/RUPS LPS on 26 February 2014	22 April 2014
3.	<u>Laksmi Mustikaningrat</u>	Director	Indonesia	-RDK/RUPS LPS on 4 June 2014	29 September 2014
4.	<u>Yoshio Hirako</u>	Director	Japan	-RUPSLB on 30 December 2014	**)
5.	<u>Eihito Tamura</u>	Director	Japan	-RUPSLB on 30 December 2014	**)

*) The Board of Commissioners meeting considered the AGM in the appointment as Director
**) on progress Fit and Proper Test In OJK. The appointment will be effective after passed the Fit and Proper Test by OJK and met the laws and regulations that applicable

In the period of 2014, members of the board of directors no one has a double position as commissioners, Directors or Executive Officers in Banks, companies, and/or other financial institutions. In addition, members of the board of Directors cannot be a member of the Remuneration and Nomination committee.

As for a summary of the profile of the members of the board of Directors as follows:

a. President director : Ahmad Fajar

Place/date of birth : Surakarta, 22 Januari 1966. Obtain a Bachelor's degree from Bogor Institute of Agriculture (IPB) in 1988, and Magister Management degree in 2000 at the University of Padjajaran. Start a career in banking in 1990 as an administrative Office Center, and in the year 2000 as Senior Manager Office - Treasury Liquidity Management Funding at Bank Bumi Daya. In 2000-2001 as a Manager Senior Officer –

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Treasury & Capital Market Portfolio Investment at Mandiri Bank. In 2001-2003 as Manager Professional Staff- Treasury Management, Treasury Product/Sales Management at Mandiri Bank. In 2003-2004 Sr: TL-Portfolio Investment Mgr- Treasury of Mandiri Bank, in 2004-2008 VP : DH- Debt & Capital Market-Treasury Debt & Capital Market in Mandiri Bank. In November 2008 trusted as director of PT Bank Mutiara Tbk. and since December 30, 2014 believed to have served as President director of PT Bank Mutiara Tbk.

b. Compliance Director : **Felix Istyono Hartadi Tiono**

Place/ date of birth: Surakarta, 8 February 1959. Graduate from Parahyangan Catholic University, Bandung in 1985 majoring in Law Faculties, and in 2006 graduated from The Institute of Development Management Indonesia, Jakarta with MM/MBA degree. Start a career in 1986-1990 at PT Wellwood Sejahtera Ekspratama as Legal Officer; in 1990 worked at PT Bank Rabobank International as Legal Officer; next in 1992 worked at PT Bank Rabobank International Indonesia as Manager Legal Affairs; in 1994 served at PT Bank Rabobank International Indonesia as Manager Credit Control & Support; in 1998 at PT Bank Rabobank International as Manager Credit Risk Control; next in 2000 still at PT Rabobank International International Indonesia served as Compliance Director; in 2006 served at PT Bank DBS Indonesia as Compliance Director; in 2009 served at Bank HSBC Indonesia as Compliance Director; start from 2014 until now served at PT Bank Mutiara Tbk as Compliance and Legal Director.

c. Director : **Laksmi Mustikaningrat**

Place/date of birth : Blitar, 1 November 1961. He earned a Bachelor of Economics in Accounting from Airlangga University in 1985. Experience in the banking world for the past 28 years, especially in the field of Retail Credit, Consumer, Mortgage, and Micro Banking. He ever had been in the world of education as a Lecturer in the University of Airlangga in 1985. Career in PT Bank Niaga since 1986, and in December 2006 was appointed as a Board of the Senior Executive in charge of the Mortgage Banking as well as Retail Sales & Services before the transition period, from PT Bank Niaga Tbk to PT Bank CIMB Niaga Tbk. After the transition, He was appointed as EVP Consumer Finance until July 2012. Then, Active as Consultant & Senior Advisor for the establishment of APEX Islamic Micro Finance Institution. On March 2014, he was appointed as Executive Vice President (EVP) Micro & Consumer Business at PT Bank Mutiara Tbk, and through annual meeting at PT Bank Mutiara Tbk on June 4, 2014 he was appointed as Director of PT Bank Mutiara Tbk.

d. Director : **Yoshio Hirako**

Men aged 44 years old. Graduated at University of Toko, Faculty of Law, Bachelor of Law in 1994 who has experienced 19 years in Banking world industry also experienced in education 3 new banks. Since joined in AEON Bank, Ltd. Tokyo which is a subsidiary of the retailer, the Japanese giant, AEON in 2007 as Executive Officer, General Manager of Corporate Planning Department until Senior Director, Head of Sales and Marketing Division in 2013, Always promote collaboration between the retail and banking business. Next in 2013 joined with ASUKA Holdings Inc. Tokyo as Representative Director and COO, also Money Design Co. Ltd. Tokyo as Representative Director and Vice President. Since 30 December 2014 he was trusted as Director of PT Bank Mutiara Tbk.

e. Director : **Eihito Tamura**

Men aged 43 years old, date of birth 24 June 1971. Graduated at University of Tokyo, Faculty of Engineering, and Department of Systems Innovation in 1996, he did not unfamiliar with a variety of payment solutions and network in the world. Have experience of three years in the field of consulting and marketing strategy, in addition to a bachelor's degree more than seven years in the banking business and securities, as well as a year to set up the Bank from the beginning. Start a

**Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)**

career at Sanwa Bank, Limited,. Tokyo as Associate in 1196 until the first time he became Executive as Executive Director at Cecile Co., Ltd. In 2006. Next served as CEO at Bitcash Inch., Tokyo before served as CEO and President at Wakatam Inc., Tokyo in 2011. Since 30 December 2014 he was believed to be Director at PT Bank Mutiara Tbk.

3) The Criteria of Director

- In order to get objective results as well as independent then the whole appointment and/or change members of the board of Directors must be approved by the shareholders through the RUP (the Meeting of the Board of Commissioners/DRC as the RUPS when the company is still handled by The Deposit Insurance Agency/DIA), with the main criteria to consider integrity, competence, professionalism, and financial reputation which is adequate in accordance with the require of Fit and Proper Test that have been set by the financial Services Authority (FSA)/ Bank Indonesia. For the appointment of a Director based on/pay attention to the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
- The majority of the Director’s member have experience of at least 5 (five) years in the field of operations as Executive Officers of the Bank.

4) The Independence Status of Director

- All members of Directors at PT Bank Mutiara Tbk is the Independent Director, that don't have financial relationship, management, stock ownership, and/or family relationship up to second degree with fellow members of Directors and/or members of the Board of Commissioners and/or Controlling Shareholders of the Bank that may affect his ability to act is not independent.
- The Director's member either singly or together do not have shares over 25% (twenty five percent) of the paid up capital in other companies.
- Members of Directors not give any power common to the other party which resulted in the transfer director’s duties and functions.

5) Transparency and Financial Relation, Management and Director’s Family

Members of Directors has made and signed a statement of updated regularly related things includes:

1. Director’s member doesn’t have stock exceeding $\geq 5\%$ (five percent) of the paid-up capital in PT Bank Mutiara Tbk on bank and other companies (domestic and International)
2. Director’s member, either singly or together do not have shares exceeding 25% (twenty five percent) of the paid up capital in other companies.
3. Director’s member does not have a mutual relationship of financial and family up to second degree with fellow members of Directors and/or members of the Board of Commissioners and controlling shareholders.

Transparency Family relationship

No.	Name	Boards of Commissioner		Director		Other Shareholders	
		YES	No	YES	NO	YES	NO
1.	<u>Ahmad Fajar</u>		✓		✓		✓
2.	<u>Felix I. Hartadi Tiono</u>		✓		✓		✓
3.	<u>Laksmi Mustikaningrat</u>		✓		✓		✓
4.	<u>Yoshio Hirako</u>		✓		✓		✓
5.	<u>Eihito Tamura</u>		✓		✓		✓

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Transparency Financial Relation

No.	Name	Boards of Commissioner		Director		Other Shareholders	
		YES	No	YES	NO	YES	NO
1.	<u>Ahmad Fajar</u>		✓		✓		✓
2.	<u>Felix I. Hartadi Tiono</u>		✓		✓		✓
3.	<u>Laksmi Mustikaningrat</u>		✓		✓		✓
4.	<u>Yoshio Hirako</u>		✓		✓		✓
5.	<u>Eihito Tamura</u>		✓		✓		✓

Transparency Ownership of stock

No.	Name	Others Company	Others Bank	Non Bank Financial Institution	%
1.	<u>Ahmad Fajar</u>	None	None	None	
2.	<u>Felix I. Hartadi Tiono</u>	None	None	None	
3.	<u>Laksmi Mustikaningrat</u>	None	None	None	
4.	<u>Yoshio Hirako</u>	None	None	None	
5.	<u>Eihito Tamura</u>	None	None	None	

6) Director's meeting

During the year 2014 have been held 40 (forty) times of regular meetings held Directors, both Board meetings and meetings of the Board of Directors with the Head of Division and others, to discuss all issues and/or strategy management of the company.

The frequency of the attendance level of Director's member meeting in 2014 as follows:

No.	Director 's Name	Period Service	Attendance Number	%Attendance
1.	<u>Sukoriyanto Saputro</u> (Managing Director)	1 January s/d 4 June 2014	20	50%
2.	<u>Ahmad Fajar</u> (Director & Managing Director)	1 January s/d 29 December 2014 & 30 December s/d 31 December 2014	38	95%
3.	<u>Felix I. Hartadi Tiono</u> (Director)	26 February s/d 31 December 2014	31	77%
4.	<u>Laksmi Mustikaningrat</u> (Director)	4 June s/d 31 December 2014	16	40%
5.	<u>Erwin Prasetyo</u> (Director)	1 January s/d 4 June 2014	17	42%
6.	<u>Benny Purnomo</u> (Director)	1 January s/d 26 February 2014	6	15%
7.	<u>Budhiyono Budoyo</u> (Director)	1 January s/d 26 February 2014	5	12%
8.	<u>Yoshio Hirako</u> (Director)	30 December s/d 31 December 2014	0	0%
9.	<u>Eihito Tamura</u> (Director)	30 December s/d 31 December 2014	0	0%

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Decision-making from the Director's meeting has been made based on deliberation and consensus, or majority vote in this case, deliberation. The results of Director's meeting has been poured in minutes of meeting and well documented, including the inclusion of dissenting opinions (if any).

7) **Director's Performance Assessment**

The Parties who do the assessment on the performance of the Directors is the Board of Commissioners and then approved by the Shareholders, up to the period of November 20, 2014 still in the handling of LPS.

The Implementation of Assessment Process

- **Stage 1**
Work Plan Budget of the Companies (WPBC) that have passed through the General Meeting of Shareholders.
- **Stage 2**
Compile Draft Key Performance Indicator (KPI)
- **Stage 3**
KPI reviewed by Boards of Commissioner and Remuneration Committee
- **Stage 4**
The Draft of KPI is proposed to the Shareholders.
- **Stage 5**
The discussion of the KPIS between the Technical Team of PT Bank Mutiara Tbk and Shareholders
- **Stage 6**
The signing along with KPIS between PT Bank Mutiara, Tbk with shareholders

Performance Criteria (Indicator)

- The preparation process of Key Performance Indicator (KPI) Directors of PT Bank Mutiara Tbk applying the method of Balanced Scorecard (BSC). Measurement of performance using four perspectives, namely : Financial, Internal Business, Customer, Learning & Growth.
- By applying the method of the BSC that is not measured only financial targets but also the process. PT Bank Mutiara Tbk believes that with BSC Method can clarify and explain vision and strategy as well as be able to communicate and associate a variety of purposes and the size of the located.
- After the KPI for bankwide/ directorate signed, each month of PT Bank Mutiara Tbk always monitor the achievement of performance against targets according to KPI's.
- End of each financial year the IBC will be evaluated by the Shareholders to measure the performance of Directors, the stages in evaluating the value of the KPI at the end of the year is as follows:



Notes: Performance assessment of Directors the above is performed during the PT Bank Mutiara, Tbk. is still handled by the LPS as majority shareholder until the period of November 20, 2014, Meanwhile, after taking stock of PT Bank Mutiara, Tbk by JTrust co., Ltd., the assessment will be determined later by the new shareholders.

8) Training Director's Program

To support the implementation of the tasks of Directors, during the 2014 some members of Directors of PT Bank Mutiara, Tbk had attended various training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

No.	Nama	Periode Menjabat	Pelatihan, Workshop, Konferensi, Seminar	Penyelenggara	Tempat & Waktu
1	Sukoriyanto Saputro (Direktur Utama)	1 Januari s/d 4 Juni 2014	THE 3 rd INTERNATIONAL WORKSHOP ON INTEGRATED PROTECTION SCHEME	LPS	Denpasar Bali Tang gal, 12-15 Maret 2014
2	Ahmad Fajar (Direktur)	1 Januari s/d 29 Desember 2014	FORUM "KEY RISK MANAGEMENT CHALLENGES IN 2015 "PREPARING FOR ASIA ECONOMIC COMMUNITY -WAYS STRENGTHEN BANK COMPETIVENESS YET SAFEGUARDING BANKS FROM RISK"	BARA	PADMA RESORT LEGIAN BALI Tanggal 27-28 Nopember 2014
	Ahmad Fajar (Direktur Utama)	30 Desember s/d 31 Desember 2014	--	--	--
3	Felix I. Hartadi Tiono (Direktur)	26 Februari s/d 31 Desember 2014	FORUM "KEY RISK MANAGEMENT CHALLENGES IN 2015 "PREPARING FOR ASIA ECONOMIC COMMUNITY -WAYS STRENGTHEN BANK COMPETIVENESS YET SAFEGUARDING BANKS FROM RISK"	BARA	PADMA RESORT LEGIAN BALI Tanggal 27-28 Nopember 2014
4	Laksmi Mustikaningrat (Direktur)	4 Juni s/d 31 Desember 2014	UJI KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 5	LSPP	WISMA BAPINDO JKT Tanggal, 28 Juni 2014

2.5 Share Ownership

As stated in the Deed of association (AD), the last is the Deed of Statement of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 51 on 20 November 2014, The shares ownership of PT Bank Mutiara Tbk currently be as follows :

No.	Owner	Sheets	Nominal value/sheet	Percent
1.	J Trust Vo., Ltd.	793.200.325.675.265 (shares of series A)	Rp 0,01	99,000%
2.	LPS	7.983.774.324.735 (shares of series A)	Rp 0,01	0,996%
3.	Old Shareholders	28.350.177.035 (shares of series B)	Rp 78,00	0,004%

Based on the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of PT Bank Mutiara Tbk on November 20, 2014, has granted approval of the stock taking of PT Bank Mutiara, Tbk by j. Trust Co., Ltd. of LPS as follows:

2.6 Transactions that contain Conflicts of Interest

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Transactions that cause a conflict/difference of interest between the Bank with private owners, members of the Board of Commissioners, members of Directors, Executive Officers, and/or related parties with the Bank, then for the members of the Board of Commissioners, members of Directors, the Executive officers are prohibited from taking actions/decisions that may harm the Bank or reduce the profits of the Bank.

In performing their duties and daily responsibilities in the conduct of business relationships with customers, partners as well as with co-workers and maintain the interest of the public, PT Bank Mutiara Tbk strives to uphold personal integrity and professionalism of the sublime, which is poured in the form of the book the Corporate Ethical guidelines PT Bank Mutiara Tbk as ethical standards and behavior that must be used as guidelines by all members of the Bank (the board of Commissioners, Directors, and employees/Contract).

Corporate Ethics Handbook of PT Bank Mutiara, Tbk set things that should be avoided to prevent potential conflict of interest in any activity with clients, associates, or between members of the Bank, included in decision-making.

In period 2014, **There is no** transaction that contains conflict of interest, as the following table:

NO	Name and Position who has a conflict of interest	Name and Position of decision makers	Type of transaction	Value of transaction (Millions of Rupiah)	Description *)
	None	None	None	None	None

*)Do not with the applicable system and procedures

2.7 Share ownership members of the Board of Commissioners and Directors reaching ≥5% (five percent) of the paid-up capital, that includes the type and number of shares in the Bank, other Banks, non-Bank Financial Institutions, and other companies domiciled in domestic and International.

During 2014, **there is no** Share ownership from the members of the Board of Commissioners and Directors that reached ≥5% (five percent) of the paid-up capital.

2.8 Financial and family relationships with members of the Board of Commissioners and Directors

During 2014, **there is no** Financial and Family relationship between members of Commissioners and Director with other board's member of Commissioner, Director, and/or the controlling shareholders of Bank.

2.9 The Shares option owned by Commissioners, Directors, and Executive Officers

Shares Option is the option to buy stock by the Board's member of Commissioners, Directors, and Executive Officers through stock deals or offers stock options in the order awarding compensation provided to the Board's member of Commissioners, Directors, and Executive Officers of the Bank, and that already decided in General Meeting of Shareholders and/or The articles of Association.

The disclosure about Share Option, at least include:

- a) Policy in the grant of share Option
- b) The number of stock owned by each Board's member of Commissioners, Director and Executive Officer before being given the Share Option.

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- c) The number of Share Opinion that given
- d) The number of Share Opinion that has been executed until the end of reporting period
- e) The price of given option
- f) The validity period of execution the share Option

During 2014, **there is no** shares opinion referred to the letter b), c), d), e), and f) as the following table

Description/Name		The number of shares owned (sheets of stock)	Number of Option		The Price of Option (Rupiah)	Period of Time
			That Given (sheets of stock)	that has been executed (sheets of Stock)		
Commissioner	(name)					
Director	(name)					
Executive Officer	(Total)					
Total		(naught)	(naught)	(naught)	(naught)	(naught)

2.10 Buy Back Shares and/or Buy Back Bank Bonds

Buy Back shares or buy back bonds is an effort to reduce the number of stocks or bonds that have been issued the Bank to buy back stock or the bonds, that the payout procedures carried out in accordance with the applicable provisions.

The Disclosure the share buy back shares and/or buy back bonds at least include:

- a. Policy in the buy back shares and/or buy back bonds.
- b. The number of shares and/or bonds that are bought back.
- c. The purchase price of the returned material stock and/or bond
- d. The increase in earnings per share and/or bond

During 2014, **there is no** Buy Back Share and/or Buy Back Bank Bond that happened at PT Bank Mutiara Tbk.

2.11 Others Remuneration and Facility

A. Package/remuneration policy and other facilities for the Board of Commissioners and Directors

1. As follows
 - a. Remuneration in the form of non-natura, including salaries and income of other fixed, in the form of allowances (benefit), stock-based compensation, bonus, and form of other remuneration.
 - b. Other facilities in the form of natura/non natura i.e. not fixed income, including allowances for housing, transportation, health insurance, and other facilities, which can or can't have.
2. The disclosure package/remuneration policy referred to, include
 - a. Package/remuneration policy and other facilities for the members of Board of Commissioners and directors who set the Bank's General Meeting of Shareholders.
 - b. The type of remuneration and other facilities for all members of the Board of Commissioners and Directors, at least includes, number for Board's member of Commissioners, Directors, and the whole package/remuneration policy and other facilities, to 2014 as the following table

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

The type of Remuneration and other facilities	The amount received In 1 year *)			
	Boards of Commissioner		Director	
	Person	In Rupiah	Person	In Rupiah
1. Remuneration (salary, bonus, regular allowance, <u>tantien</u> , and other facilities in the form of non-natura)	4	2.953.617.000	5	5.461.721.318
2. Other facilities in form of <u>natura</u> (housing, transportation, health insurance, and so on) That **):	4	657.360.000 617.575.000	5	1.007.679.600 1.235.175.000
a. Can be owned (after the post)				
b. can Not be owned (D & O Vehicle Insurance)				
TOTAL	4	4.228.552.000	5	7.774.575.918
Description : *) Before Tax **) Assessed in equivalent Rupiahs				

- c. The number of Boards member of Commissioner and Director that received the remuneration package within one (1) year are grouped according to the income level for the year 2014 as the following :

(per person)

The amount of Remuneration per Person in 1 year *)	The number of Director	The number of Commissioner
Above Rp 2 Billion	-	-
Above Rp 1 billion s/d Rp 2 billion	3	-
Above Rp 500 million s/d Rp 1 billion	2	4
Under Rp 500 million	-	-
Description : *) Received in cash before tax		

B. The highest and lowest salary ratio

- a. **The salary** is earned and employee rights are expressed in the form of money as a reward from the company/employer to employees who set up and paid out according to an agreement, agreement, or the legislation, including allowances for employees and their families for a job and/or services which he has done.
- b. **The highest and lowest salary ratio**, in scale comparison of the following:
- The highest and lowest salary ratio of Employee
 - The highest and lowest salary ratio of Director
 - The highest and lowest salary ratio of Commissioner
 - The highest and lowest salary ratio of Director and Employee respectively

Salaries are compared in the salary ratio is the remuneration received by the Board's member of Commissioners, Director, and other employee every month.

The employee is a permanent employee of the bank until the limit.

The highest and lowest salary ratio at PT Bank Mutiara Tbk in 2014, as follows:

Type of Ratio	the magnitude of ratio
The highest and lowest salary ratio of Employee	19 X
The highest and lowest salary ratio of Director	1,11 X
The highest and lowest salary ratio of Commissioner	1,39 X
The highest and lowest salary ratio of Director and Employee respectively	2,16 X

CHAPTER III
COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF COMMITTEES' TASK PT BANK MUTIARA,
TBK

Committees Under the Board of Commissioners

In order to support the implementation of the duties and responsibilities, the Board of Commissioners PT Bank Mutiara, Tbk had formed committees under the Board of Commissioners required in terms of Good Corporate Governance with the arrangement of these committees, as follows:

- Audit Committee
- Risk Monitoring Committee
- Remuneration and Nomination Committee

All committees under the Board of Commissioners, chaired by an independent Commissioner who has no financial ties, management, ownership, and/or family relationship with the Board's member of Commissioners, Directors and/or controlling shareholders or the form of another relationship with the Bank that could affect its independence.

The implementation of committee's duties and responsibilities under the Board of Commissioners PT Bank Mutiara, Tbk refers to guidelines and Conduct of work of the Committee (Committee Charter) arranged by regulations in Indonesia especially Indonesia Bank Regulations/circular letter of Bank Indonesia on the implementation of Good Corporate Governance for commercial banks and Best Practices are reviewed periodically.

3.1 Audit Committee

The Audit Committee is a Committee established to support the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners' task. The Audit committee conducts monitoring and evaluation on the planning and execution of audit as well as follow-up monitoring of audit results in order to assess the adequacy of internal control including financial reporting process.

a. The Audit Committee Charter

The Audit committee has a Charter/Guidelines and Working rules of the Audit Committee (Audit Committee Charter) that regulates matters associated with the implementation of duty and responsibility, organization structure, terms of membership, authority, implementation of the meeting, service and honorarium. The Charter/Guidelines and Working rules of the Audit Committee periodically need to be assessed and evaluated adequate by the Board of Commissioners so that the function of the Audit Committee can be implemented at an optimal level.

b. The Structure and members of Audit Committee

During the year 2014, there are 2(two) times the change in the structure and membership of the Audit Committee. Based on the Decision Letter of the Directors No. 01.12/S. Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2014 on 01 July 2014, the structure and membership the Audit Committee, as follows:

1. Sigid Moerkardjono (President of Commissioner / Independent) : Chairman and member
2. Eko B. Supriyanto (Independent Commissioner) : Member
3. Sukoriyanto Saputro (Commissioner)* : Member

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

4. Didik Madiyono (Commissioner*) :Member
5. Yusuf Subianto (Independent Party) :Member/Secretary
6. Darmawan Effendi (Independent Party) :Member

Then based on Decision Letter of Directors No. 08/08/S. Kep-Dir-HCMD/Pearl/IX/2014 on September 08, 2014, then the structure and membership of the Audit Committee be changed to be as follows:

1. Sigid Moerkardjono (President of Commissioner / Independent) : Chairman and member
2. Eko B. Supriyanto (Independent Commissioner) : Member
3. Sukoriyanto Saputro (Commissioner*) :Member
4. Didik Madiyono (Commissioner*) :Member
5. Sudarmadji Henry Sutrisno (Independent Party) : Member/Secretary
6. Haryanto (Independent Party) :Member
7. Darmawan Effendi (Independent Party)**) :Member

*) Haven't take Fit & Proper Test

**) Membership expires on 20 September 2014

The Audit committee is chaired by an Independent Commissioner and its members is 1 (one) person Independent Commissioner, the other, 2 (two) other Commissioners (effective after passed the test of Fit and Proper Test by the FSA), 1(one) person Independent Party who are experts in the fields of accounting and finance and 1(one) independent party people who have expertise in the field of business and banking law. The appointment of the Chairman and Audit Committee's member name as mentioned above have met the Criteria set out in the Regulations of Bank Indonesia.

c. The quality of Education and Work Experience of Audit Committee Members

In general, the educational qualifications and work experience of Audit Committee members as follows:

- The Independent commissioners and parties who become the members of the Audit Committee at least 51% (fifty-one percent) of the Audit Committee.
- Members of the Audit Committee shall have high integrity, morals, moral, good, ability knowledge and experience of banking adequate, and able to communicate well.
- Have enough knowledge to read and understand bank financial statements.
- Have adequate knowledge about the laws and regulations related to the business activities of the bank.
- Have mental properties and ethics and professional responsibility.
- Keep the company information confidential.

More specifically, the educational qualifications and work experience The Audit Committee's member of PT Bank Mutiara Tbk can be outlined the following:

- Sigid Moerkardjono, as President of Audit Committee

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Bachelor of Economics majoring in Accounting at Gajah Mada University, Yogyakarta, Start a banking career since year 1976 until 1999 in the Bank with various assignments, namely Credit Analyst, Branch Manager, Regional Manager (1976-1999).

On the top level (strategic) many career in the fields of compliance, audit committee, risk monitoring committee, i.e as Compliance Director of PT Bank Niaga Tbk (1999-2000), The Commissioner and also as Chairman of the Audit Committee the risk Monitoring Committee/members/member of the Remuneration Committee and the nomination of PT Bank Niaga Tbk (2000-2007), Vice President Commissioner and also Risk Monitoring Committee Chairman/member of the Audit Committee and Remuneration Committee members/Nominations of PT Bank Niaga Tbk., the Audit Committee and Risk Monitoring Committee member of PT Bank SHORT BTPN (2007-2011).

- Eko B. Supriyanto, as Member of Audit Committee
The Management Sector of National Development University, Jakarta. Started his career as Director of the Research Bureau of Infobank and the person in charge/Vice Chief Editor of the magazine Infobank since 2000. Undergo a variety of careers in the field of research, communication consulting, public relations, among others, PT Indonesia Media Network (Director), the Board of ISEI Central (public Relations), The Forum Monetary and Banking policy (member), Project Risk Management Certification Agency (head of Research), Consumer Banking mapping against the 15 Largest Banks (head of Research), Consumer Loan Mapping against the 15 Largest Banks (head of Research), Credit Card Mapping to 10 Credit Card issuing Banks (head of Research).
- Sukoriyanto Saputo, as Member of Audit Committee
Bachelor of Argonomi Agriculture Institute, Bogor who graduated in 1980, started his career in banking since 1981 until 1999 in the Exim Bank with various assignment such as the leadership employee Credit, Head of Credit, Head of Credit section, Deputy head of branch, Head of Branch (1981-1999).
Subsequently he continued his career at Mandiri Bank from 1999 to 2013 with the title as Group Head of Corporate Secretary. Later he served as Director of PT Bank Mutiara, Tbk in January 2013 s. d June 2014.
- Didik Madiyono, as Member of Audit Committee
Bachelor of Economics, at Gajah Mada University majoring in Economics, Yogyakarta in 1989, and started his career at Duta Bank in 1989 s.d 1990. Then, continued his career at Bank Indonesia from 1991 s.d 2009 with his last position as a Researcher Senior Bank at the Directorate of Banking Research and regulation. Then in January 2010, his career in the Deposit insurance Agency as the Head of the Division handling the claim, and currently has served as Group Director of Resolution Bank Implementation. Subsequently, he was appointed to be a Commissioner at PT Bank Mutiara Bank Mutiara in June-July 2014. He has attended various professional trainings in the field of banking in the local and international level, organized by Bank Indonesia, OJK, PPATK, IADI, etc.
- Darmawan Effendi, as Member of Audit Committee
Achieved a law degree from the University of Gajah Mada in 1981, started a banking career since 1981 in Bapindo until 1999, then at Bank Mandiri until 2008. A variety of training regarding banking, business law, management and leadership has followed both domestic and internasional.
- Haryanto, as Member of Audit Committee

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Bachelor of Economics majoring in accounting at Gajah Mada University in 1981, a banking career began in 1974 in Bank Niaga until 1977 and in 1980 at Bank Indonesia's development until 1999, then at Mandiri Bank as of the year 2000, the next in the Bank since the year BTN 2005 until 2013. Concerned had attended various training professions in banking sector at local and international level, organized by the Indonesia Bank, bapindo, Alpia, PDCP Manila Philippines.

- Sudarmadji Herry Sutrisno, as Skretaris and Member of Audit Committee

Bachelor of Economics majoring in accounting at Gajah Mada University in 1978 and a master of management at Bandung Institute of technology in 1996. Started his career as a staff Assistant Director of finance at PT IPTN (now PT Dirgantara Indonesia) at Bandung from 1979 until 1981. A career in the profession of public accounting in public accountant affiliated International as well as local audit object with some regional development banks and financial institutions since 1990. Until the active history of teaching as a lecturer in the Faculty of Economics at Trisakti University for courses auditing and accounting information system.

d. Independence of the Audit Committee's member

All members of the Audit Committee has met Independent's criteria and integrity required. Members of the Audit Committee does not have a financial relationship, management, ownership, and/or family relations with other boards of Commissioner's members, Directors and/or Controlling Shareholders or relationships with the Bank, which can affects its ability to act independent.

e. The duties and responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee's task is to provide independent professional opinions to the Board of Commissioner's response to reports or matters submitted by Directors to the Board of Commissioners as well as identifying matters requiring the attention of the Board of Commissioners, include:

1. Make annual activity details approved by Board of Commissioners.
2. Monitoring over the preparation process of the financial statements by emphasizing so that standards and applicable accounting policy are met.
3. Examines and gives consent to financial statements to be issued by the company published mainly either in full or high lights such as financial reports, projections and other financial information, whether it is in compliance with the guidelines of the financial accounting standards and other applicable provisions and is it consistent with the other information that is known to the Members of the Audit Committee.
4. Conduct monitoring and evaluation over the planning and execution of audit and monitoring over the follow-up on audit results in order to assess the adequacy of internal control including the financial reporting process.
5. Monitoring and evaluation of:
 - The implementation of Internal Audit Working Unit and examine the adequacy of the Internal Audit Charter.
 - Compliance audit by public accountant audit standards in force.
 - The suitability of the follow-up by Directors upon the findings of Audit Work Unit Intern, public accounting, and bank Indonesia oversight results.
6. Provide recommendations regarding the appointment of public accountant to the Board of Commissioners to be submitted to the general meeting of shareholders.

7. Evaluating the obedience and compliance towards bank regulation and legislation in the field of capital market and other regulations related to the activities of the bank.
8. Provide input towards the proposal of appointment and dismissal of the head of Internal Audit Work Unit.
9. Make sure that all risks and controls note in the report of the Internal Audit and External Auditors, so that management always run a healthy banking practices in accordance with the principle of prudence.
10. Monitoring the process of Corporate Governance with make sure that all ranks of management has to cultivate Corporate Governance.
11. The Audit Committee is required to have a work that examined the guidelines (Audit Committee Charter) and updated whenever necessary.

f. The Meeting of Audit Committee

1. Committee meeting was held in accordance with the requirements of:
 - The Audit Committee meeting with the involvement of Internal Audit Unit at least done 1 (one) time in 3(three) months.
 - The Audit Committee meeting with the Board of Commissioners is made in accordance with the needs.
2. The Audit Committee meeting was attended by at least 51% of the total number of members including an independent Commissioner and can be attended by the Board of Commissioners who is not a member of the Audit Committee.
3. The Audit Committee meeting led by Chairman of the Audit Committee, and if the Chairman of the Audit Committee is chaired by meeting unable to attend , the meeting will be led by other designated and approved man by the chairman in the meeting of the Committee.
4. The decision of Committee meeting was conducted on the basis of deliberation to reach consensus.
5. In the event that is not the case consensus discussion, decision making is done on the basis of voting based on the sounds concur 2/3 (two thirds) of the Committee members who present at the meeting.
6. The results of committee meeting shall be set out in the minutes of meeting and properly documented.
7. The differences of opinion that occurs in the Committee meeting shall be clearly mentioned in the minutes of the meeting include the reason for such difference of opinion.

During the year 2014, the Audit Committee has held 18 (eighteen)times of meeting, which consist of the Audit Committee meeting with the SKAI, with the HOOD, Accounting, Legal, Asset Recovery, and Compliance Division.

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Frequency of meeting attendance rates each Member of the Audit Committee as follows:

Audit Committee	Meeting with	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Attendance Σ
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	August	Sept	Oct	Nov	Dec	
<u>Sigid Moerkardjono</u>	SKAI	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	12
	KAP	V		V							V			5
	UKL									V				1
<u>Eko B. Supriyanto</u>	SKAI	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		11
	KAP	V		V							V			5
	UKL									V				1
<u>Sukoriyanto Saputra</u>	SKAI						X	V	V	V	V	V	V	6
	KAP										V			1
	UKL									V				1
<u>Didik Madiyono</u>	SKAI						V	V	V	V	V	X		5
	KAP										V			1
	UKL									X				
<u>Yusuf Subianto</u>	SKAI	V	V	V	V	V	V	V	V					8
	KAP	V		V										4
	UKL													
<u>Darmawan Effendi</u>	SKAI													9
	KAP	V		V										4
	UKL													
<u>Haryanto</u>	SKAI									V	V	V	V	4
	KAP										V			1
	UKL									V				1
<u>Sudarmadji Harry Sutrisno</u>	SKAI									V	V	V	V	4
	KAP										V			1
	UKL									V				1
Description : V : Attend X : Absent														
SKAI: The Internal Audit unit KAP : Public Accountants UKL : Other Units														

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Name	Period Served	The Number of Meeting	Number in Attendance	% Attendance
<u>Sigid Moerkardjono</u> (President/Independent Commissioner)	1 January s/d 31 December 2014	18	18	100%
<u>Eko B. Supriyanto</u> (Member/Independent Commissioner)	1 January s/d 20 November 2014	17	17	100%
<u>Sukoriyanto Saputro</u> (Member/Commissioner)	9 June s/d 30 December 2014	9	8	88%
<u>Didik Madiyono</u> (Member/Commissioner)	9 June s/d 20 November 2014	8	6	75%
<u>Yusuf Subianto</u> (Member/Independent Party)	1 January s/d 7 September 2014	12	12	100%
<u>Darmawan Effendi</u> (Member/Independent Party)	1 January s/d 20 September 2014	13	13	100%
<u>Haryanto</u> (Member/Independent Party)	8 September s/d 31 December 2014	6	6	100%
<u>Sudarmadi Herry Sutrisno</u> (Member/Independent Party)	8 September s/d 31 December 2014	6	6	100%

I

g. The work program and realization of Audit Committee

The Work Program of Audit Committee

No.	Work Programme
1.	Coordinate with SKAI to review Audit Results reports (LHA), monitor or evaluate the audit planning and execution as well as the follow-up on audit results.
2.	Review KAP Audit Plan in 2014
3.	Review Draft Audit report Public Accountant in 2013
4.	Review SKAI Audit Plan in 2015
5.	Participate in The Boards of Commissioner and Director Meeting
6.	Review annual report
7.	Submit a report of the implementation of Audit Committee task in 2013
8.	Provide recommendation
9.	election/retain external auditors and dismiss to Board of Commissioners
10.	Review the unaudited publication financial report

The Realization Program of Audit Committee duties 2014

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

No.	Realization
1.	the monthly meeting with the Internal Audit Division/SKAI as many as 12 times, to review the annual Plan, implementation, reporting, follow-up and resolution of audit findings, the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process and important issues that need to get Boards of Commissioner attention
2.	Meetings with the Accounting Division in the course of supervision over the financial statements preparation process by emphasizing so that standards and applicable accounting policy are met
3.	Meeting with the public accountant as many as 5 times, related to the preparation of audits and audit results progress fiscal year 2013 by KAP in a series of monitoring and evaluation by the Committee to ensure the implementation of audit for fiscal year 2013 will accordance with the applicable auditing standards. then the determination of audit scope, the audit time table, and negotiations over the financial statements auditing honorarium Bank Mutiara fiscal year 2014
4.	Meeting with the Director and Division of Compliance to review the implementation of Director and Division of compliance duties, and the application of GCG implementation reports as well as self-assessment GCG
5.	Meeting with Legal Division to ensure proper handling of lawsuits and other legal issues has gone well and can protect the interests of the law
6.	Meeting with Asset Recovery Division related with the resolution of NPL multiple debtors problem
7.	Loan Review the debtor, the debtor's top collectability review report has done a review by SKAI, report delinquent interest above 2 months beyond sampling BI, and others

The focus of supervision:

- a. Review the results of Audit SKAI report
- b. Loan Review against the debtor that potentially problematic and has become.
- c. The selection of Public Accountant Office (KAP)
- d. Review SKAI work program
- e. The implementation of external auditor duties (audit plan & TOR)
- f. Monitoring the inspection result of BI & BPK

3.2 Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee is a committee that's being formed to help Board of Commissioners executing active monitoring in implementing risk management as the regulation of Bank Indonesia.

a. Risk Monitoring Committee Charter

Risk Monitoring Committee has a charter and working rules of risk management which manages things that are related to task execution and responsibility, organization structure, membership requirement, jurisdiction, meeting execution, tenure, and honorarium. Risk Monitoring Committee Charter needs a periodic evaluation and marking of adequacy by Board of Commissioners so the function of Risk Monitoring Committee can be held effectively.

b. Structure and Membership of Risk Monitoring Committee

During the year 2014, there are 2(two) times the change in the structure and membership of the Risk Monitoring Committee. Based on the Decision Letter of the Directors No. 01.13/S. Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2014 on 01 July 2014, the structure and membership the Risk Monitoring Committee, as follows:

1. Sigid Moerkardjono (President of Commissioner / Independent): Chairman and member

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- | | |
|---|-------------------|
| 2. Eko B. Supriyanto (Independent Commissioner) | : Member |
| 3. Sukoriyanto Saputro (Commissioner)*) | :Member |
| 4. Didik Madiyono (Commissioner)*) | :Member |
| 5. Yusuf Subianto (Independent Party) | :Member/Secretary |
| 6. Darmawan Effendi (Independent Party) | :Member |

Then based on Decision Letter of Directors No. 08/09/S. Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 on September 08, 2014, then the structure and membership of the Risk Monitoring Committee be changed to be as follows:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Sigid Moerkardjono (President of Commissioner / Independent) | : Chairman and member |
| 2. Eko B. Supriyanto (Independent Commissioner) | : Member |
| 3. Sukoriyanto Saputro (Commissioner)*) | : Member |
| 4. Didik Madiyono (Commissioner)*) | : Member |
| 5. Sudarmadji Henry Sutrisno (Independent Party) | : Member/Secretary |
| 6. Haryanto (Independent Party) | : Member |
| 7. Darmawan Effendi (Independent Party)**) | : Member |

*) Haven't take Fit & Proper Test

***) Membership expires on 20 September 2014

The Risk Monitoring committee is chaired by an Independent Commissioner and its members is 1 (one) person Independent Commissioner, the other, 2 (two) other Commissioners (effective after passed the test of Fit and Proper Test by the FSA), 1(one) person Independent Party who who are experts in the fields of accounting and finance and 1(one) independent party people who have expertise in the field of business and banking law. The appointment of the Chairman and Risk Monitoring Committee's member name as mentioned above have met the Criteria set out in the Regulations of Bank Indonesia.

c. Education Qualification and Working Experience of Risk Monitoring Committee Member

- Sigid Moekardjono, as President of Risk Monitoring Committee
Education qualification and working experience as outlined above
- Eko B. Supriyanto, as Member of Risk Monitoring Committee
Education qualification and working experience as outlined above
- Sukoriyanto Saputro, as Member of Risk Monitoring Committee
Education qualification and working experience as outlined above
- Didik Madiyono, as Member of Risk Monitoring Committee
Education qualification and working experience as outlined above
- Darmawan Effendi, as Member of Risk Monitoring Committee
Education qualification and working experience as outlined above
- Haryanto, as Member of Risk Monitoring Committee
Education qualification and working experience as outlined above
- Sudarmadji Herry Sutrisno, as Member of Risk Monitoring Committee
Education qualification and working experience as outlined above

d. Independency of Risk Monitoring Committee Members

The whole Risk Monitoring Committee members do not have a financial relationship, management, ownership, and/or family relations with members of the Board of

Commissioners, Director and/or Controlling Shareholders or relation with bank, that could affect its ability to act independently.

e. The duties and responsibility of Risk Monitoring Committee

As an organ established to assist the Board of Commissioners in conducting supervision to active application of managing risk, Risk Monitoring Committee has duties and responsibilities as follows:

1. Evaluate the risk management policy is proposed by Directors to obtain the approval of Board of Commissioners.
2. Evaluate the accountability of Directors to the Board of Commissioners on implementation of the risk management policy.
3. Conduct monitoring and evaluation over the alignment of risk management policies with the implementation of the policy.
4. Conduct monitoring and evaluation the implementation of Committee task on risk management and risk management Work Unit, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.
5. Evaluating the obedience of the Bank against the regulations and laws issued in the field of risk management and other legislation related to the activities of the Bank.
6. Provide input and recommendations to the Board of Commissioners to provide advice to Directors over the information and/or events which identified potential or contain risk.
7. Evaluate and research deemed necessary towards the implementation of the Directors function in the management of risk.
8. Evaluate the application or proposal that asked Directors to the Board of Commissioners relating to the transaction or business activity that is beyond the authority of Directors to decide, so require the approval of the Board of Commissioners.
9. Ensure continuous improvement of risk management policy, implementation procedures and management practices at all levels within the Bank to ensure he has done managing the Bank's risk control.
10. Carry out other duties to assist Board of Commissioners in carrying out the authority and responsibilities associated with the implementation of risk management.

f. The Meeting of Risk Monitoring Committee

1. Risk Monitoring Committee meeting was held in accordance with the Bank needs.
2. Meetings with the working Unit involving risk management is done at least 1 (one) time in 3 (three) months.
3. Risk monitoring committee meeting attended by at least 51% of the total number of members, including one independent Commissioners and independent parties and can be attended by the Board of Commissioners.
4. Risk monitoring committee meeting led by the Chairman of the Committee Monitoring risk, and if the Risk Monitoring Committee Chairman was unable to attend, meetings led by other Committee members appointed and approved in the meeting of the Committee
5. Risk Monitoring Committee meeting was conducted on the basis of deliberation to reach consensus
6. In the event that is not the case consensus discussion, decision making is done on the basis of voting based on the sounds concur 2/3 (two thirds) of the Committee members who present at the meeting.

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

7. The results of committee meeting shall be set out in the minutes of meeting and properly documented.
8. The dissenting opinions that occurs in the Committee meeting shall be clearly mentioned in the minutes of the meeting include the reason for such difference of opinion.

During 2014, The Risk Monitoring Committee meeting had held as many as 12 (twelve) times, the frequency of meeting attendance rates of each Member, as follows:

Risk Monitoring Committee	Meeting With	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total of Attendance Σ
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	
<u>Sigid Moerkardjono</u>	RMD	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	12
<u>Ekob. Supriyanto</u>	RMD	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		11
<u>Sukorivanto Saputra</u>	RMD									V	V	V	X	3
<u>Didik Madiyono</u>	RMD									V	V			2
<u>Yusuf Subianto</u>	RMD	V	V	V	V	V	V	V	V					8
<u>Darmawan Effendi</u>	RMD	V	V	V	V	V	V	V	V	V				9
<u>Harvanto</u>	RMD									V	V	V	S	3
<u>Sudarmadji Herry Sutrisno</u>	RMD									X	V	V	V	3
Description: V : Attendance X : Absent S : Sick <div style="text-align: right;">RMD : Risk Management Division</div>														

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Name	Period Served	The Meeting Number	The number of Attendance	% Attendance
<u>Sigid Moerkardiono</u> (President/Independent Commissioner)	1 January s/d 31 December 2014	12	12	100%
<u>Eko B. Supriyanto</u> (Member/Independent Commissioner)	1 January s/d 20 November 2014	11	11	100%
<u>Sukorivanto Saputro</u> (Member/Commissioner)	9 June s/d 30 December 2014	4	3	75%
<u>Didik Madiyono</u> (Member/Commissioner)	9 June s/d 30 December 2014	2	2	100%
<u>Yusuf Subianto</u> (Member/Independent Party)	1 January s/d 7 September 2014	8	8	100%
<u>Darmawan Effendi</u> (Member/Independent Party)	1 January s/d 20 September 2014	9	9	100%
<u>Haryanto</u> (Member/Independent Party)	8 September s/d 31 December 2014	4	3	75%
<u>Sudarmadji Herry Sutrisno</u> (Member/Independent Party)	8 September s/d 31 December 2014	4	3	75%

g. The Work Program of Risk Monitoring Committee

In 2014, Risk Monitoring Committee has a work programme, as follows:

1. The discussion of Risk Profile report with the Risk Management Division
2. Monitor and evaluate the implementation of risk management Committee and Division.
3. Participate in Boards of Commissioner & Director meeting
4. Evaluate the risk management policy of PT Bank Mutiara, Tbk (when needed)
5. Evaluate the risks arising based on 8 types of risk in cases that occurred.
6. The implementation of Risk Monitoring Committee report in 2013
7. Compose the work plan of Risk Monitoring Plan in 2014

h. Realization/ Implementation Work Program of Risk Monitoring Committee's duties

Risk Monitoring Committee work program in 2014 has been realized with explanation/implemented, as follows:

1. In 2014, the meetings have been held with Risk Management Division as many as 12 times. In the meeting of the Internal Audit Division also were invited to discuss monthly risk profile while performing the evaluation of conformity between risk management Policies with implementation and evaluation of Committee task on risk management (KMR) and the Risk Management Division (RMD). Besides that, to emphasize the monitoring of credit risk, at each meeting monthly also presented about the credit portfolio and the Bank Mutiara's NPL.
2. Work program concerning the evaluation of risk management policy implementation and a discussion of the risks which arise on the basis of 8 types of risks, Discussed in Committee meeting which produced conclusions and recommendations regarding, among other things as follows:

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- The increase in consumer credit, the development of micro-credit, repair, manufacturing quality standard analysis, credit documentation, credit approval, structure determination of collectability credit.
 - Standardization of the new organizational structure of PT Bank Mutiara, Tbk, the implementation of PSAK NO. 50-55, the influence of economic conditions over the drop in the bank's risk profile ratings
 - DPK Composition Trouble
 - Must do a stress test, efforts to decrease the level of 8types of risk inherent in applying the quality improvement and risk management.
 - Good reporting compliance regarding the accuracy of the submission and accuracy reporting content
 - etc
3. Risk Monitoring Committee has followed and participated in the Directors and Board of Commissioners meeting in 2014 as many as 12 times.

3.3 Remuneration and Nomination Committee

Remuneration and Nomination Committee is a Committee established to assist the Board of Commissioners undertakes the supervision of nomination and remuneration policy in accordance with the regulations of Bank Indonesia and Bapepam-LK/OJK.

a. Remuneration and Nomination Committee Charter

Remuneration and Nomination Committee has Remuneration and Nomination Committee Charter that are related to duties and responsibilities, terms of membership, meetings, service implementation and reporting. Remuneration and Nomination Committee Charter needs a periodic evaluation and marking of adequacy by Board of Commissioners so the function of Remuneration and Nomination Committee can be held effectively.

b. Remuneration and Nomination Committee Structure and Membership

During the year 2014, there are 3(three) times the change in the structure and membership of Remuneration and Nomination Committee. Based on the Decision Letter of the Directors No. 09.10/S. Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VI/2014 on 09 June 2014, the structure and membership the Risk Monitoring Committee, as follows:

1. Eko B. Supriyanto (Independen Commissioner) : Chairman
2. Sigid Moerkardjono (Independent Commissioner President) :Member
3. Sukoryianto Saputro (Commissioner*) : Member
4. Didik Madiyono (Commissioner*) : Member
5. Pahot Hustasoit (Division Head of Human Resources Department) : Member/
Secretary

Based on Decision Letter of Directors No. 04.01/S. Kep-Dir-HCMD/Mutiara/VII/2014 on August 04,2014, then the structure and membership of Remuneration and Nomination Committee be changed to be as follows:

1. Eko B. Supriyanto (Independen Commissioner) : Chairman
2. Sigid Moerkardjono (Independent Commissioner President) :Member
3. Sukoryianto Saputro (Commissioner*) : Member
4. Didik Madiyono (Commissioner*) : Member
5. Danni T. Suryani (EVP Human Capital) : Member

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

6. Pahot Hustasoit (Division Head of Human Resources Department) : Member/
Secretary

Then based on Decision Letter of Directors No. 01.04/01/S.Kep-Dir-HCMD/Mutiara/IX/2014 on September 01, 2014, then the structure and membership of Remuneration and Nomination Committee be changed to be as follows:

1. Eko B. Supriyanto (Independent Commissioner) : Chairman
2. Sigid Moerkardjono (Independent Commissioner President) : Member
3. Sukoryianto Saputro (Commissioner)*) : Member
4. Didik Madiyono (Commissioner)*) : Member
5. Pahot Hustasoit (Division Head of Human Resources Department) : Member/
Secretary

*) Haven't take Fit and Proper Test

Before, Remuneration and Nomination Committee is chaired by Board of Independent Commissioner and Remuneration and Nomination Committee members and its members is an Independent Commissioner, 2(two) others Commissioner ((effective after passed the test of Fit and Proper Test by the FSA), and an Executive Officer who includes the human resources field. However since November 20, 2014 (resolutions of EGM) an Independent Commissioner as President referred to resign so that for a time the position of remuneration Committee Chairman and the nomination is vacant.

c. Education Qualification and Working Experience of Remuneration and Nomination Committee

- Eko B. Supriyanto, as Remuneration and Nomination Committee Chairman
Education qualification and working experience as outlined above
- Sigid Moerkardjono, as Remuneration and Nomination Committee Member
Education qualification and working experience as outlined above
- Didik Madiyono, , as Remuneration and Nomination Committee Member
Education qualification and working experience as outlined above
- Pahot Hutasoit, , as Remuneration and Nomination Committee Member
Education qualification and working experience as outlined above

d. Independency of Remuneration and Nomination Committee Members

The whole Remuneration and Nomination Committee members do not have a financial relationship, management, ownership, and/or family relations with members of the Board of Commissioners, Director and/or Controlling Shareholders or relation with bank, that could affect its ability to act independently.

e. The duties and responsibility of Remuneration and Nomination Committee

Remuneration and Nomination Committee do their duties in order to support the implementation of Boards of Commissioner duties and responsibility. The duties and responsibility of Remuneration and Nomination Committee, as follows:

1. Related with Remuneration Policy
 - Evaluate Remuneration policy

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors to set aside to the general meeting of shareholders
 - provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for Executive officer and employee overall for submitted to Directors
2. Related with Nomination Policy
- Compose and Provide recommendations about the system as well as the procedure of selection and/or replacing members of the Board of Commissioners and Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the general meeting of shareholders.
 - Provide recommendation about the next member of Board of Commissioner and Director to Board of Commissioner to be submitted to the general meeting of shareholders.
 - Provide recommendation about Independent party that will become Remuneration and Nomination Committee Member.
3. The committee shall ensure that:
- Remuneration policy in accordance with the financial performance and fulfillment of reserves as set forth in applicable laws and regulations
 - Remuneration policy in accordance with the achievement of individual performance
 - Remuneration policy in accordance with the reasonableness of a peer group
 - Remuneration policy in accordance with Consideration of objectives and long-term strategy of the bank
- f. Remuneration and Nomination Committee Meeting
- 1) Committee meetings are held as needed Bank
 - 2) Remuneration and Nomination Committee Meeting attended by at least 51% of the total number of members, including one independent Commissioners and Executive Officer.
 - 3) The decision making of Committee meeting done based on discussion and consensus
 - 4) In this case, there is no deliberation and consensus, then the decision is made by majority vote.
 - 5) The results of committee meeting shall be set out in the minutes of meeting and properly documented.
 - 6) The Dissenting Opinions that occur in the Committee meeting shall be clearly mentioned in the minutes of the meeting include the reason for such difference of opinion.

During 2014, Remuneration and Nomination Committee meeting had held as many as 10 (ten) times, the frequency of meeting attendance rates of each Member, as follows:

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Name	Period Served	The Meeting Number	The Number of Attendance	%Attendance
<u>Eko B. Supriyanto</u> (Member/Independent Commissioner)	1 January s/d 20 November 2014	10	10	100%
<u>Sigid Moekardjono</u> (Member/Independent Commissioner)	1 January s/d 31 December 2014	10	10	100%
<u>Sukoriyanto Saputro</u> (Member/Commissioner)	9 June s/d 30 December 2014	4	4	100%
<u>Didik Madiyono</u> (Member/Commissioner)	9 June s/d 30 December 2014	4	4	100%
<u>Pahot Hutasoit</u> (Member/Executive Officer)	1 January s/d 31 December 2014	10	9	90%

Remuneration and Nomination Committee	Meeting With	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Attendance Σ
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	
<u>Eko B. Supriyanto</u>	HCMD		VV	V	V	V	VVV	V				V		10
<u>Sigid Moekardjono</u>	HCMD		VV	V	V	V	VVV	V				V		10
<u>Sukoriyanto Saputro</u>	HCMD						VV	V				V		4
<u>Didik Madiyono</u>	HCMD						VV	V				V		4
<u>Pahot Hutasoit</u>	HCMD		VV	V	V	V	VVV	X				V		9
Description: V : Attendance X : Absent S : Sick <div style="text-align: right;">HCMD : Human Capital Management Division</div>														

g. Remuneration and Nomination Work Program

In 2014, Remuneration and Nomination Committee has a work program, as follows:

1. Compose the remuneration and nomination plan of PT Bank Mutiara Tbk
2. To evaluate and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for directors, executive officers, and Commissioners by 2014 to submitted to the General Meeting of Shareholders
3. Develop and provide recommendations regarding election procedures and systems and/or replacing members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders
4. Review / Evaluate the implementation of Remuneration Policy

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

5. Review/Evaluate about the achievement of KPI Director in 2013 and proposed KPI in 2014 for the next reported to the Board of Commissioners and delivered to the shareholders
 6. Regular meeting with Human Resources Department (HRD)
 7. Submit the Implementation Remuneration and Nomination Committee report in 2013
 8. Compose Remuneration and Nomination Committee work plan in 2015
- h. Realization/ Implementation Work Program of Remuneration and Nomination's duties
Remuneration and Nomination Committee work program by 2014 has been realized with explanation/implemented, as follows:
- 1) The meetings have been held as many as 10 (ten) times with Human Capital Management Division
 - 2) Remuneration and Nomination Committee work plan, discussed in the meetings of the Committee which produced conclusions and recommendations regarding, among other things as follows:
 - Discussed the proposed remuneration and facilities President director and Director
 - Discussed KPI Director for 2014
 - Evaluate Director Performance 2014 in form of KPI
 - Review performance of the remuneration and appreciation of the Board of Directors and Commissioner
 - Discussed the repair of Human Resources Mutiara Bank program
 - Discussed the training program, along with its development.
 - Discussed the changes officialsat HCMD
 - Etc

Committees under Director

To be able to identify and manage all types of risks faced by the Bank in addition to the work done by unit/Risk Management Division Risk Monitoring Committee and form which is at the level of the Board of Commissioners, so Director of PT Bank Mutiara Tbk also have set up committees Under Directors in accordance with the organizational structure of that Act provide guidance/advice/recommendations on policy and conduct oversight of risk management against the Bank. The recommendations of each Committee be a reference in the decision making process.

Committee under Director of PT Bank Mutiara Tbk met by Director Member. The composition of Committee membership is structured in accordance with the complexity of the Committee tasks and responsibilities. As follows:

1. Risk Committee

Structure and Membership

The risk management Committee is a Committee within the Bank's risk management systems are non-structural, based in the Central Office that formulates policies, oversee implementation of policies, monitoring developments and the conditions of the profit risk as well as to give advice and measures improvements in forum meetings held at least 1 (one) times a quarter. The establishment of this Committee is based on the provisions of Bank Indonesia concerning the application of risk

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

management For commercial banks. In the implementation, the Committee formed a risk management Committee with the principal task of the Sub respectively. As for the Sub Committees referred are: Credit Risk Committee and Operational Risk Committee.

Based on Decision Letter of Directors No. 01.17/S.Kep-Dir-RMD/Mutiara/IX/2014 on September 01,2014, Structure and Membership of Risk Management Committee as follows:

1. Risk Management Committee Membership Structure

Chairman : President director

Vice President : Compliance and Legal Director

Secretary : Head of Risk Management division

1) Voting Member

a. Permanent Voting Member

- President director
- Treasury & Institutional Banking Director
- Compliance and Legal Director
- Micro& Consumer Business EVP/Director

b. Non-Permanent Voting Member

- Small & Medium Business EVP
- Finance & Operation EVP
- Special Asset Management EVP
- Distribution Network EVP
- Human Capital EVP

2) Contributing Non-Voting Member

a. Contributing Permanent Non-Voting Member

- Internal Audit Division Head
- Compliance Division Head
- Legal Division Head
- Accounting Division Head
- Operation Division Head
- Planning Performance Management Division Head
- Corporate Secretary Division Head
- Risk Management Division Head

b. Contributing Non-Permanent & Non- Voting Member who attend appropriate linkages with the agenda/topics

- The head of the regional office and Division related to the material into discussion agenda of Committee meeting.

Duties and Responsibility

Risk Management Committee's duties and responsibility provides recommendation to President director, at least include:

- Compose Risk Management Policy, Strategy, and applicable guidelines
- Improvements or refinements to the implementation of risk management based on the results of implementation evaluation.
- The determination of matters related to business decisions that deviate from the normal procedure

The Implementation of duties and Meeting Frequently

During 2014, Risk Management Committee has been held 7 (seven) times of meeting and done many work plan that discuss the agenda as follows:

No.	Date	Discussion Agenda
1.	13 March 2014	The justification matters related to decision/plan business decisions to deviate from the normal procedure, in the form of All-purpose credit granting (KSG) to 1 (one) the debtor
2.	17 March 2014	The draft SOP execution of credit quality assessment
3.	19 March 2014	Meeting of BWMK changes related with Director changes and additions to EVP, requests for attestation of Directors upon Revision PPK 2011 special Article 221-BWMK (4 Revision), Article 222-BWMK trouble credit (2 Revision), Chapter II Article 230 about the authority (3 Revision)
4.	11 April 2014	Proposed manual changes to the credit product Executing <u>Multifinance</u> , proposed changes to product Manual KKS-KKB
5.	21 July 2014	The quarterly risk profile report III/June 2014
6.	30 September 2014	The implementation of Safety Level on Liquidity Contingency Plan
7.	16 October 2014	The quarterly risk profile report III/September 2014

2. Asset & Liability Committee (ALCO)

In accordance with the provisions of bank Indonesia, where banks form the Asset & Liability Committee (ALCO) the magnitude of the organization adapted to the complexity of the Bank, Asset & Liability Committee (ALCO) is a Committee that responsible set interest rate policy and strategies for the management assets and liabilities of the Bank based on the principle of prudence and according to applicable provisions.

ALCO Membership Structure

Chairman : President director

Vice President : Treasury & Institutional Banking Director

Secretary : Head of Treasury Division

1) Voting Member

a. Permanent Voting Member

- President director
- Treasury & International banking Director
- Micro & Consumer Business EVP/Director
- Distribution Network EVP

b. Non-Permanent Voting Member

- Small & Medium Business EVP
- Finance & Operation EVP
- Special Asset Management EVP
- Human Capital EVP

2) Contributing Non-Voting Member

a. Contributing Permanent Non-Voting Member

- Director Compliance & Legal
- Multi Finance Division Head
- Consumer Business Division Head
- Product & Network Division Head

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- Retail & Corporate Funding Division Head
 - Medium Business Division Head
 - Small Business Division Head
 - Micro Business Division Head
 - Institutional Banking Division Head
 - Risk Management Division Head
 - Compliance Division Head
- b. Contributing Non-Permanent & Non-Voting member who attend attend appropriate linkages with the agenda/topics
- Accounting Division Head
 - Planning Performance Division Head
 - Legal Division Head
 - The Regional Office Head associated with the material into the deliberations of the Committee meeting agenda

Duties and Responsible

Asset & Liability Committee (ALCO) has main duties, as follows:

- Reviewing the policies and strategies of Asset Liability Management, the management of liquidity risk, interest rate Risk in the Banking Book, the risk of exchange rate, and Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) trouble.
- Phased over pricing (pricing) of assets and liability to ensure pricing can be optimized the results of planting Fund, minimizing the cost of funds, and keeping the company's balance sheet structure, according to the company's ALM strategy.
- Phased assignment limit for Banking Book
- ALCO also reviewed policies, procedures and related risk limit setting of interest rates in the trading book

The implementation of duties and Meeting Frequently

During 2014, Asset & Liability Committee (ALCO) has been held 12 (twelve) times of meeting and done many work plan that discuss the agenda as follows:

No.	Date	Discussion Agenda
1.	10 January 2014	Economy Outlook in Indonesia, the current Liquidity, Review the realization of Net Interest Margin (NIM), the determination of the NIM in the period the month already underway, Determination of Fund Transfer (FTP), interest rates of third party Funds in Rupiah and foreign currency, interest rate credit assignment
2.	12 February 2014	Economy Outlook in Indonesia, the current Liquidity, Review the realization of Net Interest Margin (NIM), the determination of the NIM in the period the month already underway, Determination of Fund Transfer (FTP), interest rates of third party Funds in Rupiah and foreign currency, interest rate credit assignment
3.	11 March 2014	Economy Outlook in Indonesia, the current Liquidity, Review the realization of Net Interest Margin (NIM), the determination of the NIM in the period the month already underway, Determination of Fund Transfer

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

		(FTP), interest rates of third party Funds in Rupiah and foreign currency, interest rate credit assignment
4.	11 April 2014	Economy Outlook in Indonesia, the current Liquidity, Review the realization of Net Interest Margin (NIM), the determination of the NIM in the period the month already underway, Determination of Fund Transfer (FTP), interest rates of third party Funds in Rupiah and foreign currency, interest rate credit assignment
5.	12 May 2014	Economy Outlook in Indonesia, the current Liquidity, Review the realization of Net Interest Margin (NIM), the determination of the NIM in the period the month already underway, Determination of Fund Transfer (FTP), interest rates of third party Funds in Rupiah and foreign currency, interest rate credit assignment
6.	12 June 2014	Economy Outlook in Indonesia, the current Liquidity, Review the realization of Net Interest Margin (NIM), the determination of the NIM in the period the month already underway, Determination of Fund Transfer (FTP), interest rates of third party Funds in Rupiah and foreign currency, interest rate credit assignment
7.	22 July 2014	Economy Outlook in Indonesia, the current Liquidity, Review the realization of Net Interest Margin (NIM), the determination of the NIM in the period the month already underway, Determination of Fund Transfer (FTP), interest rates of third party Funds in Rupiah and foreign currency, interest rate credit assignment
8.	14 August 2014	Economy Outlook in Indonesia, the current Liquidity, Review the realization of Net Interest Margin (NIM), the determination of the NIM in the period the month already underway, Determination of Fund Transfer (FTP), interest rates of third party Funds in Rupiah and foreign currency, interest rate credit assignment
9.	10 September 2014	Economy Outlook in Indonesia, the current Liquidity, Review the realization of Net Interest Margin (NIM), the determination of the NIM in the period the month already underway, Determination of Fund Transfer (FTP), interest rates of third party Funds in Rupiah and foreign currency, interest rate credit assignment
10.	21 October 2014	Economy Outlook in Indonesia, the current Liquidity, Review the realization of Net Interest Margin (NIM), the determination of the NIM in the period the month already underway, Determination of Fund Transfer (FTP), interest rates of third party Funds in Rupiah and foreign currency, interest rate credit assignment
11.	11 November 2014	Economy Outlook in Indonesia, the current Liquidity, Review the realization of Net Interest Margin (NIM), the determination of the NIM in the period the month already underway, Determination of Fund Transfer (FTP), interest rates of third party Funds in Rupiah and foreign currency, interest rate credit assignment
12.	10 December 2014	Economy Outlook in Indonesia, the current Liquidity, Review the realization of Net Interest Margin (NIM), the determination of the NIM in the period the month already underway, Determination of Fund Transfer

	(FTP), interest rates of third party Funds in Rupiah and foreign currency, interest rate credit assignment
--	--

3. IT Steering Committee

IT Steering Committee has a function assist the Directors in formulating and setting the strategic plan of the dam policy in each stage of the information technology use systems since the process of planning, procurement, development, operational, Maintenance until termination and removal of information technology resources, to improve the effectiveness and efficiency of data processing activities PT Bank Mutiara Tbk so that it can give results that are correct, accurate, timely, and can guarantee the confidentiality of information.

Structure and Membership

According with the organization structure change of PT Bank Mutiara, Tbk, then followed by changes in the structure and membership of the appropriate IT Steering Committee decision letter of Director No. 26.06/S.Kep-Dir-ITD/Mutiara/VIII/2014 on August 26,2014, as follows:

IT Steering Committee Membership Structure

- 1) Chairman and Member : Finance & Operation EVP
- 2) Secretary and Member : Information Technology Division Head
- 3) Members
 - Micro & Consumer Business EVP/Director
 - Small & Medium Business EVP
 - Distribution Network EVP
 - Risk Management Division Head
 - Operation Division Head
 - Compliance Division Head
 - Accounting Division Head
 - Procurement & Fixed Asset Division Head

Duties and Responsibility

In essence, The IT Steering Committee was formed with the objectives, as follows:

- 1) Provides recommendation to Director that related with Information Technology Strategy Plan that in line with the strategic plan business activities of PT Bank Mutiara, Tbk
- 2) Provides recommendation to Director that related with conformity of information technology with the management information system and business activities needs of PT bank Mutiara, Tbk
- 3) Provides recommendation to Director that related with the suitability of the information technology projects that are approved by the information technology strategic plan has been created by PT bank Mutiara, Tbk and also set the priority status of information technology projects as well as critical in nature (impact significantly to the Bank's operational activities)
- 4) Regularly Review and Evaluate about the implementation of information technology project that done to ensure alignment with the original plan.
- 5) Provides recommendation to Director that related with the alignment of the implementation of information technology projects with an agreed project plan.

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- 6) Provides recommendation to Director that related with the effectiveness of measures to minimize the risk on Investment Bank on information technology sector so that such investment contributes to the achievement of the bank's business objectives.
- 7) Provides recommendation to Director that related with supervision and monitoring activities over the performance of information technology and the increased effort
- 8) Assist the Directors in determining the application of the principles of the system of supervision and safeguards against the use of the systems and applications that contain high risk, in particular regarding database technology, micro-computers, and data communication
- 9) Provides recommendation to Director that related with Settling various problems related information technology, which cannot be solved by unit users and organizers effectively, efficiently, and on time
- 10) Assist the Directors in setting policy in the use of information technology to suit your needs and financial capabilities of PT Bank Mutiara, Tbk
- 11) Assist the Directors in defining the management controls that include planning, determination of wisdom, standards and procedures, as well as organizations related to the use of information technology at PT Bank Mutiara, Tbk
- 12) Assist the Directors in setting control system of information technology application that will be used include the procurement, development, operation, and maintenance.
- 13) Provides recommendation to Director that related with assign vendor-related organization of information technology was handed over to third parties, where necessary
- 14) Do the analysis of the proposed development and/or purchase the application/software submitted by the End User/work Unit.
- 15) The analysis is at number 14) above at least consist of:
 - The development and/or purchase purpose
 - The level of demand and the bank interest to undertake the development and/or purchase.
 - Conformity with the annual work plan of the Bank
 - Security features and control that is contained on the software, hardware and communication network.
 - Maintenance and support from vendor Party
 - Aspects of the costs and benefits
 - Adequacy of policies and procedures in implementing information technologies by third parties
- 16) Make recommendations to the Directors as a result of the analysis process is done
- 17) Coordinate and deliver to the related units concerning information technology strategic plan that supports the activities of the Bank's business strategy, which was spelled out in the business plan of the Bank.
- 18) Analysis on the development and changes of technology information system especially in banking.

The Implementation of duties and Meeting Frequently

During 2014, IT Steering Committee has been held 7 (seven) times of meeting and done many work plan that discuss the agenda as follows:

**Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)**

No.	Date	Discussion Agenda
1.	17 January 2014	S1 Maintenance in 2014
2.	17 April 2014	1) Application of LOS and consumer Micro 2) Internet Banking & Core interface 3) Maintenance Hardware Security Internet Banking 4) Hardware to Web Teller 5) Project IT Progress
3.	24 July 2014	1) the Project Upgrades Core Banking Status 2) Project PSAK-migration status of CBS to Bank Vision 3) Professional Billing Service Misys 4) etc
4.	29 August 2014	1) PSAK project status, as follows: a. CBS Migration to Vision Bank b. PD/LGD, Migration of the Loan Equation to the Bank Vision and PSAK 2) Bill Misys over excess fixed income transaction
5.	7 November 2014	1) Upgrade Core Banking 2) Virtual Private Network (VPN) Connection 3) Human Resource Application
6.	24 November 2014	changes to schedule upgrades Core Banking
7.	30 December 2014	1) Host Security Module 2) Email Microsoft Exchange

4. HR Committee

Structure and Membership

Based on the decision letter of Director No. 01.03/S.Kep-DIR-HCMD/Mutiara/IX/2014 on September 01, 2014, Structure and Membership of HR Committee, as follows:

HR Committee Membership Structure

Chairman : President director

Member : Treasury & Institutional Banking Director

Micro & Consumer Business Director

Compliance & legal Director

Human capital EVP

Human capital Division Head

Duties and Responsible

In essence, HR Committee was formed with the purpose to provide recommendation to Director that related with strategic plan regarding employment that in line with the bank's business activities strategic plan, among others:

- The Human resources (HR) need according the needs of bank business activities
- Training needs in order to increase knowledge, skills, and insights into the development of all employees
- Monitoring of the top performing employees associated with reward and punishment
- Monitoring and completion of various employment issues in accordance with the provisions and regulations
- Implementation of administrative and governance related to employment that is safe and good

The implementation of duties and Meeting Frequently

During 2014, HR Committee has been held 12 (twelve) times of meeting and done many work plan that discuss the agenda as follows:

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

No.	Date	Discussion Agenda
1.	10 March 2014	Proposal of mutations and the promotion of the leadership of the Branch; The Proposed Division Head Credit/SLD
2.	20 March 2014	The proposed MORTGAGE solicitation of employees; the results of the evaluation of the employee's employment contract; The proposed Retirement of employees
3.	25 March 2014	Proposal of mutation and promotion in the credit Division/MLD and SLD; Facilities vehicle for Commissioners, Board of Directors EVP; increase Job Grade increments; the results of assessment are not the only consideration for promotion
4.	8 April 2014	Appointment Of Personnel Banking Outlet Manager; The proposed promotion/mutations in branches/Capem/cash
5.	23 May 2014	The Proposed Caretaker Leadership Capem Medan Asia; Proposed Dept. Head and adjusting salaries Dept. Head; The proposed organizational structure of Micro
6.	26 August 2014	The formation NPL and OEP Team; EVP Human Capital Formation; the proposed promotion to Division Dept. Head, as well as Mutations Dept. Head; Adjustment of the entire SK Directors about Committee; Review the return and follow-up Audit Committee who has exceeded the time of work; Extend the term of the credit Division Chief caretaker/CLD (6 months); Termination of employment contract the leadership Branch
7.	7 September 2014	Head of SKAI Division & Corporate Secretary changes; replacement Pimcab Yogya and Depok; Facilities vehicle for officials who placed on efficiency team; discussion the results of the consideration of the settlement of the Employees
8.	25 September 2014	The proposal of cooperation's Financial Institution Pension Fund for the retirement program
9.	22 October 2014	Proposed Dept. Head; Remuneration and allowances Division line of Micro
10	5 November 2014	The proposed candidate Compliance Division Head; Proposal of candidates/promotions Dept. Head; Duplicate assignments for the leadership of the branch of Kemang and Kuningan; Human Capital strategy against officials who did not join
11	24 November 2014	The proposed candidate head of the Division of Compliance; Proposal of candidates/promotions Dept. Head; Duplicate assignments for the leadership of the branch at kemang & Kuningan ; Regional separation II III
12	2 December 2014	The proposed candidate Division Head Multifinance, Medium Business; The Proposed Candidate For The Leadership Of The Semarang Branch Of Brass; Proposed Mutation Dept. Head and Division; The placement of the Dept. Head for regional offices

5. **Credit Committee**

Structure and Membership

Credit Committee of PT Bank Mutiara Tbk consists of officials of the breaker's credit, Voting member, and non-voting member.

Credit Committee made the decision upon cash loan and non-cash loan pf the debtor's credit/prospective borrowers through a meeting attended by officials of the holder of the appropriate credit limit disconnected authority that is assigned, voting member, and can be shared with other Division/work unit, such as a Legal, Compliance, operations, and Risk Management Division requested the meeting expressed opinions as a non-voting member.

In addition, appropriate credit limit assignment, there is also the holder of the credit decision (PKK) is the individual who is authorized by the Board of Directors (disconnect the credit in circulari.e. without going through the meeting and without a non-voting member) based on ability, competence, and integrity are good.

Thus, the appropriate credit limit set out in the guidelines for the implementation of the applicable Credit since December 17,2014 (Ref. SK Director No.17.09/S.Kep-DIR-SBD-RMD/Mutiara/XII/2014 on December 17, 2014), Authorizes the credit Committee of PT Bank Mutiara, Tbk consists of:

Category	New, Additional, Change
A1	Above Rp 20 Billion
A2	Above Rp 10 Billion s/d Rp 20 Billion
A3	Above Rp 2 Billion s/d Rp 10 Billion
PKK A	Above Rp 1 Billion s/d Rp 2 Billion
PKK B	Above Rp 200 million s/d Rp 1 Billion
PKK C	Under Rp 200 million

Credit Committee category A1 is the highest Committee in respect of the structure of the authority cut off credit.

While the Credit Committee membership based on credit limit as follows:

Category	Credits Breaker	Prosper	Non-Voting Member
A1	President director + Treasury Director & Institutional Banking + Sponsor EVP	Medium Business, Multi Finance, Consumer Business/International Banking Division Head along with Department Head and Section Head/Accounts Officer/Reviewer Or Division Head Small Business SME Manager shared Account Officer	Compliance & Legal Director or Finance & Operation EVP, accompanied by : <ul style="list-style-type: none"> • Risk Management Division Head • Operation Division Head • Compliance Division Head • Legal Division Head
A2	Treasury Director & Institutional Banking EVP Non Sponsor	Medium Business, Multi Finance, Consumer	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Management Division Head

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

	Business + Sponsor EVP Or Treasury Director & Institutional Banking + Non-Sponsor Business EVP	Business/International Banking Division Head along with Department Head and Section Head/Accounts Officer/Reviewer Or Division Head Small Business SME Manager shared Account Officer	<ul style="list-style-type: none"> • Operation Division Head • Compliance Division Head • Legal Division Head
A3	Sponsor/ Non-Sponsor Business EVP + Head of Business Division not prosper	Medium Business, Multi Finance, Consumer Business/International Banking Division Head along with Department Head and Section Head/Accounts Officer/Reviewer Or Division Head Small Business SME Manager shared Account Officer	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Management Division Head • Operation Division Head • Compliance Division Head • Legal Division Head
PKK A	The Credit Business Decision and Credit Decision holders, Credit Risk	Account Officer and/or Team Leader also The head of branch and regional offices or head as well as Reviewer	Without Non-Voting Member
PKK B	The Credit Business Decision and Credit Decision holders, Credit Risk	Account Officer and/or Team Leader also The head of branch and regional offices or head as well as Reviewer	Without Non-Voting Member
PKK C	The Credit Business Decision and Credit Decision holders, Credit Risk	Account Officer and/or Team Leader also The head of branch and regional offices or head as well as Reviewer	Without Non-Voting Member

Duties and Responsibility

The credit Committee is responsible for reviewing and giving a decision on the application/petition for credit facilities based on the limits of the authority cut off credit (BWMK) in the framework of the fulfillment of the principle of prudence of granting healthy credit, among others include solicitation of new credit facilities, the addition of facilities or credit plafond, the extension of credit

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

facilities, changes in credit facilities, the replacement of collateral credit facilities, credit facility period change/Rescheduling, restructuring of troubled credits, and so forth.

Credit decision to Limit authority to break the credit (BWMK) is implemented based on the credit Committee Meetings (FSP) and the holder of the credit decision (PKK) are based on the policy of the Pearl banks (KPMB) and guidelines for the implementation of the credit (PKK) PT bank Mutiara, Tbk that apply.

The implementation of duties and Meeting Frequently

During the year 2014, the credit Committee has conducted meetings according to your needs and credit solicitation. Furthermore the work program implemented is to ensure credit decision in Committee meeting credits (FSP) and the credit decision holder (PKK) are based on the limits of the authority cut off credit (BWMK) were in accordance with the guidelines on policy and credit implementation of Mutiara Bank that apply.

CHAPTER IV

The application of the function of Internal Audit, compliance and Audit external call

4.1 application of bank compliance function

The compliance function is a series of actions or measures are preventive to ensure that policies, conditions, system and procedure as well as the business activities conducted by the bank had been in compliance with the provisions of Bank Indonesia and laws-laws, also make sure Bank compliance against the commitments made by the Bank to the Bank Indonesia and/or other authorities supervisory authority.

In running his business, PT Bank Mutiara, Tbk has a high commitment to comply with the provisions of Bank Indonesia and other prevailing laws. Permanent compliance function is an important element in minimize the risk of compliance and build a culture of compliance. In order that the supervisory function is active. Active supervision is exercised in the form of another description, approval of policies and procedures, reporting in periodic, demand an explanation. The compliance function is ex-ante should be done thoroughly, i.e. not only through the availability of the policy/regulation, but also prevention directly by the perpetrators. This can happen if you've already created celebrating the internalization of the overall compliance for all employees so that employees are also expected to have awareness of risks in each unit of work.

The implementation of compliance functions Bank Indonesia Bank Indonesia Regulations on number/13/2/PBI/2011 January 12, 2011 about the "implementation of Function Compliance public Bank" which applies from the date 01 September 2011.

With regard to the implementation of Compliance Functions Bank include actions to:

- a. Realizing the implementation Compliance culture at all levels of the Organization and business bank activities
- b. Managing risk compliance what is faced by the Bank
- c. Ensure that the policies, procedures and system conditions, as well as the business activities conducted by the Bank had been in compliance with the provisions of Bank Indonesia and the applicable legislation.
- d. Make sure the bank's compliance against the commitments made by the Bank to the Bank Indonesia and/or other authorities' supervisory authority.

Development challenges and risks of the bank business is getting bigger, then needed a variety of efforts to mitigate those risks. These efforts – efforts can be ex-ante or ex-post. Efforts that are ex-ante is very necessary to reduce or minimize the potential risk of business activities of the bank, which is expected to occur, therefore PT Bank Mutiara, Tbk continually strives to enhance the roles and functions of the compliance work unit, as well as compliance in risk management compliance.

The role of the Board of Commissioners and Board of Directors

The board of commissioners shall conduct active supervision on the implementation of the compliance function in the Bank, with:

- a. Evaluate the implementation of Compliance Function Bank at least 2 (two) times in one year through the report of the task submitted by the Director overseeing the compliance function and report on the

implementation of the Compliance Function of the Bank submitted by the Division/Work Unit Compliance. To carry out a proper evaluation and accurate can be done through meetings, whether the meeting of the Board of Commissioners, board of Directors meeting or Committee meeting-committee

- b. Based on the results of the evaluation of the implementation of the compliance function, the Board of Commissioners suggestions in order to improve the quality of implementation of compliance functions bank to the Director with a copy to the Director of the compliance function.

The Directors shall be obliged to:

1. Foster and embody the implementation of a culture of compliance at all levels of the Organization and business activities of the bank.
2. Ensure the implementation of the bank's compliance function.

Compliance framework

Compliance framework presents a policy and a guideline/standard Operational procedure compliance and supervision for banks. Policies and compliance guidelines aimed to ensure adherence to laws, regulations, and legislation, internal policies and guidelines of ethics ode dank behavior. Policies and guidelines are drafted in accordance with the regulations of bank Number 13/2/PBI/2011 January 12, 2011 about the implementation of compliance functions of commercial banks, and best practice in order to identify, assess, monitor and control compliance risks continuously throughout the business activities and the activities of the bank.

The compliance function as well as the role of the compliance work unit in the future in addition to the abundance of capabilities which are monitoring ex-ante as well as do risk management Compliance sustainable in harmony with the application of risk management in the Bank as a whole

The key to success and challenges in the implementation of the compliance function

The functions of Compliance Director within an organization is applied for approximately 16 years since Bank Indonesia issued the PBI No: 1/6/PBI/1999 regarding the assignment of Director of compliance (compliance Director) in banking organizations. During that period, PT Bank Mutiara, Tbk is constantly working to improve the synergy between the functions of compliance and business functions can be awake and still goes well in a series of key success factors (key success factor) can be fulfilled, namely:

- ***Start From The Top***

High commitment from the top of management (Board of Directors and Commissioner), including the executive officers from the organization. The existence of the policy and compliance procedure that have been set up have to be taken in a maximum effort by all the management corresponding with duties, responsibility and each authority.

- ***Compliance Culture***

The existence of 'compliance' culture in all level of worker and management is one of critical success factors in keeping the strategy in line with compliance function and business function as desired. Concretely to ensure that compliance has already understood as one of the company culture, then it is necessary to put it on bank internal provisions, such as in GCG terms, ethic code, as well as

policies and other compliance procedures. Therefore, the implementation can be monitored and improved from time to time.

- ***Compliance Procedure and Policy in Place***

The existence of policy and formal compliance procedures is a key success due to its ability in reflecting the readiness and sincerity of an organization to implement the compliance function as mandated by regulator. The policy and compliance procedures must clearly illustrating the job description, responsibility and compliance function authority in managing risks faced by organization, including procedures in managing main risks issue, covering identification process, measurement, evaluation and compliance risk mitigation.

- ***People and Infrastructure***

In the end, the key success factors on the implementation of compliance function in an organization lies on the existence of human resources and other infrastructures such as information system technology, both for reporting purposes or data storage purpose. In this case, it is important to obtain human resources with certain conditions, such as multi-talent individual or a person with excellent skills in memorizing compliance issues that always in a large scope and changes in dynamic.

Compliance Function Director

PBI No: 13/2/PBI/2011 as an enhanced version of PBI No: 1/6/PBI/1999 is a policy issued by Bank of Indonesia (BI) covering enhancement/refinement in terms of banking organization, duties and responsibility of all parties who are linked to compliance function implementation, based on risk management framework, to support the creation of compliance culture. According to the regulation, mission and responsibility owning by director that authorized compliance function are:

- a. Formulate strategy to support the creation of Bank compliance culture.
- b. Review and propose compliance policy or compliance principles to be set by board of directors.
- c. Establish system and compliance procedures that will be used to arrange terms and bank internal guide.
- d. Communicate policy and procedure to the working unit/employee through an official letter or internal memo and internal email.
- e. Ensure that all the policies, terms, systems, procedures and business activities done by Bank is already in line with the provisions from Bank of Indonesia according to the bank precautionary principle, Good Corporate Governance, and the legislation applied.
- f. Minimizing bank compliance risk.
- g. Conducting various improvement and enhancement on internal provisions, reporting mechanism system, and intern controlling.
- h. Conducting a precautionary measure to avoid any irrelevancy policy by the Board of Directors with the provisions from Bank of Indonesia and the Indonesian legislation.
- i. Execute other duties in relation to the compliance function, such as monitoring and keeping the bank compliance to the commitment established by bank to the Bank of Indonesia or another authorized supervisor.

All duties and responsibilities are not obliterate all the rights and obligations of Director that authorized compliance function as a member of board of bank directors, as stated in constitution of limited liability companies.

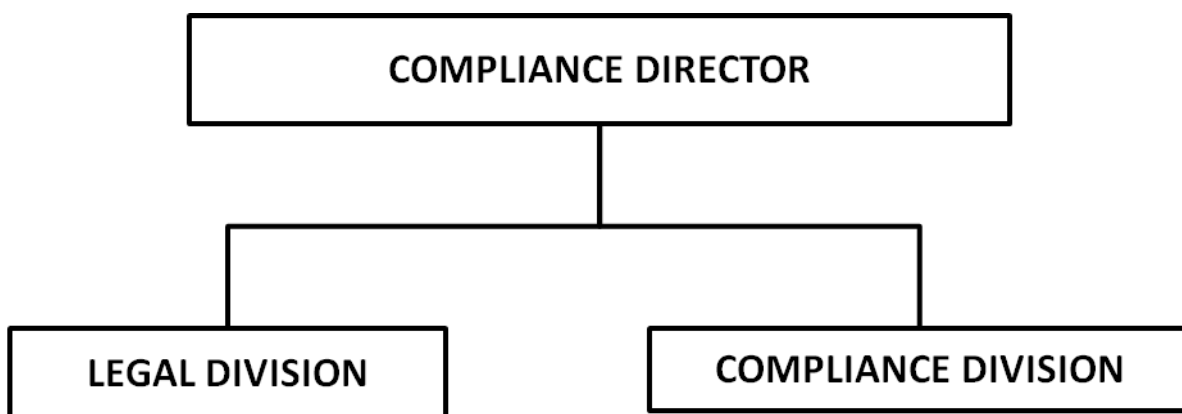
Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

In order to uphold the implementation of prudential principles in managing bank and to ensure that bank obey all the regulations by Bank of Indonesia and the law in force, PT Bank Mutiara Tbk already have a Director that authorized compliance function, and is a member of Board of Directors that the appointment already meet the independency requirements and other criteria, they are:

1. Have no financial relationship, management, stock ownership, and/or family relationship up to second generation of the member of board of commissioners, directors, and/or stockholder controller or relationship with bank that could affect his/her abilities to act independently.
2. There is no double position with Main Director and/or Vice Main Director.
3. Not supervising functions as follows:
 - a. Business and operational (collecting activities and/or fund distribution and agencies activity).
 - b. Risk management that plays role as decision-maker in Bank activity business.
 - c. Treasury.
 - d. Finance and accounting.
 - e. Logistics and procurement goods/services.
 - f. Technology information.
 - g. Internal audit.
4. Having integrity and adequate knowledge concerning provisions from Bank of Indonesia and the constitutions.

Working unit organization structures under Compliance Function Director in 2014, are:

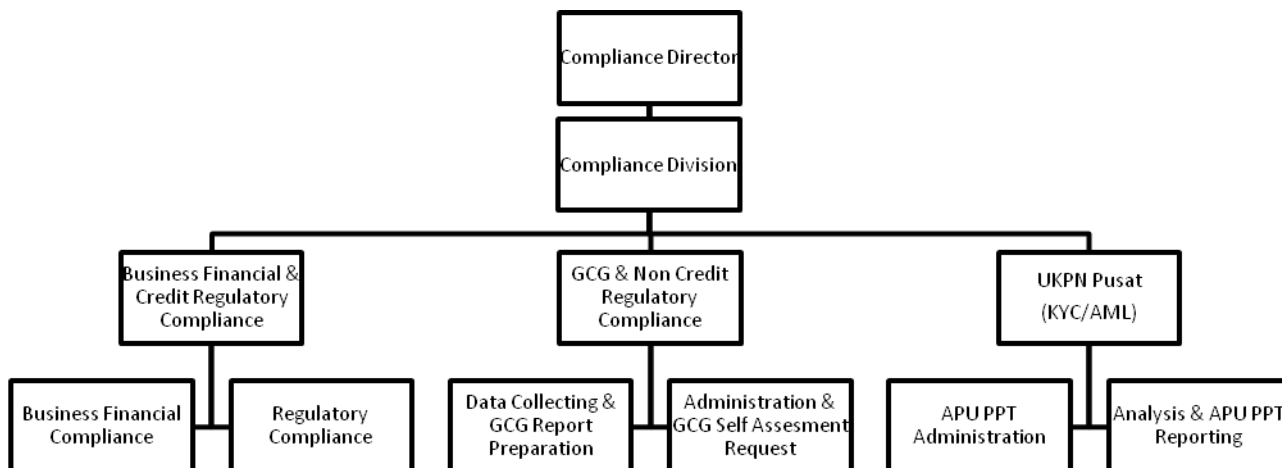
- Decree of Director (SK) No. 19.01/S. Kep- Dir- HRMD/Mutiara/V /2014 date applied Mei 19 2014, Compliance Director supervising Compliance Division (CPO) and Legal Division (LGD).
- Revised by Decree of Director No.08.02/S.Kep-Dir-HRMD/Mutiara/VII/2014 date applied 08 Juli 2014, Compliance Director supervising CPO, LGD, Risk Management Division (RMD), and Human Capital Management Division (HCMD).
- The last for organization structures in 2014 re-modified by Decree of Director supervising CPD and LGD, illustrated as follows:



Notes:

The organization structure of compliance division of PT Bank Mutiara Tbk issued based on Decree of Director No.25.10/S.Kep Dir-HRMD/MutiaraNIII/2014 date applied Agustus 25 2014.

Organization Structure of Compliance Division



Notes:

The organization structure of compliance division of PT Bank Mutiara Tbk issued based on Memo No.123/MEMO/CPD/2014 date applied 02 April2014.

In conducting duties and responsibilities, Compliance Function Director assisted by Compliance Division Head that supervising compliance unit/working corps, GCG working unit and client introduction working unit (UKPN).

Compliance Division Head

In accordance with the provisions from Bank of Indonesia, Compliance Division Head of PT Bank Mutiara Tbk must already meet the criteria requirement as follows:

- Fulfilling independency requirements.
- Mastering provisions from Bank of Indonesia and the constitution applied.
- Not carrying out other duties outside compliance function or no double position in other structure.
- Having high commitment to conduct and develop compliance culture.

The appointment, discharge, or replacement of Compliance Division Head has already reported to the Bank of Indonesia, refer to reporting requirement for Executive Officers of the Commercial Bank.

Compliance Division/Working Unit

PT Bank Mutiara Tbk formed compliance division/working unit as an independent working unit:

**Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)**

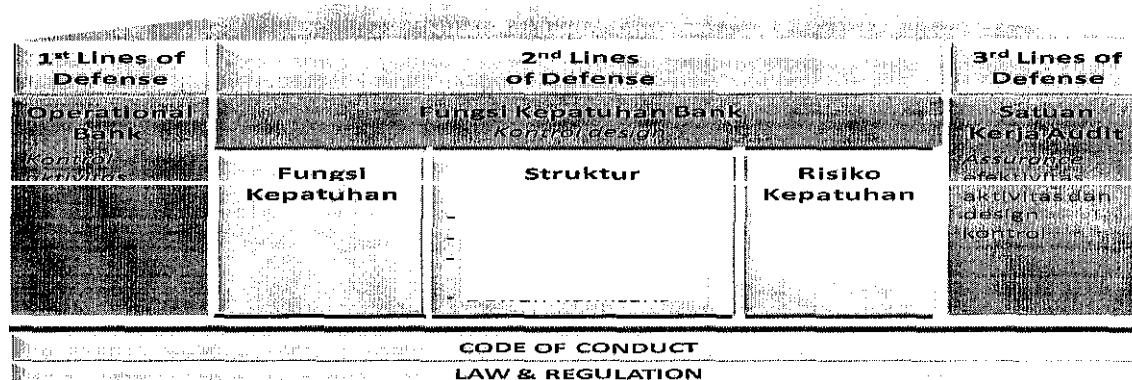
- a. Formed independently on the headquarter, but doing its duties on all of bank networks.
 - b. Free from other bank influences.
 - c. Having direct access to the director supervising compliance function.
- There is no officer and staff in compliance division/working unit that are placed in position facing conflict of interest in doing their compliance function responsibilities.

In conducting bank compliance function, Division/compliance unit possessing duties and responsibilities as follows:

- a. Creating step by step in order to support compliance culture in all bank business activities in every organizations level.
- b. Coordinating with risk management working unit to identify, measure, monitoring, and compliance risk control by referring to regulations from Bank of Indonesia concerning risk management implementation for Commercial Bank.
- c. Assess and evaluate effectiveness, adequacy, and compliance policies, provisions, system nor procedure owned by Bank with legislation applied.
- d. Review and/or recommend update and enhancement policies, provisions, system nor procedure that owned by Bank, so that it stays in line with the provision of Bank of Indonesia and legislation applied.
- e. Take efforts to ensure that policies, provisions, system and procedures, as well as business activity Bank already corresponding with provisions from Bank of Indonesia and legislation applied.
- f. Carry out other tasks related to Compliance Function , they are :
 - Ensure Bank commitment compliance to Bank Indonesia nor supervisory authorities.
 - Socialization/training to all Bank employees concerning provision applied in relation to the compliance function.
 - Act as contact person for any Bank compliance issues both for internal and external parties.
 - Conducting Compliance checklist on- site for activities related with opening licensing /relocation/closure and enhancement network office status.

Compliance Risk Management Framework

Compliance risk management framework conducted through approachment based on 3 (three) defense line they are:



- **First line of defense**, is the first defense line role that represented by Business Unit and supporting unit with the main role as unit taker and risk owner's (risk taking and risk owner unit), where they

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

chase business growth and taking decision that consider risk aspect.

- ***Second line of defense***, is a second defense line conducted by risk Management Division and Compliance Division with the main role as risk control unit, whose duties include: set framework and internal regulation concerning risk management, both financial nor Non-financial; monitoring on how business function and non-business is implemented in corridor of risk management Policy, and standard operational procedure that has been established → *ex ante* (preventive effort/prevention).
- ***Third line of defense***, is the third line Defense held by internal auditors that functionate as risk assurance. Auditor is independent and responsible directly to main director. The main role of internal auditor related to risk management is review and conducting periodical evaluation to framework and risk manage system in whole Bank that already done by the first and second line defense to ensure second line runs according to each role → *ex post* (review after events).

Activities Program Related to the Implementation of Bank Compliance

Program activities that related to the Implementation Bank Compliance Function based on duties and responsibilities Compliance Function Director, along 2014 Compliance Division supervising compliance unit, GCG working unit and Client introduction working unit (UKPN) already conducted bank compliance function on all working unit are as follows:

1. Monitoring Bank compliance level to all provision and legislation that apply as follows :
 - a. Bank compliance indicators from each factor development that monitored, as follows:

Monitored Factors	Indicator/Ratio		Notes
	Semester I Position June 2014	Semester II Position December 2014	
Capital Adequacy Ratio/CAR (Credit Risk, Market and Operational)	14,88%	13,58%	Obedient, above the Minimum capital Requirement provisions (CAR).
Lending limit (BMPK) Credit BMPK: Infringement Exceedances	Nil Rp.91.733 juta	Nil Rp.191.510 juta	Obedient, no BMPK infringement, exceedances BMPK, continuing effort so that it can be solved in 2015
Securities BMPK: Infringement Exceedances	Nil Rp.201.573 juta	Nil	Obedient, no BMPK infringement, exceedances BMPK, continuing effort so that it can be solved in 2015

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

		Rp.338.080 juta	
Net Open Position (PDN)	7.45%	3.18%	Obedient, PDN runs based on provisions from Bank of Indonesia and continuing to maintain good position.
Productive Asset Quality (KAP)/Non Performing Loan (NPL) :			
NPL Gross	14.87%	12.24%	Not obedient , Gross NPL decrease insignificantly and continue to improve in 2015.
NPL Net	5.91%	5.45%	Not obedient , Net NPL not match with BI provisions or above 5% and continue to improve in 2015.
Statutory Reserves (GWM):			
Main/Primary GWM	9.35%	11.68%	Obedient , match with BI provisions (8%).
Secondary GWM	16.06%	19.22%	Obedient , match with BI Provisions (2.5%)
Forex GWM	8.95%	8.77%	Obedient , match with BI Provisions (8%)
Bank Health Level (TKB)	4 (Less Healthy)	4 (Less Healthy)	
Bank Risk Profile:			
Risk Profile	4	4	
Inheren Risk	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	
Risk Management Implementation Quality	Fair	Fair	

- b. There are LDR Bank Ration below applied provisions so it is subject to liability to add GWM deposit based on provisions in force.

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- c. There are warning penalties/warning, administration and fines to the process and submission of Bank Routine Reports to the regulator, as stated below:
- There are warning penalties and fines from Financial Services Authority/Bank of Indonesia on retardment in: delivery and announcement of 2013 financial annual report, delivery report of BMPK improvement action plan, delivery annual report in the use of technology, delivery of 2014-2016 RBB, and so on. While error in delivery report of LHBU date March 26th 2014 Form 201 (1 item).
 - First Memorandum from BEI on retardment of delivery Interim financial report ended per March 21th 2014.
 - Memorandum/administrative warning and/or fines penalties from Financial Services Authority on retardment of delivery report changes list details of the related parties.
- d. Structure and composition of Board Commissioner based on RUPSLB decision on December 30th 2014 has not meet provision with a number of 2 person and Bank already submit a notice to OJK with commitment to add Commissioner through RUPSLB no later than March 2015.
- e. Vacant position in Chairman Committee Remuneration Position and nominations since November 20th 2014, as the only Independent Commissioner take double role as Chairman of the audit Committee and Chairman of the Committee Oversight Risk.
- f. Credit monitoring has not done optimally (obedience aspect) that can impact on:
- Sufficient information of ability and debtor business development.
 - Credit Amenities Extension Process (Temporary Extension).
 - There is no Credit Amenities Extension that done close to the due date, so that it can optimize the analysis quality.
 - Bridging Finance at the time debtor gets payment from bowhir/business relation can be well-monitored.
 - Collectability level has not meet with the provisions.
 - Quality reduction in terms of aspects performance, business prospect and ability to pay and business debtor can not be detected early.
- g. The loan process is not yet fully meet with the applied provisions (compliance aspects), so it is impacted in:
- Weak in monitoring the conformity of credit use on end-user (e.g: bridging BP takeover from N Bank and personal interest factor of BP supervisor), and anticipating problematic credits appearance from other debtor.
 - Weak in human resources quality on business unit, that already followed by efforts to provide training, Banking Development Officer Program (BDO) and Banking Development Staff (BDS).
 - Fulfillment on the completeness of documents (business legality, e.g: UUG for industrial enterprises, such as: PT PI, IWT, S, and SKDP a/n. PT MPP, PTASH, PT PMM).
 - Obedience on RKK decision (Financial Report that not yet audited, are: PT ASH. PT AF; Adequacy and collateral fastening CV. J)
- h. Bank already have Policy and SOP related to the determination of credit quality in accordance with the PBI No.14/15/PBI/2012 concerning Commercial Bank Quality Asset, but have not covering determination on credit quality for debtor amenities credit that already meet the due date and not yet do extension with the new credit agreement (Example: BPK,CV REI, PT ASH).
- i. Bank already implements calculation PSAK 50/55 in Bank reporting, however PSAK 50/55 manual

**Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)**

calculations only performed for the calculation of CKPN credit individually because PSAK engine to perform calculations automatically are still in developing process. For CKPN Collective, magnitude probability of default already done in an auto system by PSAK engine (Bank Vision).

- j. Internal Fraud still be found in Medan Branch Office, Serpong, and Kuningan but already solved by Bank.
 - k. Commitment Fulfillment and settlement deadline for finding result by supervisory team from OJK which is still unfinished or some of it still in the process of completion so that it required a petition for settlement commitment extension to OJK, and required a more intensive and effective settlement effort commitment.
2. Conduct monitoring on activity related to opening licensing/relocation/closure and enhancement of office network status through some points, as follows:
- Arrange Compliance checklist for office preparation to ensure building physical readiness, human resources readiness and assets readiness that will be used before submitting permission request to Bank of Indonesia.
 - Coordinating with project manager (related working unit that have the authority).
 - Review document before delivered to Bank of Indonesia.
 - On-site visiting as well as to look and ensure the readiness of facilities and infrastructure to the office locations that filed the petition request to Bank of Indonesia.

Up to December 2014 PT Bank Mutiara Tbk already submitted Opening and relocation, and Changes in Office Network Status that has been approved, not yet to be approved or still in approval process from Bank of Indonesia and already classified with details as follows :

Information	January-December 2014 Status Approved by Bank of Indonesia		In Approval process	Not yet to be Approved
	Business Plan	Realization		
Office Opening	1	-	-	1*)
Office Relocation	5	5	-	-
Office Closure	-	-	-	-
Decrease/Increase Status	-	-	-	-

*) No Approved by OJK by Letter of OJK No. S-41/PB.12/2014 dated 16 April 2014, while for office relocation all already gain permission through letter from OJK.

Up to December 2014 the the number of total branch network is 61 office with details are as follows:

Office type	Number of office	
	Up to June 2014	Up to December 2014
Office territory	4	4
Office Branch	23	23
Office Sub Branch	35	35
Kas Office	3	3
Total number	61	61

- 3. Follow the decision-making process of bank management by reviewing/testing on every plan/internal Bank regulation design and management policy/decision in terms of its compliance with the provision and constitution applied, and guided by precautionary principles (prudential banking) in order to apply Good

**Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)**

Corporate Governance, also include providing direction and suggestion in following Credit Committee Meeting process (RKK), Technical Meeting, Meeting in determination of prime lending rate (SBDK), ALCO Meeting, Preparation Policy meeting and SOP, and other meeting in related to the implementation of compliance to determine Policy and Bank activities.

4. Monitoring on policy implementation and compliance procedure on the operation of Bank in every working unit/Division related, which provides "Compliance opinion" on policy implementation and compliance procedures such as petition input/opinions from Division/other working unit in preparation of product launching and new activities so that it is not digress from provisions in force.
5. Socialize compliance Awareness for all individual in Bank Mutiara by:
 - Conduct socialization and training in relation with procedures, regulations and provisions in force that organized in internal bank or by external parties in the training venues specified to all employees in working unit/Division, Office territory, Office Branch/Sub Branch/Kas, among others training related to APU-PPT, GCG, compliance, and etc.
 - Cultural Meeting every Wednesday by all Division/working unit, Office territory, and Branch/Sub Branch/kas that constantly remind employees to carry out performance activities in accordance with procedures, rules and regulations.
6. Management Risk compliance conducted through identification process, measurement, monitoring and control to Risk compliance to build culture of Compliance in all Bank organization unit so that management Risk compliance become one of reference in transaction implementation Bank operational activity.

Management Risk Bank Compliance cover :

- Measurement on Risk Profile for Risk Compliance
- Risk Compliance encountered
- Risk Compliance mitigation that have been implemented
- Risk Compliance potency which is predicted to be encountered in the future.

Result from Self Assessment on Compliance Risk as being part of Bank Risk Profile Report on 2014 that already submitted to the OJK are as follows:

No	Period/Assesment Position	Inheren Risk Rating	Trend	Risk Management Quality Level	Trend
1	2 nd Quarterly/June 2014	Moderate to High (March 2014=Moderate to High)	Constant	Fair (March 2014=Fair)	Constant
2	4 th Quarterly/December 2014	Moderate to High (September 2014=Moderate to High)	Constant	Fair (September 2014=Fair)	Constant

7. Submit report periodically to the FSA (OJK) concerning implementation duties of Compliance Function Director in the form of:
 - Compliance working plan report, contained in Bank business plan.
 - Special report concerning policies and/or decisions of director that according to Compliance Function Director already digress from provisions of Bank of Indonesia/OJK an/or constitutions applied. For the year 2014 related to the director policies there is no special report issued, unless delivered in Action Plan Report because GCG ratings is "4" (Low).

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- Compliance Report, signed by Compliance Function Director and delivered biannually (Every June and December) and presented comparatively in 2 (two) report period with a copy to Board of Commissioner and Main Director. Throughout 2014 it had been submitted 2 (two) Compliance Report to OJK with details as follows:

Compliance Report	Letter Number	Letter Date
Semester I	No.24.01 /5-Dir-CPD/Mutiara/VII /2014	July 24 th 2014
Semester II	No.29.07/5-Dir-CPD/Mutiara/1/2015	January 29 th 2015

8. Related to the duties of Director in charge of Compliance Function assisted by Compliance Division through UKPN headquarter and UKPN Office Branch/Sub Branch already conduct monitoring on implementation of Anti Money Laundering Program and Combating the Financing of Terrorism (APU and PPT) in accordance with PBI No.14/27/PBI/2012 date applied 28 Desember 2012 and SE BI No.15/21/DPNP date applied 14 Juni 2013, and the Constitution of Republic of Indonesia No.8 Prevention and Combating Money Laundering, and has adjusted the implementation of the action plan APU and PPT program include:
 1. Data updating Realization Report PT Bank Mutiara Tbk Period of January 2014-December 2014" according to the target that had been set by all of the office in 2nd semester compliance report of 2013. The next is re-arrange "Updating Data Report Plan 2015 PT Bank MutiaraTbk Data Position December 2014" guided by attachment format in corresponding target that already arranged by all office in SE BI No.15/21/DPNP date 14 June 2013.
 2. Upgrade Smart-AML System and implemented on all office in order to filter customer reception and customer exist, Walk in Customer (WIC) based on watch-list (DHN, Politically Exposed person (PEP), SUN list, OFAC, SUS saction, internal blacklist and Custom list) from BI and OFAC, monitoring suspicious transaction and cash transaction, grouping risk customer by risk based approach (RBA), and other related activities with APU-PPT.

In order to implement the governance structure, it is constantly improved in organization structure, mapping a clearer function and responsibilities, include UKPN in headquarter nor in Office Branch/Sub Branch/Kas, the implementation are as follows:

1. Book of Policies and Standard Procedures of APU-PPT 2013 edition (2nd Revision), already distributed to all Division Head and Office Branch/Sub Branch/Kas.
2. Duties and responsibilities UKPN in the headquarter and Branch (Decree of Director No.019/Mutiara/SK-DIR/111/2010 dated March 17th 2010) on the duties and responsibilities of the central and branch UKPN, as well as Improving the competence of all employees through training APU PPT performed at least once a year in accordance with regulations applied;
3. Grouping and Customer Management by Risk Based Approach (SK Dir. No. 020/Mutiara/SK-DIR/III/2010 dated March 22th, 2010 on Customer Management by risks (Risk based approachment);
4. The need for information and documents of Prospective Customers/Clients and Walk In Customer! WIC (SK Dir 123/Mutiara/SK-DIR/V/2010 dated May 19th 2010).

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

Governance Process in the implementation of APU and PPT, is the quality process of the availability of governance structure that can be tested for their effectiveness, in the implementation of Governance Process related to AML and PPT, the implementation are as follows:

1. Bank has implemented Smart AML application system (Red Flag), and on all Office Branch, sub branch and kas, and performing administrative or clerical customer data on core banking system for the better through the Customer Data Updating on an ongoing basis and applying Single CIF;
2. Mapping customer based on risk (risk based approachment) in the context of strict monitoring of the customer accounts included in the High Risk category, i.e PEP, Dormant Accounts, High Risk Customer Operations, and other high-risk category according to the regulations applied.
3. Reporting to the Reporting Center and financial Transaction analysis according to the regulations applied.

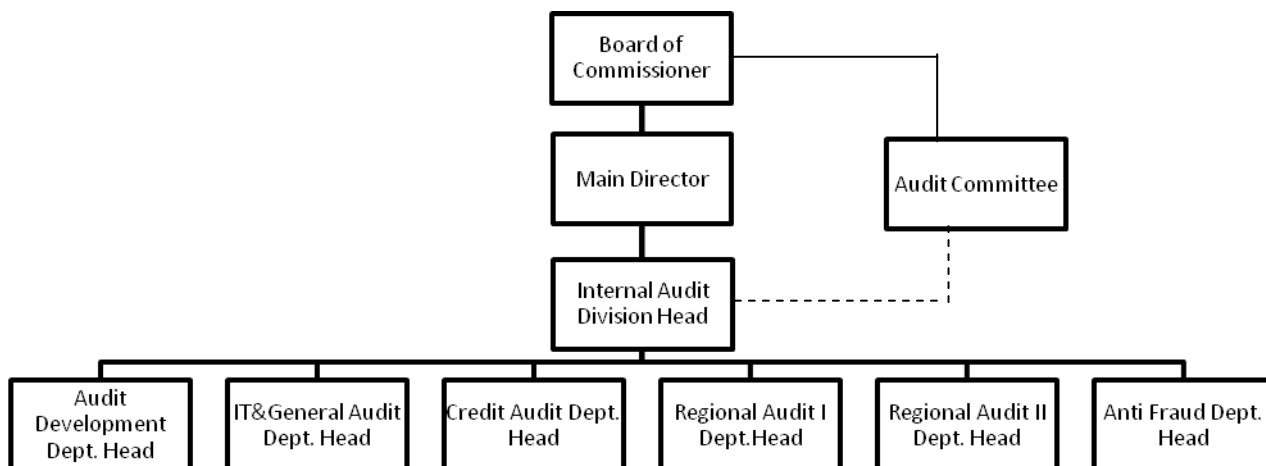
4.2. Internal Audit Function

Internal Audit unit (SKAI) PT Bank Mutiara Tbk is an Independent unit and impartial in carrying out their duties, covering Assurance activities and Risk Consulting/Control designed to provide value-added, can increase operational, help and securing Bank Business plan achievement (RBB) by performing evaluation on effectiveness and increase Control functions, risk Management and Governance Process.

To implement the role mentioned above, SKAI take role as Strategic Business partner for all working unit and they already feel the benefits in the presence of SKAI for security and business enhancement.

To maintain independency of the internal audit function, SKAI position is under and perform direct reports to the main Director, and has a line of co-ordination with the Board of Commissioners through the Audit Committee. SKAI act as the eyes and ears of Main Director regarding to the enforcement of the Internal Control System (SPI) and securing the Bank's operational activities related to the activity of funds raising, credit, charge and fee-based income. Position, authority, responsibility, professionalism, organization, and scope duties of SKAI has referred to the Internal Audit Function Implementation Standards (SPFAIB) stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 1/6/PBI/1999 dated September 20 1999 on the Assignment of Compliance Director and Implementation of Internal Audit Function Implementation Standards for Commercial Banks.

Organization Structure of Internal Audit Working Unit (SKAI) PT Bank Mutiara Tbk in 2014



SKAI assist Bank in achieving its objectives through systematic approachment and discipline in evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control/control and GCG. Its activities cover the operational areas, credit, technology, and system information and supporting functions in the headquarter. In performing its duties, SKAI has authorities to access all function, notes, property and Bank employee based on audits without being restricted by any party.

Audit Charter is a formal document defining: objectives, SKAI activities, authorities and responsibilities of SKAI in organizations include its relationship with the Directors and Board of Commissioners. Head of SKAI directly responsible to the Main Director and have a coordinative line to the Audit Committee to communicate results of Internal Audit work to the Director and Board of Commissioner. SKAI PT Bank Mutiara Tbk assigned to assist Main director and Board of Commissioner to ensure completeness and effectiveness of Internal Control System (SPI), make Annual audit Plan that must be approved by Main director and the implementation monitored by Board of Commissioners through Audit Committee. In setting the views and thoughts, Head of Internal audit divisions are given free room and objective and free from pressure from any party (independence), so that it can be free from conflict of interest on object or activity examined.

In performing audit, SKAI make analysis and research in financial field , accounting, operational and other activities through on-site examination/audit and off-site monitoring, as well as giving suggestion for improvements repair and objective information on activity that need special attention by all levels of

management, also capable to identify all possibility to improve and increase efficiency in use source power and fund.

Audit conducted by Risk Based Audit methodology to perform evaluation on completeness and assessment on reliability/effectiveness of SPI in order to minimize risk, besides that the audit findings will be used as the basis for corrective action on SPI weaknesses.

Qualifications/Internal Audit Professional Certification and Training

To improve the competence of SKAI auditors continuously so that it can perform internal audit function professionally, the qualification/profession certification required for the SKAI auditor are:

- All SKAI resources already have Risk management certifications level 1 for auditor and Team Leader, level 1 and 2 for Department Head and level 1, 2 and 3 for Head of SKAI.
- Moreover, to support technical competence, SKAI already have 3 (three) auditor with Certified Bank internal audit from LSPP.

Along with the dynamics of the company, SKAI required to perform continuous adjustments to maintain standard performance. Therefore PT Bank Mutiara Tbk constantly engage officer and official SKAI to a training both internal and external so they can obtain qualification as follows:

- a. Having adequate knowledge both general and technical in relevant task with his/her specialty.
- b. Independent, honest, objective, persevering and loyal.
- c. Be able to maintain profession quality in professional line.
- d. Excellent skills in interaction and communication, both oral and written.
- e. can enhance his/her role as a consultant and catalyst.

Evaluation or Review the Implementation of the Bank Internal Audit

To perform evaluation or review on SKAI Bank work result and its compliance to the Internal Bank Audit function implementation standards (SPFAIB), and possible improvement to be done based on provisions and regulation from Bank of Indonesia, then at least every 3 years evaluation or review by auditor/extern parties is required, the last audit done in 2013 for audit period between 2011-2013 and it is stated that SKAI have fulfilled the provisions on SPFAIB. To evaluate/review for the next period on SKAI Bank work result and its compliance to the Internal Bank Audit function implementation standards (SPFAIB), it will be performed in 2016.

Objective and Bank Internal Audit Implementation Phase

In performing its duties, SKAI mainly focus to ensure the implementation of SPI which has objectives to:

- a. Ensuring the security of client funds, covering deposito, giro, saving and other third parties funds.
- b. Securing assets in the form of audit on productive assests quality (credit) through credit manager working unit audit and Loan review (end to end process) to ensure that credit process (initiation, analysis, determining, melting and monitoring) have been done in prudent.
- c. The achievement of goals and operational activity objectives that have been set, the use of resources economically and efficiently, effective and supervise certain activities such as information technology systems (Core Banking, Opics, Trade Innovation, Swift, and others).
- d. Truth and wholeness of information, including registration of bank liabilities and accurate administrative accounts, complete, and on time.

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- e. Compliance to the policies, plan, procedures, law and regulations, include aspects ratings that could affect to the Bank Health level.
- f. Awareness evaluation management line/supervision to the 8 components of SPI.

Pre Audit begins with selection of audit approachment method such as scope audit based on assessment results, related audit program, Mondays, sample size determination, testing techniques, minimum evidence and how to get it.

Determination on assignment decided by Head of Internal Audit Division based on suggestion from Regional Head/General Audit Head and pre audit result.

Audit assignment begins with making of letter of assignment, entry meeting, field audit, exit meeting, follow-up monitoring list (DMTL) and audit result in the form of SPI assessment results will be reflected in audit rating with strong qualification, satisfactory, fair, marginal and unsatisfactory.

Audit result will be acted by making of summary report submitted to Main Director and SPI weakness will be acted by making corrective action.

4.2.1. Internal Audit Implementation

A. General Audit

Is an audit covering bank operational activities aspects, with its objectives to assess SPI effectiveness especially assessment on system and procedures applied and its implementation. The audit performed on all branch office/sub branch and headquarter division. The first step towards Risk Based Audit, in the beginning of the year it is used COSO Framework methodology (5 components) up dates 2014 include:

- a. *Control Environment*
- b. *Risk Assessment*
- c. *Information Et Communication*
- d. *Monitoring*
- e. *Control Activity*

B. Special Audit (Anti Fraud)

Is an audit performed related to fraud investigation refer to Memorandum from Bank of Indonesia No.13/28/DPNP dated 09 December 2011 and special assignment from the management, both from central and office branch/sub branch. The audit carry out according to the needs and urgency and incidental.

In 2014 SKAI conducted special audit to some cases with the total number of cases are 7 fraud cases and 4 special assignment.

C. Passive Examination (On Desk Audit)

Is an examination performed on desk covering monitoring to the DMTL accomplishment, intermediaries account, research and making of recapitulations based on report delivered to the office branch/sub branch.

4.2.2. Realization/Internal Audit Assigning Achievement

In 2014, SKAI carried out general examination (General Audit) and special audit for the total number of 79 inspection objects, consist of 21 office branches, 37 office sub branches, and 10 working unit/headquarter division and 11 special audit/assignment.

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

The achievement of the audit plan with the Audit Realization are as follows:

Audit Objects	2014			2015		
	Audit Plan	Audit Realization	Achievement	Audit Plan	Audit Realization	Achievement
Branch Office	21	21	100	21	21	100
Sub Branch Office	37	37	100	33	35	106
Kas Office *)						
Working Unit/Headquarter Division	19	10	52,63	10	13	125
Special Assignment	-	11	100	-	9	100
Total Audit	77	79	100	64	78	121
Loan Review	90	90	100	50	84	
Thematic Audit	3	3	100	3	3	100

Notes:

*) Kas Office Examination drawn into a single unit with branch audit as its parents

***) Audit in Division not achieved because in 2014 divestment process was held in which its officer using few auditor, against the division unaudited in 2014 will be prioritized in 2015.

4.2.3. Findings from Internal Audit Examination

Below is a summary of important findings in some Branch Offices, Sub Branch Offices and Working Unit/Division at the Headquarter/Credit:

1. Examination on Branch Offices/sub branch

SKAI audit results in branch offices/sub branch offices, in general can be disclosed that internal control is quite effective where the audit findings are caused by negligence and lack of maximum control/monitoring conducted by officers and supervisors to transactions and daily reports.

2. Credit Line

From the results of Credit audits /Loan Review, discovered the weakness of credit risk mitigation on business risk of the debtor (a turnover of fairness and Financial Statements) and the lack of monitoring after the loan disbursement.

3. Examination on the entire Working Unit/Division at Headquarters

Generally, audit findings on SKAI audit results at Working Unit/Division in the Headquarters caused by implementation of activities not in accordance with the SOP applied and SOP itself incomplete. This happens mainly because of the current risks of changes that have not been mitigated in the SOP.

4.3. External Audit Function

Supervision of PT Bank Mutiara Tbk. in addition to carried out by the internal auditor, also carried out by an external auditor, including BI/OJK and the Public Accounting Firm (KAP). To ensure the effectiveness of the implementation on external audit function, PT Bank Mutiara Tbk refers to and strives to meet the terms of the relationship between the Bank, the Office of Public Accountant and BI as stipulated in BI on Transparency of Financial Condition.

One of important component in carrying out Good Corporate Governance (GCG) is the availability of Adequate financial statements and adequacy in financial reporting process, based on principles of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

In order to support the achievement of adequate financial statements and the adequacy of the financial reporting process, the role of the External Auditor (in this case the public accounting firm) is very important.

The role and function of the external auditor are:

1. Ensure compliance of financial statements with the accounting standards.
2. Ensure internal financial statements already complied with provisions of Bank Indonesia concerning Transparency in Bank Financial Condition.

The disclosure of information is transparent to the general public through Bank Indonesia, Print Media, YLKI, LPPI, etc., and displayed on the Home Page or Web Site of PT Bank Mutiara Tbk, with the address www.mutiarabank.co.id.

Transparency of the bank's financial condition are set in:

1. Bank Indonesia Regulation No.14/14/PBI/2012 dated October 18, 2012 on Transparency and Bank report Publication.
2. Bank Indonesia Regulation No.3/22/PBI/2001 dated December 13, 2001 on Transparency of Bank Financial Condition as amended by PBI No.7/50/PBI/2005 dated November 29, 2005 concerning Amendment to Regulation of Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 on Transparency of Bank Financial Condition.
3. Bank Indonesia Memorandum No.13/30/DPNP dated December 16, 2011 regarding the Third Amendment to Bank Indonesia Memorandum No. 3/30/DPNP dated 14 December 2001 on Financial Statements Condensed Quarterly and Monthly Commercial Banks and Certain Reports submitted to Bank Indonesia.

Implementation of presentation and financial statements preparation of PT Bank Mutiara Tbk delivered in the form and scope as stated in the Regulation of Bank Indonesia consists of:

1. Annual report
2. Quarterly Condensed Financial Statements
3. Monthly Financial Reports
4. Consolidated Financial Statements

Information contained in the Annual Financial Report is presented to the public consist of:

- 1) General information, including:
 - a. Management;

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

- b. Ownership;
 - c. Bank business development and bank business group;
 - d. Management strategy and policies;
 - e. Management reports.
- 2) Annual Financial Report, includes:
 - a. Statement of Financial Position (Balance Sheet);
 - b. Statement of Comprehensive Income;
 - c. Statement of Changes in Equity;
 - d. Cash flow statement;
 - e. Notes on the financial statements, including information on commitments and contingencies.
 - 3) Opinion from Certified Public Accountants.
 - 4) Risks type and potential losses (risk exposures) faced by Bank as well as risk management practices applied by Bank.
 - 5) All aspects of transparency and information required for Quarterly Condensed Financial Statements.
 - 6) Other aspects of disclosure as required by the Financial Accounting Standards, in this case it has not been included in item (1) to (5) above.
 - 7) Other informations.

In carrying out the functions of Good Corporate Governance (GCG) that is the transparency function of financial condition, Bank has prepared and present the Financial Statements for the years ended in December 31, 2014 (Audited) and 2013 (Audited). In accordance with the RUPS PT Bank Mutiara Tbk which was held on June 4, 2014, RUPS provides power and authority to the Board of Commissioners to determine public accounting firm in order to fulfill requirements on Audit of Financial Statements 2014.

For the Financial Report of 2014 and 2013, it have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Tjahjadi a Tamara (An Independent Member Firm of Morison International) with opinion "CASUAL WITHOUT EXCEPTIONS" in all material respects.

A brief information on Annual Financial Statements as of December 2014 (Audited) and 2013 (Audited) can be disclosed as follows:

Financial Report

ASET (Audited)

(in million rupiah)

No	Certain Pos	31-12-2014	31-12-2013
1	Giro in Bank Indonesia	1.321.263	2.446.981
2	Giro in other banks – Net	151.026	229.488
3	Placement in Bank Indonesia & other banks – Net	1.1435.819	157.001
4	Securities – Net	1.684.151	695.395
5	Derivatives bill – Net	117	0
6	Credit given – Net	7.234.672	10.128.316
7	Forclosed Properties – Net	0	0

Liability and Equity

Liability (Audited)

(in million rupiah)

No	Certain Pos	31-12-2014	31-12-2013
1	Customer Deposits:		
	- Related Parties	24.736	42.378
	- Third Parties	11.002.003	11.515.703
2	Deposits from other banks	48.745	1.063.369
3	Derivatives liability	126	1.606

Equity (Audited)

(in million rupiah)

No	Certain Pos	31-12-2014	31-12-2013
1	Capital stock issued and fully paid	10.223.155	8.973.675
2	Additional paid-in capital	178.759	178.759
3	Down payment on paid-in capital	300.000	1.249.480
4	Revaluation Surplus on Fixed Assets	128.907	132.425

Profit (Loss) (Audited)

(in million rupiah)

No	Certain Pos	31-12-2014	31-12-2013
1	Profit (Loss) Net	(667.007)	(1.136.045)
2	Profit (Loss) Per Basic Share	(0,0008)	(0,0017)

Important Financial Ratios (Audited)

	Certain Pos	31-12-2014	31-12-2013
Capital	- Available KPMM Ratio for Credit Risk and Operational Risk	13,65%	14,32%
	- Available KPMM Ratio after considering Credit Risk, Market Risk, and Operational Risk	13,58%	14,03%
	- Fixed Assets against capital	31,90%	22,97%
Productive Assets	- Problematic Productive Asset	22,21%	20,23%
	- NPL – Gross	12,24%	12,28%

Report on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 2014
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh, PT Bank Mutiara Tbk.)

	- NPL – Net	5,45%	3,61%
	- PPAP against Productive Assets	18,71%	17,34%
	- PPAP fulfillment	112,08%	104,81%
Rentability	- ROA	(4,96)%	(7,58)%
	- ROE	(57,88)%	(142,48)%
	- NIM	0,24%	1,67%
	- BOPO	135,91%	173,80%
Liquidity	LDR	71,14%	96,31%
Compliance	Statutory Reserves (GWM)		
	- Rupiah Primary GWM	11,68%	19,49%
	- Rupiah Secondary GWM	19,22%	16,81%
	- Forex GWM	8,77%	8,13%
	PDN (Per Balance Position against year-end capital)	3,18%	13,65%

CHAPTER V

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS

5.1. Implementation of Risk Management

PT Bank Mutiara Tbk implemented risk management based on the provisions of Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 5/8/PBI I 2003 dated May 19, 2003 on Implementation of Risk Management for commercial Banks, with the change in PBI No. 11/25/PBI/2009 dated 1 July 2009 and memorandum of Bank Indonesia (SE BI) No. 5/21/DPNP dated September 29, 2003, on Implementation of Risk Management for commercial Banks, with the changes in SE BI No. 13/23/DPNP dated October 25, 2011, and other Bank Indonesia provisions related to risk management.

In line with the provision from Bank Indonesia, the implementation of risk management and Bank management (Good Corporate Governance) in an appropriate and healthy way will play a role in increasing value-added and give a comprehensive overview concerning potential risk and bank losses in the future adjusted with the complexity and bank internal condition.

To achieve the above objectives, it is required to present risk awareness and adequate technical abilities on all working unit in Bank Mutiara, where all of this is the responsibility and involving all working unit in Bank Mutiara.

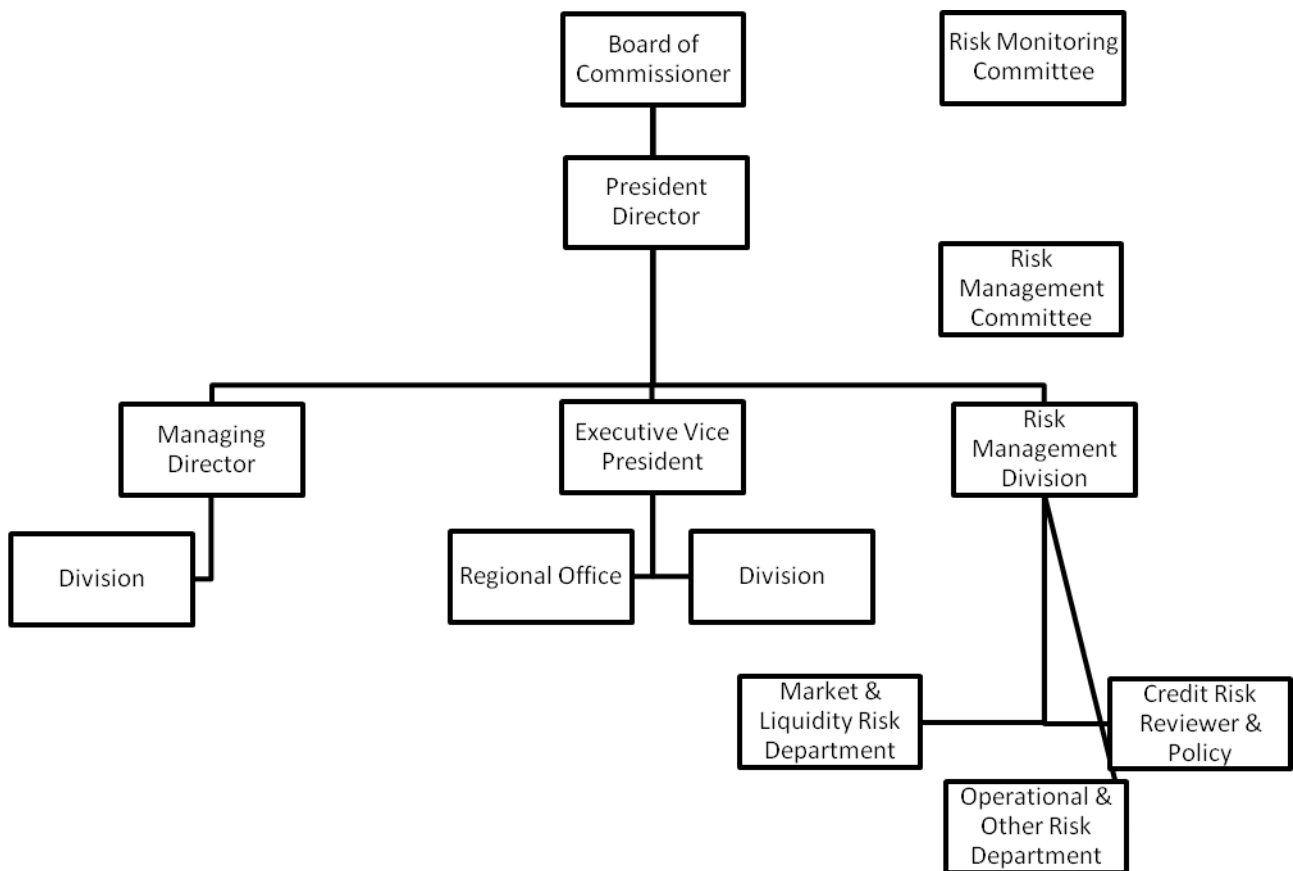
Effectiveness on implementation of management and framework risk management by PT Bank Mutiara Tbk covering 4 (four) pillar stated below:

a. Active supervision from Board of Commissioner and Directors as part of management supervision,

Board of commissioner and Director responsible on effectiveness of risk management implementation in Bank, as well as ensure the risk management implementation are adequate based on characteristics, complexity, and bank risk profit. Board of commissioner perform evaluation on the policies and risk management implementation done by Director. On supervising and bank risk management as well as Good Corporate Governance implementation, Board of commissioner assist by risk monitoring committee on commissioner level and on Director level assist by risk management committee.

Risk Management Committee carry out duties and responsible to arrange and adjusting strategy policy as well as risk management implementation guide and to ensure that process and risk management system implementation runs effectively. Evaluating development and risk profit condition, and giving suggestion and step by step on improvement to discuss specific issues on certain types of risk and need an immediate response by doing limited RMC meeting, or called sub-RMC. There are 2 sub-RMC they are credit risk committee and operational risk committee, formed to discuss issues related to risk credit, operational risk and other risks.

The following is risk management organization structure of PT Bank Mutiara Tbk:



b. Adequacy on policies, procedures, and limit determination as guide in risk management implementation,

Risk management implementation in PT Bank Mutiara Tbk stated in some policies and procedures, they are risk management general risk (KUMR). KUMR as the highest provisions in giving policies management direction and risk control in order to secure PT Bank Mutiara Tbk on faced risk in its business activities. Limit determination managed in business activities and product have adjusted on risk level to be taken (risk appetite) and the limit reviewed periodically to adjust it to the changes on conditions happened.

c. Adequacy on identification process, measurement, supervising, and risk control, and risk management information system

Risk management implementation process covering identification, measurement, supervising, management and control to the 8 risks they are: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, strategic risk, law risk, and reputation risk. One of risk measurement reflected in quarterly risk profit statement and risk control self assessment statement/RCSA, and for risk supervising conducted by evaluating treasury transaction limit, and risk control by providing follow-up on high risk potential. Risk management information system applied such as system value at risk (VaR) Forex and Interest Rate bond that can be accessed on Treasury division and report it periodically to the Director.

d. Effective internal control system in bank operational implementation

Internal control had been done by internal audit unit to assess the process and risk management system implementation on functional activity with risk exposure. Moreover, the existence of a clear functions separation between operational working unit (risk taking unit) and working unit doing the risk control function implementation (risk management unit).

Risk management implementation in PT Bank Mutiara Tbk is stated on some policies and procedures, such as risk management general policies (KUMR). KUMR as the highest provisions in giving direction in terms of management and risk control in order to secure PT Bank Mutiara Tbk on risks faced in doing its business activities.

PT Bank Mutiara Tbk established division/risk management unit as independent unit serves to create policies and supervise risks on activities and business process.

Some aspects/efforts has been done by management in doing risk management implementation are as follows:

- a. Updating policies and procedures adjusted to the regulations applied.
- b. Measure bank level health by risk bases bank rating approachment (RBBR), using 4 coverage ratings: risk profit statement, Good Corporate Governance Statement, rentability and capital aspects.
- c. In an effort to improve bank employee competency in risk management, sustainability management engage bank employee on risk management certification, so that it can fulfill the provisions in force.
- d. Arrange bank business plan for the year 2015-2018.
- e. Upgrade core banking system by forming BFEQ 4.0 migration team.
- f. Fulfilling CAR ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) and measuring ATMR based on latest regulations.

Regarding risk profit assessment guided by provisions/regulation of Bank Indonesia No/13/1/PBE/2011 dated January 5th 2011 on commercial bank health level assessment, and Memorandum Bank Indonesia No.13/23/DPNP dated October 25th 2011 ammendment on memorandum No.5/21/DPNP on commercial bank risk management implementation, then risks managed by PT Bank Mutiara Tbk in doing its activities divide into 8 risk types they are: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, law risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk. Each of risks assess from 2 aspects, they are inherent risk and risk management implementation quality. Inherent risk is a risk that contained in bank activities, while quality of risk management implementation is bank ability to control risk in those activities. Both of assessment necessary to determine a general overview of bank risk, that often called as risk profile. As a guide in manage the 8 risks, PT Bank Mutiara Tbk possess risk management general policies (KUMR) that constantly updated/adjusted periodically based on provisions in force.

To identify, measure, supervise and control all of the risk types inherent in bank (inherent risk), it is required a shape of management organization structure based on size, complexity, bank ability and objectives and policies of PT Bank Mutiara Tbk through the making of quarterly risk profile statement by unit/risk management division based on provisions from Bank Indonesia.

The following are measurement result on PT Bank Mutiara risk profile based on inherent risk and risk management implementation quality December 2014 period (OJK assessment) compare to September 2014 period:

Risk Profile	Dec 2014 (OJK)			September 2014		
	Inheren Risk Rank	Quality on Risk Management Implementation Rank	Risk Level Rank	Inheren Risk Rank	Quality on Risk Management Implementation Rank	Risk Level Rank
Credit Risk	Moderate to High	Marginal	4	Moderate to High	Fair	4
Market Risk	Moderate to High	Fair	3	Moderate to High	Fair	3

Operational Risk	Moderate to High	Fair	4	Moderate to High	Fair	4
Legal Risk	Moderate to High	Fair	4	Moderate to High	Fair	4
Strategic Risk	Moderate to High	Fair	4	Moderate to High	Fair	4
Compliance Risk	Moderate to High	Fair	4	Moderate to High	Fair	4
Reputation Risk	Moderate to High	Fair	3	Moderate to High	Fair	4
Composite Ranks	Moderate to High	Fair	4	Moderate to High	Fair	4

Assessment from OJK on bank risk profile statement for position December 31st 2014 based on OJK letter No.SR-23/PB.31/2015 dated February 25th 2015 on risk profile statement and bank level health for December 31st 2014.

After doing measurement on risk profile for December 2014 period, it is resulted in risk composite ratings stated as moderate to high with constant risk trend compare to previous quarterly composite ratings on September 2014 period.

By seeing inherent risk composite ratings on moderate to high positions and risk management implementation quality is fair, then risk profile ratings for December 2014 is 4.

Based on bank risk profile statement on December 2014 period (qualitative data), 8 types of main risks can be describe as follows:

a. Credit Risk

Arising Risks as a result of the failure or potential failure of the customer (counterparty) to meet its obligations in full accordance with the agreement, either because it is not able to or do not have good intentions or due to other causes, causing the bank suffered a loss.

Some steps have been taken to anticipate credit risk include:

- Credit Risk Management performed by involving Business Units and Non-Voting Member (in this case the Risk Management Division, Operation Division, Compliance Division and Legal Division) through the mechanism of Credit Committee Meeting, held in accordance with the limits of authority of each holder of the loan approval authority.
- Credit approval mechanism on Micro segment, Small, and Consumer Business by the Credit Committee and Credit authority holders (PKK). PKK is the people who are given the authority to decide credit by the Board of Directors based on the ability, competence and integrity.
- Conducting limits/Limit Privileges Breaking Loans are reviewed periodically and make improvements to the credit process of PT Bank Mutiara Tbk, they are: concerning limit Privileges Terminate Credit (BWMK) for the Small Business segment has been running for this so that the decision-making process credit goes faster but still guided by the principles of prudential banking.
- Completing bank with Bank Mutiara credit policy and credit implementation guide that are reviewed periodically, and other than that constantly perform complement and enhance Standard Operation Procedure on credit.
- Monitoring Bank's portfolio, monitoring carried out including credit segmentation, credit quality, as well as the Z5 and 100 Core Debtor.

- Improving on Credit Analysis Memorandum include spread sheet on financial statements.
- Establish Mutiara Credit Culture Enforcement Team with the objectives to build a credit culture that will produce bank's credit quality in the future.
- Improvements on non-performing loans, by doing credit settlement for problematic debtor.
- Make preparation of the Loan Portfolio per industrial sector to compile Mutiara Industry Code & Catalogues, and Approved Industries Recommendations and target market.
- Crediting without ignoring BMPK, limit and credit concentration.

By implementing a good credit risk management it can resulted in a healthy credit management and prudent, so it can bring a good impact and positive direction for the Bank to make integrity and independence in the process of assessing credit risk.

b. Market Risk

Risks arising due to movements in market variables on the portfolio owned by the Bank both cash transactions and derivative transactions, in which can be inflict a financial loss to the Bank. Include in market variables are interest rates, exchange rates, stock prices and commodity prices, including derivatives from the market risk type.

Interest rate risk, is a quite significant potential risk for PT Bank Mutiara Tbk for the distribution of funds other than in the form of credits, also in the form of portfolio investments in securities, especially securities exchange that in average of long-term possessing fixed interest rate. This condition will depress net interest margin (NIM) when the interest rate funds are likely to increase. Some anticipation/strategies and Bank risk mitigation in addressing this condition are:

- Company making improvements to the productive assets composition structure and non productive assets to bring bank to a better position.
- Attempting bank liabilities structure management in improving long-term sources funding, by giving attractive and competitive interest rate on deposito for 3 months up to a year long.
- Increasing third parties funding (DPK) from government funding in a long-term.
- Implement floating rate in allocating certain types of credit, so that interest rate decreasing risk aren't a burden for bank and will not affect debtor if interest rate increase.
- Monitoring market price development (market pricing) and strengthened assets pricing policy and liabilities through a meeting forum called Assets Liability Committee (ALCO) by discussing some important calculations such as cost of money, base lending rate and other calculations. Thus, any problems that occur in Bank, especially related to interest rate risk can be anticipated as early as possible.
- Monitoring on liquidity, activities and Treasury Division risk limit, on a daily basis and report to the Board of Directors.
- Presenting system Value at Risk (VaR) for Forex and Interest Rate Bond which can be accessed from the Treasury Division and report it periodically to the Board, to mitigate the risk of changes in currency values against foreign currency and interest rate changes on the Securities possessed by the Bank and also simulation on increase or decrease in the currency and Securities traded.

Meanwhile, as foreign banks, Bank Mutiara certainly can not be separated from the exchange rate risk (Foreign Exchange Rate Risk) or exchange rate fluctuations risks as a result of the unstable on macro economic conditions in Indonesia and other countries due to the global financial crisis that were keenly felt. This condition requires Bank to maintain assets position and its forex liabilities in a position in accordance with Bank Indonesia, to avoid potential losses in case of exchange rate fluctuations.

Variable markets are not only in the form of exchange rate fluctuations or interest rate fluctuations, but also include market value fluctuations from portfolio owned by Bank, such as portfolio of securities traded.

Bank strategy to mitigate risk are as follows:

- Constantly perform monitoring on price movement from bank investment portfolio, so that a follow-up action can be taken as early as possible in case of losses indication through market to market.
- Manage and mitigate concentration risk by making a clearer rules concerning transaction limit begins from the boundary breakers, interbank limit, dealer limits, limits per economic sector, geography and others.
- Conduct in-depth analysis (rating, maturity, issuer, underlying transaction, listed & market price) before making an investment.

Bank formed ALCO committee that responsible in setting the strategy in the management of assets and Bank liabilities according to the regulations applied. Moreover, Bank also set limits such as transaction limits on Foreign Exchange, Bank Notes, Money Market and Securities. In terms of IT development (Information Technology), Bank optimize OPICS applications, and has been implemented as a system to supports Treasury transactions.

c. **Liquidity Risk**

In managing liquidity risk that is partly caused by Bank inability to meet obligations to the customers or counter-party on due date. Some of strategies taken by Bank to anticipate those things are:

- Performing investment portfolio towards a more liquid investments.
- Encouraging the growing number of low costs investment or low cost fund customers.
- Improving the effectiveness of the liquidity gap management (maturity gap, projected cash flow) to anticipate risk liquidity as early as possible.
- Intensify the collection of the problematic loans so it can be further improved.
- Accelerate the liquidation process of unproductive assets i.e. The collateral Foreclosed (AYDA).
- Increase cooperation with other banks in order to maximize the facility of Call Money and internal bank Repo Securities.

PT Bank Mutiara Tbk attempt to improve the effectiveness of the gap liquidity management (maturity gap and cash flow projections) in anticipation of liquidity risk as early as possible, and also controlling liquidity risk, especially under critical condition.

Bank also developed a Contingency Funding Plan, as well as continue to maintain its ability to access the money market by continuing to build relationships with correspondent banks. To detect liquidity risk, PT Bank Mutiara Tbk has LCP Standard Operation Procedure (Liquidity contingency Plan) and monitoring liquidity on a daily basis to be reported to the Board of Directors.

d. **Operational Risk**

Operational risk is a risk that is caused by insufficient or failed internal processes, human error, system failure, or external problems affecting the Bank operations.

Along with the bank growth, operational risk management also become as one of bank attention. To prevent lossess by the existence of operational risk then bank do the following things:

- Each of products or new activities, Bank always conduct risk assessments in accordance with the provisions from the regulator.
- Performing review and refinement of SOP in each unit periodically.
- Ensuring the availability of Disaster Recovery Plan (DRP) which is tested regularly in case there is disruption in IT.
- Management of operational risk also done by strengthening the security and reliability of information technology, so that the system failure or human error can be suppressed.
- Delimitation of authority in conducting operational transactions.
- Increase internal oversight functions through the Internal Audit Unit (SKAI). In addition to it, shaping SKAI Anti Fraud Department in an effort to strengthen the internal control

system.

- Improve the human resources quality by increasing both internal and external training frequency in credit, product marketing, and work motivation.
- To identify risk events that occur in Branch and earning a loss impact, then monitoring is done using Operational Risk Report.
- Increase IT Security System for the entire system in PT Bank Mutiara Tbk.
- Recording data loss, where the data are used as one of the parameters in the measurement of Operational Risk Profit.
- Bank conducted Risk & Control Self Assessment (RCSA), which is a methodology to identify sources of risk, used to measure the level of risk, monitor risk level of trends, and to control and risk mitigation. Identification through the RCSA implementation will apply to all units gradually.
- Bank has a Business Continuity Plan (BCP) intended to minimize the risk, addressing the impact of disruption/disaster, as well as accelerating the recovery process so that its operations and services to customers can continue to run well.

In order to minimize the potential loss of financial or non-financial caused by external factors such as natural disasters, fires, riots, which can impact on the Bank technological capability and the Bank's business operations especially services to customers, Bank implemented policies and Business Continuity Plan Standard Operating Procedure (BCP).

The BCP Organization team established by Bank handling duties to coordinating the implementation of the BCP in handling the business activity in an emergency (disaster) matched with the needs and conditions of Bank. In 2014 Bank has made BCP improvements by Review Business Impact Analysis (BIA) based on business process, and has conducted socialization and simulation of BCP implementation based on predetermined scenario to all branches, then conduct review on policies and SOP, alternative procedure review (contingency plan), and perform BCP trials on certain office branch using fire disaster simulation by activating alternative locations close to branch office.

On December 2014, case of fire happened in at the branch office Pasar Klewer Solo and Bank has implemented BCP procedures against branch office Pasar Klewer Solo like the followings:

- Since branch office Pasar Klewer failed to operate, the operation temporarily transferred to a branch office on its parent Branch Office in Slamet Riyadi Solo.
- Implementation of transfer location (relocation) branches Pasar Klewer referring to Bank Indonesia Regulation No.13/27/PB1/2011 Article 53, paragraph 3 and 4.

e. Legal Risk

Legal risk is a risk due to the weakness of the judicial aspect /legal because transactions are not well-documented. This risks are unlimited on emerging risks from the failure possibilities on contract/agreement, lawsuits/third party claim, incompatibility with the rules and regulations applied, weakness engagement, imperfect binding assurances, inability on court ruling implementation, court decisions that can interfere or affect the operation or Bank condition.

Legal Risk Management done by:

- Conduct a review on legal documents, agreements and contracts with third parties.
- Inventory on legal cases that occur including monitoring the progress of each case on existing law. Handling of the legal case are done based on priorities and the entire development are well-monitored and are always reported to the Management to be followed up through completion containing at least the potential legal risks.
- Function of Legal Division, which has an important role in providing analysis/review from legal sight related to the product or bank activities, giving suggestion from legal sight by the existence of regulation changes, review on agreements made between bank and third parties, moreover, handling legal cases

related to the litigation as well.

f. Strategic Risk

Strategic risk, is a risk caused by an inappropriate in determination and implementation of bank strategy, inappropriate business decision-making or bank less responsive against external changes. Some steps conducted to anticipate this risk done by:

- Arrange bank business plan for the period 2015-2018 used as guide for management and employee.
- Monitoring on financial performance by comparing between realization and target to be achieved by bank based on bank business plan.
- Planning performance division that routinely conduct periodical monitoring (performance review) on performance achievement on every division and overall bank.
- Revised update on strategy to be achieved based on development both on internal and external conditions, so that it become realistic with the bank target achievement.

g. Compliance Risk

Compliance risk, is a risk caused by the non compliance bank or not implement legislation and other provisions in force as major concern. Steps taken to anticipate this risk are:

- Arrange Compliance Policy and Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism.
- Monitoring of customer data updating and implementation of CIF singles as well as handling of passive accounts/dormant.
- Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML and CFT) based on mandate in the Regulation of Bank Indonesia, where PT Bank Mutiara Tbk regularly perform socialization to the relevant units through the Compliance Division.
- Arrange Compliance Report and conduct compliance trial.
- Develop an action plan in order to comply with the regulator.
- Improvement in Compliance Division to conduct compliance trials on any regulation, both internal and external conditions.

h. Reputation Risk

Reputation risk as a pillar of trust giving risk due to negative publicity related to the bank business activities or negative perception against Bank that could affect the Bank image, so that the level of public confidence on Bank relatively increased.

As a reflection of the Bank's attention to the risk of reputation, then the reputation risk management is done by:

- Monitoring on media publications, in collaboration with third-party services by the Corporate Secretary.
- Monitoring customer complaints via Product & Networking Management Division to handle complaints promptly, and perform optimization on Call Center function in handling of customer complaints.
- As part of the community, PT Bank Mutiara Tbk also took part in implementing Corporate Social Responsibility program, as well as participate in implementing other social activities together with customers, including act as a sponsor in various community activities.
- Improving the implementation of Financial Information Transparency to stakeholders such as the presentation of financial information, the improvement of the Bank's website, as well as carrying out a press release to the media.

PT Bank Mutiara Tbk believe that every aspect of the effectiveness on the implementation of good bank management (including risk management and internal control systems) in relation with Good Corporate Governance (GCG) will improve the reputation.

One of it is manifested in award giving to Bank Mutiara as Best Company for Leadership - Banking - Indonesia from IAIR, one of international magazine discussing economic and sustainable global on IAIR Awards, Hong Kong, Februari 2014.

Reputation and support of the new shareholders that professionally assist management in order to improve the reputation and public confidence through increased performance and better work programs are a direct implication on the management of reputation risk.

Risk management action plan in 2015 are:

1. **Credit Risk**

- Handling debtor 2nd collectability by reminding debtor via SMS Blast before the due date of payment to prepare funds, monitoring on debtor's business and payment obligation, calling 2c collectability debtor (>60 days) and fulfilling credit terms and condition, and maintaining credit on due date.
- Handling NPL to decrease under 5% by maximizing billing, PKPU, collateral auction, bankruptcy debtor, and write off.
- Credit expansion with credit types on low risk (selective) by fill in rundown during Q1 and next is fill in based in RBB 2015 and restructuring credit process and credit breaker authorization.
- Handling securities (Re-CSPA September 12th 2014) where the right to collect security deposit, related to the 3 cooperative and account escrow, MLA Hong Kong had moved to LPS so it required a write off.
- Fulfillment on Allowance for Impairment Losses/CKPN <100%.

2. **Market Risk**

Strengthen the risk mitigation caused by increased on risk exposure at the banking book and trading book, for complex treasury products are done by preparing SOP and Market Risk Policy if there are additional risk exposures.

3. **Liquidity risk**

- Reduce the concentration of large group depositors (currently \pm 40% from the total deposits) by making limitation to maximum interest rate for each depositor, decrease the top four jumbo deposit portfolio, giving limit/quota deposit portfolio to a large group of depositors and Bank will increase retail transactions by selling product bundling. Bank also set up a duties force transactional and perform enhancement on IT Infrastructure.
- Sources of funds are still dominated by short-term (1-3 months) which are liabilities sensitive (lend long borrow short) through the granting of credit focused on working capital credit and short-term.
- Accessed on funding sources especially on money market relatively less, by increasing credit lines from banks or financial institutions by relying on the brand of Jtrust and activating collaboration with Japanese company in Indonesia.
- Update liquidity contingency plan (LCP) by considering sources of funding outside DPK including support from financial stocks.

4. **Operational risks**

- Related to email spam, PABX and reuters had improved and bank will perform migration from Zimbra to Microsoft Exchange (for email),
- Implementation of PSAK 50/55 had been implemented on LBU December 2014, so that implementation of PSAK 50/55 already in line with the regulation and pararely bank prepared engine PSAK 50/55 automatically.
- Increasing of human resources competency through standard improvement, recruitment process and new employee training program, and the existence of competency to business office holders and keeping its competent employees to remain working ing Bank Mutiara (retention program).

5. **Legal Risk**

- Lawsuits/litigation against bank performed by facing the lawsuit by optimizing internal lawyer staff

and taking legal services from external lawyer, perform monitoring and cases reporting.

- Misconception or lack of caution on act as a result from the lack of comprehension and legal compliance by employees, then it required to increase understanding and legal knowledge of employees through trainings conducted by bank or specifically and periodical socialization.

6. Strategic Risk

- Bank will conduct intensive monitoring to the realization of the RBB achievement.
- Bank will conduct intensive monitoring on external conditions that will affect the bank condition and to revise the RBB on the first occasion if external constraints that affect the achievement of RBB appear.
- Bank will make mapping on financial ratios against peer group and arrange action plan to constantly equalizes the performance.
- Bank formed efficiency team to decrease BOPO ratio.

7. Compliance Risk

- Compliance against the routine and scheduled reporting (regulator & relation institution) by implementing compliance report monitoring (CRM).
- Compliance against CAR, NPL, BMPK provisions. For CAR ratio will be performed capital increase gradually for the year between 2014-2018 and for handling on BMPK exceedances especially TDI a/n PT Persada Sakti Raya and Damar Kristal will be written off as well as the handling on BMPK exceedances of PT Sinar Central Clothing will be explored to lower its exposure by selling the collateral.
- Composition of the independent Board of Commissioners haven't meet the requirement so that one of the Committee functions under the Board of Commissioners also haven't meet the requirements, and the Bank has submitted this to the OJK by letter No.29.21 /S.Dir CPD/Mutiara/XII/2014 dated.29.12.2014 and will be performed RUPS.

8. Reputation Risk

Carrying out positives corporation activities to compensate negatives publication, carry out to positives publications to the public by collaborating with stakeholder, planning on changing bank names, and decrease cost of fund that relatively high so that funds grow due to the good reputation.

With the action plan above, it is expected Bank Mutiara health level will gets better.

Effectiveness Evaluation on Risk Management System

Board of commissioner constantly perform risk management policies evaluation and risk management strategy at least once a year or on a frequent basis in case there is changes in factors affecting bank business activities in significant way. In running the functions, Risk Monitoring Committee regularly conduct meetings every month together with the Risk Management Division to discuss the risk profile that includes inherent risk and quality of risk management implementation on 8 (eight) risk mentioned.

Board of commissioner evaluate risk profile description from risk monitoring committee and risk management division, and giving improvement suggestion on risk management implementation periodically to the directors, including credit policies regarding write-off and review from the Board of Commissioners on a committed line that given to the debtor for above Rp 25 billion. The evaluation done in order to ensure that the Board of Directors manage the activities and Risks Bank effectively.

5.2. Internal Control System

In order to be able to manage the Bank effectively and efficiently as well as act as the basic of a healthy and safe operations, it is required an Internal Control System.

Regulation of Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 dated May 19, 2003 regarding Risk Management for Banks, Bank Indonesia Regulation No. 9/15/PBI/2007 dated November 30th 2007 regarding Risk Management in the Use of Technology of Information by Banks, and Bank Indonesia Memorandum No. 5/22/DPNP dated September 29th 2003 regarding Guidelines for Internal Control Standards for Commercial Banks, requiring

the Bank to implement the Internal Control System effectively to all business activities and operations at all organizational levels of the Bank.

Internal Control System is a control mechanism established by the Board of Directors with approval from the Board of Commissioners on an ongoing basis in order to achieve companies' goals.

Implementation of Internal Control System will effectively assist Bank in terms of:

- a. Maintaining and securing Bank assets.
- b. Ensuring the availability of information and a more accurate report.
- c. Improving Bank's compliance against rules and regulations applied.
- d. Reduce the financial impact/risk of loss, irregularities including fraud, and violation of the prudent principle.
- e. Enhance organizational effectiveness and cost efficiency.

For the above purposes PT Bank Mutiara Tbk adopted Internal Control principles based on the COSO Model with five (5) components must be controlled as follows:

1. ***Control Environment (CE)***

CE is a set of standards, rules, processes and organizational structures that provide the basis for implementing the SPI for the whole organization. BOD and Management implement Tone At The Top on the importance of SPI including behavioral standard. CE consists of values of integrity and ethics organizations, parameters that will allow BOD and Management to implement operational control of the company, the effectiveness of the organizational structure, individual tasks, the performance obstacle, incentives and penalties to encourage performance accountability, the resulting CE will have a broad impact on overall SPI.

2. ***Risk Assessment (RA)***

RA involving a dynamic and iterative process to identify and assess the risks that might be affect the achievement of corporate objectives, so that RA formed the basis to determine on how risks will be managed. RA also requires management to consider the impact of possible changes in the external environment and the business model that can make the SPI ineffective. Risk is defined as the possibility that an event will occur and will affect the achievement of corporate goals.

3. ***Information Communication (IC)***

IC is required by companies on implementation of SPI in order to support the corporate goals achievement. Management acquire or produce and using a relevant and quality information, both internal and external resources to support the other components from SPI. Communication should be carried out continuously, by giving, sharing and obtaining the required information. Internal communication is the way in which information is disseminated throughout the organization, flows from bottom to top, down and co-workers at the same level which allows the person to receive a clear message from management and vice versa. External communication consists of two activities, which enables the person to receive relevant external information, and provide information to external parties.

4. ***Monitoring Activities***

Monitoring activities consist of Sustainable Evaluation (On going Evaluation), Separated Evaluation (Separate Evaluation), or a combination of both that is used to ensure whether each of the five SPI component, is Present (Present) and Functioning (functioning). Sustainable evaluation is built into the business processes at different levels to provide information relating to errors/omissions at the earliest stage. Separate evaluations performed periodically will vary in scope and frequency depending on the results of the risk assessment, effectiveness on the Sustainable evaluation and other considerations from management. The findings from evaluation are recorded and communicated to the management.

5. ***Control Activities (CA)***

CA is the management direction defined by policies and procedures to reduce risks against companies' objectives achievement. CA conducted at all levels of the organization, at different stages in the business process, and all of Information Technology (IT). CA can be either preventive control

or detective that can be done manually and automatically such as authorization, approval, verification, reconciliation, and reporting business performance. Segregation of Duties can be used as the construction and development of CA. When Segregation of Duties failed to run, management must select and develop alternative control activities.

Each of the component are related to each other, it is need an integrated control and its implementation responsibilities are on all of units hand with the objectives are as follows:

1. **Strategic**, bank business plan are well-understood, in line and supported by all of unit.
2. **Operation**, runs effectively and efficiently in using human resources and infrastructures.
3. **Reporting**, accurate and reliable.
4. **Compliance**, activities and transaction bowed into the provisions and laws in force.

Throughout 2014 average audit rating in bank wide are as follows:

No	Risk Owner	Audit Rating			Explanation
		2013	2014	Rating	
1	Branch	76,47	75,52	Satisfactory	SPI ran well, however improvement still required limited on SOP and Human Resources Compliance in operational conduct.
2	Division	78,03	79,62	Satisfactory	SPI ran good enough, however improvement on limited SOP is required and Human Resources Compliance in operational conduct.
3	Credit Division	78,84	71,83	Fair	SPI on all credit unit contain weakness in various SPI components (5 components) and must perform improvement /corrective action against SOP, system and Human Resources.

CHAPTER VI
PROVIDING FUNDS, BANK STRATEGIC PLAN, TRANSPARENCY AND OTHER ASPECTS OF
DISCLOSURE

A. Provision of Funds to Related Party and Provision of Large Funds (Large Exposures)

Provision of funds to Related Party and the debtor/core group per December 31, 2014 are shown on the following table:

No	Funding	Amount	
		Debtor	Nominal (in million rupiah)
1	To the related parties *)	25	6.212
2	To the core debtor:	25	3.387.943
	- Individual	16	1.785.839
	- Group	9	1.602.104

Notes:

*) Amount of funding to the related parties including:

- Loans to bank executive officer given in terms of PT Bank Mutiara Tbk officer credit Credit are given to the core Debtor consists of granting credit to 16 (sixteen) individual debtors for total amount of Rp.1.785.839 million and 9 (nine) group of debtors totaling Rp.1.602.104 million.

According to the Regulation of Bank Indonesia, the provision of funds to related parties and the debtors/core group are done well and there is no violation on BMPK, however there still remain BMPK exceedances as assets legacy from the old management. Management has submitted Report periodically on the Action Plan Implementation statement/The Action Plan Completion on the BMPK exceedances to Bank Indonesia containing Settlement Plan on BMPK exceedances, Target Settlement, and Settlement Progress.

The credit process has gone through the Technical Meeting to mitigate various possibilities that arise prior to the administration of provision funds to the debtor. In every decision-making on provision of funds it has to be decided upon Credit Committee Meeting based on Credit Approval Authority Limit (BWMK). Especially for provisions on Bank Indonesia concerning maximum limit lending (BMPK) it is always informed in Credit Analysis Memorandum (NAK) based on the memo about the number of Bank Capital issued each month by the Division of Accounting.

Bank already has an internal policy regarding the monitoring mechanism on provision of funds by observing distribution/diversification portfolio by management allocation on each business unit based on credit segmentation, such as retail business, consumer business, small business, medium business, and multi finance.

PT Bank Mutiara Tbk already set internal policy on limit of provisions funds based on Bank Indonesia Regulation No.7131PBII2005 dated Januari 20th 2005 and its amendment on Bank Indonesia regulation No.81131PBI/2006 dated Oktober 5th 2006 on maximum limit of crediting, and based on Procedures Memorandum No.28.09/M.Dir-EVP.MB/Mutiara/II/2013 which basically bank already set the in house limit for a maximum amount 80% from maximum limit of crediting (BMPK).

B. Bank Strategic Plan

PT Bank Mutiara Tbk constantly perform maximum effort to achieve objectives, such as to formulate efforts in the form of "bank Strategic Plan" which will be taken by the management in utilizing existing resources to improve company's performance and in the end goal can be achieved.

The disclosure of strategic plan PT Bank Mutiara Tbk refer to provisions from BI/OJK, that the keynote can be described on the followings:

- Corporate plan arrangement and business plan PT Bank Mutiara Tbk already matched with bank vision and mission. In relation with this thing it can be delivered as:
 - ✓ *Corporate plan* and *business plan* arranged based on bank vision and mission. The main business focus of PT Bank Mutiara Tbk are: treasury, small and medium enterprises, consumer and micro as well as becoming a fine quality and professional financial services provider bank, who build its services to the customers through close relationship as business partner and adjusted with the potential resources owned and its business scales. Various strategies and programs already prepared by the management to make PT Bank Mutiara Tbk as the best "Focus Bank" for the community and become one of the leading bank in Indonesia that safe, reliable in providing special services, produces the best products with reliable performance, clean and strong as pearl philosophy.
 - ✓ This is had been stated on bank business plan (RBB) and RBB correction/revision enclosed with letter of approval from Board of commissioner including to the Bank Indonesia/OJK.
- Bank strategic plan fully supported by owner, reflected in commitment and effort to strengthening bank capitals. In relation to this, it can be describe as:
 - ✓ Owner supports and commit in strengthening capital in PT Bank Mutiara Tbk by adding capital for about Rp.1.249,48 billion so that CAR can stand above 14% based on provisions from PBI No.14/18/PBI/2012 on obligation of minimum capital providing on commercial banks (ICAAP) so that CAR stand above 14%. By the switch of the owning to the new owner that is JTrust Co.Ltd are also commit to strengthen and maintaining the capital based on ICAAP and peer bank and also adding capital deposited by the end of 2014 for about Rp300 billion/.

1. Corporate Plan

Corporate plan is a strategic plan in a long-term to achieved bank objectives, is a target need to supported in formulating the policies and company's strategies.

Formulation in arranging Corporate Plan begins with setting goals/objectives → internal and external analysis → strategy arrangement → strategy implementation → monitoring strategy → back to objectives improvement.

Defining objectives can be as vision that define long-term objectives from an organization and mission in which it is translation from vision so it can be better understood by the stakeholder. Internal and external analysis is a stage from collecting and analyzing the existing data through SWOT analysis (strength, weaknesses, opportunities, and threats possessed by company).

As a strategic efforts of the new management in resolving fundamental problem of PT Bank Mutiara Tbk, in 2009 bank has already deepen the vision and mission that can be described as below:

Vision

“BECOMING COMMUNITY CHOICES AS THE BEST FOCUS BANK”

Bank main business focus are: small and medium enterprises, consumer and micro, and treasury.

Bank Mutiara will constantly try to become as a fine quality and profesional financial services provider, who build services to the community through the close relationship as business partner.

Mission

“GIVING THE BEST BY PRIORITIZING SERVICES, COMFORTABILITY AND CUSTOMER SATISFACTION FOR AN OPTIMAL RESULT”

Related to the mission, Bank Mutiara give the best by prioritizing services, comfortness, and customer's satisfaction optimally, as well as becoming a leading focus bank with a core value “SPIRIT” as manifestation from service excellence, professionalism, integrity, relationship, innovative, and trust.

As for the advanced strategies, it is done by SWOT approachment:

a. **SWOT Analysis**

S - Strengths

- Having good access to the UKM business network for businessmen from certain ethnic.
- Having relationship advantages to the customers' funds.
- The new owner is Jtrust, a financial company from Japan to strengthen company's image.
- Having customer's financing portfolio through an adequate multifinance, however having smallest problematic credits almost 0%.
- Possessing 61 offices to support UMKM financing.
- Having excellent funds marketing employee.
- Is a public company, enabling the company to gain funds from capital market on expansion objectives in the future.

W- Weaknesses

- Financing structures dominate by high cost fund especially deposito.
- Funds product not yet supported by proper banking technology.
- Number of staff with a proper credit analyzing ability still in minimum.
- Still remaining debitur with BMPK exceedances.
- Business counterparty reliability still not fully recovered especially from foreign banks due to negative issues or political turmoil appeared from bank century cases and waiting for owning switching from LPS so there still LIC rejected and line bank giving still limited finally complicate Bank Mutiara in running export import transaction.
- Banking technology implementation and electronic channel that are still improper so it can't boost low cost fund growth and no product champion.
- Office network distribution still not optimal because concentrated in Jakarta.
- Changes in provisions/regulatory capital [CAR accordance ICAAP, PBI No.14/18/PBI/2012] causes the bank's CAR below the minimum CAR of 14% [risk profile category 5] thus limiting the expansion capabilities of assets and branch network of the Bank.
- Bank is currently operating under an adequate scale, and does not fit the overhead fixed cost structure profile, making it difficult to achieve similar performance with the industry best performers and the peer group.
- The development of an industrial environment with average CAR of 17-18% placed the financial strength of Bank Mutiara in an inferior position to competitors.
- Corporate brand has not been able to become the driving ease of an efficient business acquisitions.
- Micro business infrastructure, Consumer and Small as the main business has not been able to support the establishment of a portfolio that supports equalization acceleration performance.
- Productivity is not proportional to the number of branches and labor costs.
- The need for improvement in loan quality.
- High cost of funds.
- MIS intergrated inoptimally.

O- Opportunities

- The opportunity to optimize network development in Java and outside Java.
- The foreign exchange market transactions and bank notes can still be optimized added with Common Foreign exchange transactions that are not optimal.
- The potential growth of the SME segment in particular from certain ethnic business people can still be improved.
- Opportunities on consumer Et retail sector is still open.
- Microfinance Opportunity is still untapped by bank and is still very open.
- Bank has established a partnership with several institutions that have customer base and extensive distribution network for business development in some areas such as funding, loans and fee-based income.
- With the lowest loan to GDP ratio by 25%, Indonesia is expected to face a structural change in the credit cycle.
- Fixed UMK segment is a credit segment with the fastest growing.
- The existence of incentives from regulators to microcredit

T- Threats

- Intense competition in low cost fund raising by utilizing e-banking and other electronic channels.
- There is still a potential lawsuits from customers and counterparties associated with problems on old management.
- Recovery Failure on foreclosed productive assets and AYDA.
- Deterioration on credit assets portfolio in the material amount that impacted in decreasing on CAR.
- Increases in interest rates may tighten liquidity.
- Small-scale Bank more sensitive to the reputation threat.

b. Management Policy (*Policy Statement*)

In keeping with efforts to achieve business targets, Bank Mutiara has set and run five priority focus target for the year 2014 as the foundation for business growth, as follows:

1. Business Development:

- Evaluation & Development of lending business & funding
- KPI & scalable Financial models
- Budget Control
- Integrated MIS
- Strong Early Warning System
- NPL settlement

2. *Business Process*

- Mapping potential customer and competitor
- Develop business processes effectively and efficiently
- Integrated promotion program
- Monitoring disciplined sales process

3. *Risk Management*

- Evaluate and improve the policies and business processes
- Completion of the Early Warning System
- Quality Control

4. Human Resources

- Fulfillment of competent human resources
- Sustainable Training Program
- Interesting career path
- Incentive scheme
- Strong corporate culture

5. Infrastructure

- Optimization of office network
- Development of IT to support the business
- Establish an integrated IT

c. **Risk Management Policy and Compliance**

1. Strengthening the implementation of dual control and quality improvement through:
 - a. Implementation of RCSA (Risk Control Self-assessment)
 - b. Implementation of COSO Based Component
 - c. Implementation of Risk Based Audit (pilot project)
 - d. Develop Audit Rating System
2. Development and improvement on 8 kinds of segregated risk management profiles with business managers.
3. Improving the quality of implementation on the credit committee (NAK assisted by consultants, credit training Et LK by the Bank's internal staff).
4. Improving the implementation quality of the ALCO to set the competitive bank product interest rate.
5. Improving the quality of advice/management recommendations related to risk management, General Policy Risk Management (KUMR).

Strengthening the quality of compliance (GCG) and corporate culture:

- i) Strengthening the quality of management policies and decisions about products, services, as well as the management of the company as stated in the decree, memorandum, SOP both internal and external Bank by providing input to the divisions, socialize, make an assessment, and so on.
- ii) Implementation of know-your-customer principle, related to the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (APU dan PPT) by performing socialization and update data.
- iii) Strengthening on implementation of corporate culture based on the determined standard.

d. **Business Development Strategy**

With the new policy according to the Bank Indonesia Regulation Number 14/26/PBI/2012 on Business Activities and Office Network Based on the Bank's core capital today where the bank is trying to strengthen capital. For then on the next phase bank seeks to strengthen the implementation of the dual control and business quality improvement back in the future through: business development plan that is more focused on the field or micro segment, small and medium enterprises, such as retail and commercial, as well as working to improve funding composition at a better CASA.

Besides having established cooperation through "Bancassurance" it will also focused to develop products to support low-cost funds, and more optimize the existing network. Banks will also start doing repairs on upgrading core system to support and develop "E - Banking" and "M-Banking" to provide better facilities for prime customers, aside to be able to compete with other bank liabilities.

e. **Human Resources Development Strategy**

Strategy of Human Resource Development (HRD) and the Remuneration Policies that has been conducted in 2014, as follows:

1. Package/Remuneration policies and other facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors include:
 - a. Non natura Remuneration, including salaries and other fixed income, such as allowances (benefit), stock-based compensation, and other forms of remuneration.
 - b. Other facilities in natura/non-natura i.e no non fixed income, including housing allowances, transportation, health insurance and other facilities, which can be owned and can not be owned.
2. Disclosure package/remuneration policies referred to, includes:
 - a. Package/Remuneration policies and other facilities for Board of Commissioners and Board of

Directors members set by Bank RUPS.

- b. Types of remuneration and other facilities for all Board of Commissioners and Board of Directors members, at a minimum level cover the number of Board of Commissioners members, the number of the Board of Directors members, and the total number of packages/remuneration policies and other facilities referred.
- c. The number of Board of Commissioners and Directors members receive remuneration package within 1 (one) year, which are grouped in the range of income levels for 2014, as follows:

Remuneration per Individual in 1 year *)	Directors	Commissioner
Above Rp.2 miliar	-	-
Above Rp.1 miliar s.d. Rp. 2 miliar	3	-
Above Rp.500 juta s.d. Rp.1miliar	2	4
Under Rp. 500 million	-	-
Notes:		
*) Received in cash before tax		

3. Ratio of the highest salary and the lowest salary

- a. Salary is a right of employees which is received and expressed in terms of money as a reward from the company/employer to employees assigned and paid by an employment agreement, contracts, or laws, including allowances for employees and their families for a job and/or services he had done.
- b. Ratio of highest and lowest salaries per December 2014, on a comparative scale are as follows:
 - a. Ratio of the highest and the lowest salaries for employee is 1:19
 - b. Ratio of the highest and lowest salary for the Directors is 1:1, 11
 - c. Ratio of the highest and lowest salary for commissioner is 1:1, 39
 - d. Ratio of the highest salary of the directors and the highest salary for the employee is 1:2,

16

The salary compared in the salary ratio above is the remuneration received by members of the Board of Commissioners, Directors and employees per month.

Bank employee is a permanent employee up to the extent executor.

2. Business Plan

Is a bank business plan for the short term (1 year) and medium term (3 years) including a strategy to realize the plan, a plan to improve business performance, and plans for fulfillment on prudential requirements in line with the target and time setting.

Business plans arranged must remark the external/internal factors, the prudential principle, the implementation of risk management and healthy banking principles. Business plans should be carefully prepared, realistic and comprehensive so that it can better reflect the complexity of the business and can be set as policy and development direction for the Bank, and can also increase the operational flexibility of the Bank in facing higher competition. Business Plan prepared by the Board of Directors and must be approved by the Board of Commissioners and communicated to the shareholders and employees at all levels of organization.

Preparation of the Bank Business plan refer to Regulation of Bank Indonesia No. 12121/PBI/2010 dated October 19, 2010 on Bank Business Plan and Bank Indonesia memorandum No. 12127/DPNP dated October 25, 2010 concerning Commercial Bank Business plan, which at least includes an executive summary, management policies and strategies, risk management practices and current Bank performance, projections of financial statements and underlying assumptions, projections of ratios and other certain items, funding plan, funds investment plan, capital plan, organization and human resources development plan, products publication and/or implementation of new activities plan, plans on development and/or changes in the office network, and other informations.

Bank Business Plan must be submitted to Bank Indonesia no later than the end of November before the year Business Plan begins.

Business Plan Changes can only be done in 1 (one) time, at the latest by the end of the first half of the current year if:

- There are external and internal factors that significantly affect the operations of the Bank, and/or
- There are factors that significantly affect the Bank's performance based on the consideration of Bank Indonesia.
- PT Bank Mutiara Tbk has compiled RBB realistically, comprehensive, measurable (achievable) by observing the prudential principle and responsive to internal and external changes. Related to this matter can be described as:
 - ✓ RBB has been prepared on the assumption of future macroeconomic growth and the ability of the Bank itself accompanied by the implementation of the prudential principle to create realistic RBB, comprehensive and measurable (achiveable). Banks also quite responsive to the development of internal and external conditions by RBB Revised 2014-2016 year on June 30, 2014 through a letter to the OJK No.30.01 I 5-Dir PPD/Mutiara/VI/2014,
- The Board of Directors has implemented RBB effectively. It is done by Board of Directors, by monitoring the effectiveness on the implementation of RBB, as follows:
 - ✓ Monitoring the realization of RKAPI RBB to the shareholders on a monthly basis.
 - ✓ Monitoring the RBB realization submitted to Bank Indonesia on every Quarterly.
 - ✓ Monitoring realization achievement against RBB made directly at the end of each month by doing a "prognosis monthly meeting" so that the achievement in line with the targets set.
- Commissioners carry out supervision on the implementation of RBB. Related to this matter can be described as:
 - ✓ Commissioners already supervised the implementation of RBB through the preparation of the business plan supervise report (regularly per semester) submitted to the OJK and the monthly meeting of Directors-commissioner. In the report and the meeting, in addition to act as a supervisor, the Commissioner also provide direction and input for the future strategy to the Bank.

a. Short-Term Business Plan

a.1 Total Asset

The performance of PT Bank Mutiara Tbk for December 2014 decreased Rp.1.935,27 billion, from Rp.14.576,09 billion in December 2013 to Rp.12.640,82 billion. The decline in assets is the impact of losses due to decrease in the credit meltdown from capital limitedness, and a decrease in third party funds and interbank obligations settlement for liquidity optimization by the decrease in credit.

a.2 Total funds from Third Parties (DPK)

Third parties fund decreasing up to September 2014 amounted to Rp.696,29 billion from December 2013 Rp.11.558,08 billion to Rp.10.861,79 billion, is a bank attempt to manage optimal liquidity with the absence of credit expansion related to limited CAR ratio. Until the end of December 2014 third-parties funds has decreased by Rp.532,20 billion, or 4.6%, becoming Rp.11.025,88 billion in December 2014.

Seeing the condition of financial growth with the additional capital from new owner J Trust at the end of the 2014 period amounted to Rp. 300 billion in order to reduce dependence on expensive funds, bank is now trying to improve the composition of third party funds to the growth of lower cost funds by targeting the growth of CASA low-cost funds in December 2015 at 17.5%, from originally only 12.9% in December 2013 as well as in the next two-year period where in 2016 expected to raise up to 20.9% and in 2017 raise to 21, 7%. It is expected to reduce the high cost of funds, but will have an impact on increasing NIM from 1.7% in December 2013 to 2.8% in December 2014 and is expected in 2016 raise up to 4.6% and 5.9% in 2017, it is expected will increase earnings in 2015 and the next two-year periods.

a.3 Loans granted

Credit for 2014 has decreased quite large related to limited bank capital, a decrease from Rp. 11131.05 billion in December 2013 to Rp.7.843,70 billion in December 2014, or decrease for about Rp.3.287,35 billion. For December 2014 credit already considering write-offs for about Rp 500 billion, and to maintain capital ratios based on ICAAP 14% which resulted in a second decrease on outstanding loans compared to December 2013, as well as the existence of several repayment on NPL, the credit transfer to other banks and also some delays on credit disbursement in the beginning of the year remembering CAR is very limited as the fulfillment of minimum CAR requirement based on ICAAP that also increasing, about 11% -14% requiring Bank become selective in distributing lending to implement the prudential principle, especially with the very limited CAR to focus more on credit portfolio maintenance.

Credit expansion for the next 2015-2017 will focus on small loans, medium and micro.

a.4 Profit and loss

In 2014, acquisition /accumulation of profit and loss on bank in the current year on December 2014 period still remain of loss for minus Rp. 556.15 billion. aside from some debtors decreased collectability, this is because decrease on outstanding decrease as mentioned before in which it is causing decrease in net interest income, while the overhead cost keep on rising, this is mainly caused by:

1. Some negative issues near the transfer of bank LPS ownership until the 3rd quarter that befall on Bank Mutiara, has increased the cost of funds or in other words bank was forced to increased interest rate to defend. A number of negative issues that is ahead of the transfer of ownership of LPS bank until the 3rd quarter that befall Bank Mutiara, also has increased the cost of funds or in other words the Bank was forced to increase interest rates to defend third party funds so the cost of funds increase from 8.6% in 2013, to 9.9% in December 2014 period.
2. Total overhead cost in December 2014 amounted to Rp. 516.90 billion, still slightly above the target set at Rp.488, 14 billion. If it is seen on overhead cost components it can be explained as follows, general and administration costs realized Rp. 176.75 billion, slightly above the target set at Rp. 152.10 billion, however there is a bit of savings for promotional expenses from given target at Rp. 17.49 billion reach into Rp.13,41 billion, and other charges which consists of premium insurance cost and others from the original target Rp.29,72 billion realized for Rp. 19.63 billion. For personnel costs also have exceeded the budget target set by Rp.288,83 be realized Rp.307 billion, 11 billion, it is due to the imposition of severance pay/severance.

3. On other operational costs there are charge on severance pay/severance Rp. 17.8 billion at the end of the year in the transfer process have increased the personnel costs.
4. Banks also charge cost on FBME legal case GBP 5 million or Rp.97,68 billion.
5. Bank formed CKPN costs around Rp.182 billion to cover the shortfall.
6. On operational income component, aside from interest that still can be optimal especially income on provision commission, impact from withheld lending distribution. As well as securities from mark to market still can't be optimal still affected by the movement of a market decrease at the end of December 2014 period.
7. The high in non-operational load associated with the remapping of the costs previously recorded as operating expenses, including attorney fees, consultant fees and expenses of deferred charges.

As for the next target, will be described as below:

With the capital increase from the new owner at the end of this year amounted to Rp 300 billion and gradually up with the same amount for the next year, is expected in the next period the bank's business returned to growth and profitability back to normal, especially with the target expansion for 2015 until 2017. With the credit growth of Rp.1.652,63 billion, with the majority on high yield loans and accompanied by a decrease in cost of funds, eventually NIM will improve from 0.5% to 2.8% in 2015. With the credit expansion and treasury business development, fee base income that rests on the results of the commission and the provision of credit and foreign exchange transaction revenue is also expected to increase as well. The results of recovery on troubled asset are also significant approximately Rp.168 billion in contributing revenue so it can generate a combined on profit components that will generate a positives profit at the end of 2015 for about Rp.53,28 miliar, and it is expected will continue to grow to the next period, and in 2016 it is expected profit raise up to Rp.24,27 miliar, decrease due to profit genuinely resulted from bank business operation, and raise up to Rp.74,80 miliar in 2017.

On the overhead, increasing in the next year majority reserved to support business and the new strategic initiative such as: costs related to network expansion, headquarter transfer, capital expenditure, and IT costs to support business and increase in personnel costs. For the next year, on postal personnel cost for 2016 amounted to Rp.449,18 billion and Rp.651,57 billion in 2017, this is related to the plan on the addition of the new employees to support the new office opening and microcredit expansion as well as COLA increasing and reward based on performance. The new strategic plan also affected on general expenses and administration, so that it raise up to Rp.184, 11 billion in 2015 and raise to Rp.234,65 miliar and Rp.287,02 miliar for 2016 and 2017. Beside related with the business expansion, increasing administrative general expenses, and also include headquarter office relocation expenses that depreciated and continuation on spending plan and IT cost for business expansion and a possibility on upgrading/replacing core banking business in order to better accommodate development contribute to raise the BUA.

PPAP cost formed in line with the new credit growth and assumption that small part of new expansion (2%) are decrease in collectability, as seen on below table.

Table Cost on PPA Form of the new Credit Growth

	December -15	December- 16	December – 17
Loan Growth	1.662.630	2.493.196	2.331.775
Provisions for New NPL	1.620	2.443	2.285
Provisions for New Expansion	16.526	24.932	23.318
	18.146	27.375	25.603

Note:

- 1) 1% PPA for the new credit
- 2) Assumed 2% from the new expansion become as NPL, detail as follows
 - 5% Loss (100% PPAP)
 - 15% Doubtful (50% PPAP)
 - 80% Sub-standard (15% PPAP)
- 3) PPAP for NPL calculated after reduction on collateral assumed covering 80% from outstanding.

For 2015, the establishment of PPA cost Rp.18, 15 billion can be closed by recovery from troubled assets for as much Rp.168, 14 billion so that net PPA release can be as much as Rp.149,90 billion as shown on profit and loss table.

In 2016, profit gained after tax predicted to be decrease to Rp.24,27 billion by the absence of revenue on the recovery of the trouble assets. However this also implies that in 2016, bank already generate profit from bank operations and this conditions expected to keep on continue on the subsequent years.

Strategies to be done in 2015 period until 2017 to support profit gaining so that it can create balance sheet structure and good profit loss are as follows:

1. Attempt to increase fee based income in 2015 with the following:
 - Increasing fee based income remittance:
 - ✓ Performing intensive marketing to optimize remittance transaction by increasing cash encashment services remittances both domestic and overseas.
 - ✓ Increasing remittance partnership such as Mandiri D/S, BCA D/S, Fire, MoneyGram.
 - ✓ Reward and promotion by giving awards to the branch office and support on remittance promotions.
 - ✓ Alliance with other banks or companies who are possessing system remittance.
 - Adding and improve interbank line partnership.
 - Expand business on network owned by Jtrust include in Japan, Korea, and Singapore (Expanding cross-border transaction in the region).
 - Increase PIB transaction on branches.
 - Increase fee based from guaranteed bank publication partnership to companies with bonding permission (KGB).
 - Increase fee based income treasury:
 - ✓ Optimalization of treasury gallery and existing unit treasury as on stop service infrastructure to forex trading, market consulting.
 - ✓ Granting treasury line facilities such as tom, spot, forward, and swap for every corporate clients and money changer to generate profit for bank and increase volume.
 - Warehousing activities by placement of securities in mutual funds, where its management done by MI (Investment manager).
 - Increase fee based in credit field by increasing client transactions and developing product bundling and a special rate establishment.
2. Until December 2014, by using the wide office network (61 offices), Bank Mutiara will keep on optimizing the existing network and develop it based on capital power and also had been decide on ICAAP. While on micro opening it is planned to raise up to 26 organic kiosk and 25 outlet in organic in the form of kiosk replica, for the plan on kiosk office network development and outlet.
3. Keep on developing IT Core Banking and its infrastructure as one of supporting business acceleration.

4. Increase yield and investment management to produce optimal result.
5. Reconsideration and development on products and pricing establishment on competitive mode, however keep on giving profit so that it can compete in order to increase interest rate and fee based income.

a.5 **Financial Ratio**

1. **Capital:**

From minimum capital provision ratio, CAR (market, credit Et operational risk) as much as 14.03% at the end of 2013 and has been better with the additional paid-in capital of Rp. 300 billion raise up to 14.77% in December 2014. CAR condition under 14% is predicted to keep on continuing in January and February 2015 before the paid-in capital again at the end of I quarterly or gradually in 2015. In March 2015, CAR is predicted will raise again into 15,31% and currently bank begins to increase the outstanding balance of credit. CAR is predicted to raise up to 14,96% in 2016 and 15,17% in 2017. Bank try to maintain CAR in line with the provisions from Bank Indonesia and Good Corporate Governance and constantly fullfiling the provisions in force.

2. **Rentability**

NIM continues to improve from 0,3% in 2014 and become 2,8% in2015, and projected in 2016 will raise up to 4,6% and in 2017 raise up to 5,9%, bank strive to perform improvement on some factors detaining NIM.

Some attempt to increase NIM are as follows:

a. Increase low cost fund raising

Increase in DPK by considering cost and competitive interest rate as well as performing cost efficiency relate to funding, e.g operational costs, cash in safe, etc.

Attempt to repair funding mix by performing some innovation and program development for giro and savings as well as continuing services development.

Bank attempt to increase number of account by partnership with credit division anda reference from existing client and companies' by holding payroll for its employee. Through increasing in number of accounts, it is expected that low cost balance will keep on raising. Moreover, the addition on ATM feature is expected to increase services to clients so that they can transact freely in ATM unit anywhere.

b. Performing yield enhancement

Aside from reducing cost funding, increasing NIM also can be done by increase credit interest income by the following strategies:

- Continuing programs such as crash program on NPL settlement, as it has been running from 2013 to the end of 2014.
- Developing and performing microcredit expansion, which is planned in 2015 starts to open 26 kiosk and 25 microoutlet. Opening micro kiosk in 2014 to 2015 planned to spread in Jabodetabek, Banten, Central Java, and East Java.
- Performing rapid consumer and small credit expansion, but still hold on prudential principles.
- Selling AYDA and placing it on productive assets.
- Controlling deposito growth as high cost fund resources so that it will not experiencing rapid growth compared to credit increase.
- Transfer some placements on daily BI with low interest rate to the other productive assets placement with higher interest rates along the fund still can't be distributed in form of credit.

Other rentability ratio, such as ROA from negative 4,86% in December 2014 decrease to 0,58% in 2015 and is expected to get better related to profit gained. ROE improved from negative 56,7% in 2013 become 5,7% in 2015. In 2016 ROE and ROA decrease due to profit decrease gained genuinely from operational without recovery asset desired in the next period profit gained is operational result and sustainable.

3. **Liquidity**

PT Bank Mutiara Tbk constantly fulfilling the provisions in force for minimum obligations giro fulfillment (GWM) rupiah-primary as much as 8% and secondary for 2,5%. Including fulfillment on

GWM forex becoming 5% since march 2011, and fulfilling GWM ratio forex up to 8% starts from june 2011 based on provisions in force. Liquidity for daily operations is expected to remain well preserved, where placement on SUN and SBI rose from the placement of the bank capital increase. LDR is projected at 91, 0% in 2015 and for the period of 2016 amounted to 91, 8% and 91.8% in 2017, as the bank's efforts to optimize net interest income. LDR will be kept to constantly be between 78.0% and below 92.0% to avoid being hit by disincentive on GWM provisions and has been in effective since March 2011.

4. **Assets Quality:**

a. An increase in the percentage of collectability from 3.6% in 2013 to 4.9% in 2014 mainly because it caused by a decrease in outstanding loans. However as the credit growth in subsequent periods, the ratio of Non Performing Loan (NPL) can continue to improve. The NPL ratio is expected to maintain under 5% in 2015 and is projected to continue to improve in 2016 amounted to 3.6%, to 3.1% in 2017.

b. NPL ratio is projected to continue to improve and continue to maintain under the maximum limit required on Bank Indonesia regulations. This is done through some efforts by monitoring and handling non performing loans such as billing, restructuring and expansion of new loans are projected smoothly and the absence of new NPL. Efforts will be made to improve the quality of productive and non productive assets as follows:

- Conducting cooperative and prospective restructuring on problematic debtors.
- Maximize billing services by using third-parties services.
- Stratification on debtor that can be PKPU (Revision of Debt Settlement) and which can be bankrupted.
- Charging write-off securities through the courts.
- Conduct a reassessment on all AYDA and write-off collateral debtors.
- Optimization Auctioneer and KJPP (Office of Public Appraisal Service).
- Monitoring on problematic L/C cases.
- Conducting litigation or lawsuits to debtor who are not cooperative.
- Reorganization that leads to the sharpening unit.
- Appointing advisor in accounting, legal and appraisal.

c. The bank strives to form PPA based on the Regulation of Bank Indonesia, so that its compliance is always projected at a minimum of 100%.

5. **Credit ratio against total productive assets:**

Originally 80% in 2013 raised to 67.0% in September 2014 and 55.7% in December 2014 in line with the decrease in credit growth that were applied in 2014, the composition of the credit distribution against the total productive assets are projected to decrease with rising in asset growth. As for the next period in 2015 increased to 70.6% and 73.8% in 2016 and 75.4% in 2017 is the impact of credit growth which is expected to return to grow and normal in the next period.

6. **UMKM ratio (Micro, Small and Medium Enterprises) Against Total Credit**

As well as the credit distribution target for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are also projected for future periods may continues to increase every year. UMKM ratio against total credit was projected in 2014 by 41.8% and 43.7% in 2015 to re-grow to 44.3% in 2016, and for the next period in 2017 is projected to grow in around 44.7% and adjusted to the running credit growth.

b. **Middle Term Business Plan**

In preparing for the transition phase to the new ownership, the bank has set up several medium-term targets on the basis of short-term plan as the beginning or business base figure that can be described as the following:

Tahun 2014 (base figure)

Consolidation, transformation, Reorganization, Positioning

1. Business evaluation & infrastructure
2. NPL settlement (restructure, collection&WO), special mention collection
3. Improving financial performance
4. Business consolidation (organization, NPL, business) and business expansion preparation (Micro SME business and retail)
5. Set up a focused business strategy.
6. Sales force recruit.
7. Focus training on micro SME&consumer
8. Improving and optimizing branch office and its distribution network
9. Liability contingency.

Tahun 2015

Expand, optimization, and growth

1. Micro SME Business, Trade Finance and Treasury Development
2. Consumer program products develop
3. Optimizing infrastructure
4. Focus on Micro, Small and Medium Enterprises growth
5. Sales Force Recruit
6. Development of Micro SME business program, Commercial, Trade Finance
7. Optimizing CASA
8. Liability contingency

Tahun 2016

Improving (Infrastructure, Capacity, Capability) and Growth

1. Prepare implant Et agency banking infrastructure
2. Adding office network
3. Build Integrated Core Banking System
4. Restructure on Remuneration System
5. Focus on the growth of Micro, small and medium enterprises
6. Preparation of commercial banking business
7. Development of CASA for credit Micro, small and medium enterprises, Commercial, Trade Finance Et Consumer
8. CASA Growth
9. Development Et internet mobile banking
10. Liability contingency

Tahun 2017

Market Share

1. Enlarge market share
2. Focus on the growth of micro, small and medium enterprises
3. Growth in Retail Banking
4. CASA Growth
5. Liabilities Contingency

c. Long term business plan

For further long-term business development can be described with a focus on strategy as follows:

2018

Integrated Expansion

1. The market share, profit
2. Micro, small and medium Integrated banking
3. The growth of sustainable business
4. Addition office network

2019

Integrated Expansion

1. Strengthening the market position and strengthen sustainable profit
2. Integrated banking Micro SME Et Commercial, Retail Consumer
3. Strengthening business growth

C. Transparency of Financial and Non-Financial condition unrevealed In Other Reports

As a public company, PT Bank Mutiara Tbk has provided disclosure information regarding financial and non-financial Bank condition to stakeholders through publication of Annual Financial Statements, Quarterly Financial Reports and Other reports submitted to regulators such as Bank Indonesia (BI), Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX) as well as other stakeholders based on regulations applied. The Annual Financial Report published in at least two newspapers on national distribution, for the Quarterly Report published at least on one national newspaper and can be accessed through the bank's web site.

Aside from publishing its Financial Statements, PT Bank Mutiara Tbk also prepare and submit the publication of the Annual Report. Annual Report is expected to increase the transparency of the Bank as a whole, including ownership, business growth and Bank performance to the public in maintaining public confidence against Bank. Annual Report must be submitted to the Shareholders, Bank Indonesia (BI), Financial Services Authority (OJK), the Indonesian Consumers Foundation (YLKI), Rating Agency Indonesia, the Association of Banks in Indonesia (PERBANAS), Bankers Indonesian Institute (IBI), two (2) Research Institution in Economics and Finance competent, two (2) Economy and Finance famous magazine.

The coverage on Annual Report is quite comprehensive, covering Public Information, Annual Financial Statements, Opinion from the Public Accounting Firm (KAP), transparency regarding Business Group, transparency on employment report, transparency on reporting in accordance with PASK, Exposure and Risk Management and other Information closely related to Bank Operations.

General information including: board of Management, details of Shareholding, Bank business development, objectives, strategy and management policies, organizational structure, major activities, Information Technology, office networks, and important things that are predicted to occur in the future, the number and HR structures. While the Annual Financial Report is a year-end financial report as a result of the audit from Public Accounting Firm (KAP) and their opinions.

Transparency should also apply to information about bank products to provide clarity to the customers about the benefits and the risks inherent in Bank Products. This transparency can be information in Indonesian delivered to the customers completely and clear regarding product characteristics both oral and written. The information is at least covering the product name, product type, the benefits and risks attached, protocols in using the product, costs of products, calculation of interest or profit sharing and margin benefit, validity period of products and Bank product publishers including presence and absence of guarantee products. Changes made shall immediately notified to the customer. The information about the products should be clear, including the layout and legibility.

Bank also continuously updating customer data, so that the personal data submitted by the customer banks are in addition to be transparent are also the latest data, besides to improve protection against customers' rights in connecting with bank but also to minimizing other risks caused by the incorrect or inaccurate customers' data. Bank must also request written consent from customer if bank will provide and distribute customers' private data to other parties for commercial purposes, unless otherwise stipulated by other laws and regulations.

Transparency should also be carried out on customer complaints settlement, in which it is a form of increasing customer protection so that customers rights in transactions with the Bank always guaranteed. Customer complaints should be followed up so that it won't harm the bank's reputation and may reduce public confidence against banking institutions. Bank given time to an settlement of an oral complaint for 2 working days and 20 (twenty) working days on written complaints settlement.

Banks should provide a unit or a special function at any Bank office address and resolve customer complaints and shall publish the existence of this unit to the public. The result of the complaint handling and settlement is quarterly reported to Bank Indonesia.

D. Number of Internal Storage (Internal Fraud) and settlement efforts by Bank

Internal Fraud is irregularities/fraud committed by management, permanent and temporary employees (honorarium and outsourcing) related to the work process and the Bank's operations that affect the Bank's financial condition significantly. Point in affecting significantly to the Bank's financial condition is if the impact of the irrelevancy are > Rp.100.000.000, - (one hundred million rupiah).

Throughout 2014 the number of fraud cases (Internal Fraud) performed by Bank employees and/or external parties that affect the Bank's financial condition significantly or impact of deviations > Rp.100.000.000, - (one hundred million rupiah) are as the following table:

(satuan)

Internal fraud in a year	Cases done by						Notes
	Management		Permanent Employee		Temporary Employee		
	Previous Year	2014	Previous Year	2014	Previous Year	2014	
Total Fraud	-	-	1	2	-	-	1. Granting loan in Medan Asia Branch 2. Fake bilyet giro in Serpong Branch
Done	-	-	1	2	-	-	
On Settlement process in bank internal	-	-	-	-	-	-	
completion has not been sought	-	-	-	-	-	-	
Done legal process	-	-	-	-	-	-	

In fraud cases (Internal Fraud), whether it is committed by employees and/or external parties and have reported to the OJK/Bank Indonesia based on provisions concerning Anti-Fraud Strategy Implementation for Commercial Banks. Furthermore, monitoring of the case carried out by the Internal Audit Unit (SKAI), and the Bank employees involved has been handled by the Settlement Employees Team (TPK).

E. Implementation of Anti-Fraud Strategy

In accordance with Memorandum of Bank Indonesia No.13/28/DPNP dated December 9, 2011 regarding Implementation of Anti Fraud Strategy for Commercial Bank, in order to implement Anti-Fraud Strategy of Bank Mutiara (SAFBM), PT Bank Mutiara Tbk has issued Board of Directors Decree No. 05. 02/S. Kep-Dir-IAD/Mutiara/VI/2012 dated June 5, 2012 concerning Bank Mutiara Anti Fraud Strategy SOP, which rule four (4) Anti Fraud pillars, they are Prevention, Detection, Investigasi and Monitoring.

Anti Fraud Strategy has been implemented during 2014 include:

1. Prevention:

- a. Advanced socialization of Anti Fraud in Division and Branch
- b. The signing of Integrity Pact
- c. Published Corporate Ethics book
- d. Distribute Anti Fraud SOP
- e. Preparation of Fraud Risk Assessment (FRA)
- f. Determination program Know Your Employee (KYE)

2. Detection:

- a. Completing Whistleblower System (WBS)
- b. WBS socialization

- c. Perform surprise audit in Kas Branch Office and Securities
 - d. Supervision Activities over the credit activities
3. **Investigation:**
- a. Collecting Data Fraud/case
 - b. Investigation Team Determination
 - c. Documents examination
 - d. Interview
 - e. Making Police investigation report (BAP)
 - f. On The Spot (OTS) for the purpose of cross-checking facts on the ground
 - g. Perform data analysis
 - h. Reporting investigation results
 - i. Determination of the parties responsible and sanctions
4. **Monitoring:**
- a. Monitoring on the implementation of sanctions
 - b. Delivering Anti Fraud report to Bank Indonesia

The SOP must contained fraud follow detection strategy to establish policies Whistleblower System (WBS) include:

- 1) Determination of fraud reporting tool such as Mailbox, SMS and Anti Fraud Portal.
- 2) Determination of officer who are entitled to access the WBS, in this case held by the Main Director, the implementation of an investigation carried out by the Internal Audit Unit (SKAI)/Anti-Fraud Department.
- 3) Confidential information and guarantees on the complainant identity.
- 4) Award for complainant in which information reported contains truth and can prevent the fraud.

Aside from that, in preventing fraud, PT Bank Mutiara Tbk has been implementing prevention strategies as follows:

- 1) Anti Fraud Awareness Program intended to raise awareness about the importance of preventing Fraud by all relevant parties, among others by preparing and campaigning/socialization of slogan "No Fraud Tolerance" as a slogan for Anti Fraud and signing of Anti-Fraud Charter, Annual Disclosure and Integrity Pact.T
- 2) The recruitment procedure is effective, which is equipped with the right qualifications by considering the risks, as well as defined objectively and transparently.
- 3) Know Your Employee (KYE) i.e. monitoring effort and character recognition, behaviors, and lifestyles of employees in working unit.

Submission Violation Report

In order to implement the Anti Fraud Strategy of Bank Mutiara, i.e. the implementation of Pillar Detection, bank has established a policy ruling the mechanisms on Fraud reporting (Whistleblowing System) which has transparent and consistently applied in order to generate confidence for all Bank employees against reliability and confidentiality on Whistleblowing System. Suspicious incident/offense known by the employee must be reported to management by using Whistleblowing System (WBS), they are:

- SMS/WhatsApp sent to Number: 0813 1504 5555.
- Anti fraud Portal with the address/Address http://10.11.11:30/mutiara_serasi.
- Post Office Box 99 Jakarta 10000.

Whistleblower protection

- Bank committed to protect the complainant with their good faith and obedient to all relevant rules and regulations and best practices applied in the implementation of Violation Reporting System (Whistleblowing System).
- The protection afforded to the complainant includes bank protection against adverse treatment such as unfair dismissal, demotion/promotion, discrimination in all its forms, and record adverse in employee personal archives (personal record file).

Complaint Handling

Complaints/infringement reports that submitted to WBS and contains a truth supported by evidence that would corroborate reported by the Board for following-up investigation by the Investigation Audit Team.

Complaint Manager

WBS The bank is managed and monitored by the Anti-Fraud Department under the SKAI Organizational Structure and directly responsible to the Director.

Number of Complaint

Since WBS assigned in 2012 up to December 2014 there had been information coming in submitted by officer through WBS, details as shown on the table below:

WBS Infrastructure	Number of Information	Material	Informatio
SMS	42 times	1. Account Related 2. Branch kas condition	Followed up 44
Portal	2 times	1. Username use 2. Officer Professionality	
Mailbox 99 Jakarta 10000 Total	- 44 times		Followed up 44 (100%)

F. Number of Legal Issues and Efforts Settlement by Bank

Legal issues are civil law issues and criminal law issues faced by bank throughout the year period and a report has been filed through the legal process.

Throughout the 2014 the number of civil and criminal law issues faced by PT Bank Mutiara Tbk, which has been filed through the legal process, as the following table:

1. Bank as Defendant/Respondent/challenged/Reported

(satuan)

Legal Issues		
	Civil Issues	Criminal Issues
Finished (contained fixed legal power)	9	2
On settlement process	21	0
Total	30	2

2. Bank as the Plaintiff/Applicant/Pelawan/reporter

(satuan)

Legal Issues		
	Civil Issues	Criminal Issues
A. Issue related to fraud and TPPU done by employee		
Finished (maintaining fixed legal power)		
On settlement process		2
Total		2
B. Issue related to force on execution on court decision sentenced bank to return fund.		
Finished (maintaining fixed legal power)		
On settlement process	1	
Total	1	
C. Issue related to fund possession		
Finished (maintaining fixed legal power)		
On settlement process	1	
Total	1	

Legal issues commonly faced by Bank are:

- **Civil issues** faced by Bank regarding claims from investors products investment owned by PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia, ownership dispute over the Security Deposit and Securities, debtor resistance on the auction planned and fund ownership disputes.
- **Criminal issues** are a problem faced by Bank officers or former officers, which is currently in the legal process by the authorities and some of the proceedings are in the District Court, but no one

already get a decision from the court that has binding legal force.

Efforts to resolve the legal issues by Bank include:

- Ensuring the handling of cases, whether handled by the internal and external lawyer in accordance with the provisions of law applied.
- Monitor the handling of legal cases handled by both internal and external lawyer.

G. The Use of Service Provider on Information technology/Vendor TI

Based PBI No.9/15/PBI/2007 dated November 30 2007, and SE BI 9/30/DPNP dated December 12, 2007 regarding Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks, Bank may use the services of the other party/parties information technology services provider to organize the activities of information technology in order to improve the effectiveness and efficiency of the achievement of strategic objectives.

The use of TI service providers cause Bank has a dependence on the services provided on an ongoing basis or within a certain period that can affect the incidence of the risk of the Bank in the form of operational risk, compliance, legal and reputational, among others, for the failure of service providers in providing services, breach of security or inability to comply with laws and regulations applied.

a. Selection Process and Determination of the Service Provider Information Technology

In general the Selection Process and the determination of the Service Provider Information technology provider/vendor candidates of TI (related to the cooperation system/program) in PT Bank Mutiara Tbk include:

a.1 Obtaining resources of prospective vendors TI from:

- Previous experience in interacting with prospective vendors.
- Network introductions fellow IT banking.
- Browsing on the internet.
- Input from business unit/division/branch/other internal.
- Seminar or training.

a.2 Criteria and basic consideration in determining the prospective vendor TI to be selected:

Meets the highest total value/maximum 100 of the combined three aspects of assessment, i.e.:

- Functional Aspects, weights 40% with a maximum value of 40.
- Technical Aspects, weights 30% with a maximum value of 30.
- Financial Aspects, weights 30% with a maximum value of 30.

a.3 Procedures of request for approval on prospective IT vendor to be selected:

- Conduct a review on the annual business plan that contains a list of projects which will be run, and set priorities for the project which will be run.
- Gathers requirements/functional needs from the business unit.
- Gathers requirements/technical needs from the IT Division.
- Saw requirement/financial needs/Budget on the annual business plan.
- Preparation of TOR (Terms of Reference) based on the functional and technical requirements.
- Send presentation invitations and its TOR to several IT vendors eaton.
- Presentation from IT Vendor Candidates.
- IT Vendor Candidates submit tender proposals based on TOR.
- Invite POC (Proof Of Concept) of eaton vendor TI (if it is possible for POC).
- Candidates IT vendors perform POC (if it is possible for POC).
- Assess all aspects (total maximum value of 100) consists of:
 - Functional Aspects (maximum value 40), assessed by the business unit as a user.
 - Technical Aspects (maximum value 30), assessed by IT Division.
 - Financial Aspects (maximum value 30), assessed by a Fixed Asset Procurement Division.
- Assessment on IT vendors discussed in the IT Committee (if the project is strategic).

- IT Committee according to the appropriate authority provides recommendations to the Board of Directors.
- The Board of Directors shall approve or decline the IT Committee recommendations.
- After approved by the Board of Directors based on limits authority based applicable limit, the Procurement Division of a Fixed Asset following up engagement process of IT vendor hereinafter: Purchase Order process/Work Order manufacture, contracts and others.

b. Monitoring/Supervision of IT Vendor in Vendor Management

Banks are required to possess a data monitoring program of IT vendor on an ongoing basis to ensure the service providers/IT vendors has been carrying out work/provide services in accordance with the contract/agreement to perform:

- Monitoring the achievement of SLA (Service Level Agreement) from main vendors of IT.
- Routine working visit to the work location/data center of the main IT vendor.
- Requests for annual financial statements (Audited) IT major vendor.
- Request an independent audit results from the relevant institutions such as ISO.
- Meeting regularly with the main IT vendor.
- Monitoring progress on the completion of IT projects periodically according to the Project Management principles.

The following is a list of IT projects and Vendor IT in cooperation with PT Bank Mutiara Tbk throughout 2014:

No	Vendor Name	Project Name	Project Goals	Status
1	PT. Megawastu Solusindo	Retail Treasury	Forex buy and sell integration process between branch and headquarter	Terminated, unresolved by vendor
2	PT. Visionet Internasional	Network Security procurement	Improve network security	Finished
3	PT. Visionet Internasional	Hardware Web Teller Procurement	Providing Hardware for Web Teller apps	Finished
4	PT. Tridas Widiantara	IFTI Reporting Module (International Financial Transfer Instruction) for Moenygram Transaction	Reporting automation on IFTI to the GRIPS PPATK related to Moneygram transaction	Finished
5	PT. Teravin Technovations	Corporate Internet Banking	Corporate client can use internet banking services	Finished on development, waiting for OJK for launching
6	PT. Misys International Financial System	Upgrade Core Banking System – Bank Fusion Equation	Improve certain function on core banking	Finished on development, Live in January 2015
7	PT. Vaia Indonesia	Project Management Office (PMO) for upgrading core	Ensure upgrade core banking system runs well	Following upgrade core banking system project

		banking system		
8	PT. Multipolar Technology	PSAK 50/55 Module	Financial Report based on PSAK 50/55 provisions	On progress
9	PT. Tri Daya Asira	Interface RTGS New Generation & SKN with core banking system	RTGS automation New Generation & SKN, no double input	On Progress

CHAPTER VII FUNDING FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

7.1. Funding for Social Activities

Funding for Social Activities is a form of implementation on the corporate social responsibility program (Corporate Social Responsibility/CSR) of PT Bank Mutiara Tbk, which is believed it can create conducive community conditions, and capable of responding to changes in society, which could eventually create mutually beneficial relationships between PT Bank Mutiara Tbk and the wider community.

PT Bank Mutiara Tbk constantly strive to create a harmony atmosphere of activities operation to the community wide and caring environment, which is expected to be a company that continues loved by the people. The creation of a society that is safe, comfortable and dynamic believed to be ideal conditions for the survival of any business in the world.

Based on the idea that the company is part of a society, PT Bank Mutiara Tbk realize that the company has a social responsibility to develop and empower the lives of surrounding communities through the program "Mutiara Peduli" focus on education, health, social religious, caring living environment and emergency response in every nature disaster.

Five Pillars of CSR

In order to carry out regarding all above aspects, PT Bank Mutiara Tbk perform some efforts by paying attention to the five pillars of CSR, as a principle in the implementation in the field. The five pillars are as follows:

- ***Building Human Capital***

Internally, the Bank strives to create reliable human resources. While externally, the Bank strives to empower the community, primarily through community development.

- ***Strengthening Economies***

Bank seeks to make profit by taking into account the interests and welfare of the community in the economic environment in which it operates.

- ***Assessing Social Tension***

Bank continues to maintain harmony with the surrounding communities in order to avoid conflict.

- ***Encouraging Good Governance***

In conducting its business, Bank always run good corporate governance well.

- ***Protecting The Environment***

Bank strives to conserve the environment.

CSR Program 2014

Throughout 2014, PT Bank Mutiara Tbk continues to participate in building a society within the framework of the implementation of CSR programs as well as details of distributing CSR funds focused in several fields of activity as follows:

Activity table and Realization of Corporate Social Responsibility:

No	Activities	Realization (Rp)
1	Education	107.000.000
2	Health and Education	215.864.800
3	Social – Religion	129.967.100
Total		452.821.900

In more detail, the various activities carried out by PT Bank Mutiara Tbk in the CSR program are as follows:

1. Education

One of the CSR program in education conducted by PT Bank Mutiara Tbk is a donation education assistance program in cooperation with Pondok Pesantren Arr-Hikmah Rojaul Tambun, West Java in form of donations for the education of the students.

In addition, there is also provision of financial assistance to the empowerment of the people in order to empower the economic field, which is expected by the empowerment of the people in this economy can provide the knowledge for the community in Madura and the surrounding region.

Then, also conducted educational assistance compensation to the students through the Sampoerna Foundation engaged in the field of education for students who underprivileged.

The table details the distribution of funds CSR program for education in 2014:

Education Activities Table

No	Activities	Realization (Rp)
1	Education Aid to Pondok Pesantren Ar Rojaul Hikmah	2.000.000
2	Community Economic Empowerment Aid for Madura Community	50.000.000
3	Education Aid for students through 'Sampoerna Academy' Foundation	55.000.000
Total		107.000.000

2. Health and Humanity

Routine program of PT Bank Mutiara Tbk in CSR activities in the field of health and humanity is the activities of blood donation in cooperation with the Indonesian Red Cross (PMI). The event is held in the bank's office building held regularly two (2) times a year.

In addition, PT Bank Mutiara Tbk also participated in several charitable activities by provision of assistance to flood victims in Central Java and manufacturing street lights in the village of Wasian Manado.

The table details the distribution of CSR funds for health and humanitarian program activities in 2014:

Table Health and Humanity Programs

No	Activities	Realization (Rp)
1	Blood Donation PT Bank Mutiara Tbk (2x in a year)	8.974.800
2	Charity program for flood survivor in Jepara Central Java	100.000.000
3	Donation 2 bike unit and 50 trees pucuk merah in Solo	4.890.000
4	Public Welafer Fund Donation for Solo Community	75.000.000
5	Aid in road light making in Wasian Village Manado	10.000.000
6	Medical Aid on Gunung Kelud disaster	2.000.000
7	Disaster aid through 'Perbankan Peduli'	15.000.000
Total		215.864.800

3. Social and Religious

Forms of CSR activities in the fields of social and religious run by PT Bank Mutiara Tbk in 2014 include the construction or renovation of houses of worship, either mosques, Mushollah, boarding school located in the community, offices and/or educational environment, as well as other places of worship. Including donations to orphans surrounding bank's environment coordinated by board of Masjid Al-Ijtihad Jakarta Setiabudi.

The arrangement of the qurban distributed to the underprivileged community around the neighborhood Central Office of Bank Mutiara.

The table below are details of the distribution of CSR funds for social and religious activities in 2014:

Table Social and Religious Programs

No	Programs	Realization (Rp)
1	Rumah Quran Masjid Al-Anshor	5.000.000
2	Mosque Building Construction in Sumenep	17.400.000
3	Mushollah Al-Hasyim Sumenep Building Construction	4.000.000
4	Mushollah Annur Building Construction	2.000.000
5	Masjid Al-Ijtihad Setiabudi Building Construction	5.000.000
6	Mushollah Wali Songo Desa Talango Renovation	4.000.000
7	Maulid Nabi Muhammad SAW Setiabudi event sponsor	5.000.000
8	Pengajian Akbar Activities	1.857.100
9	Masjid Al-Ijtihad Setiabudi Renovation	5.000.000
10	Yayasan Yoseph Yeemye Makassar	5.000.000
11	SDI Cikal Harapan Banten	3.000.000
12	Mushollah Baiturrahmah Rehabilitation	4.200.000
13	Santunan anak Yatim Piatu in Masjid Al-Ijtihad Setiabudi	12.850.000
14	Santunan anak yatim piatu TPA Al-Amal Jakarta	2.500.000
15	Mutiara Ramadhan Bank Mutiara in Solo	3.500.000
16	Pondok Pesantren in Madura	17.950.000
17	Kubah Masjid Al Kautsar Pengecoran	4.000.000
18	Bantuan Mushollah Nurul Iman Desa Compur Barat	4.200.000

19	Mutiara Ramadhan in Kertajaya	3.000.000
20	Pemotongan Hewan Qurban in Jakarta	20.500.000
	Total	129.957.100

CSR Program Plan 2015

In addition to permanent attention and increase activity in accordance with the five pillars of CSR PT Bank Mutiara Tbk as described previously, PT Bank Mutiara Tbk will also support the OJK initiative in the field of financial education (in banking). Support for the program named SIKAPI that have been implemented in the period 2014 to the community around the headquarter, as an expression of care PT Bank Mutiara Tbk on society.

7.2. Granting Funds for Political Activity

As in previous years, during 2014 PT Bank Mutiara Tbk never engage in political activities or make a donation of funds for political activities.

No	Program Name	Amount (Rp)
NIHIL		

Self Assessment Report (Self Assessment/Implementation of GCG Bank)

- GCG implementation requires assessments to determine to what extent of the corporate governance principles that have been conducted by PT Bank Mutiara Tbk. The assessment is also useful to look at the extent to which the quality of GCG implementation on an ongoing basis into business processes.
- PT Bank Mutiara Tbk carry out a self-assessment in accordance with the provisions of Bank Indonesia, which requires that Bank perform internal self-assessment of the implementation of GCG.
- Herewith submitted Self Assessment Report (Self Assessment) on Implementation of GCG PT Bank Mutiara Tbk for Semester 11/Position December 2014:

Self Assessment on Implementation of GCG Bank		
	Rank	Rank Definition
Individual	4	Not Good

Consolidation	---	If subsidiary company available
Analysis		
<p>Based on Self Assessment Working Paper on implementation of GCG and data/other relevant supporting documents (internal and external audit results, data/financial information I Non-Financial Bank), it could be said the results of the self assessment GCG Bank are as follows:</p> <p>A. <u>Strengths:</u></p> <p>a. <u>Governance Structure:</u></p> <p><i>Governance structure is a structure of power following the requirements of officer in the Bank as required by legislation applied.</i></p> <p>Associated with the implementation of the governance structure, among others, can be delivered more of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Has the last RUPS held in 2014 by the Extraordinary RUPS on December 30, 2014 in accordance with regulations applied. • Composition of the Board of Commissioners consists of people who are skilled and experienced, have integrity, competence and adequate reputation, and the Board of Commissioners has been monitoring the implementation of GCG and compliance functions. • Composition of the Board of Directors has the competence, integrity and has been tested, and has a good understanding of the banking financial industry, as well as the Board of Directors has made efforts to foster a culture of compliance and implementation of GCG. • Committees have been established under the Board of Commissioners and under the Board of Directors in accordance with applicable regulations, as well as members of committees have the competence and have been carrying out their duties and responsibilities. • Already possessed Policies and Standard Operation Procedures/SOP about Conflict of interest, always updated. • Already have infra Structure Organization on Risk Management, Compliance and Legal fields, with adequate human resources competency. • Has had Organizational Structure on Internal Audit Unit/SKAI with adequate human resource competencies and can work independently. • Already appoint Public Accountant/KAP that meet the legal aspects and professional standards of public accountants to audit. • Has had Policies, Procedures/SOP and Product Manual, as well as the stage of complete system and infrastructure as needed that constantly updated in accordance with Bank Indonesia regulations and legislation in force, and has implemented PSAK 50 a 55 relating to the calculation CKPN. • Have had a policy on limit Terminate Privileges Credit limit/BWMK individually or collegially in accordance with the functions, duties and responsibilities of each board of management. • Financial Statements presented in transparent, and product-related information including bank deposit rate and lending rate is also presented in transparent in accordance with the provisions. • Has run programs Banking Development Staff (BDS) and Banking Development Officer (BDO) that are structured according to the roadmap has been prepared, as 		

well as the "Special Hire" for some positions and advisor. have established Champion business and Branch Roll Out team to the transformation of the branches in further improve of the quality and quantity of human resources in the branches as needed as the spearhead sales and service, as well as recruitment and training of new staff.

b. Governance Process:

Governance process is the setting of duties, powers and responsibilities of units and bank officials in running the business and banking operations.

Related to the implementation of Governance process, among others, can be delivered more of the following:

- The Board of Commissioners and Board of Directors perform duties, functions and responsibilities as has been clearly stated in Bank's Articles and the regulations applied.
- Board of Commissioners has been carrying out its duties and responsibilities, has been monitoring/provide advice to the Board of Directors, directing, monitoring and evaluating the implementation of the strategic policy, has monitored and remind the Board of Directors to follow up all the findings from internal audit and external audit, and are not involved in decisions relating to operational activities.
- Committees under the Board of Commissioners and Committees under the Board of Directors has performed duties and responsibilities optimally.
- In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Board of Directors have never entered the realm in Conflict of Interest.
- Member of the Board of Directors do not hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers or as a bank, company and/or other institutions.
- In order to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG), the Board of Directors has been formed and appoint Members of the Committee and certain work units responsible to the Board of Directors, a.l. : Division of Compliance, Risk Management Division, Legal Division, Internal Audit, Risk Management Committee, Information Technology Steering Committee, ALCO Committee, and so on.
- Risk Management and Compliance Division as a second line of defense has worked independently and be guided by the applicable regulations.
- Bank constantly trying to reduce the offense to be better and as much as possible to avoid infringement in an effort to build a Culture of Compliance.
- Internal Audit/Internal Audit as a third line of defense has been working independently and guided by the provisions in force.
- Bank operational activity has been run independently without the intervention of Shareholders (shareholder) or other interested parties (stakeholders).
- The appointment process of Public Accounting Firm (KAP Registered) in compliance with the procedures applied and GCG principles, and transparency process on Financial Report is always done and well presented.
- Implementation stages in HR Competency improvement in carrying out the functions and duties according to the policies and SOP and statutory of provisions in force, which gradually supported by adequate infrastructure systems.
- The implementation process of Risk Management has aligned with risk management

policies and procedures, as well as the provision of funds to related parties and large exposures, the decision was at the discretion of a procedures in force.

- Has been working to meet the target on the bank's business strategic plan through policies that constantly adjusted to take into account the competitive and economic conditions, as well as the prudential principles.
- Exceedances BMPK settlement process still continue to be pursued through the action plan submitted to the Shareholders and the Regulator, and is expected to be overcome with the capital injection which is the commitment of J-Trust.
- Has conducted the tests on policy and SOP Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Recovery Plan (DRP), witnessed and reviewed by an independent party, and has also equipped on alternative procedure on each SOP in each work unit.
- Implement Compliance Monitoring Report (CRM) more effectively, and have been prepared SOP work unit in order to improve business processes including related policies, organization, credit authority holder and SLA credit.

c. Governance Outcomes:

Governance Outcomes are the result of the implementation of both aspects of GCG results/performance as well as how practices used to achieve these performance results.

Among other governance related outcomes can be delivered more of the following:

- Board of Commissioners has supervised and provide a recommendation or advice to the Board of Directors in an effort to improve performance and bank values through the Board of Directors and Commissioners Meeting (Radirkom and Decision Review Meeting of RKK), Meeting of the Committee under the Commissioner and by mail to the Management.
- The new shareholders (J-Trust) has committed to a capital injection on a regular basis, where J-Trust will carry out the capital increase gradually as needed.
- The Board of Directors has been accountable execution of his duty to the Shareholders/PS through the General Meeting of Shareholders/RUPS, maintain communication on all levels related to the vision and mission of the company, increasing employee competency.
- Committees have provided recommendations and guidance to the Board of Commissioners related to problems in internal control, risk management and other useful thing.
- Findings from Internal Audit Unit/SKAI and the external auditors have largely been resolved in accordance with the target time, and on an ongoing basis will continue to increase the monitoring of following-up DMTL to related units.
- Compliance Reports, TKB biannually report was submitted to the Regulator with coverage according to regulations in force, and quarterly risk Profit report has been submitted to the Regulator in accordance with provisions in force.
- Fulfillment Efforts on quantity and quality/competence of human resources, as well as policies and SOP compliance phase as well as systems and supporting infrastructure, impact on the ongoing activities of the operational and adequate business in accordance with provisions, which is run by the prudential principles.
- Provision of funds to related parties and the provision of funds carried out based on the BMPK (disbursement account the bank's capital).
- Information on products and services as well as other information a.l. SBDK, LPS

Guarantee Interest Rate Announcement, has been delivered to customers in transparent both written and oral.

- Employee Settlement Team (TPK) is done intensively in follow-up investigations and inquiries conducted employee fraud issues as part of a moral enforcement, and intensify the application of the Anti Fraud Policy includes whistleblower.
- Bank has implemented the relevant provisions related to Customer Complaints Management and reporting to the Regulator.

B. Weaknesses

a. Governance Structure:

- The results of the latest RUPS was held on December 30, 2014 the number of the Board of Commissioners have not been fulfill, where the number only 2 and the Bank has delivered notice to the OJK with commitment in adding commissioner through RUPS no later than March 2015 (the aspect of accountability).
- There is still a Committee under the Commissioner i.e. Remuneration and Nomination Committee, while the interim Chairman of the committee is "vacant" because the number of independent directors only one (1) person who may serve two (2) committees, while the number of Committees under the Board of Commissioners are 3 (three) Committee.
- The adequacy and competence of Human Resources/HR (human resources aspect) and infrastructure systems to support the bank's business that still need to be fulfill and further improved (accountability aspect).

b. Governance Process:

- Credit monitoring have not done optimally (compliance aspects) that this can affected to:
 - Adequacy in ability information and debtor business growth.
 - There is no Credit Facility Extension process is done close to due date, so the quality of the analysis is optimal.
 - Bridging Finance at the time debtor gets paid from bowhir/business relations can be well-monitored.
 - Decrease in the quality of the performance aspects, business prospects and repayment capability and the business of the debtor is not early detected.
- Loan process is not done according to regulations in force (compliance aspect), affected in:
 - Optimal monitoring on the appropriateness of using credit on end-users (e.g bridging Bakti Pos takeover from Bank Niaga and personal interest of the Bakti Pos supervisor), and to anticipate the emergence of problematic credits from other debtors.
 - Improving the quality of human resources in business units, which have started to be followed up by efforts to provide training, as well as the program Banking Development Officer (BDO) and Banking Development Staff (BDS).
 - Fulfillment of the documents (the legality of operations, eg mentioning for industrial enterprises, among others: PT Pensonic Indonesia, I Wayan Tunas, Soetikno, and SKDP a/n. PT Mega Prima Pertamina, PT Air Source of Life, PT Prima Mandiri Mangan).
 - Compliance on RKK Decision (unaudited Financial Statements, they are: PT Air

Source of Life. PT Arjuna Finance).

- NPL ratio above provisions, and a decrease in earnings as well as the impact on the impairment of the Bank and GCG.
- Core system is not optimal yet to support MIS and accurate and timely reporting, so the impact lies on governance outcomes, i.e.:
 - Minimizing reprimands and penalties due to late and inaccurate reports (compliance aspect).
 - Optimizing Security Dual Control at the Core system for verification on customer data changes (updating data) conducted by CS/UKPN Branch.
- There still remains infringement on important ratios, including NPL ratio, BMPK, LOR, so it's need to repair and improve governance process, including an increase in awareness of the Policies and Procedures and other provisions in force.
- Awareness is not optimal yet from the Leader's Office and Operations Manager (KBO) on the implementation of APU · PPT who have supported Smart AML automation system, so there are findings from the Internal Audit Unit (SKAI) and the OJK, they are: Data Updating and Dual CIF. In the future this will be followed by Letter of Reprimand To Branch/Sub Branch related and submitted to the Human Capital Management Division to become one of the KPI Branch/Sub Branch assessment component.

c. Governance Outcomes:

- Increased Ratio of nonperforming loans/Gross NPL and NPL Nett above regulatory requirements in connection with credit collectability downgrading of some debtors, where it is impacted on the worsening rentability and capital of the Bank.
- Still remain exceedances on BMPK (Credit a.n. PT SCS and PT. SPR, and Securities a.n. JPM) and not yet to be finalized, the action plan has been approved by the OJK on a letter dated June 12, 2014, but with the commitment and the realization of capital injection it is expected in 2015 there will be no longer exceedances on BMPK.
- LDR ratio under the regulations in force, causing on obligation to increase the GWM deposit based on provisions in force.
- Warning Penalties/reprimand, administrative and fines to the process and submission of Bank Routine reports to the Regulator, they are:
 - Penalties and fines from the Financial Services Authority/Bank Indonesia for the delay or error in delivery of reports, they are: the delivery and announcement of the Annual Financial Report 2013, submission of the BMPK improvement action plan report, submission of RBB 2014 · 2016, and so on.
 - Memorandum/Reprimand Administrative and/or financial penalties from the Financial Services Authority for the late submission on the statement of changes detailed list of related parties.
- There are several Follow-Up Monitoring List (DMTL) in 2014 on the results of the SKAI audit and OJK audit SKAI that have not been resolved.
- There are still internal fraud in Medan Branch and Branch Serpong in which this has been handled by the Employees Settlement Team (TPK).

Based on analysis of the Strengths and Weaknesses on 11 Self Assessment Factor in GCG implementation, and by paying attention to the assessment of Quality Risk Management in order to vote bank Profit Risk, the results of Self Assessment on Implementation of GCG PT Bank Mutiara

Tbk for Semester II/Position December 2014 is ranked 4 (Not Good).

Report on the Implementation of Action Plan GCG

In connection with the results of Self Assessment on Implementation of GCG PT Bank Mutiara Tbk for 2014 in a rating 4 (Not Good), then to the regeneration of the GCG Bank subsequently to get GCG rated better, herewith we convey the implementation of the Action Plan improvement of GCG as follows:

From the 11 factors/pillars on GCG implementation assessment, then to fix from Ranked # 4 (Not Good) into a 3 rating (Good), a few things need to be improved gradually are as follows:

No	Main Problem/Significant	Improvement/Settlement Plan	Settlement Target Time	Obstacles in Settlement
1	<p>Task Implementation and Responsibilities of Board of Commissioner</p> <p>Composition of Independent Board of Commissioner not comply with the provisions that one of committee function under commissioner did not comply with the provisions.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Add Independent Commissioner. • Submitted to OJK through letter No.29.21/S.Dir-CPD/Mutiara/XII/2014 dated December 29th 2014. • RUPS will be held 	<ul style="list-style-type: none"> • Number of commissioner matched with the regulation. • Q1 (RUPS plan done dated March 30th 2015) 	
2	Task Implementation and Director's Responsibilities
3	<p>Completeness and Committee Task Implementation</p> <p>Chief of Remuneration Committee and Nomination (KRN) currently in vacant</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Add Independent Commissioner. • Submitted to OJK through letter No.29.21/S.Dir-CPD/Mutiara/XII/2014 dated December 29th 2014. • RUPS will be held 	<ul style="list-style-type: none"> • Number of commissioner matched with the regulation. • Q1 (RUPS plan done dated March 30th 2015) 	
4	Conflict of Interest Handling
5	<p>Bank Compliance Function Implementation:</p> <p>1. Obedient to the routine reporting and scheduled (Regulator and Related</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bank will implement Compliance Report Monitoring (CRM) socialized with Memo No. 002/memo/CPD/I/2015 dated January 6th 2015. CRM set to 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimizing fines, sanction and warning penalties throughout 2015 and the next periods. • February 2015 	

	<p>Institution)</p> <p>2. Awareness haven't optimal yet from the office leader and operation manager (KBO) against implementation APU-PPT supported by Smart AML automation system</p> <p>3. Compliance to the NPL provision and CAR</p>	<p>increase monitoring function t the bank obligation in reporting to external.</p> <ul style="list-style-type: none"> Recapitulation data report from all division. Input data report to PIC on each division Go Live CRM <p>Propose to HCMD to become as one of assessment component on branch KPI</p> <ul style="list-style-type: none"> Fulfillment of NPL ratio and CAR <ul style="list-style-type: none"> Done by maximizing billing, PKPU, asset auction, bankruptcy debtor. Result will be Rp 257,5 billion Perform Write Off minimum Rp 200M in Semester I 2015 so it will decrease NPL Gross. Propose addition of write off Rp 200M in Semester II (Revision RBB 	<ul style="list-style-type: none"> February 2015 March 2015 June 2015 <p><u>Cash Inflow: 2015</u></p> <p>Rp 7,3M Q1</p> <p>Rp 37,6 M Q2</p> <p>Rp 39,6 M Q3</p> <p>Rp 172,6M Q4</p> <p><u>NPL Nett:</u></p> <p>4,7%</p> <p>4,5%</p> <p>4,2%</p> <p>4,2%</p> <p><u>NPL Gross 8,6%</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dec 2015 <p>2015</p> <p>15,31% Q1/2015</p> <p>15,14% Q2/2015</p> <p>14,87% Q3/2015</p> <p>15,08% Q4/2015</p> <p>Implemented since January 2012</p>	
--	--	--	--	--

		<p>2015).</p> <ul style="list-style-type: none"> For CAR ratio will be add by paid-in capital gradually: <ul style="list-style-type: none"> ✓ March 2015 Rp 300M ✓ Dec 2016 Rp 300M ✓ Dec 2017 Rp 300M <p>Processing Fraud s/d decision on sanction from Directors</p>		
6	Internal Audit Function Implementation	Formed unit anti fraud department in unit SKAI based SK Director No.05.02/S.Kep-Dir-IAD/Mutiara/VI/2012 on SOP strategy Anti Fraud, regulate about organization Anti Fraud and Function, duties, authorities and responsibilities of Anti Fraud Unit	Minimizing Fraud to be Zero Fraud	
7	External Audit Function Implementation	-	-	-
8	Risk Management Implementation including internal control system	-	-	-
9	Provisions of fund to the related parties and large exposures Compliance to the BMPK provisions	Fullfillment on BMPK	<p>1) Handling</p> <p>Exceedances on BMPK especially TDI a/n. PT. SPR, and PT. DKM, will be write off.</p> <p>Semester I/2015</p> <p>2) For handling on BMPK Exceedances PT. SCS will be decrease the exposures by selling its assets.</p> <ul style="list-style-type: none"> Semester I/2016 	
10	Transparency on financial condition and no financial bank, GCG implementation report,	-	-	-

	and internal report			
11	Bank Strategic Plan, business realization and financial did not achieve the target RBB set. If necessary, RBB will be adjusted to the environment and bank's ability including obstacles that will be faced in achieving target.	<ul style="list-style-type: none"> • Bank will conduct intensive monitoring against realization of RBB achievement • Bank will conduct intensive monitoring against the external condition & immediately revised RBB if external obstacles appear and affecting RBB achievement • Monitoring achievement through review target achievement and prognosis meeting on bank's financial • Revise RBB based on provisions 	<p>1) Variance on better target</p> <p>2) Revision under 10%</p> <p>3) Q4</p> <p>4) Q2</p>	

GCG 2015 Implementation Plan

GCG improvement plan in 2015, is further enhancing the implementation of the five basic principles of good corporate governance: transparency, accountability, responsibility, independency, fairness. Fifth GCG principles are implemented in supporting business development plan of PT Bank Mutiara Tbk in 2015, that is "Expand, optimization, Growth", which among other things increase GCG implementation in 2015 in support of:

- Micro SME Business Development, Finance Trade and Treasury
- Develop a Consumer product program
- Infrastructure Optimization
- Focus on the growth of Micro, small and medium enterprises
- Recruit Sales Force
- Business development program for Micro SME, Commercial, Trade Finance
- Optimization of CASA
- Contingency Liabilities

In addition to the increase in GCG implementation in 2015 is to support aspects of compliance and prudential in supporting the business development, but also need to be increased to:

- Objectify the company's vision, PT Bank Mutiara Tbk will be directed into one of the best Focused bank' in Indonesia that is safe, reliable special service, produce quality products, with the reliable performance, clean and powerful based on the philosophy of pearls, adjusted to the potential of existing resources and scale of its business.
- Supports aspects of compliance and prudential in supports various strategies and programs have been prepared by management with a focus on the development of retail business through credit in micro, small and medium enterprises that are expected to obtain a high yield (high yield loans) which in turn

will improve the Net Interest Margin (NIM).

- Support the strengthening of bank business networks by planning on opening of several branch offices to support the acceleration of the expansion of the customer base and also third-party funds, so that control of third party funds will be more evenly, and not concentrate on large depositors only. implementation of good corporate governance in 2015 also paying account to the effectiveness of expansion related capital expenditures in the development of technology systems to support the business.
- Continue to sought for improvements on financial-ratios according to regulations in force, they are ratios: CAR, BMPK, PDN, NPL, GWM, LDR including the establishment and calculation of CKPN and PPA in accordance with the provisions.
- Make an effort to minimize fraud, infringement (fines, penalties, reprimands) due to late reporting by improving Compliance Monitoring Report (CRM), and
- Efforts to increase the other implementation of GCG 2015 in supporting improvement of performance of PT Bank Mutiara Tbk, to be always in line with regulations in force.
- Thus Revised GCG Implementation Report 2014 we submit, for the attention of the Financial Services Authority (OJK) we say thank you.

Jakarta, August 4 2015

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (dh. PT Bank Mutiara Tbk.)

With Regards,

President Director

Ahmad Fajar

